BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

LKPJ

KEPALA DAERAH

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TAHUN ANGGARAN 2025

H. ANSAR AHMAD, S.E., M.M.
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

Dr. NYANYANG HARIS PRATAMURA, S.E., M.Si
WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

(0771) 4575000

https://kepriprov.go.id

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Celak Pulau Dompak Seri Darul Makmur, Tanjungpinang

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat serta karunia-Nya sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 tersusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyusunan dokumen ini mencerminkan komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam menjaga prinsip akuntabilitas, transparansi, serta tata kelola pemerintahan yang baik. LKPJ menjadi sarana penyampaian hasil kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagai representasi masyarakat.

LKPJ Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 disusun berlandaskan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 sebagai penjabaran tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029, dan Perubahan APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025. Dokumen ini menyajikan gambaran menyeluruh mengenai capaian pelaksanaan urusan pemerintahan serta pembangunan daerah sepanjang satu tahun anggaran. Muatan LKPJ mencakup penjabaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, capaian program kegiatan setiap urusan pemerintahan kewenangan daerah, kebijakan strategis kepala daerah, serta tindak lanjut rekomendasi DPRD Tahun Anggaran sebelumnya.

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan serta penugasan turut tersaji sebagai bagian integral LKPJ Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025. Penyajian informasi tersebut memberikan gambaran objektif mengenai kontribusi perangkat daerah terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat. Evaluasi atas pelaksanaan tugas tersebut menjadi bahan penting dalam menilai efektivitas koordinasi lintas pemerintahan. Sehubungan hal tersebut, DPRD Provinsi Kepulauan Riau diharapkan melaksanakan pembahasan LKPJ Tahun Anggaran 2025 sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Ketentuan waktu pembahasan paling lambat tiga puluh hari sejak dokumen diterima menjadi dasar pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD. Rekomendasi DPRD selanjutnya diharapkan menjadi masukan strategis bagi penyempurnaan perencanaan pembangunan daerah, kebijakan

anggaran tahun berjalan maupun tahun berikutnya, serta perumusan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, maupun kebijakan strategis lainnya.

Akhir kata, apresiasi serta ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang berperan aktif dalam proses penyusunan LKPJ Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025. Sinergi lintas perangkat daerah menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas substansi serta ketepatan waktu penyampaian dokumen. Harapan besar tertuju agar LKPJ ini memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi sekaligus rujukan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah masa mendatang.

Tanjungpinang, 13 Maret 2026

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

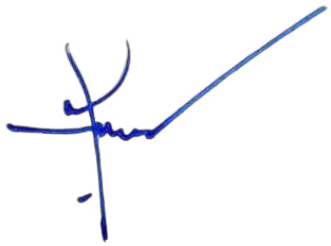

ANSAR AHMAD

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1-1

1.1 Latar Belakang 1-1

1.2 Dasar Hukum 1-3

1.3 Visi dan Misi Kepala Daerah 1-5

1.4 Data Umum Daerah 1-7

BAB II PENJABARAN PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 2-1

2.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah 2-1

2.2 Pengelolaan Belanja Daerah 2-7

2.3 Pengelolaan Pembiayaan Daerah 2-10

BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH 3.1-1

3.1 Capaian Kinerja Indikator Makro dan Indikator Sasaran RPJMD 3.1-1

3.1.1 Capaian Kinerja Indikator Makro 3.1-1

3.1.2 Capaian Kinerja Indikator Tujuan dan Sasaran RPJMD 3.1-19

3.2 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan 3.2.1-1

1. Urusan Pendidikan 3.2.1-1

2. Urusan Kesehatan 3.2.2-1

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3.2.3-1

4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman 3.2.4-1

5. Urusan Ketenteraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat 3.2.5-1

6. Urusan Sosial 3.2.6-1

7. Urusan Tenaga Kerja 3.2.7-1
8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3.2.8-1
9. Urusan Pangan 3.2.9-1
10. Urusan Pertanahan 3.2.10-1
11. Urusan Lingkungan Hidup 3.2.11-1
12. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3.2.12-1
13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3.2.13-1
14. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 3.2.14-1
15. Urusan Perhubungan 3.2.15-1
16. Urusan Komunikasi dan Informatika 3.2.16-1
17. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 3.2.17-1
18. Urusan Penanaman Modal 3.2.18-1
19. Urusan Kepemudaan dan Olahraga 3.2.19-1
20. Urusan Statistik 3.2.20-1
21. Urusan Persandian 3.2.21-1
22. Urusan Kebudayaan 3.2.22-1
23. Urusan Perpustakaan 3.2.23-1
24. Urusan Kearsipan 3.2.24-1
25. Urusan Kelautan dan Perikanan 3.2.25-1
26. Urusan Pariwisata 3.2.26-1
27. Urusan Pertanian 3.2.27-1
28. Urusan Kehutanan 3.2.28-1
29. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral 3.2.29-1
30. Urusan Perdagangan 3.2.30-1
31. Urusan Perindustrian 3.2.31-1
32. Urusan Transmigrasi 3.2.32-1
33. Fungsi Penunjang Sekretariat Daerah 3.2.33-1
34. Fungsi Penunjang Sekretariat DPRD 3.2.34-1
35. Fungsi Penunjang Perencanaan 3.2.35-1
36. Fungsi Penunjang Keuangan 3.2.36-1

37. Fungsi Penunjang Kepegawaian 3.2.37-1
38. Fungsi Penunjang Pendidikan dan Pelatihan 3.2.38-1
39. Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan 3.2.39-1
40. Fungsi Penunjang Pengelolaan Perbatasan 3.2.40-1
41. Fungsi Penunjang Pengelolaan Penghubung 3.2.41-1
42. Fungsi Penunjang Pengawasan 3.2.42-1
43. Urusan Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik 3.2.43-1
3.3 Capaian Pelaksanaan Kebijakan Strategis yang ditetapkan 3.3-1
3.4 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran 2024 3.4-1

BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN 4-1
4.1 Urusan Pemerintahan yang di Tugas Pembantuan 4-1
4.2 Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian 4-7

BAB V PENUTUP 5-1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah menempatkan akuntabilitas kinerja, transparansi pengelolaan keuangan, serta keterbukaan informasi publik sebagai prinsip utama tata kelola pemerintahan. Pemerintah daerah memikul tanggung jawab memastikan keterpaduan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan daerah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah berperan sebagai instrumen formal pertanggungjawaban atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan daerah selama satu tahun anggaran.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan kewajiban Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pengaturan tersebut diperkuat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mengatur bentuk, substansi, serta mekanisme penyampaian dan pembahasan LKPJ. Ketentuan tersebut menegaskan kedudukan LKPJ sebagai instrumen akuntabilitas tahunan sekaligus sarana evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 mengatur kewajiban penyampaian LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD melalui Rapat Paripurna satu kali setiap tahun. Penyampaian laporan dilakukan paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran guna menjamin kepastian hukum, ketepatan waktu pelaporan, serta efektivitas fungsi pengawasan DPRD. Pengaturan tersebut menjaga kesinambungan siklus perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan daerah.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 merupakan laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025. Laporan ini memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang mencakup urusan wajib, urusan pilihan, pelaksanaan tugas pembantuan, serta penugasan. Penyusunan LKPJ mengacu dokumen perencanaan serta penganggaran daerah, meliputi Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025, dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, guna menjamin konsistensi kebijakan serta keselarasan target kinerja pembangunan.

LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 menjadi bahan pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau sesuai ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. DPRD melaksanakan pembahasan paling lambat tiga puluh hari setelah penerimaan LKPJ. Fokus pembahasan mencakup capaian kinerja program serta kegiatan, pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, serta implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Rekomendasi DPRD berfungsi sebagai dasar perbaikan perencanaan pembangunan, penganggaran daerah, serta perumusan kebijakan strategis tahun berjalan maupun tahun berikutnya.

Sistematika penyusunan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 berpedoman Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2024 sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Sistematika laporan meliputi:

1. **Bab I Pendahuluan**, yang memuat dasar hukum, visi dan misi kepala daerah, dan data umum daerah;
2. **Bab II Penjabaran APBD**, yang menjelaskan perubahan terhadap kegiatan dan alokasi yang terkait dengan pengelolaan pendapatan, pengelolaan belanja, dan pengelolaan pembiayaan dalam rangka pencapaian target;
3. **Bab III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah**, yang memuat capaian pelaksanaan program dan kegiatan, kebijakan strategis yang ditetapkan, dan tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun anggaran sebelumnya;
4. **Bab IV Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan**, yang memuat urusan pemerintahan, tugas pembantuan, dan hambatan/permasalahan dalam pelaksanaan tugas pembantuan dan upaya penyelesaian;

5. **Bab V Penutup**, berisi kesimpulan dan daftar penghargaan yang diterima Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025.

LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 berfungsi sebagai laporan perkembangan kinerja pembangunan daerah selama satu tahun anggaran sekaligus instrumen evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029. Tingkat pencapaian indikator kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan, serta sub kegiatan mencerminkan efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar perumusan langkah perbaikan kebijakan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau menuju periode pembangunan berikutnya.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 58);

15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 5);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), sebagaimana dimutakhirkan dengan 900.1 - 2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
20. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);
21. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 981);
22. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 1017);

23. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 1048);
24. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 1068).

1.3. Visi dan Misi Kepala Daerah

Sesuai dengan RPJMD Tahun 2025-2029, Visi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk periode 2025-2029 adalah: "Kepulauan Riau Maju, Makmur dan Merata". Visi ini menegaskan arah pembangunan Provinsi Kepulauan Riau selama lima tahun dari tahun 2025 hingga tahun 2029. Visi Provinsi Kepulauan Riau tersebut selanjutnya dimaknai sebagai berikut:

1. **Maju**

   Provinsi Kepulauan Riau menjadi wilayah dengan pembangunan berkualitas yang memanfaatkan potensi maritim sebagai modal utama. Peningkatan human capital melalui penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian menjadi kunci pertumbuhan ekonomi, terutama di sektor kelautan, industri pengolahan, pertambangan, energi baru terbarukan, dan ekonomi sirkular. Kemajuan ini ditandai dengan produktivitas masyarakat, peningkatan daya saing daerah, dan pengaruh Kepulauan Riau dalam ekosistem maritim nasional maupun global.

2. **Makmur**

   Kehidupan masyarakat lebih layak dan sejahtera, dengan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Kesempatan mengembangkan diri dan memperoleh akses ekonomi lebih luas menjadi prioritas, didukung oleh peran aktif pemerintah dan seluruh komponen masyarakat.

3. **Merata**

   Hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat melalui pembangunan yang adil, berkualitas, dan berkelanjutan. Pemerataan mencakup

pengembangan infrastruktur pendidikan, kesehatan, transportasi, perumahan, energi, dan telekomunikasi, sehingga kesenjangan sosial dan ekonomi antarwilayah dapat diminimalkan, tanpa mendorong urbanisasi berlebihan.

Visi pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau tersebut sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 diharapkan dapat dicapai melalui 5 (lima) misi yaitu:

1. **Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah**

   Mengoptimalkan potensi sumber daya alam dan maritim secara produktif untuk kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan keterampilan nelayan dan petani, daya saing produk lokal, penguatan industri kecil dan menengah, ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, penurunan pengangguran, serta pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.
2. **Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah**

   Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur dasar dan transportasi publik untuk memperkuat konektivitas antar wilayah, menjangkau daerah terisolir, dan mendukung pertumbuhan ekonomi, termasuk akses listrik, air bersih, sanitasi, serta jalan dan jembatan ke sentra produksi.
3. **Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya Saing, dan Berkarakter**

   Mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terampil, dan kompetitif untuk menghadapi era globalisasi, memanfaatkan bonus demografi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
4. **Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Demokratis, Terbuka, Berbasis Teknologi, dan Berorientasi Pelayanan**

   Meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan melalui reformasi birokrasi, pelayanan publik berbasis teknologi informasi, *open government*, serta penguatan demokrasi, ketertiban, dan ketenteraman umum.

5. **Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional serta Ekologi untuk Pembangunan Berkelanjutan**

   Melestarikan dan memajukan budaya lokal dan nasional, memperkuat toleransi dan kerukunan, serta membangun secara berkelanjutan dengan menyelaraskan kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan ekologi. Pembangunan diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara manfaat sumber daya alam dan manusia dengan daya dukung lingkungan, sekaligus meningkatkan ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim.

1.4. Data Umum Daerah

1.4.1. Kondisi Geografis Wilayah

1. **Letak, Luas dan Batas Wilayah Administrasi**

   Provinsi Kepulauan Riau menempati posisi geografis strategis antara 00°29’ Lintang Selatan hingga 04°40’ Lintang Utara serta 103°22’ hingga 109°04’ Bujur Timur. Posisi tersebut menempatkan wilayah ini sebagai salah satu gerbang utama Indonesia pada kawasan Asia Tenggara. Kedekatan geografis terhadap sejumlah negara ASEAN memperkuat peran Kepulauan Riau sebagai simpul penting aktivitas ekonomi, perdagangan, dan mobilitas regional, sekaligus menjadi beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

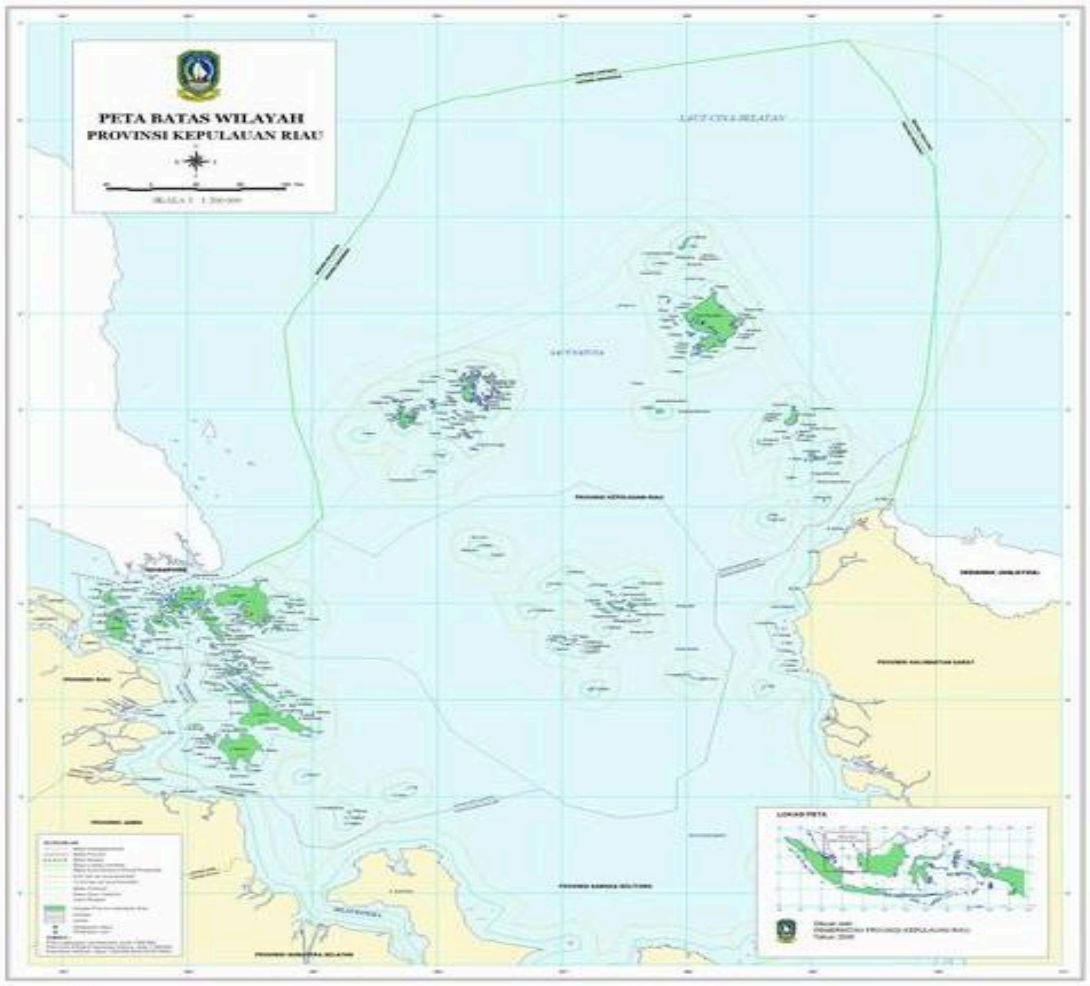

Gambar 1.1. Peta Administrasi Provinsi Kepulauan Riau

Interaksi wilayah Provinsi Kepulauan Riau tidak hanya terbatas antar wilayah nasional, melainkan juga lintas negara. Wilayah utara berbatasan langsung dengan Negara Vietnam dan Negara Kamboja. Arah timur bersebelahan dengan Negara Malaysia serta Provinsi Kalimantan Barat. Wilayah selatan berhadapan dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Jambi. Arah barat berbatasan dengan Negara Singapura, Negara Malaysia, serta Provinsi Riau. Batas wilayah tersebut mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017–2037.

Struktur pemerintahan daerah Provinsi Kepulauan Riau mencakup dua kota dan lima kabupaten. Kota Tanjungpinang berperan sebagai ibu kota provinsi, sedangkan Kota Batam berkembang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi utama. Wilayah

kabupaten meliputi Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, serta Kabupaten Kepulauan Anambas. Karakter kepulauan menyebabkan rentang kendali pemerintahan relatif luas, tercermin melalui jarak terjauh antardaerah mencapai sekitar 440 kilometer antara Natuna dan Tanjungpinang.

Cakupan wilayah daratan Provinsi Kepulauan Riau tercatat seluas 8.170,375 kilometer persegi. Penetapan luas wilayah tersebut merujuk kepada Keputusan Menteri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tertanggal 25 April 2025. Persebaran luas daratan antar kabupaten dan kota menunjukkan variasi karakter wilayah, baik pulau besar maupun gugusan pulau kecil, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 1.1.
Luas Wilayah Daratan Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten / Kota	Luas Wilayah Daratan (km²)
1	Karimun	916,331
2	Bintan	1.311,868
3	Natuna	1.978,010
4	Lingga	2.173,630
5	Kepulauan Anambas	620,622
6	Kota Batam	1.020,280
7	Kota Tanjungpinang	149,634
Total		**8.170,375**

Sumber: Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tanggal 25 April 2025; BPS Kepulauan Riau: Provinsi Kepulauan Riau Dalam Angka Tahun 2025

Provinsi Kepulauan Riau memiliki wilayah laut yang sangat dominan dibandingkan daratan. Perhitungan teknis Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal tahun 2007 mencatat luas wilayah laut mencapai 417.012,97 km², dengan perhitungan tersebut belum memperhitungkan batas kewenangan pengelolaan laut sejauh 12 mil. Hingga saat ini, penetapan resmi luas wilayah laut Provinsi Kepulauan Riau melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri belum tersedia. Informasi luas wilayah laut per kabupaten dan kota masih merujuk kepada hasil kajian teknis Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal tahun 2007 sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 1.2.
Luas Wilayah Lautan Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten / Kota	Luas Wilayah Laut (km²)
1	Karimun	4.698,09
2	Bintan	102.964,08
3	Natuna	216.113,42
4	Lingga	43.339,00
5	Kepulauan Anambas	46.074,00
6	Kota Batam	3.675,25
7	Kota Tanjungpinang	149,13
Total		**417.012,97**

Sumber: Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal Tahun 2007

Sebaran wilayah laut menunjukkan perbedaan karakter antardaerah. Kabupaten Natuna memiliki cakupan laut terluas, mencerminkan posisi geografisnya sebagai wilayah terluar Indonesia. Kabupaten Bintan, Kabupaten Kepulauan Anambas, serta Kabupaten Lingga juga memiliki wilayah laut yang signifikan. Kota Batam, Kota Tanjungpinang, dan Kabupaten Karimun memiliki luasan laut relatif lebih kecil, sejalan dengan karakter wilayah perkotaan dan kedekatan antarwilayah.

Kondisi geografis Kepulauan Riau sebagai provinsi kepulauan tercermin dari jumlah pulau yang mencapai 2.028 pulau sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Dala Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian Dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 mencatat sebanyak 22 pulau kecil terluar berada dalam wilayah administrasi Provinsi Kepulauan Riau. Pulau-pulau tersebut tersebar pada Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, serta Kota Batam. Keberadaan pulau kecil terluar tersebut memiliki peran strategis sebagai penanda batas wilayah negara sekaligus penguat posisi Provinsi Kepulauan Riau sebagai wilayah perbatasan nasional. Rincian jumlah pulau serta nama pulau kecil terluar per kabupaten dan kota selanjutnya disajikan dalam tabel berikut, sesuai ketentuan Permendagri Nomor 72 Tahun 2019 serta publikasi resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.

Tabel 1.3.
Jumlah Pulau Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Pulau	Nama Pulau Terluar
1	Karimun	248	Pulau Tokong Hiu Kecil, Pulau Karimun Anak
2	Bintan	263	Pulau Berakit, Pulau Sentut, Pulau Bintan, Pulau Malang Berdaun
3	Natuna	172	Pulau Kepala, Pulau Subi Kecil, Pulau Senoa, Pulau Sekatung, Pulau Sebetul, Pulau Semiun, Pulau Tokong Boro
4	Lingga	630	-
5	Kepulauan Anambas	239	Pulau Tokong Malang Biru, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokong Nanas, Pulau Tokong Berlayar
6	Kota Batam	454	Pulau Nipah, Pulau Pelampong, Pulau Batu Berhenti, Pulau Nongsa
7	Kota Tanjungpinang	8	-
8	Kepulauan Riau	14	
	TOTAL	**2.028**	

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau Dalam Angka Tahun 2025

2. Kondisi Topografi

Topografi Provinsi Kepulauan Riau memperlihatkan variasi bentang alam antarpulau yang terbentuk melalui proses geologi jangka panjang. Karakter wilayah kepulauan menghasilkan perbedaan kondisi permukaan tanah, mulai dari dataran rendah hingga kawasan perbukitan dan pegunungan. Keragaman tersebut berpengaruh terhadap pola pemanfaatan ruang serta pengembangan wilayah. Secara umum, wilayah Kepulauan Riau dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok topografi utama berdasarkan kesamaan morfologi dan ketinggian wilayah. Rincian ketinggian wilayah selanjutnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.4.
Rata-rata Ketinggian Tempat Menurut Kabupaten/Kota
Di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten/Kota	Tinggi (m DPL)
1	Karimun	5 m
2	Bintan	6 m
3	Natuna	14 m
4	Lingga	6 m
5	Kepulauan Anambas	7 m

No	Kabupaten/Kota	Tinggi (m DPL)
6	Batam	8 m
7	Tanjungpinang	65 m

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau Dalam Angka Tahun 2025

Pulau-pulau lepas pantai timur Sumatera mencakup wilayah Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga, serta Kota Batam. Ketinggian wilayah kelompok ini umumnya berada pada kisaran 50–200 meter di atas permukaan laut, disertai keberadaan dataran rendah dan kawasan pegunungan. Kondisi topografi tersebut membentuk bentang alam perbukitan yang cukup dominan. Gunung Lingga tercatat sebagai titik tertinggi wilayah ini dengan ketinggian mencapai 1.163 meter di atas permukaan laut.

Kelompok pulau sisi timur jauh meliputi Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas yang berhadapan langsung dengan Laut Cina Selatan. Pulau-pulau utama pada wilayah ini antara lain Pulau Bunguran, Pulau Jemaja, Pulau Anambas, serta Pulau Tambelan. Karakter morfologi wilayah menunjukkan kemiripan pola topografi dengan Kabupaten Bintan. Gunung Ranai menjadi puncak tertinggi kelompok wilayah ini dengan ketinggian sekitar 1.035 meter di atas permukaan laut.

Pulau-pulau bagian tenggara Kepulauan Lingga–Singkep membentuk jajaran memanjang searah struktur geologi utama berorientasi barat laut–tenggara. Wilayah ini didominasi bentang alam perbukitan hingga pegunungan sebagai sisa morfologi tua. Gugusan Pulau Batam, Rempang, serta Galang juga menunjukkan bentang alam bergelombang yang merupakan bagian paparan tepian Benua Sunda. Informasi ketinggian wilayah kabupaten dan kota merujuk kepada data Badan Informasi Geospasial tahun 2016 berdasarkan interpretasi Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1:50.000. Secara rinci data nama gunung dan ketinggiannya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 1.5.
Nama Gunung dan Ketinggiannya Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten/Kota	Nama Gunung	Tinggi (m)
1	Karimun	Gunung Jantan	478
2	Bintan	Gunung Bintan	380
3	Natuna	Gunung Ranai	959
		Gunung Datuk	510
		Gunung Tukong	477
		Gunung Selasih	387
		Gunung Lintang	610
4	Lingga	Gunung Daik	1.272
		Gunung Sepincan	800
		Gunung Tanda	343
		Gunung Lanjut	519
		Gunung Muncung	415
5	Kepulauan Anambas	Gunung Pujang	443
		Gunung Kute	232
		Gunung Pelawan Condong	405

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau Dalam Angka Tahun 2025

3. Kondisi Geologi, Geomorfologi dan Hidrologi

a. Geologi

Provinsi Kepulauan Riau berada bagian Paparan Sunda yang dikenal relatif stabil secara regional. Wilayah kepulauan ini menempati posisi tinggian batuan dasar sisi timur Cekungan Sumatera Selatan serta sisi utara Cekungan Sunda. Posisi tersebut menempatkan Kepulauan Riau dalam jalur timah granit Kraton Sunda yang memanjang Thailand, Semenanjung Malaysia, Kepulauan Riau, Bangka Belitung hingga Kalimantan Barat. Jalur geologi tersebut menjelaskan keberadaan sumber daya mineral tertentu, khususnya timah, yang berkembang mengikuti alur purba atau *paleochannel* sebagai zona pengendapan material daratan serta laut (Cobbing, 2005; PPPGL, 2008)

Wilayah perairan Kepulauan Riau merupakan bagian sistem Selat Malaka serta Cekungan Sumatra Tengah yang terbentuk melalui proses tektonik jangka panjang (Aleva, 1985). Susunan batuan mencerminkan perkembangan geologi

bertahap mulai Trias–Jura hingga Kuarter. Endapan Kuarter berkembang terbatas wilayah pesisir serta dataran rendah, sementara pengaruh gelombang relatif kecil menghasilkan karakter pantai maju. Peta sumber daya mineral kelautan Indonesia menunjukkan Kepulauan Riau termasuk wilayah potensial mineral kelautan Indonesia bagian barat berdasarkan kompilasi survei BBSPGL Badan Geologi KESDM periode 1996–2022 sesuai klasifikasi SNI 4726-2019 (Setiady et al., 2023)

Struktur geologi Kepulauan Riau didominasi batuan granit, batuan sedimen, serta endapan aluvial muda. Sebaran granit luas dijumpai Pulau Batam, Bintan, Karimun, Lingga, Natuna, serta Kepulauan Anambas yang membentuk karakter lahan bebatuan keras serta lapisan tanah relatif tipis. Susunan stratigrafi regional meliputi Formasi Goungon, Tanjungkerontang, Semarung, Pancur, serta Pulau Panjang, disertai intrusi granit serta gabro wilayah Karimun–Kundur (Cameron et al., 1982; Kusnama et al., 1994; Setiady et al., 2024) Karakter batuan granit juga berkaitan potensi unsur tanah jarang serta mineral logam tertentu yang memerlukan pengelolaan terencana guna menjaga keberlanjutan wilayah kepulauan (Irzon, 2017).

b. Geomorfologi

Geomorfologi wilayah Kepulauan Riau dicirikan dominasi perbukitan granit, dataran pantai sempit, serta dataran aluvial terbatas. Bentuk lahan perbukitan umumnya memanjang mengikuti arah struktur geologi regional. Dataran berkembang terutama sepanjang kaki bukit serta kawasan pesisir tertentu. Variasi bentuk lahan tersebut membentuk karakter wilayah kepulauan yang terfragmentasi serta memiliki keterbatasan ruang terbangun. Kondisi ini mempengaruhi pola persebaran permukiman serta biaya penyediaan infrastruktur dasar.

Topografi wilayah menunjukkan perbedaan cukup kontras antarwilayah, mulai dataran rendah pesisir hingga perbukitan berkelerengan sedang sampai curam. Pola aliran sungai bersifat pendek dan berdebit kecil, mengikuti morfologi pulau serta struktur batuan granit yang relatif homogen. Beberapa wilayah

memperlihatkan pola aliran trellis akibat pengaruh struktur geologi terlipat. Dinamika pesisir seperti abrasi dan sedimentasi juga berkembang aktif, terutama wilayah pulau kecil dan kawasan pantai berpenduduk. Kondisi geomorfologi tersebut menuntut pengelolaan ruang berbasis daya dukung serta penguatan mitigasi risiko lingkungan.

Karakter tanah wilayah berkembang sebagai hasil interaksi batuan penyusun dan proses geomorfologi, sehingga mempengaruhi daya dukung lahan bagi kegiatan pembangunan. Jenis tanah wilayah Kepulauan Riau didominasi tanah podsolik merah kuning, latosol, aluvial, serta tanah organik dalam lokasi tertentu. Karakter tanah umumnya menunjukkan kesuburan rendah hingga sedang serta lapisan solum relatif tipis. Kapasitas simpan air tanah terbatas menjadi ciri utama sebagian besar wilayah. Kondisi tersebut membatasi pengembangan pertanian lahan kering berskala luas. Pemanfaatan lahan memerlukan pengelolaan konservatif guna menjaga stabilitas lingkungan. Tanah aluvial memiliki potensi relatif lebih baik bagi kegiatan budidaya dan permukiman. Sebaran tanah jenis ini terbatas serta rentan genangan musiman. Tanah organik berkembang khusus wilayah tertentu seperti pulau kecil dan kawasan rawa. Karakter tanah tersebut memerlukan pendekatan teknis spesifik agar mendukung pembangunan berkelanjutan. Kesesuaian lahan menjadi faktor penting dalam perencanaan tata ruang wilayah kepulauan.

c. Hidrologi

Kondisi hidrologi wilayah Kepulauan Riau menunjukkan keterbatasan sumber air tawar alami. Sungai berukuran pendek serta berdebit kecil menjadi ciri utama wilayah kepulauan berbatuan granit. Waduk, embung, serta kolong bekas tambang berperan penting sebagai sumber air baku masyarakat. Ketergantungan tinggi terhadap curah hujan menyebabkan ketersediaan air bersih bersifat fluktuatif. Pengelolaan sumber air memerlukan pendekatan terpadu lintas sektor.

Air tanah umumnya bersifat dangkal serta memiliki kerentanan tinggi terhadap intrusi air laut, terutama kawasan pesisir dan pulau kecil. Wilayah Sungai Kepulauan Riau mencakup seluruh kabupaten dan kota serta terdiri atas ratusan Daerah Aliran Sungai (DAS) berukuran kecil. Karakter DAS sempit menimbulkan

keterbatasan daya tampung serta potensi genangan lokal. Kondisi tersebut menuntut penguatan konservasi daerah tangkapan air. Penyediaan air baku menjadi tantangan struktural pembangunan wilayah kepulauan. Rincian DAS di WS Kepulauan Riau ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 1.6.
Daftar Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Sungai (WS) Kepulauan Riau

No	Nama DAS	Luas (Km^2)	No	Nama DAS	Luas (Km^2)	No	Nama DAS	Luas (Km^2)
1.	DAS Abang Besar	0,29	41.	DAS Jelutung	0,43	81.	DAS Posik	0,44
2.	DAS Air Abu	0,49	42.	DAS Kampung Hilir	1,57	82.	DAS Rapit	0,17
3.	DAS Air Asuk	0,08	43.	DAS Kangka	0,49	83.	DAS Resun	0,18
4.	DAS Air Merah	0,27	44.	DAS Karimun	1,36	84.	DAS Sanglar	0,18
5.	DAS Alai	0,33	45.	DAS Katubi	1,02	85.	DAS Sawang	1,03
6.	DAS Anggus	0,89	46.	DAS Kelarik	0,39	86.	DAS Sebangka	1,71
7.	DAS Ara	0,42	47.	DAS Kelarik Hulu	0,67	87.	DAS Sebesi	0,47
8.	DAS Awak	0,28	48.	DAS Kerasing	1,89	88.	DAS Segeram	4,04
9.	DAS Bajau	0,25	49.	DAS Ketam	0,73	89.	DAS Sekarim	0,23
10.	DAS Balo	0,34	50.	DAS Durai	0,20	90.	DAS Selamak	0,60
11.	DAS Batang	0,18	51.	DAS Durian	0,24	91.	DAS Selapan	0,55
12.	DAS Batu Belah	0,51	52.	DAS Kredong	0,50	92.	DAS Selor	0,07
13.	DAS Bela	0,57	53.	DAS Kumbang	0,57	93.	DAS Sembulang	0,43
14.	DAS Benuwa	0,21	54.	DAS Ladan	0,21	94.	DAS Sendanau	0,10
15.	DAS Bidai	0,34	55.	DAS Ladi	0,49	95.	DAS Serasan	0,69
16.	DAS Binjai	6,57	56.	DAS Lagong	0,21	96.	DAS Seraya Cundung	0,16
17.	DAS Bintan	1,79	57.	DAS Langkap	0,21	97.	DAS Sergong	0,90
18.	DAS Bukit Jodoh	0,51	58.	DAS Lebuh	0,10	98.	DAS Siantan	0,10
19.	DAS Buluh	0,41	59.	DAS Lieng	0,35	99.	DAS Sopor	0,04
20.	DAS Bunguran Timur	0,77	60.	DAS Logo	1,87	100.	DAS Sugi	0,98
21.	DAS Buru	0,20	61.	DAS Mamut	1,43	101.	DAS Sumpai	2,27
22.	DAS Canot	0,78	62.	DAS Mapor	0,29	102.	DAS Tambang Besar	0,32
23.	DAS Cikolek	1,78	63.	DAS Maroktua	1,50	103.	DAS Tambelan	0,02
24.	DAS Cinak	1,04	64.	DAS Matak	0,86	104.	DAS Telaga	0,18

No	Nama DAS	Luas (Km^2)	No	Nama DAS	Luas (Km^2)	No	Nama DAS	Luas (Km^2)
25.	DAS Cinak Besar	0,60	65.	DAS Medang	0,36	105.	DAS Telok	0,62
26.	DAS Combol	0,59	66.	DAS Mentuda	0,21	106.	DAS Teluk Radang	0,39
27.	DAS Dabo	0,44	67.	DAS Midai	0,27	107.	DAS Tembok	0,58
28.	DAS Dompak	1,33	68.	DAS Moro	0,23	108.	DAS Temiang	0,86
29.	DAS Duara	0,65	69.	DAS Mubur	0,41	109.	DAS Terong	0,32
30.	DAS Durai	0,20	70.	DAS Musal	0,27	110.	DAS Terong	0,01
31.	DAS Durian	0,24	71.	DAS Nongsa	0,75	111.	DAS Tiban Lama	0,75
32.	DAS Durslin	0,97	72.	DAS Nyamuk	0,14	112.	DAS Tiga	2,06
33.	DAS Ekang	0,48	73.	DAS Panai	2,34	113.	DAS Tjempah	0,32
34.	DAS Gading	1,16	74.	DAS Papan	0,53	114.	DAS Tjitim	0,25
35.	DAS Galang	0,87	75.	DAS Pauh	0,06	115.	DAS Ungar	0,58
36.	DAS Galang Baru	0,33	76.	DAS Penatu	0,72	116.	DAS Urung	0,48
37.	DAS Gata	0,65	77.	DAS Pengibu	0,01	117.	DAS Wampu	1,06
38.	DAS Gemuruh	0,25	78.	DAS Pengok	0,57			
39.	DAS Hulu	0,73	79.	DAS Penuba	0,43			
40.	DAS Jang	0,38	80.	DAS Pesung	0,50			

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015

4. Keadaan Iklim

Terdapat 6 Stasiun Pengamatan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) di Provinsi Kepulauan Riau, diantaranya yaitu: Stasiun BMKG Raja Haji Abdullah Tanjung Balai Karimun; Stasiun BMKG Ranai; Stasiun BMKG Dabo Singkep; Stasiun BMKG Tarempa; Stasiun BMKG Hang Nadim Batam; dan Stasiun BMKG Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang.

Suhu udara maksimum selama tahun 2025 tertinggi terjadi di Kabupaten Bintan dengan suhu 36,6 derajat celsius dan kondisi suhu udara maksimum terendah terjadi di Kota Batam yaitu sekitar 30,1 derajat Celsius. Sementara itu untuk kelembaban udara minimum terjadi di Kabupaten Natuna dengan kelembaban sebesar 44 persen. Disisi lain, jumlah hari hujan terbanyak selama tahun 2025 terjadi di Kabupaten Natuna yaitu sebanyak 175 hari hujan dan hari hujan yang paling sedikit terjadi di Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu sebesar 148 hari hujan.

Gambaran lebih rinci mengenai kondisi cuaca Provinsi Kepulauan Riau sepanjang tahun 2025 tercatat melalui pengamatan stasiun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Data hasil pengamatan tersebut menjadi dasar penyusunan informasi iklim daerah. Rincian rata-rata unsur cuaca berdasarkan stasiun pengamatan selanjutnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.7.
Rata-rata Suhu Udara, Kelembaban Udara, Tekanan Udara, Kecepatan Angin, Curah Hujan dan Penyinaran Matahari Tahun 2025

Kabupaten / Kota	Stasiun BMKG	Rata-rata Suhu (°C)	Rata-rata Kelembaban Udara (%)	Rata-rata Tekanan Udara (mb)	Rata-rata Kecepatan Angin (m/s)	Curah Hujan (mm^3)	Penyinaran Matahari (%)
Karimun	Stasiun Meteorologi Raja Haji Abdullah	27,9	83,1	1.010,6	3,0	2.737,0	4,1
Bintan	Stasiun Meteorologi Raja Haji Fisabilillah	27,4	84,3	1.006,1	5,1	3.364,0	5,1
Natuna	Stasiun Meteorologi Ranai Natuna	27,4	85,6	1.012,2	6,0	2.641,3	3,7
Lingga	Stasiun Meteorologi Dabo Singkep	27,3	84,9	1.010,1	3,6	3.610,3	3,5
Kepulauan Anambas	Stasiun Meteorologi Tarempa	27,9	81,1	1.009,5	4,3	1.927,0	3,7
Batam	Stasiun Meteorologi Hang Nadim	27,9	82,0	1.011,4	5,9	3.095,9	4,0
Tanjungpinang	Stasiun Meteorologi Raja Haji Fisabilillah	27,4	84,3	1.008,6	3,7	3.746,7	5,1

Sumber: BPS Kepulauan Riau: Provinsi Kepulauan Riau Dalam Angka 2025

1.4.2. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 tercatat sebesar 2.183,29 ribu jiwa, terdiri atas 1.123,79 ribu jiwa penduduk laki-laki dan 1.089,67 ribu jiwa penduduk perempuan. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin relatif seimbang, tercermin melalui rasio jenis kelamin sebesar 103,1. Kondisi tersebut menunjukkan dominasi penduduk laki-laki yang tidak terlalu signifikan dan mencerminkan dinamika sosial serta ekonomi wilayah kepulauan.

Sebaran penduduk antarkabupaten dan kota menunjukkan ketimpangan yang cukup mencolok. Kota Batam menjadi wilayah dengan jumlah penduduk terbesar, mencapai 1.296,93 ribu jiwa atau lebih dari separuh total penduduk Provinsi Kepulauan Riau. Kota Tanjungpinang menempati urutan berikutnya dengan jumlah penduduk sebesar 237,43 ribu jiwa. Kabupaten Karimun dan Kabupaten Bintan berada pada kelompok menengah, sedangkan Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, serta Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki jumlah penduduk relatif kecil.

Kepadatan penduduk memperlihatkan perbedaan yang sangat signifikan antarwilayah. Kota Tanjungpinang mencatat tingkat kepadatan tertinggi sebesar 1.596 jiwa per kilometer persegi, disusul Kota Batam sebesar 1.251 jiwa per kilometer persegi. Kabupaten Karimun dan Kabupaten Bintan memiliki kepadatan menengah, sementara wilayah kepulauan terluar menunjukkan kepadatan rendah di bawah 100 jiwa per kilometer persegi. Rata-rata kepadatan penduduk Provinsi Kepulauan Riau tercatat sebesar 268 jiwa per kilometer persegi.

Variasi rasio jenis kelamin antardaerah umumnya berada di atas angka 100. Kabupaten Lingga dan Kabupaten Kepulauan Anambas mencatat rasio tertinggi sebesar 107,1, sedangkan Kota Batam memiliki rasio terendah sebesar 101,9. Pola tersebut berkaitan dengan karakter lapangan pekerjaan dan mobilitas penduduk, khususnya pada wilayah pusat pertumbuhan. Kondisi kependudukan ini menegaskan pentingnya kebijakan pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik antarpulau.

Tabel 1.8.
Jumlah Penduduk, Rasio Jenis Kelamin, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

No.	Kabupaten / Kota	Laki-Laki (ribu jiwa)	Perempuan (ribu jiwa)	Jumlah (ribu jiwa)	Rasio Jenis Kelamin (%)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km2)
1	Karimun	136,4	129,61	266,01	105,2	286
2	Bintan	87,63	82,83	170,46	105,8	129
3	Natuna	44,58	42,18	86,76	105,7	43
4	Lingga	53,24	49,71	102,95	107,1	47
5	Kepulauan Anambas	26,04	24,32	50,36	107,1	80
6	Batam	654,71	642,25	1.296,93	101,9	1.251
7	Tanjung Pinang	121,18	118,78	237,43	102	1.596
	Provinsi Kepulauan Riau	1.123,79	1.089,67	2.183,29	103,1	268

Sumber: BPS Kepulauan Riau: Provinsi Kepulauan Riau Dalam Angka Tahun 2025

1.4.3. Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan tren perlambatan pada periode 2020–2025. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk provinsi menurun dari 2,02 persen pada periode 2010–2020 menjadi 1,47 persen. Kondisi ini mencerminkan perubahan dinamika demografi yang dipengaruhi oleh penurunan tingkat kelahiran serta pergeseran arus migrasi, terutama setelah periode 2020. Perlambatan tersebut berimplikasi pada kebutuhan penyesuaian kebijakan kependudukan dan perencanaan pembangunan daerah.

Perbedaan laju pertumbuhan penduduk antar kabupaten dan kota masih terlihat jelas. Kota Batam tetap menjadi wilayah dengan pertumbuhan tertinggi pada periode 2020–2025 sebesar 1,67 persen, diikuti Kabupaten Bintan sebesar 1,43 persen serta Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna masing-masing sebesar 1,34 persen dan 1,35 persen. Kabupaten Lingga mencatat laju pertumbuhan terendah sebesar 0,99 persen, sementara Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Karimun juga mengalami perlambatan. Variasi tersebut menegaskan pengaruh peran ekonomi, daya tarik migrasi, serta karakter geografis terhadap dinamika kependudukan Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 1.9.
Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau

NO	Kabupaten/Kota	Rata-Rata Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	
		2010-2020	2020-2025
1	Karimun	1,72	1,08
2	Bintan	1,11	1,43
3	Natuna	1,62	1,35
4	Lingga	1,31	0,99
5	Kepulauan Anambas	2,32	1,34
6	Batam	2,32	1,67
7	Tanjungpinang	1,9	1,13
	Provinsi Kepulauan Riau	**2,02**	**1,47**

Sumber: BPS Kepulauan Riau: Provinsi Kepulauan Riau Dalam Angka Tahun 2025.

1.4.4. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)

Aparatur Sipil Negara merupakan unsur utama penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Kepulauan Riau. Keberadaan ASN mencakup Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja, serta PPPK Paruh Waktu yang menjalankan fungsi pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Peran strategis ASN tercermin melalui kontribusi nyata terhadap efektivitas kebijakan publik serta kualitas layanan kepada masyarakat.

Jumlah ASN Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tercatat sebanyak 12.651 orang. Komposisi tersebut terdiri atas PNS berjumlah 4.782 orang, PPPK sebanyak 6.370 orang, serta PPPK Paruh Waktu sebanyak 1.499 orang. Berdasarkan jenis kelamin, ASN laki-laki berjumlah 6.168 orang sedangkan ASN perempuan tercatat sebanyak 6.483 orang. Struktur tersebut menunjukkan keseimbangan representasi gender sekaligus menggambarkan keterlibatan perempuan cukup signifikan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tabel 1.10.
Jumlah Aparatur Sipil Negara Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

No.	ASN	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	PNS	2.200	2.582	4.782
2	PPPK	3.297	3.073	6.370
3	PPPK Paruh Waktu	671	828	1.499

Total	**6.168**	**6.483**	**12.651**

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Kualifikasi pendidikan ASN mencerminkan kapasitas sumber daya aparatur pendukung pelaksanaan tugas pemerintahan. Lulusan strata satu mendominasi komposisi ASN jumlah 7.741 orang yang tersebar pada PNS, PPPK, serta PPPK Paruh Waktu. Lulusan strata dua dan strata tiga tercatat sebanyak 1.037 orang yang mayoritas berasal PNS. ASN berlatar pendidikan menengah hingga diploma tetap menempati porsi tertentu khususnya pada PPPK serta PPPK Paruh Waktu guna mendukung pelaksanaan fungsi teknis dan operasional.

Tabel 1.11.
Jumlah Aparatur Sipil Negara Provinsi Kepulauan Riau menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2025

No.	Jenjang Pendidikan	ASN		
		PNS	PPPK	PPPK Paruh Waktu
1	SD	6	87	18
2	SMP/SLTP	2	126	3
3	SMA	275	1.779	573
4	D-I	4	1	4
5	D-II	2	0	0
6	D-III	350	390	47
7	D-IV	124	60	22
8	S-1	3.077	3.837	827
9	S-2	901	89	5
10	S-3	41	1	0
Total		**4782**	**6370**	**1499**

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Struktur jabatan ASN menunjukkan variasi peran sesuai kebutuhan organisasi perangkat daerah. Jabatan PNS meliputi 41 pejabat pimpinan tinggi, 209 pejabat administrator, serta 247 pejabat pengawas yang menjalankan fungsi manajerial dan pengendalian organisasi. Jabatan fungsional PNS mencakup tenaga teknis, kesehatan,

serta guru jumlah keseluruhan 3.199 orang. Jabatan pelaksana PNS tercatat sebanyak 1.086 orang yang mendukung operasional administrasi pemerintahan.

Komposisi jabatan PPPK didominasi jabatan fungsional guru sebanyak 2.180 orang serta jabatan pelaksana sebanyak 3.875 orang. Jabatan fungsional kesehatan dan teknis turut melengkapi kebutuhan pelayanan dasar serta tugas spesifik perangkat daerah. Jabatan PPPK Paruh Waktu mencakup fungsional guru, fungsional kesehatan, serta pelaksana jumlah total 1.499 orang yang berperan mendukung keberlanjutan pelayanan publik sesuai kebutuhan daerah.

Tabel 1.12.
Jumlah Aparatur Sipil Negara Provinsi Kepulauan Riau menurut Jabatan Tahun 2025

No.	ASN	Jabatan	Jumlah
1	PNS	JPT	41
		Administrator	209
		Pengawas	247
		Fungsional Teknis	942
		Fungsional Kesehatan	465
		Fungsional Guru	1792
		Pelaksana	1086
2	PPPK	Fungsional Teknis	25
		Fungsional Kesehatan	290
		Fungsional Guru	2.180
		Pelaksana	3.875
3	PPPK Paruh Waktu	Fungsional Kesehatan	43
		Fungsional Guru	721
		Pelaksana	735
Total			**12651**

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Distribusi ASN berdasarkan status kepegawaian, jenjang pendidikan, jenis kelamin, serta jabatan menunjukkan upaya penataan aparatur Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau agar selaras kebutuhan organisasi dan tuntutan peningkatan kualitas layanan publik. Rincian data ASN tersebut menjadi dasar evaluasi kecukupan sumber daya aparatur serta perumusan kebijakan pengembangan kepegawaian daerah.

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Berdasarkan ketentuan umum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Struktur pendapatan daerah terbagi ke dalam Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah mencakup Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Transfer bersumber atas alokasi pemerintah pusat, sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berasal atas penerimaan hibah. Susunan pendapatan tersebut mencerminkan kapasitas fiskal daerah serta menopang pembiayaan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 menetapkan target pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp3.910.214.946.462,43. Realisasi pendapatan daerah mencapai Rp3.729.977.626.911,96 atau sebesar 95,39 persen. Tingkat capaian tersebut menunjukkan kinerja pendapatan daerah berada pada kategori baik walaupun target APBD Perubahan belum sepenuhnya tercapai. Pendapatan Asli Daerah terealisasi sebesar Rp1.753.879.399.953,39 atau 92,08 persen dari target sebesar Rp1.904.763.732.160,43. Pendapatan Transfer terealisasi sebesar Rp1.974.299.383.024,00 atau 98,51 persen dari target sebesar Rp2.004.127.111.802,00. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah realisasi sebesar Rp1.798.843.934,57 atau 135,85 persen dari target sebesar Rp1.324.102.500,00 yang bersumber dari penerimaan hibah Tahun Anggaran 2025. Secara umum gambaran realisasi pendapatan daerah pada tahun 2025 tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1.
Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Kode Rekening	Uraian	Target APBD-P 2025	Realisasi 2025	%
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**3.910.214.946.462,43**	**3.729.977.626.911,96**	**95,39**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**1.904.763.732.160,43**	**1.753.879.399.953,39**	**92,08**
4.1.01	Pajak Daerah	1.617.238.624.316,00	1.447.285.058.158,50	89,49
4.1.02	Retribusi Daerah	168.940.551.756,24	171.635.268.102,00	101,60
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.100.000.000,00	2.275.536.541,00	73,40
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	115.484.556.088,19	132.683.537.151,89	114,89
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	**1.904.763.732.160,43**	**1.753.879.399.953,39**	**92,08**
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**2.004.127.111.802,00**	**1.974.299.383.024,00**	**98,51**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.004.127.111.802,00	1.974.299.383.024,00	98,51
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	**2.004.127.111.802,00**	**1.974.299.383.024,00**	98,51
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**1.324.102.500,00**	**1.798.843.934,57**	**135,85**
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.324.102.500,00	1.798.843.934,57	135,85
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**1.324.102.500,00**	**1.798.843.934,57**	**135,85**
	JUMLAH PENDAPATAN	**3.910.214.946.462,43**	**3.729.977.626.911,96**	**95,39**

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Evaluasi kinerja pendapatan daerah memerlukan pemahaman hubungan antara perencanaan anggaran dan capaian realisasi pada tahun 2025. Informasi tersebut penting guna menilai tingkat efektivitas pengelolaan sumber penerimaan daerah. Perbandingan antara target pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Riau serta realisasinya selanjutnya disajikan melalui grafik berikut.

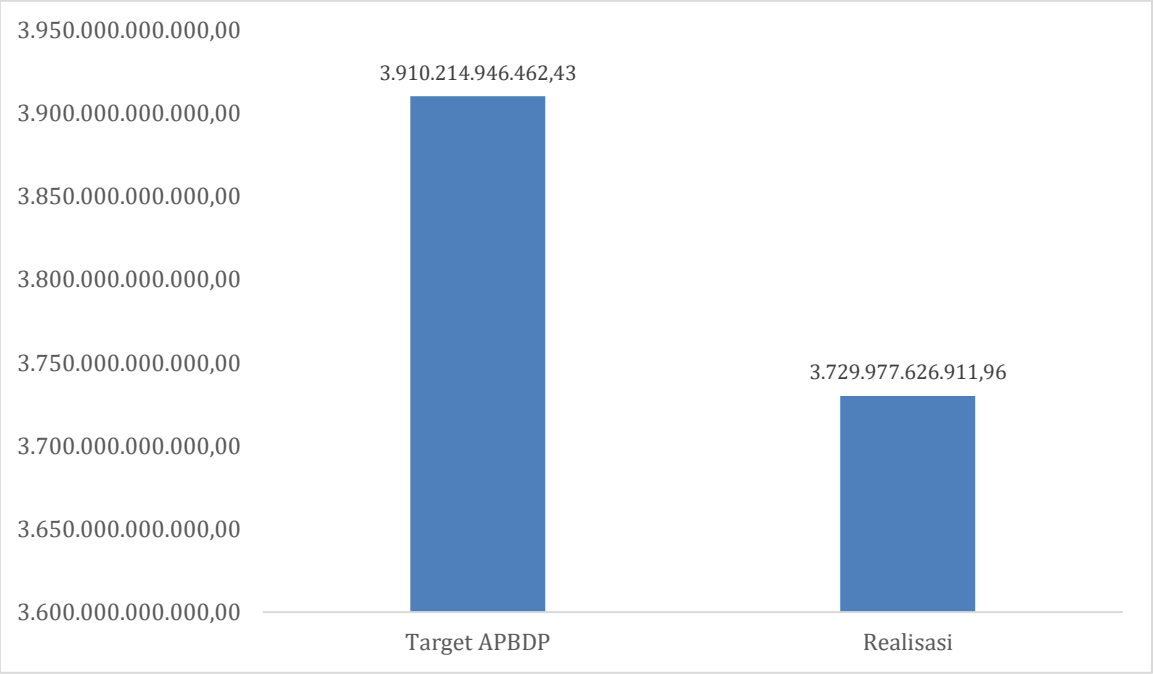

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Gambar 2.1. Perbandingan Realisasi Pendapatan Daerah dengan Target APBD-P Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Penjelasan mengenai realisasi masing-masing unsur pendapatan daerah diuraikan di bawah ini.

1. **Realisasi Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp1.753.879.399.953,39 atau 92,08 persen dari target sebesar Rp1.904.763.732.160,43. Tingkat pencapaian tersebut menunjukkan kinerja penerimaan daerah berada dalam kondisi relatif stabil walaupun target belum terpenuhi sepenuhnya. Struktur penerimaan masih bertumpu atas Pajak Daerah serta Retribusi Daerah sebagai sumber dominan pembiayaan daerah.

Pajak Daerah membukukan realisasi Rp1.447.285.058.158,50 atau 89,49 persen atas target. Kontribusi utama berasal atas Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, serta Pajak Air Permukaan. Sebagian jenis pajak melampaui target, sebagian lain menunjukkan capaian rendah, mencerminkan perbedaan potensi penerimaan antarobjek pajak yang memerlukan penguatan pengelolaan. Retribusi Daerah mencatat realisasi Rp171.635.268.102,00 melampaui target sebesar 101,60 persen, terutama bersumber atas pelayanan kesehatan.

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan masih memberikan kontribusi terbatas. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terealisasi sesuai target serta berperan memperkuat struktur penerimaan. Kinerja Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025 menggambarkan stabilitas fiskal daerah sekaligus kebutuhan optimalisasi sumber penerimaan nonpajak guna memperkuat kapasitas keuangan periode berikutnya.

Tabel 2.2.
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**3.910.214.946.462,43**	**3.729.977.626.911,96**	**95,39**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**1.904.763.732.160,43**	**1.753.879.399.953,39**	**92,08**
4.1.01	**Pajak Daerah**	1.617.238.624.316,00	1.447.285.058.158,50	**89,49**
4.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	444.109.779.594,00	405.307.682.591,00	91,26
4.1.01.02	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	399.572.412.018,00	273.480.737.600,00	68,44
4.1.01.03	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	478.452.376.124,00	489.750.163.677,00	102,36
4.1.01.04	Pajak Air Permukaan	33.933.643.819,00	33.017.182.076,00	97,30
4.1.01.05	Pajak Rokok	180.651.107.585,00	174.288.290.965,00	96,48
4.1.01.17	Pajak Alat Berat	4.334.952.300,00	614.336.352,00	14,17
4.1.02	**Retribusi Daerah**	**168.940.551.756,24**	**171.635.268.102,00**	**101,60**
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	162.484.348.266,00	164.263.165.463,00	101,09
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	162.484.348.266,00	164.263.165.463,00	101,09
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	5.171.572.325,24	5.950.969.639,00	115,07
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.819.463.600,00	2.145.830.800,00	117,94
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	125.775.000,00	13.300.000,00	10,57
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	700.000.000,00	617.849.585,00	88,26
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	136.000.000,00	312.591.390,00	229,85
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	0,00	170.976.840,00	-
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	136.000.000,00	141.614.550,00	104,13
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.284.631.165,00	1.421.133.000,00	110,63
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1.284.631.165,00	1.421.133.000,00	0,00
4.1.02.03.08	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	1.200.000.000,00	1.421.133.000,00	118,43
4.1.02.03.09	Retribusi Pertambangan Rakyat	84.631.165,00	0,00	-

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%
4.1.03	**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**	**3.100.000.000,00**	**2.275.536.541,00**	**73,40**
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	3.100.000.000,00	2.275.536.541,00	73,40
4.1.04	**Lain-lain PAD yang Sah**	**115.484.556.088,19**	**132.683.537.151,89**	**114,89**
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	512.084.414,00	
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	957.027.354,47	
4.1.04.05	Jasa Giro	4.500.000.000,00	3.616.565.508,65	80,37
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	1.245.873.063,98	1.889.238.643,57	151,64
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	80.794.464,06	
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	29.741.310.212,21	25.858.479.507,12	86,94
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	1.098.168,00	35.861.416,00	3.265,57
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	73.423.349.811,00	76.600.661.500,46	104,33
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	6.472.476.433,00	23.027.104.674,52	355,77
4.1.04.19	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	4.107.657,16	
4.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	100.448.400,00	100.448.400,00	100,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	**1.904.763.732.160,43**	**1.753.879.399.953,39**	92,08

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau

2. Realisasi Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan penerimaan daerah yang bersumber atas alokasi Pemerintah Pusat guna mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Komponen ini mencakup Dana Perimbangan yang berfungsi menjaga keseimbangan fiskal antardaerah melalui Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, serta Dana Alokasi Khusus, serta Insentif Fiskal yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja pengelolaan keuangan daerah. Pendapatan Transfer terealisasi sebesar Rp1.974.299.383.024,00 atau 98,51 persen dari target sebesar Rp2.004.127.111.802,00.

Dana Perimbangan menjadi kontributor utama Pendapatan Transfer dengan realisasi sebesar Rp.0,00, sesuai dengan target yang ditetapkan. Dana perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Khusus. Dana

Alokasi Umum mencatat realisasi sebesar Rp1.027.801.318.066,00 atau 100,02 persen dari target. Dana Bagi Hasil terealisasi sebesar Rp297.708.095.000,00 atau 92,25 persen dari target anggaran. Dana Alokasi Khusus terealisasi sebesar Rp453.983.730.377,00 atau 98,91 persen dari target.

Insentif Fiskal terealisasi penuh sebesar Rp23.236.157.000,00 atau 100,00 persen sesuai alokasi anggaran. Struktur Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2025 menegaskan peran Dana Perimbangan sebagai penopang utama kapasitas keuangan daerah. Pengelolaan transfer yang konsisten tetap diperlukan guna menjaga stabilitas fiskal serta kesinambungan pendanaan pada periode perencanaan selanjutnya.

Tabel 2.3.
Realisasi Pendapatan Transfer Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**2.004.127.111.802,00**	**1.974.299.383.024,00**	**98,51**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.004.127.111.802,00	1.974.299.383.024,00	98,51
4.2.01.01	**Pendapatan Transfer Dana Perimbangan**	**0,00**	**0,00**	**-**
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	0,00	0,00	-
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00	0,00	-
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	0,00	0,00	-
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	0,00	0,00	-
4.2.01.07	**Dana Bagi Hasil (DBH)**	**322.734.238.997,00**	**297.708.095.000,00**	**92,25**
4.2.01.08	**Dana Alokasi Umum (DAU)**	**1.027.586.951.680,00**	**1.027.801.318.066,00**	**100,02**
4.2.01.09	**Dana Alokasi Khusus (DAK)**	**458.999.545.125,00**	**453.983.730.377,00**	**98,91**
4.2.01.09.01	DAK Fisik	92.350.324.000,00	88.988.492.951,00	96,36
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	366.649.221.125,00	364.995.237.426,00	99,55
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	**1.980.890.954.802,00**	**1.951.063.226.024,00**	**98,49**
4.2.01.06	**Insentif Fiskal**	**23.236.157.000,00**	**23.236.157.000,00**	**100,00**
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	0,00	0,00	-
4.2.01.06.02	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	23.236.157.000,00	23.236.157.000,00	100,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	**23.236.157.000,00**	**23.236.157.000,00**	**100,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	**2.004.127.111.802,00**	**1.974.299.383.024,00**	**98,51**

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan penerimaan daerah bersumber atas mekanisme nonrutin di luar Pendapatan Asli Daerah maupun Pendapatan Transfer. Kelompok pendapatan ini mencakup hibah serta sumbangan pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi utamanya mendukung pembiayaan kegiatan tertentu tanpa menciptakan kewajiban berkelanjutan. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah realisasi sebesar Rp1.675.108.563,48 atau 126,51 persen dari target sebesar Rp1.324.102.500,00 yang bersumber dari penerimaan hibah Tahun Anggaran 2025.

Kinerja Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ini mencerminkan dukungan eksternal terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah. Struktur pendapatan bersifat insidental menuntut kehati-hatian penafsiran kinerja tahunan, sehingga optimalisasi perencanaan tetap diperlukan agar proyeksi pendapatan lebih realistis. Konsistensi pengelolaan menjadi prasyarat yang harus dipenuhi untuk menjaga akuntabilitas pendapatan daerah.

Tabel 2.4.
Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**1.324.102.500,00**	**1.675.108.563,48**	**126,51**
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.324.102.500,00	1.675.108.563,48	126,51
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	1.324.102.500,00	1.294.704.000,00	97,78
4.3.01.04.01	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	1.324.102.500,00	1.294.704.000,00	97,78
4.3.01.05	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0,00	380.404.563,48	-
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**1.324.102.500,00**	**1.675.108.563,48**	**126,51**

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau

2.2. Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan seluruh kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih anggaran tahunan. Kelompok belanja ini mencakup Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, serta Belanja Transfer. Tahun Anggaran 2025 Provinsi Kepulauan Riau menetapkan anggaran Belanja Daerah sebesar Rp3.932.501.110.900,44. Realisasi belanja mencapai Rp3.733.650.403.940,54 atau 94,94 persen dari rencana anggaran.

Belanja Operasi menempati porsi terbesar dengan realisasi Rp2.782.089.740.486,38 atau 94,49 persen dari anggaran sebesar Rp2.944.090.151.988,51. Komponen Belanja Pegawai menunjukkan serapan sangat tinggi mencapai 98,65 persen, sedangkan Belanja Barang Jasa terealisasi sebesar 89,95 persen. Belanja Hibah mencatat capaian 94,79 persen, sementara Belanja Subsidi dan Bantuan Sosial memperlihatkan tingkat realisasi lebih rendah, yaitu 29,14 persen untuk Belanja Subsidi, dan sebesar 64,23 persen untuk Belanja Bantuan Sosial.

Belanja Modal terealisasi Rp247.372.232.810,16 atau 91,85 persen dari anggaran sebesar Rp269.313.511.475,33, terutama terserap melalui pembangunan gedung, peralatan, serta infrastruktur jalan. Belanja Tidak Terduga tidak terealisasi sepanjang tahun anggaran. Belanja Transfer mencatat realisasi sangat tinggi sebesar Rp704.188.430.644,00 atau sebesar 98,24 persen, didominasi Belanja Bagi Hasil kepada pemerintah kabupaten kota, dan sebagian lainnya untuk belanja bantuan keuangan.

Secara detail besarnya anggaran dan realisasi anggaran belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5.
Realisasi Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%
5	**BELANJA DAERAH**	**3.932.501.110.900,44**	**3.733.650.403.940,54**	**94,94**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%
5.1	**BELANJA OPERASI**	**2.944.090.151.988,51**	**2.782.089.740.486,38**	**94,49**
5.1.01	Belanja Pegawai	1.468.712.653.029,50	1.448.897.643.513,04	98,65
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.294.788.524.618,62	1.164.755.030.074,38	89,95
5.1.03	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
5.1.04	Belanja Subsidi	2.864.494.061,38	834.852.991,00	29,14
5.1.05	Belanja Hibah	174.868.035.279,01	165.767.273.907,96	94,79
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.856.445.000,00	1.834.940.000,00	64,23
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**2.944.090.151.988,51**	**2.782.089.740.486,38**	**94,49**
5.2	**BELANJA MODAL**	**269.313.511.475,33**	**247.372.232.810,16**	**91,85**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.000.000.000,00	992.100.000,00	99,21
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	88.735.653.121,33	85.840.441.732,00	96,73
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	94.492.416.281,00	91.671.299.394,06	97,01
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	61.989.061.381,00	46.310.371.998,10	74,70
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	21.970.627.692,00	21.957.775.186,00	99,94
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.125.753.000,00	600.244.500,00	53,31
	JUMLAH BELANJA MODAL	**269.313.511.475,33**	**247.372.232.810,16**	**91,85**
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**2.281.396.903,60**	**0,00**	-
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.281.396.903,60	0,00	-
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	**2.281.396.903,60**	**0,00**	-
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**716.816.050.533,00**	**704.188.430.644,00**	98,24
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	698.706.050.533,00	690.951.951.944,00	98,89
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	18.110.000.000,00	13.236.478.700,00	73,09
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	**716.816.050.533,00**	**704.188.430.644,00**	98,24
	JUMLAH BELANJA	**3.932.501.110.900,44**	**3.733.650.403.940,54**	**94,94**
	SURPLUS/DEFISIT	**(22.286.164.438,01)**	**(3.675.368.128,58)**	16,49

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Analisis pelaksanaan belanja daerah memerlukan penelusuran kesesuaian antara alokasi anggaran serta realisasi penggunaan anggaran sepanjang Tahun Anggaran 2025. Informasi tersebut menjadi dasar penilaian terhadap efisiensi serta ketepatan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Perbandingan antara

anggaran belanja Provinsi Kepulauan Riau serta realisasinya selanjutnya ditampilkan melalui grafik berikut.

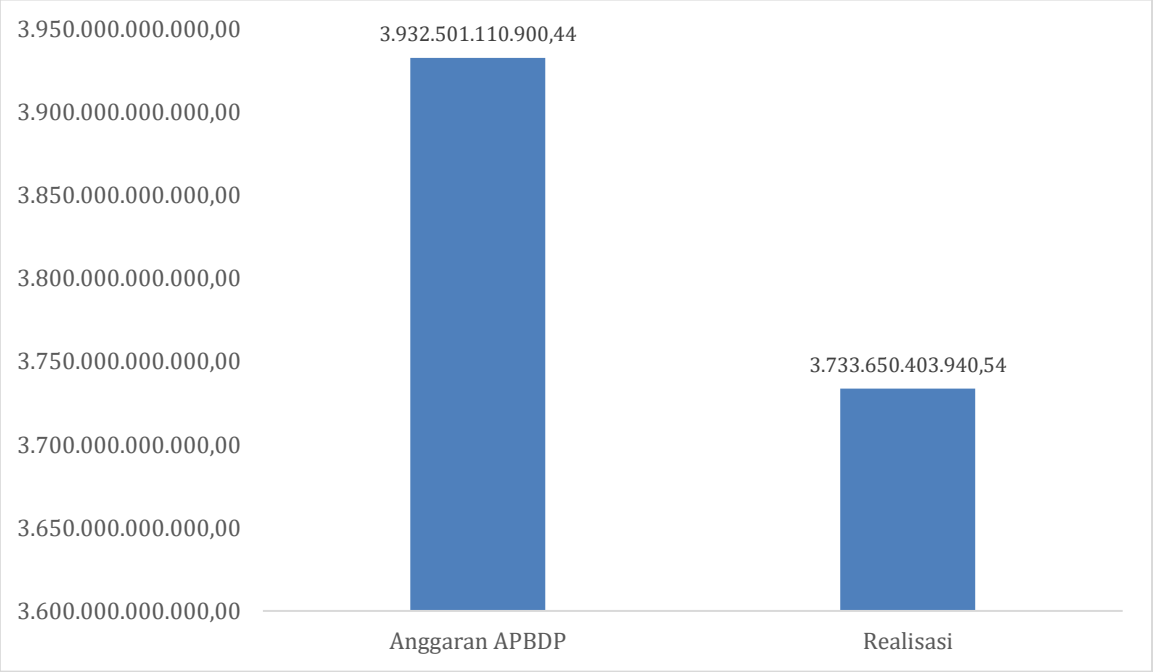

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Gambar 2.2. Perbandingan Realisasi Belanja Daerah dengan Target APBD-P Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

2.3. Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan yang berfungsi menutup selisih antara pendapatan serta belanja anggaran tahunan. Kelompok ini mencakup penerimaan pembiayaan serta pengeluaran pembiayaan. Tahun Anggaran 2025 menetapkan rencana penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp27.286.164.438,01, terealisasi sebesar Rp27.291.476.128,01 atau 100,01 persen. Penerimaan Pembiayaan terutama bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya. Penerimaan pembiayaan juga bersumber dari penerimaan kembali pinjaman daerah meskipun dengan nilai relatif kecil. Struktur penerimaan ini menunjukkan peran SILPA sebagai instrumen utama penyeimbang anggaran. Pengeluaran Pembiayaan direalisasikan sebesar Rp5.000.000.000,00 atau 100 persen dari alokasi anggaran. Seluruh pengeluaran dialokasikan untuk penyertaan modal daerah. Kondisi tersebut menghasilkan Pembiayaan Netto sebesar Rp22.291.476.128,01 dari rencana sebesar

Rp22.286.164.438,01. Berdasarkan hasil perhitungan pendapatan, belanja, penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, diperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp18.618.699.099,43 pada akhir tahun anggaran.

Tabel 2.6.
Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**			
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**27.286.164.438,01**	**27.291.476.128,01**	**100,01**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	27.286.164.438,01	27.208.640.128,01	99,72
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	82.836.000,00	-
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**27.286.164.438,01**	**27.291.476.128,01**	**100,01**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**5.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**	**100,00**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**5.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**	**100,00**
	PEMBIAYAAN NETTO	**22.286.164.438,01**	**22.291.476.128,01**	**100,02**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	**18.618.699.099,43**	**0,00**

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Kinerja pembiayaan daerah mencerminkan kemampuan pemerintah daerah menjaga keseimbangan fiskal melalui pengelolaan penerimaan serta pengeluaran pembiayaan sepanjang Tahun Anggaran 2025. Dinamika pembiayaan berperan penting dalam menutup defisit anggaran maupun mengelola sisa lebih perhitungan anggaran. Gambaran antara perencanaan pembiayaan serta realisasi pelaksanaannya ditunjukkan melalui grafik berikut.

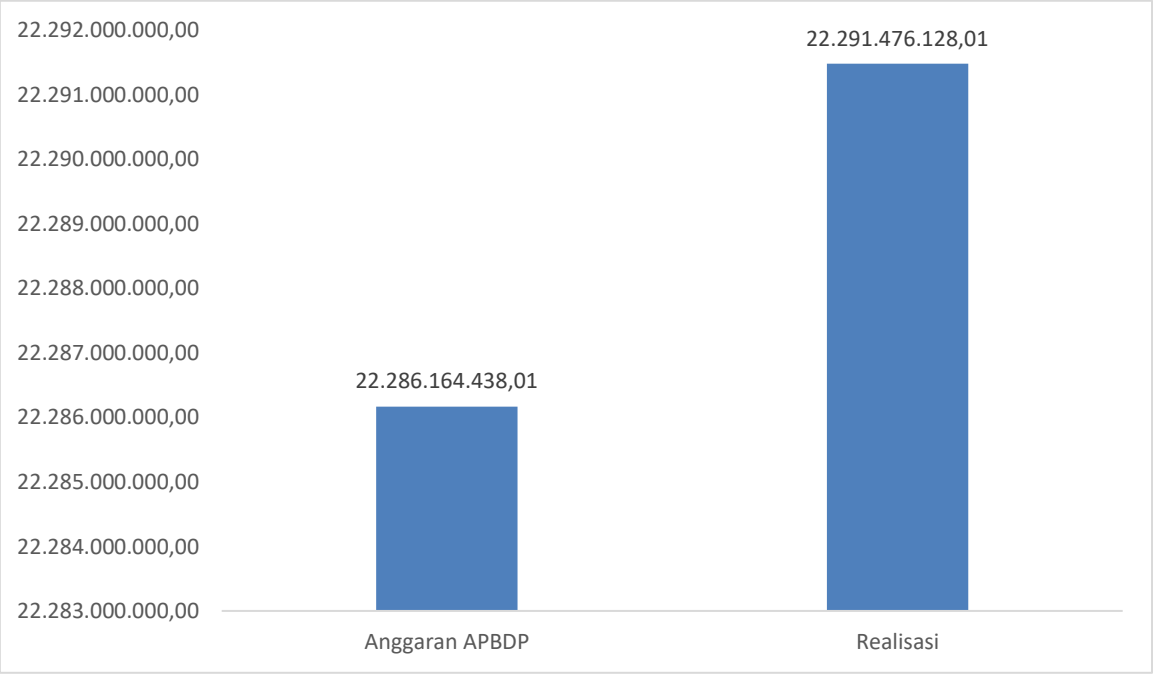

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Gambar 2.3. Perbandingan Realisasi Pembiayaan Netto dengan Target APBD-P Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

BAB III
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1. Capaian Kinerja Indikator Makro dan Indikator Sasaran RPJMD

3.1.1. Capaian Kinerja Indikator Makro

1. PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang berasal dari segala aktivitas ekonomi dalam satu periode tertentu. PDRB memiliki informasi tentang data nilai tambah sektoral, struktur perekonomian, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Perhitungan PDRB suatu daerah dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran. Pendekatan produksi mengukur nilai tambah yang tercipta di setiap sektor atau lapangan usaha. Pendekatan pendapatan menelusuri pembentukan pendapatan para pelaku ekonomi, meliputi upah, sewa, bunga, dan laba. Pendekatan pengeluaran mengukur besarnya pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi, perubahan inventori, serta ekspor neto.

PDRB disajikan dalam dua ukuran, yaitu atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK). PDRB ADHB menunjukkan nilai ekonomi pada harga yang berlaku pada tahun berjalan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun berjalan. Angka ini mencerminkan besaran nominal perekonomian karena memuat pengaruh kenaikan harga (inflasi) sekaligus perubahan volume produksi. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Penggunaan harga acuan tersebut menghilangkan pengaruh perubahan harga, sehingga angka yang dihasilkan lebih menggambarkan perubahan aktivitas ekonomi secara riil (Puspitasari, 2021).

PDRB atas dasar harga berlaku Provinsi Kepulauan Riau terus meningkat selama 2021–2025. Nilainya naik dari sekitar 275.622,85 miliar rupiah tahun 2021 menjadi 381.729,88 milyar rupiah tahun 2025. Kenaikan ini menunjukkan skala kegiatan ekonomi makin besar secara nominal. Angka tersebut juga mencerminkan pengaruh kenaikan harga serta bertambahnya aktivitas produksi.

Tabel 3.1.
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2025

Kategori	Uraian	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)				
		2021	2022	2023	2024	2025
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8.461,83	9.371,31	9.898,66	10.355,53	11.388,08
B	Pertambangan dan Penggalian	34.696,08	38.839,30	37.035,07	34.242,44	38.396,66
C	Industri Pengolahan	115.852,49	125.989,68	132.924,88	144.628,95	158.685,94
D	Pengadaan Listrik, Gas	2.733,33	3.263,28	3.557,08	3.865,21	4.356,55
E	Pengadaan Air	279,64	306,16	322,41	343,47	388,91
F	Konstruksi	53.159,16	59.057,19	66.985,11	71.355,76	75.858,34
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	22.474,87	27.343,40	30.165,96	32.602,64	35.965,76
H	Transportasi dan Pergudangan	3.826,60	5.887,72	6.768,92	7.207,25	7.722,55
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.167,57	4.874,87	6.301,87	6.681,45	6.979,95
J	Informasi dan Komunikasi	7.078,07	7.719,85	9.334,19	9.388,78	9.113,73
K	Jasa Keuangan	7.191,82	7.906,25	8.823,30	9.644,34	10.228,53
L	Real Estate	3.116,59	3.353,47	3.640,00	3.882,74	4.159,73
M,N	Jasa Perusahaan	6,63	8,82	11,12	11,97	14,23
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.697,96	7.202,78	7.886,50	9.223,37	8.873,93
P	Jasa Pendidikan	3.878,48	4.182,92	4.416,32	4.702,61	5.092,38
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.571,78	2.646,26	2.578,69	3.124,06	3.273,05
R,S,T,U	Jasa lainnya	429,97	786,47	994,44	1.175,87	1.231,55
	PDRB	275.622,85	308.739,72	331.644,53	352.436,43	381.729,88
	PDRB TANPA MIGAS	245.866,24	275.393,56	300.922,18	323.886,79	349.136,49

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau

PDRB ADHK Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan peningkatan secara terus-menerus sepanjang 2021-2025. Pada tahun 2021, PDRB ADHK Provinsi Kepulauan Riau adalah sebesar 180.952,44 milyar rupiah dan terus meningkat hingga tahun 2025 mencapai 224.504,72 miliar rupiah. Kenaikan yang terjadi setiap tahun menggambarkan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil. Hal ini menunjukkan penambahan produksi barang dan jasa secara riil, karena pengaruh kenaikan harga

sudah dihilangkan. Peningkatan tersebut lebih menggambarkan bertambahnya aktivitas ekonomi, bukan sekadar akibat inflasi.

Tabel 3.2.
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2025

Kategori	Uraian	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)				
		2021	2022	2023	2024	2025
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.322,05	5.601,86	5.687,63	5.720,17	5.919,87
B	Pertambangan dan Penggalian	24.748,82	23.015,61	22.406,26	20.650,99	23.956,26
C	Industri Pengolahan	75.925,35	79.348,16	81.302,96	87.616,69	94.202,86
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.648,93	1.919,01	2.073,12	2.222,43	2.452,86
E	Pengadaan Air, pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	218,68	237,96	248,56	253,49	283,14
F	Konstruksi	33.256,03	34.917,26	38.580,25	40.799,50	42.962,22
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	13.592,98	15.477,62	16.385,52	17.301,86	18.607,41
H	Transportasi dan Pergudangan	2.514,94	3.479,88	3.999,01	4.099,38	4.393,91
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.357,95	3.530,11	4.494,33	4.683,68	4.818,29
J	Informasi dan Komunikasi	5.909,45	6.421,12	7.702,88	7.698,40	7.494,68
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4.833,25	5.035,02	5.470,38	5.875,90	6.117,41
L	Real Estate	2.247,92	2.352,27	2.475,66	2.614,14	2.763,51
M,N	Jasa Perusahaan	5,74	6,61	7,82	8,21	9,59
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	4.028,29	4.163,45	4.376,99	5.158,77	5.083,69
P	Jasa Pendidikan	2.183,17	2.255,62	2.342,98	2.435,31	2.568,83
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.886,04	1.885,75	1.794,92	2.146,71	2.203,96
R,S,T,U	Jasa lainnya	272,86	463,78	563,56	653,43	666,25
	PDRB	**180.952,44**	**190.111,09**	**199.912,83**	**209.939,07**	**224.504,72**
	PDRB TANPA MIGAS	**159.424,39**	**170.131,20**	**180.601,62**	**191.969,07**	**203.248,62**

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolok ukur utama untuk menilai kondisi perekonomian suatu daerah. Konsep ini mengacu pada proses peningkatan pendapatan atau output perkapita jangka panjang (Hapsari et al., 2014). Indikator pengukuran tercermin melalui tingkat pertumbuhan PDRB riil. Konteks kebijakan ekonomi makro menempatkan pertumbuhan sebagai tujuan strategis karena mencerminkan kemajuan perekonomian wilayah. Suatu perekonomian dikatakan bertumbuh apabila aktivitas ekonomi masyarakat mendorong peningkatan produksi barang serta jasa. Pandangan ekonomi klasik menyebut sejumlah faktor penentu pertumbuhan, antara lain jumlah penduduk, akumulasi barang modal, ketersediaan lahan serta kekayaan alam, serta kemajuan teknologi yang digunakan (Sudana, 2020).

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 berada 3,43 persen dan mencerminkan fase awal pemulihan. Capaian tahun 2025 telah meningkat hingga 6,94 persen dan menunjukkan penguatan yang cukup konsisten setelah fase lonjakan dan koreksi. Pergerakan sepanjang periode analisis bersifat fluktuatif namun berpola menguat, karena terjadi percepatan tinggi setelah pemulihan awal lalu diikuti stabilisasi sebelum kembali melonjak. Rentang 2021–2025 menghasilkan kenaikan 3,51 poin sehingga dapat dikategorikan sangat signifikan.

Pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2021 tercatat 3,7 persen dan menempatkan perekonomian nasional sedikit lebih baik dibanding Kepulauan Riau pada fase awal pemulihan. Perbandingan kedua wilayah menunjukkan perbedaan karakter pertumbuhan yang jelas. Kepulauan Riau memiliki laju pertumbuhan yang lebih dinamis dan responsif terhadap momentum ekonomi, sementara nasional bergerak lebih stabil. Selisih peningkatan 2021–2025 menegaskan bahwa kapasitas akselerasi ekonomi Kepulauan Riau jauh lebih kuat dibanding nasional, walau risiko fluktuasi juga lebih tinggi. Kondisi tersebut memperlihatkan potensi pertumbuhan daerah yang besar apabila penguatan struktur ekonomi dan stabilitas kinerja sektor unggulan dapat terus dijaga.

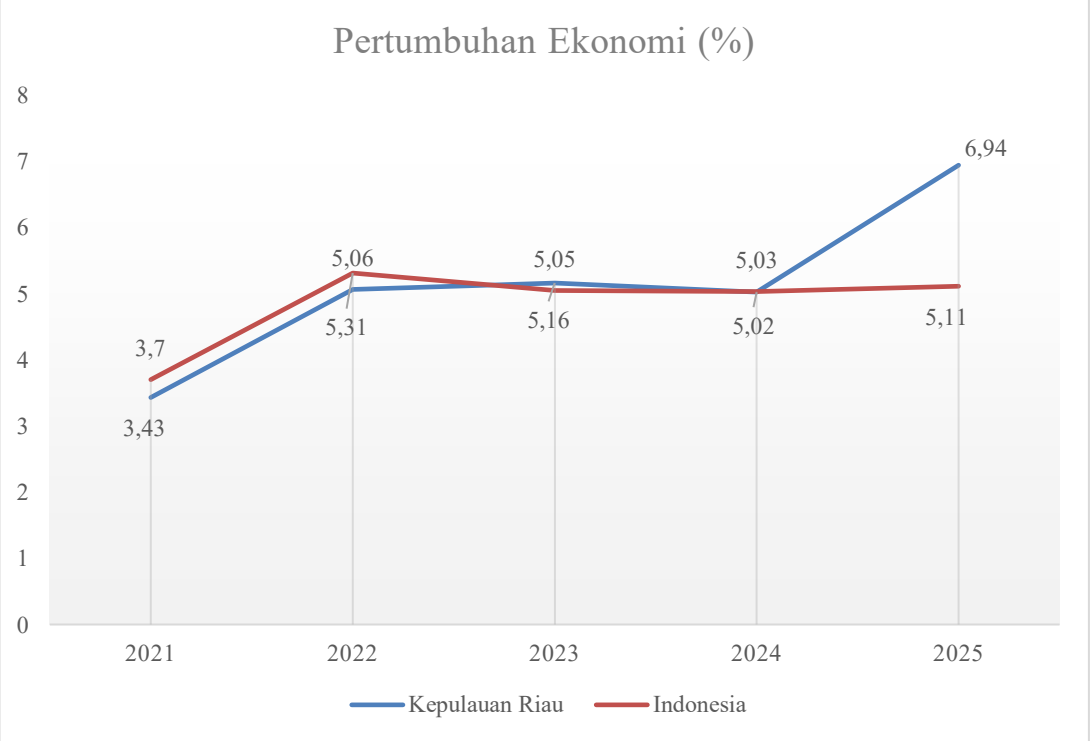

Sumber: BPS dan BPS Provinsi Kepulauan Riau

Gambar 3.1. Pertumbuhan Ekonomi (%) Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2021-2025

Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 wilayah Sumatera menunjukkan perbedaan kinerja antar provinsi yang cukup jelas. Sumatera Selatan mencatat pertumbuhan tertinggi 5,35 persen dan melampaui rata-rata nasional 5,11 persen. Kepulauan Riau mencatat 6,94 persen dan menempati posisi tertinggi yang mencerminkan stabilitas pertumbuhan regional. Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, serta Sumatera Utara menunjukkan kinerja moderat kisaran 4,09-4,8 persen dan menandakan pemulihan yang belum sepenuhnya kuat. Aceh serta Sumatera Barat mencatat pertumbuhan terendah 2,97 persen dan 3,37 persen yang menggambarkan perlunya penguatan kembali basis aktivitas ekonomi daerah.

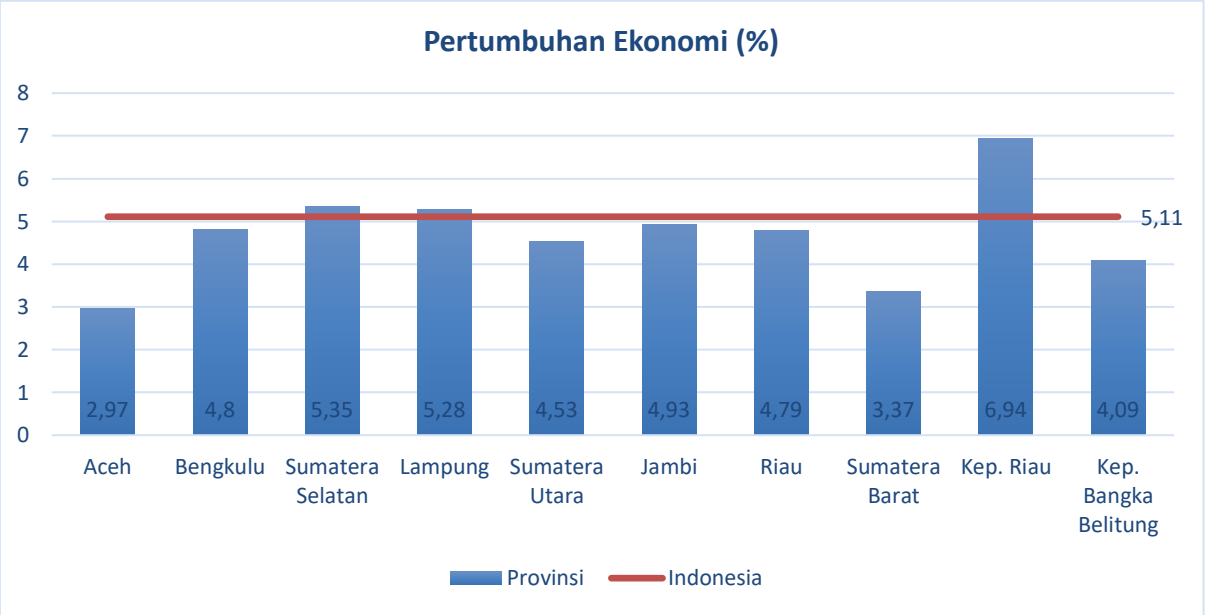

Sumber: BPS dan BPS Provinsi Kepulauan Riau

Gambar 3.8. Posisi Relatif Pertumbuhan Ekonomi (%) Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Lain di Wilayah Sumatera dan Nasional Tahun 2025

2. PDRB Perkapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita merupakan indikator yang menggambarkan rata-rata nilai tambah bruto yang dihasilkan setiap penduduk dalam suatu wilayah selama satu tahun. Indikator ini sering digunakan sebagai proksi tingkat kemakmuran karena menunjukkan kapasitas ekonomi per orang. Perhitungan PDRB per kapita dapat disajikan atas dasar harga berlaku (ADHB) untuk melihat nilai nominal, serta atas dasar harga konstan (ADHK) guna menggambarkan pertumbuhan riil tanpa pengaruh inflasi. Kombinasi kedua pendekatan tersebut memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika kesejahteraan ekonomi suatu daerah.

Perkembangan PDRB per kapita ADHB Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021–2025 menunjukkan tren meningkat konsisten, yakni 131.883,84 ribu rupiah tahun 2021 menjadi 172.458,76 ribu rupiah tahun 2025. Kenaikan tersebut merefleksikan pertumbuhan kapasitas ekonomi nominal per penduduk yang cukup kuat sepanjang periode lima tahun. Indonesia pada periode sama meningkat dari 62.259,10 menjadi 83.747,73 ribu rupiah. Selisih nilai yang hampir dua kali lipat memperlihatkan posisi Kepulauan Riau yang relatif unggul dibanding rata-rata nasional dalam hal pendapatan per kapita nominal.

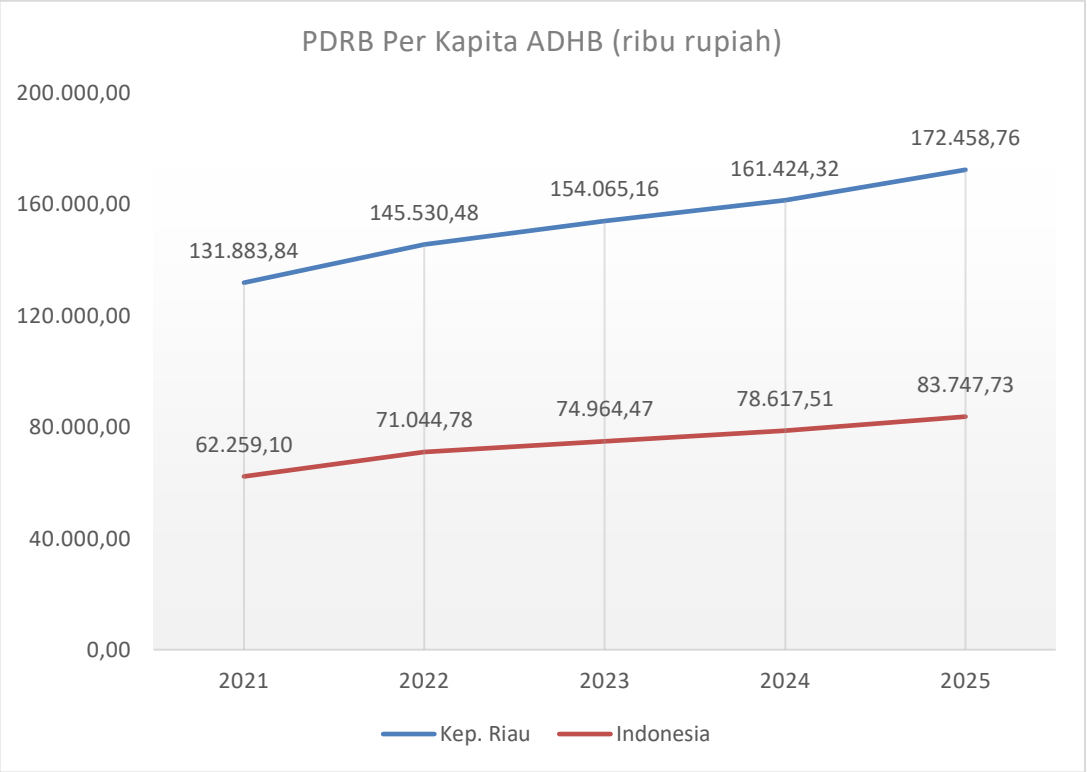

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau

Gambar 3.2. PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ribu rupiah) Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2021-2025

Gambaran pertumbuhan riil tercermin melalui PDRB per kapita ADHK yang juga memperlihatkan peningkatan berkelanjutan. Kepulauan Riau mencatat kenaikan 86.584,63 ribu rupiah tahun 2021 menjadi 101.427,23 ribu rupiah tahun 2025, menunjukkan ekspansi ekonomi nyata. PDB Per Kapita Indonesia meningkat dari sebesar 40.780,75 menjadi 47.744,98 ribu rupiah dalam periode sama. Kesenjangan tingkat riil tetap lebar, mencerminkan produktivitas dan nilai tambah per penduduk Kepulauan Riau yang lebih tinggi dibanding agregat nasional.

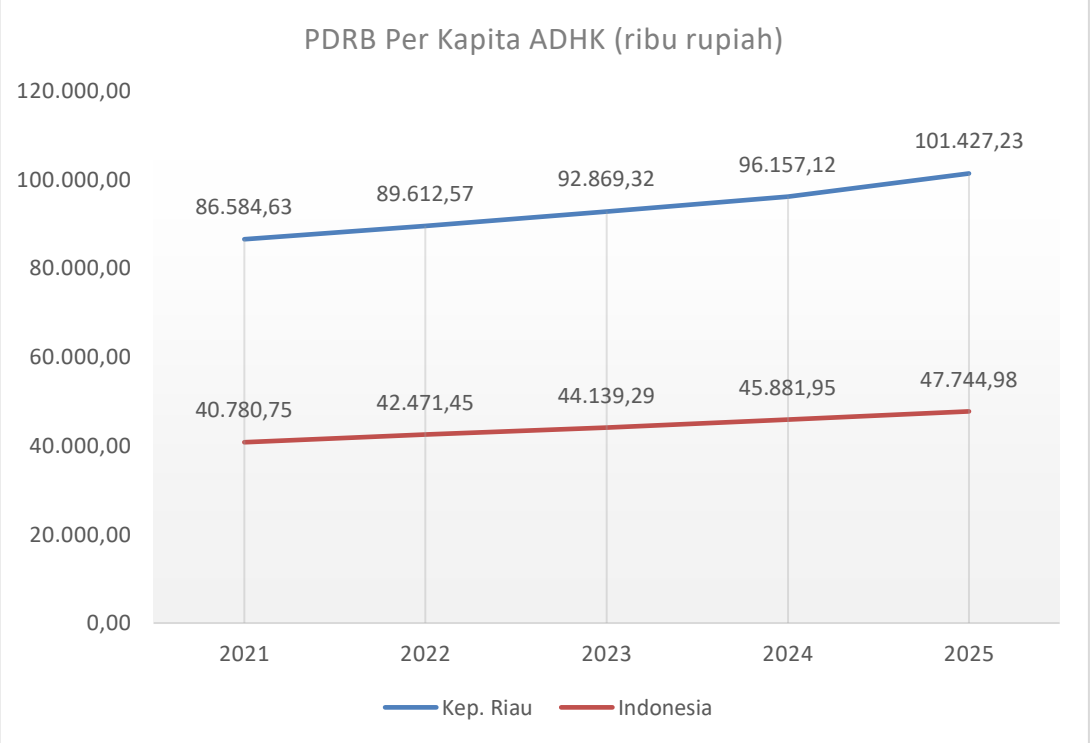

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau

Gambar 3.3. PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan (ribu rupiah) Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2021-2025

Posisi relatif PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) antar provinsi di Sumatera memperlihatkan struktur kekuatan ekonomi kawasan dan tingkat produktivitas masing-masing daerah.Berdasarkan ADHB tahun 2025, posisi tertinggi ditempati Riau, disusul Kepulauan Riau. Kelompok menengah terdiri atas Jambi, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Kepulauan Bangka Belitung. Posisi terendah berada pada Aceh, Bengkulu, Lampung, serta Sumatera Barat. Keunggulan Riau dan Kepulauan Riau dipengaruhi struktur ekonomi berbasis industri pengolahan, migas, perdagangan internasional, serta aktivitas kawasan strategis yang menghasilkan nilai tambah tinggi. Kelompok menengah umumnya bertumpu pada kombinasi sektor primer dan jasa regional. Kelompok bawah mencerminkan struktur ekonomi yang lebih dominan sektor tradisional serta produktivitas relatif lebih rendah.

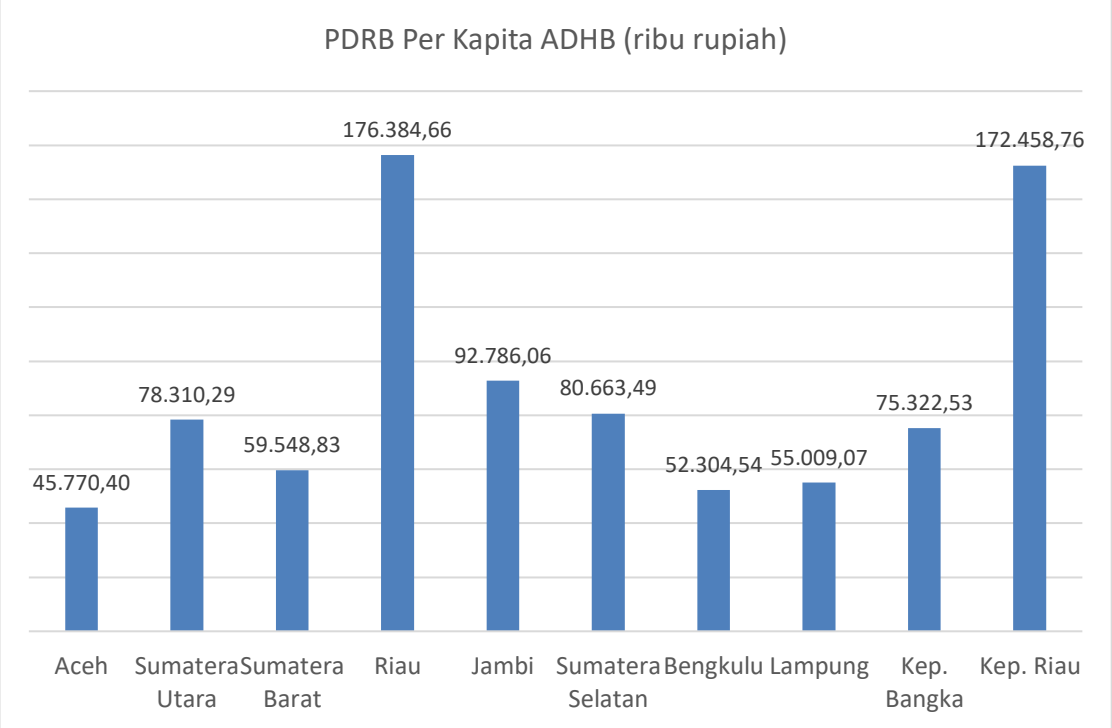

Sumber: BPS dan BPS Provinsi Kepulauan Riau

Gambar 3.4. PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ribu rupiah) Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Lain di Pulau Sumatera Tahun 2025

PDRB per kapita ADHK tahun 2025 memperlihatkan perbedaan tingkat produktivitas riil antar provinsi di Sumatera yang cukup mencolok. Kepulauan Riau menempati posisi tertinggi dengan nilai 101.427,23 ribu rupiah, diikuti Riau sebesar 87.886,74 ribu rupiah. Kelompok menengah dihuni Jambi, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, serta Kepulauan Bangka Belitung dengan capaian pada kisaran 40.811,39 hingga 49.245,88 ribu rupiah. Posisi terendah berada pada Aceh dan Bengkulu yang berada di bawah 30.000 ribu rupiah.

Keunggulan Kepulauan Riau pada indikator ADHK menegaskan tingkat produktivitas riil per penduduk yang paling kuat di Sumatera, bukan sekadar dipengaruhi dinamika harga. Selisih yang relatif besar dibanding kelompok menengah menunjukkan kemampuan daerah menghasilkan nilai tambah tinggi secara berkelanjutan. Struktur ekonomi berbasis industri pengolahan berorientasi ekspor, perdagangan lintas batas, serta dukungan kawasan strategis dan arus investasi memberikan kontribusi signifikan terhadap capaian tersebut.

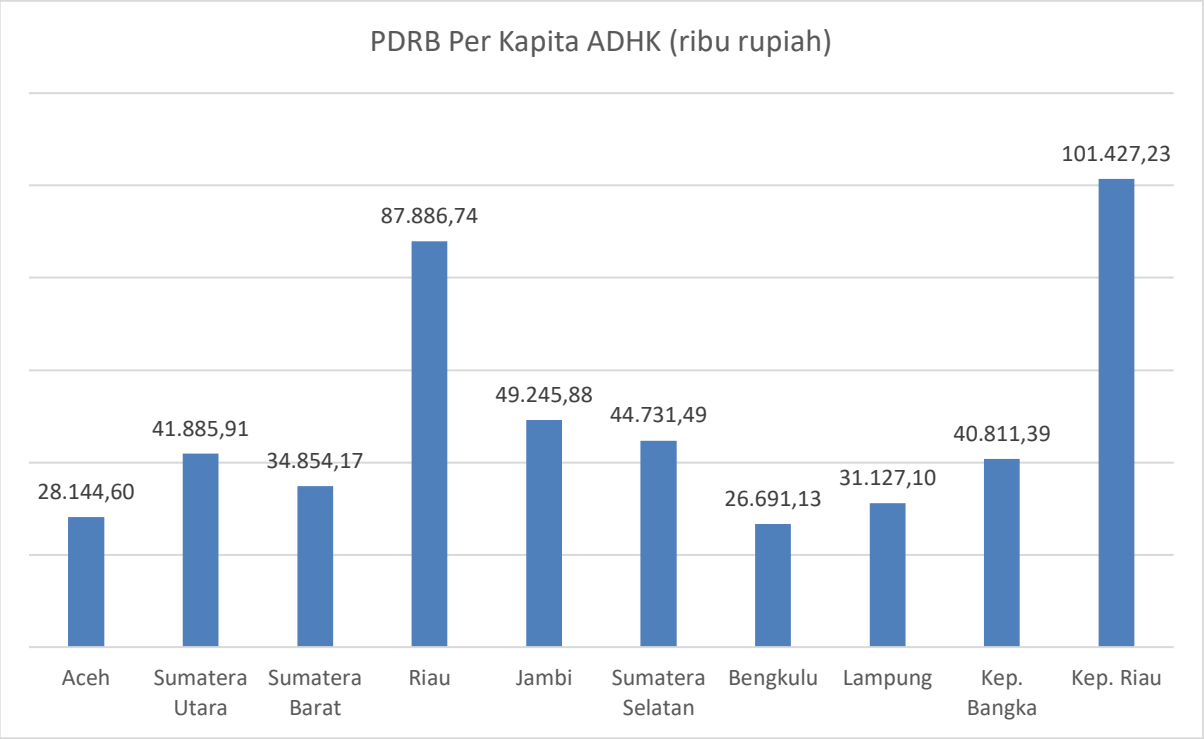

Sumber: BPS dan BPS Provinsi Kepulauan Riau

Gambar 3.5. PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan (ribu rupiah) Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Lain di Pulau Sumatera Tahun 2025

3. Laju Inflasi

Inflasi merupakan laju kenaikan harga barang serta jasa dalam suatu perekonomian dan umumnya diukur melalui Consumer Price Index yang mencerminkan perubahan harga lebih 200 kelompok komoditas (Hornberg, 2024). Laju inflasi Provinsi Kepulauan Riau periode 2021–2025 menunjukkan dinamika fluktuatif namun masih berada rentang terkendali, tercermin inflasi 2,26 persen tahun 2021 yang meningkat tajam 5,83 persen tahun 2022 akibat tekanan global serta gangguan rantai pasok. Kondisi tersebut sejalan temuan berbagai kajian yang menjelaskan inflasi dapat dipicu kebijakan moneter, stimulus ekonomi, maupun gangguan pasokan, bahkan dipahami sebagai fenomena konflik akibat ketegangan distribusi dan struktur ekonomi yang berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat serta strategi usaha (Angle, 2022; Hein, 2024). Penurunan inflasi Kepulauan Riau menuju 2,76 persen lalu 2,09 persen mencerminkan meredanya tekanan harga, sebelum kembali meningkat 3,47 persen tahun 2025 yang masih

berada tingkat moderat. Laju inflasi nasional bergerak pola serupa namun relatif lebih rendah, tercatat 1,87 persen tahun 2021 lalu meningkat menjadi 2,92 persen pada tahun 2025, sementara interpretasi perbedaan inflasi antarwilayah juga perlu mempertimbangkan keterbatasan CPI yang berpotensi melebihkan kenaikan harga akibat perubahan kualitas barang dan jasa (Hornberg, 2024).

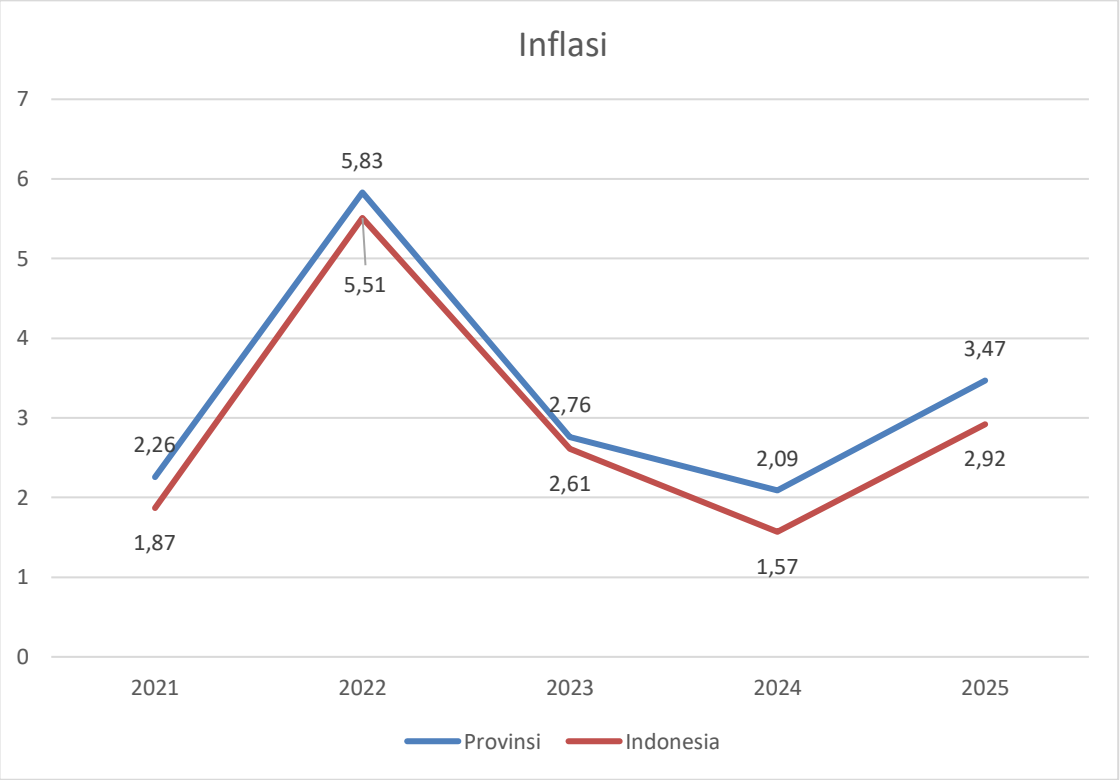

Sumber: BPS dan BPS Provinsi Kepulauan Riau

Gambar 3.9. Laju Inflasi y-on-y Desember Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2021-2025

Laju inflasi Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 tercatat 3,47 persen dan menunjukkan tekanan harga tingkat menengah dibanding provinsi lain wilayah Sumatera maupun nasional. Capaian tersebut berada di atas inflasi nasional 2,92 persen serta lebih tinggi dibanding Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, dan Lampung yang mencerminkan stabilitas harga relatif lebih baik. Posisi Kepulauan Riau masih lebih terkendali dibanding Aceh, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Utara, serta Jambi yang mengalami tekanan harga lebih kuat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa dinamika inflasi Kepulauan Riau dipengaruhi keseimbangan permintaan dan pasokan yang belum sepenuhnya optimal, namun belum mencapai

tingkat yang berisiko tinggi. Perbandingan tersebut menempatkan Kepulauan Riau kelompok menengah atas inflasi regional dan menunjukkan perlunya penguatan pengendalian harga pangan, distribusi logistik, serta stabilisasi pasokan agar laju inflasi lebih selaras sasaran nasional.

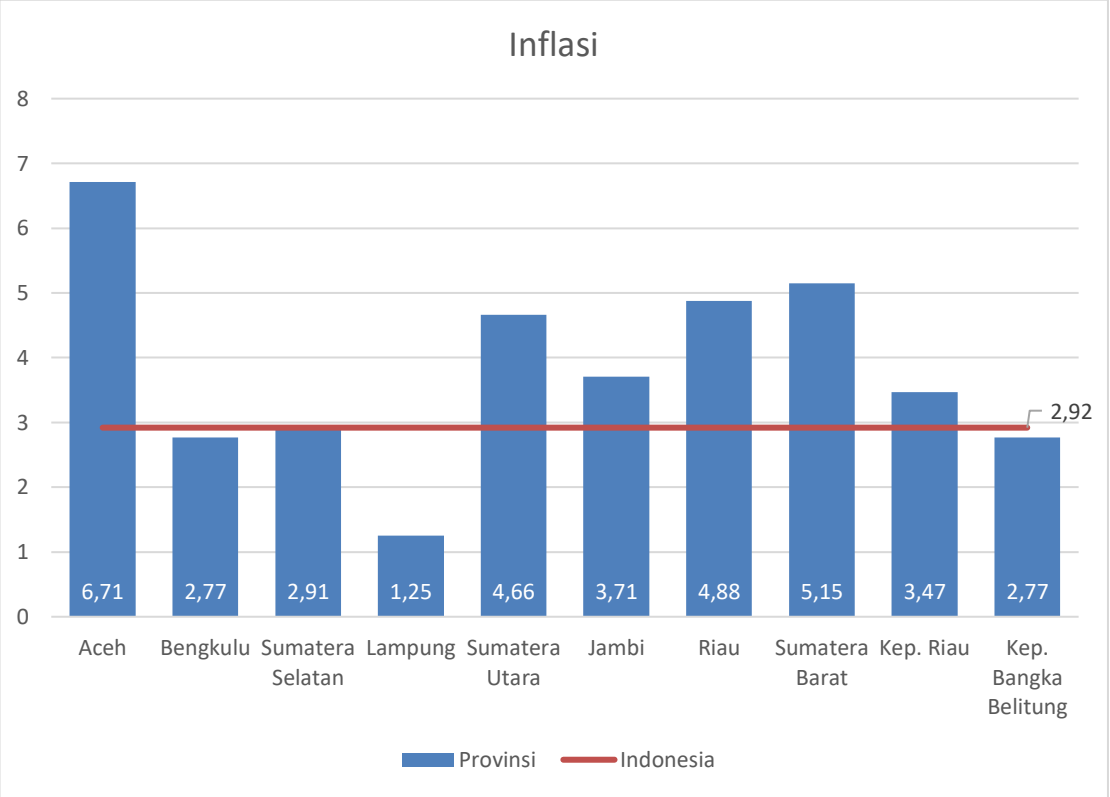

Sumber: BPS dan BPS Provinsi Kepulauan Riau

Gambar 3.10. Posisi Relatif Laju Inflasi y-on-y Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Lain di Wilayah Sumatera dan Nasional Tahun 2025

4. Persentase Penduduk Miskin

Persentase penduduk miskin merupakan indikator utama kesejahteraan masyarakat yang menggambarkan proporsi penduduk yang memiliki tingkat pengeluaran berada di bawah garis kemiskinan. Indikator ini mencerminkan kemampuan dasar masyarakat memenuhi kebutuhan hidup layak sekaligus menunjukkan efektivitas kebijakan pembangunan sosial dan ekonomi. Perubahan persentase penduduk miskin tidak hanya dipengaruhi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga stabilitas harga, kesempatan kerja, serta efektivitas perlindungan sosial. Tren penurunan indikator ini umumnya menunjukkan perbaikan kondisi kesejahteraan,

sedangkan peningkatan mencerminkan tekanan ekonomi yang dirasakan kelompok rentan.

Persentase penduduk miskin Provinsi Kepulauan Riau periode 2021–2025 menunjukkan tren penurunan yang konsisten dan cukup signifikan. Tahun 2021 tercatat 6,12 persen lalu sempat meningkat tipis 6,24 persen tahun 2022, sebelum bergerak menurun berkelanjutan hingga mencapai 4,44 persen tahun 2025. Pergerakan tersebut mencerminkan pemulihan kesejahteraan masyarakat setelah tekanan ekonomi awal periode, sekaligus menunjukkan efektivitas pertumbuhan ekonomi dan program penanggulangan kemiskinan. Penurunan 1,68 poin persentase sepanjang 2021–2025 menandakan perbaikan kondisi sosial ekonomi yang relatif kuat.

Perbandingan tingkat nasional memperlihatkan pola penurunan serupa namun pada level yang jauh lebih tinggi. Persentase penduduk miskin Indonesia turun 10,14 persen tahun 2021 menuju 8,47 persen tahun 2025 atau berkurang 1,67 poin persentase. Selisih tingkat kemiskinan antara Kepulauan Riau dan nasional tetap lebar sepanjang periode analisis, menandakan posisi Kepulauan Riau berada jauh lebih baik dibanding rata-rata nasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perbaikan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Riau tidak hanya bersifat absolut, tetapi juga relatif lebih cepat dan lebih efektif dibanding tren nasional.

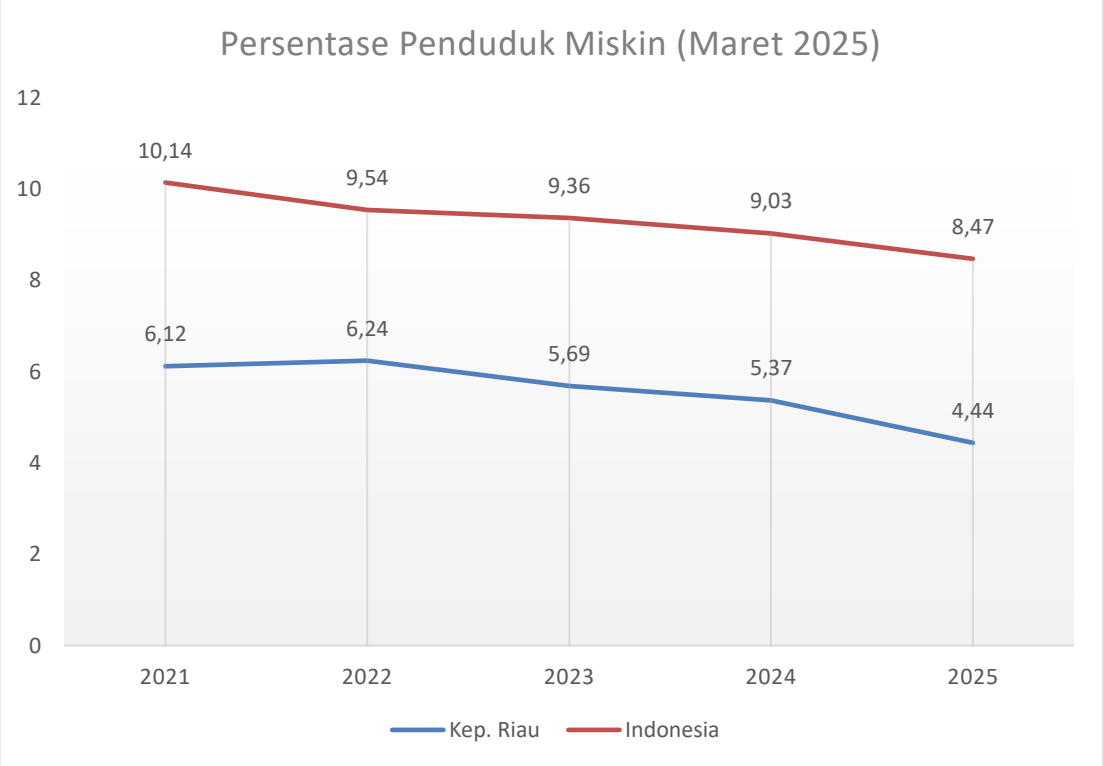

Sumber: BPS dan BPS Provinsi Kepulauan Riau

Gambar 3.11. Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2021-2025

Persentase penduduk miskin tahun 2025 wilayah Sumatera menunjukkan variasi tingkat kesejahteraan antar provinsi. Aceh dan Bengkulu mencatat persentase tertinggi 12,33 persen dan 12,08 persen, berada cukup jauh di atas rata-rata nasional 8,47 persen dan mencerminkan tantangan kesejahteraan yang masih perlu mendapat perhatian serius. Sumatera Selatan serta Lampung berada kisaran 10 persen dan masih berada di atas capaian nasional, menandakan tekanan sosial ekonomi yang relatif lebih besar. Sumatera Utara serta Jambi mencatat 7,36 persen dan 7,19 persen dan menunjukkan kondisi yang lebih baik dibanding rata-rata nasional. Riau, Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, serta Kepulauan Riau mencatat persentase penduduk miskin lebih rendah dibanding nasional, dengan Kepulauan Riau berada posisi terendah 4,44 persen. Gambaran tersebut menunjukkan adanya perbedaan capaian kesejahteraan antarwilayah, sementara Kepulauan Riau menampilkan kinerja yang relatif lebih baik dalam upaya penurunan kemiskinan.

Sumber: BPS dan BPS Provinsi Kepulauan Riau

Gambar 3.12. Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Lain di Wilayah Sumatera dan Nasional Tahun 2025

5. Indeks Gini

Indeks Gini merupakan indikator kuantitatif yang menggambarkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan dalam suatu wilayah dan secara luas digunakan sebagai parameter evaluasi kesejahteraan masyarakat (Giorgi & Giglierano, 2017). Secara konseptual perlu ditegaskan bahwa semakin besar nilai Indeks Gini, semakin tinggi tingkat ketimpangan, yang berarti kinerja pemerataan pendapatan semakin kurang baik. Sebaliknya, penurunan nilai indeks mencerminkan distribusi pendapatan yang semakin merata. Indeks Gini merupakan indikator yang menggambarkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan dalam suatu wilayah. Semakin besar nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan yang terjadi dan semakin rendah capaian pemerataan kesejahteraan. Sebaliknya, nilai yang lebih kecil menunjukkan distribusi pendapatan yang lebih merata. Analisis trend dan posisi relatif penting untuk menilai kualitas pertumbuhan ekonomi daerah.

Perkembangan Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau periode 2021–2025 menunjukkan dinamika yang fluktuatif. Nilai tercatat 0,343 tahun 2021, menurun

tipis menjadi 0,340 tahun 2023, kemudian meningkat menjadi 0,349 tahun 2024 dan naik cukup tajam menjadi 0,382 tahun 2025. Kenaikan signifikan pada akhir periode menunjukkan pelebaran ketimpangan pendapatan dan penurunan kualitas pemerataan. Tren nasional bergerak relatif lebih stabil, yakni 0,384 tahun 2021 menjadi 0,375 tahun 2025. Posisi tahun 2025 menempatkan Kepulauan Riau sedikit lebih tinggi dibanding nasional, yang berarti tingkat ketimpangan daerah berada di atas rata-rata Indonesia.

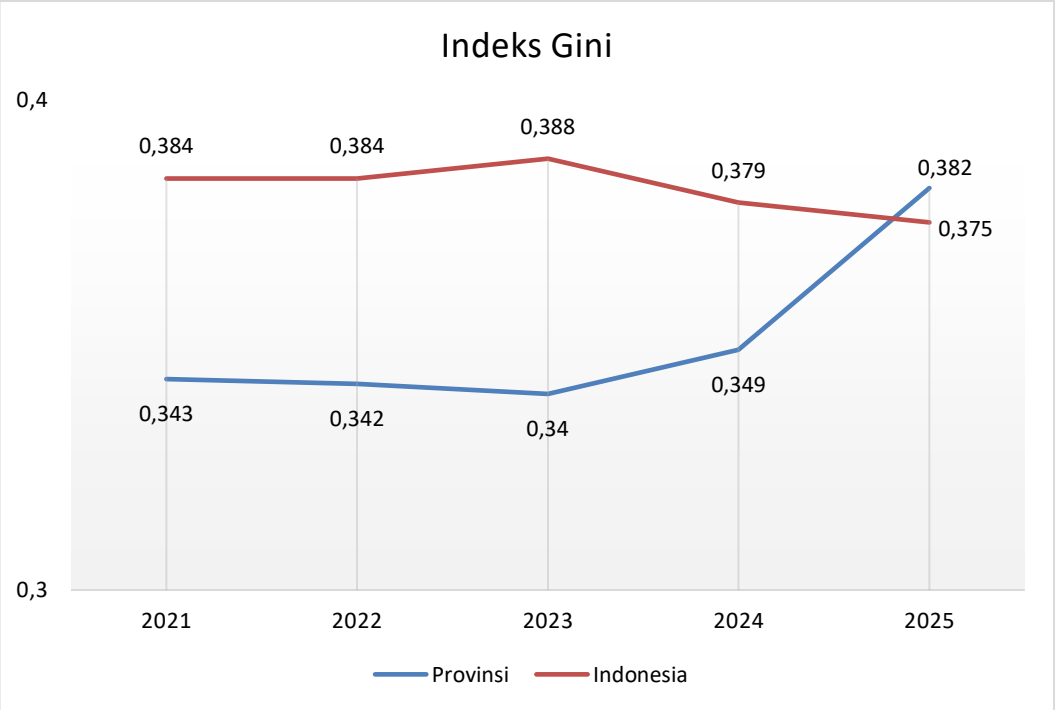

Sumber: BPS dan BPS Provinsi Kepulauan Riau

Gambar 3.13. Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2021-2025

Perbandingan antar provinsi di Sumatera tahun 2025 memperlihatkan variasi yang cukup lebar. Nilai terendah dicatat Kepulauan Bangka Belitung sebesar 0,199, diikuti Aceh dan Sumatera Selatan sebesar 0,224. Kelompok menengah berada pada kisaran 0,228–0,275 yang dihuni Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, dan Lampung. Kepulauan Riau mencatat nilai tertinggi sebesar 0,382 dan melampaui rata-rata nasional 0,375. Posisi tersebut menunjukkan ketimpangan pendapatan di Kepulauan Riau paling tinggi di Sumatera pada tahun 2025. Kondisi ini dapat dipengaruhi struktur ekonomi yang bertumpu pada sektor bernilai tambah tinggi dan terkonsentrasi pada wilayah tertentu, sehingga distribusi pendapatan antarwilayah dan antarkelompok belum merata. Pertumbuhan ekonomi yang kuat

belum sepenuhnya diikuti pemerataan hasil pembangunan. Penguatan kebijakan inklusif, perluasan akses kesempatan kerja, serta pengembangan ekonomi berbasis masyarakat menjadi langkah strategis guna menurunkan ketimpangan pada periode berikutnya.

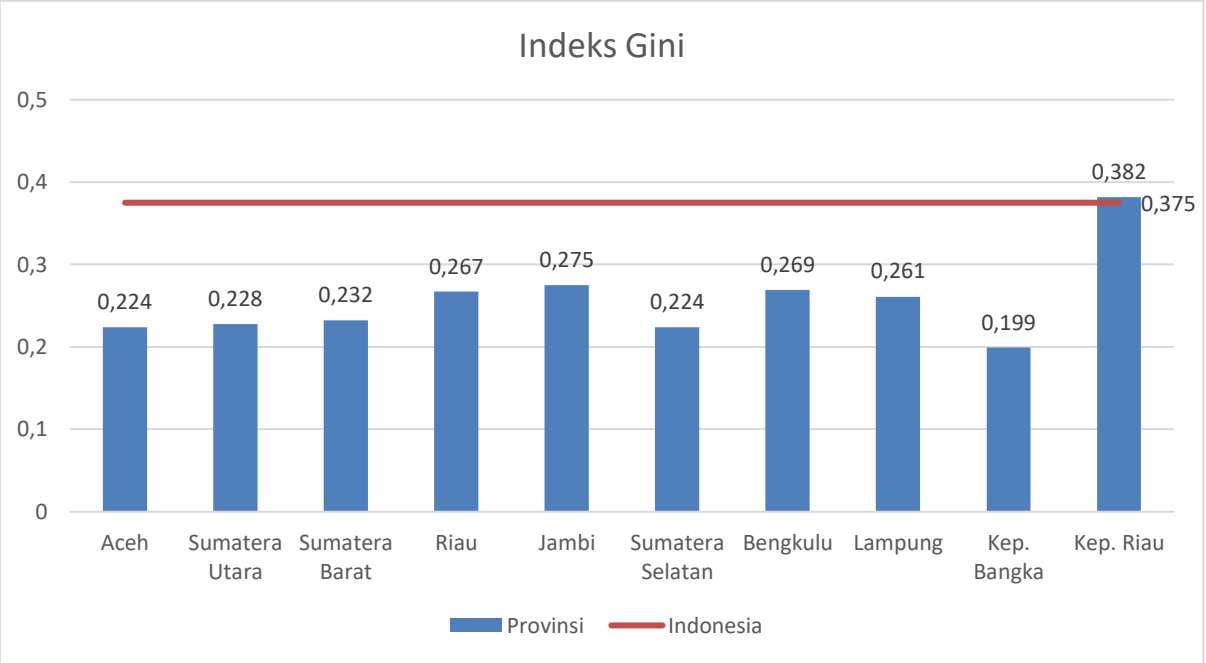

Sumber: BPS dan BPS Provinsi Kepulauan Riau

Gambar 3.14. Posisi Relatif Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Lain di Wilayah Sumatera dan Nasional Tahun 2025

6. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit yang digunakan untuk menggambarkan capaian pembangunan kualitas manusia melalui tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, serta standar hidup layak. IPM memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai keberhasilan pembangunan dibanding indikator ekonomi semata, karena menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan. Peningkatan nilai IPM mencerminkan membaiknya kualitas hidup penduduk, akses layanan dasar yang lebih luas, serta meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dalam mendorong pembangunan berkelanjutan.

IPM Provinsi Kepulauan Riau periode 2021–2025 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dan cukup kuat. Nilai IPM meningkat dari 77,87 tahun 2021 menjadi 80,53 tahun 2025, atau bertambah 2,66 poin dalam lima tahun, yang

menandakan perbaikan berkelanjutan kualitas hidup masyarakat. Capaian tersebut menempatkan Kepulauan Riau pada kategori IPM tinggi dan berada di atas rata-rata nasional sepanjang periode analisis. IPM nasional juga menunjukkan tren meningkat, dari 73,16 tahun 2021 menjadi 75,90 tahun 2025, dengan kenaikan 2,74 poin. Perbandingan kedua capaian menunjukkan bahwa Kepulauan Riau secara konsisten mempertahankan posisi lebih baik dibanding nasional, mencerminkan efektivitas pembangunan manusia daerah yang relatif lebih maju, sekaligus menjadi modal penting dalam mendukung daya saing dan kesejahteraan masyarakat jangka menengah.

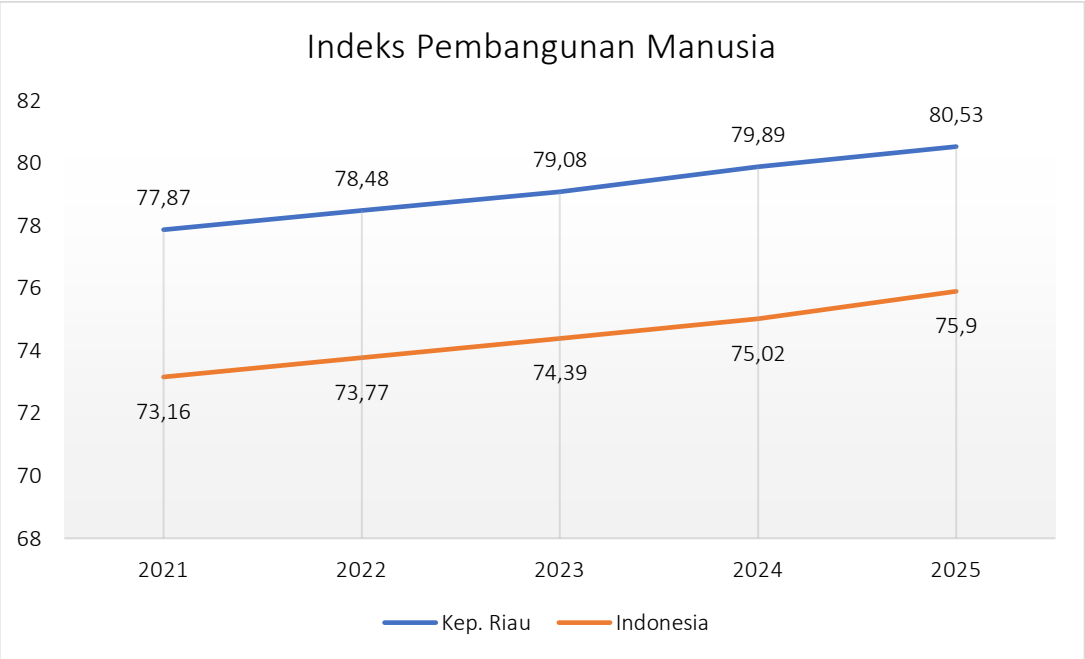

Sumber: BPS dan BPS Provinsi Kepulauan Riau

Gambar 3.15. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2021-2025

Indeks Pembangunan Manusia tahun 2025 wilayah Sumatera menunjukkan capaian yang relatif baik dan umumnya berada di atas rata-rata nasional. Nilai IPM nasional berada angka 75,90, sementara sebagian besar provinsi Sumatera telah mencapai kategori IPM tinggi. Sumatera Barat menempati posisi tertinggi 77,27 dan menunjukkan kualitas pembangunan manusia paling menonjol wilayah Sumatera. Sumatera Utara, Riau, serta Kepulauan Riau berada kisaran 76,31–80,53 dan menunjukkan capaian yang melampaui rata-rata nasional. Aceh serta Bengkulu

menunjukkan kinerja yang masih sejalan kelompok menengah atas wilayah Sumatera. Sumatera Selatan, Lampung, serta Kepulauan Bangka Belitung berada tingkat lebih rendah namun tetap termasuk kategori IPM tinggi, sehingga secara umum pembangunan manusia wilayah Sumatera memperlihatkan kemajuan yang relatif merata.

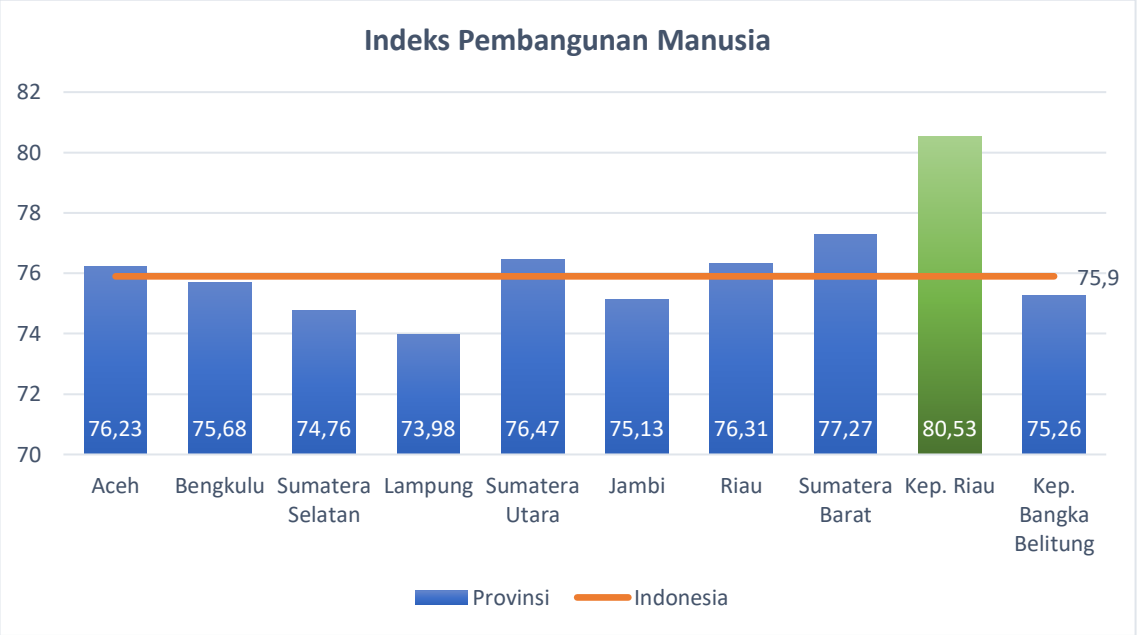

Sumber: BPS dan BPS Provinsi Kepulauan Riau

Gambar 3.16. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Lain di Wilayah Sumatera dan Nasional Tahun 2025

3.1.2. Capaian Kinerja Indikator Tujuan dan Sasaran RPJMD

Pencapaian tujuan serta sasaran RPJMD Tahun 2025 dinilai melalui 42 indikator yang mencakup 8 indikator tujuan serta 34 indikator sasaran. Sebanyak 38 indikator tercatat berada pada kategori capaian sangat tinggi, sebanyak 4 indikator dengan status Tinggi. Kondisi ini mencerminkan kinerja pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025 secara umum berada pada tingkat yang baik. Rincian capaian masing-masing indikator tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 3.3.
Pencapaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian Target	Status Capaian	Instansi/ Perangkat Daerah
1	Mewujudkan perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan		Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,24-7,14	6,94	100,00	ST	BPS
			Rasio Gini (Indeks)	0,370-0,382	0,382	100,00	ST	BPS
			Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (Rp Juta)	170,63-179,20	172,46	100,00	ST	BPS
		Meningkatnya kinerja pariwisata berkelas dunia dan ekonomi kreatif	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	2,00	1,83	91,50	ST	Dinas Pariwisata
		Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Koperasi	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,420	0,4411	105,02	ST	Dinkop UKM
		Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	41,22-41,70	41,57	100,00	ST	Disperindag
			Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	71,28	106,9	149,97	ST	Disperindag
		Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang berkompetensi dan berdaya saing	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,89-6,31	6,45	93,61	ST	BPS
		Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan,	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (BEI) (Indeks)	38,54	44,60	115,72	ST	DKP
			Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)	66,79	73,21	109,61	ST	DKP2KH

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian Target	Status Capaian	Instansi/ Perangkat Daerah
		dan ketahanan pangan						
		Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) (%)	44,56	44,38	99,60	ST	DPMPTSP
		Menurunnya tingkat kemiskinan	Tingkat Kemiskinan (%)	4,48-4,28	4,44	99,11	ST	BPS
2	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur Kewilayahan yang terintegrasi, strategis dan memiliki daya ungkit		Indeks Infrastruktur (Indeks)	64,30	64,22	99,88	ST	DPUPR, Disperkim Dinas ESDM, Diskominfo
		Meningkatnya kualitas infrastruktur publik	Indeks Kualitas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman (%)	51,44	44,45	86,41	T	DPUPR dan Disperkim
			Konsumsi Listrik per Kapita (Kwh/Kapita)	2.947	3.046	103,36	ST	Dinas ESDM
		Meningkatnya konektivitas transportasi publik	Rasio Konektivitas (Rasio)	0,69	0,69	100,00	ST	Dishub

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian Target	Status Capaian	Instansi/ Perangkat Daerah
3	Menciptakan Sumber Daya Manusia yang Unggul		Indeks Modal Manusia (Indeks)	0,60-0,62	0,59**)	98,33	ST	BPS
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))	75,32	75,46	100,19	ST	BPS
			Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))	14,80	15	98,65	ST	Dinkes
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun ((tahun))	10,90	10,78	98,90	ST	Disdik
			Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,28	13,28	100,00	ST	Disdik
		Meningkatnya kualitas dan perlindungan perempuan dan anak	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)	0,331-0,328	0,309	105,79	ST	BPS
			Indeks Perlindungan Anak (IPA) (Indeks)	70,28	74,1	105,44	ST	DP3AP2KB
		Meningkatnya Kualitas Pembangunan Pemuda dan Olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) (Indeks)	71,35	68,73	96,33	ST	Dispora
			Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) (Indeks)	0,354	0,319	90,11	T	Dispora
4	Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang berbasis digital		Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	A-	A- (83,24)	100,00	ST	Biro Organisasi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian Target	Status Capaian	Instansi/ Perangkat Daerah
		Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat	Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	4,27	4,48	104,92	ST	Biro Organisasi
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Indeks)	61,31	68,91	112,40	ST	Satpol PP Golkar
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan, Kapasitas Keuangan Daerah dan Kualitas Pengawasan serta Daya Saing Daerah	Predikat SAKIP (Predikat)	BB (78,37)	BB (78.35)	99,97	ST	Biro Organisasi
			Opini BPK atas Laporan Keuangan (Opini)	WTP	WTP*)	100,00	ST	BKAD
			Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah (%) (%)	46,32	47,02	101,51	ST	Bapenda
			Level Maturitas SPIP (Level)	Level 3	Level 2	86,72	T	Inspektorat
			Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) (Indeks)	3,40	3,38*)	99,41	ST	Bappeda
		Meningkatnya Kualitas dan Kinerja ASN	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	81,65	83,4	102,14	ST	BKD dan Korpri
		Meningkatnya Transformasi Digital Daerah	Indeks Transformasi Digital Nasional (IPDN) (Indeks)	50,80	55,93*)	110,10	ST	Diskominfo
		Meningkatnya Perkembangan Demokrasi Pemerintahan	Indeks Demokrasi Provinsi (Indeks)	77,67	80,83	104,07	ST	Bakesbangpol

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian Target	Status Capaian	Instansi/ Perangkat Daerah
5	Meningkatkan kehidupan beragama maslahat dan berkebudayaan maju		Indeks Harmoni (Indeks)	Baik	7,07 (Sangat Baik)	133,33	ST	Bakesbangpol
		Meningkatnya Penguatan Pemajuan Kebudayaan Melayu	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) ((%))	61,07	60,34*)	98,80	ST	Disbud
		Meningkatnya toleransi kerukunan umat beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (Indeks)	84,32-84,46	83,68	99,24	ST	Biro Kesejahteraan Rakyat
6	Mewujudkan lingkungan hidup yang lestari dan memberikan nilai tambah sosial ekonomi masyarakat serta ketahanan daerah		Indeks Ekonomi Hijau Daerah (Indeks)	49,18	64,47	131,09	ST	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Indeks)	75,46	77,62	102,86	ST	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian Target	Status Capaian	Instansi/ Perangkat Daerah
		Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Risiko Bencana (Indeks)	109,00	132,68	82,15	T	BPBD

Keterangan: *) Menggunakan data tahun 2024, karena data tahun 2025 belum dirilis.
NA = not available (data tidak tersedia karena belum dirilis oleh lembaga terkait).

Keterangan Status Kinerja:

≤ 50% : Sangat Rendah 51% ≤ 65% : Rendah 66% ≤ 75% : Sedang 76% ≤ 90% : Tinggi 91% ≤ 100% : Sangat tinggi

3.2. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan

3.2.1. Urusan Pendidikan

Urusan Pendidikan Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Pelaksanaan urusan tersebut didukung alokasi anggaran sebesar Rp1.031.118.270.120,30, sementara realisasi anggaran sampai akhir tahun 2025 mencapai Rp1.015.880.356.358,38 atau setara 98,52 persen, yang mencerminkan tingkat pelaksanaan program dan kegiatan yang sangat optimal. Kinerja program menunjukkan dari sebanyak 14 indikator program telah ditetapkan dan 11 di antaranya termasuk dalam kategori Sangat Tinggi, 2 indikator kategori Tinggi, dan 1 indikator kategori Sedang.

Berdasarkan dokumen perencanaan dan penganggaran, indikator kegiatan sama dengan indikator sub kegiatan, sehingga dalam dokumen LKPJ ini hanya disajikan indikator sub kegiatan. Terlihat dari sebanyak 141 indikator sub kegiatan, semuanya sebanyak 116 indikator sub kegiatan telah mencapai target kinerja yang ditetapkan dengan status sangat tinggi, sebanyak 1 indikator memiliki kinerja tinggi, sebanyak 1 indikator memiliki kinerja sedang, sebanyak 23 memiliki status kinerja sangat rendah. Secara umum kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam dokumen penganggaran dan perjanjian kinerja tergolong baik.

Uraian lebih rinci mengenai capaian kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan, berikut permasalahan yang dihadapi, upaya penanganan, serta tindak lanjut rekomendasi DPRD pada Urusan Pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.2.1.
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Pendidikan yang Dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Status				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							**1.031.118.270.120,30**	**1.015.880.356.358,38**	**98,52**			
Dinas Pendidikan							**1.029.314.069.493,50**	**1.014.424.792.559,52**	**98,55**			
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							**663.646.811.326,71**	**667.003.508.042,63**	**100,51**			
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan	**Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah**	**Indeks**	**80,46**	**84,57**	**105,11**	**ST**						
	Indeks Kepuasan Masyarakat	**Indeks**	**86**	**86,8**	**100,93**	**ST**						
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	**Predikat**	**BB**	**BB**	**100,00**	**ST**						
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							**443.715.770,00**	**381.167.874,00**	**85,90**			
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	100,00	ST	338.684.000,00	321.589.829,00	94,95			
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	100,00	ST	27.116.770,00	5.921.245,00	21,84	Efisiensi belanja		
3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	100,00	ST	72.915.000,00	53.656.800,00	73,59	Efisiensi belanja		
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	100,00	ST	5.000.000,00	0	0,00	Efisiensi belanja		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Status				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							**639.352.586.087,78**	**630.364.320.206,00**	**98,59**			
5. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	4206	4206	100,00	ST	635.400.465.377,78	626.966.334.306,00	98,67			
6. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	100,00	ST	3.849.566.710,00	3.322.446.000,00	86,31			
7. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	1	100,00	ST	89.054.000,00	75.539.900,00	84,82			
8. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	1	100,00	ST	13.500.000,00		0,00	Efisiensi belanja		
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							**50.764.000,00**	**42.417.711,00**	**83,56**			
9. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	100,00	ST	25.315.000,00	18.277.433,00	72,20	Efisiensi belanja		
10. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	100,00	ST	25.449.000,00	24.140.278,00	94,86			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							**762.430.399,91**	**679.685.538,00**	**89,15**			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Status				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
11. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	1	100,00	ST	465.670.699,91	420.511.538,00	90,30			
12. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	25	25	100,00	ST	296.759.700,00	259.174.000,00	87,33			
Administrasi Umum Perangkat Daerah							**2.195.623.723,72**	**1.658.738.837,00**	**75,55**			
13. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	100,00	ST	50.475.600,00	50.090.600,00	99,24			
14. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	6	100,00	ST	232.248.550,72	145.907.840,00	62,82	Tunda Bayar		
15. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	4	100,00	ST	29.999.000,00	29.386.473,00	97,96			
16. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	100,00	ST	279.366.900,00	252.982.633,00	90,56			
17. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	45.886.500,00	42.520.232,00	92,66			
18. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	2	100,00	ST	60.520.000,00	41.916.000,00	69,26			
19. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	4	100,00	ST	92.499.400,00	78.850.390,00	85,24			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Status				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
20. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	4	100,00	ST	1.323.222.673,00	952.351.009,00	71,97	Efisiensi belanja		
21. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	4	100,00	ST	81.405.100,00	64.733.660,00	79,52			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							**1.636.377.896,00**	**1.140.441.156,00**	**69,69**			
22. Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	2	2	100,00	ST	124.887.867,00	85.692.000,00	68,62	Tunda Bayar		
23. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	8	8	100,00	ST	1.006.821.779,00	597.867.230,00	59,38	Tunda Bayar		
24. Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	0	SR	33.000.000,00	0,00	0,00	Efisiensi belanja		
25. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	8	8	100,00	ST	471.668.250,00	456.881.926,00	96,87	Tunda Bayar		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**9.332.313.943,30**	**8.734.738.215,00**	**93,60**			
26. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	100,00	ST	5.000.000,00	2.000.000,00	40,00			
27. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	4	100,00	ST	2.021.499.300,00	1.553.369.345,00	76,84	Tunda Bayar		
28. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	4	100,00	ST	245.617.000,00	217.336.180,00	88,49	Tunda Bayar		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Status				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
29. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	4	100,00	ST	7.060.197.643,30	6.962.032.690,00	98,61			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**2.600.123.400,00**	**2.216.071.611,00**	**85,23**			
30. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	15	15	100,00	ST	735.910.530,00	598.480.816,00	81,33	Tunda Bayar		
31. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100,00	ST	538.250.000,00	535.251.957,00	99,44			
32. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100,00	ST	1.325.962.870,00	1.082.338.838,00	81,63	Tunda Bayar		
Peningkatan Pelayanan BLUD							**7.272.876.106,00**	**21.727.588.094,63**	298,75			
33. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	5	5	100,00	ST	7.272.876.106,00	21.727.588.094,63	298,75			
BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN (BTIKP)							**1.486.232.818,80**	**1.300.289.250,86**	**87,49**			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							**1.302.192.718,80**	**1.145.607.990,86**	**87,98**			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Status				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Administrasi Umum Perangkat Daerah							**396.097.828,80**	**317.956.614,00**	**80,27**			
34. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	5.000.000,00	4.271.058,00	85,42			
35. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	188.968.300,00	141.267.493,00	74,76	Efisiensi belanja		
36. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	10.000.000,00	6.062.043,00	60,62	Efisiensi belanja		
37. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	5	100,00	ST	112.062.100,00	101.985.110,00	91,01			
38. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	19.193.000,00	19.052.373,00	99,27			
39. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	100,00	ST	5.416.500,00	-	0,00	Efisiensi belanja		
40. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	100,00	ST	55.457.928,80	45.318.537,00	81,72			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**842.075.040,00**	**763.631.527,00**	**90,68**			
41. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	100,00	ST	1.456.000,00	1.400.000,00	96,15			
42. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Laporan	1	1	100,00	ST	117.120.000,00	82.404.179,00	70,36	Efisiensi belanja		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Status				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
	Daya Air dan Listrik yang Disediakan											
43. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	50.000.000,00	44.977.200,00	89,95			
44. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	673.499.040,00	634.850.148,00	94,26			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**64.019.850,00**	**64.019.849,86**	**100,00**			
45. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100,00	ST	64.019.850,00	64.019.849,86	100,00			
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							**184.040.100,00**	**154.681.260,00**	84,05			
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas							**184.040.100,00**	**154.681.260,00**	**84,05**			
46. Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah di kembangkan	Konten	1	1	100,00	ST	58.608.100,00	44.719.310,00	76,30			
47. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang	90	90	100,00	ST	125.432.000,00	109.961.950,00	87,67			
CABANG DINAS BATAM												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN							**70.658.108,00**	**63.868.551,00**	90,39			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Status				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI												
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							**4.500.000,00**	**4.500.000,00**	100,00			
48. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	1	100,00	ST	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00			
Administrasi Umum Perangkat Daerah							**42.300.608,00**	**41.169.960,00**	**97,33**			
49. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	1.501.200,00	1.439.400,00	**95,88**			
50. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3	3	100,00	ST	3.008.100,00	2.965.000,00	**98,57**			
51. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	100,00	ST	11.815.608,00	11.625.200,00	**98,39**			
52. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	100,00	ST	7.206.900,00	6.802.900,00	**94,39**			
53. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	100,00	ST	4.658.800,00	4.576.460,00	**98,23**			
54. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	100,00	ST	14.110.000,00	13.761.000,00	**97,53**			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**23.857.500,00**	**18.198.591,00**	**76,28**			
55. Penyediaan Jasa Komunikasi,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	Laporan	1	1	100,00	ST	18.607.500,00	12.958.591,00	**69,64**			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Status				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Sumber Daya Air dan Listrik	Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan											
56. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	5.250.000,00	5.240.000,00	**99,81**			
CABANG DINAS KARIMUN												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							**66.177.200,00**	**27.599.000,00**	**41,70**			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							**6.610.400,00**	**264.000,00**	**3,99**			
57. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	1	100,00	ST	6.610.400,00	264.000,00	**3,99**	Efisiensi belanja		
Administrasi Umum Perangkat Daerah							**45.976.800,00**	**19.576.000,00**	**42,58**			
58. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	588.900,00	576.000,00	97,81			
59. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	2	100,00	ST	501.100,00	463.000,00	92,40			
60. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	4	66,67	S	15.994.795,00	6.654.800,00	41,61	Efisiensi belanja		
61. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	0	0	SR	1.497.805,00	-	0,00	Efisiensi belanja		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Status				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
62. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	100,00	ST	2.108.000,00	-	0,00	Efisiensi belanja		
63. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	100,00	ST	25.286.200,00	11.882.200,00	46,99	Efisiensi belanja		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**13.590.000,00**	**7.759.000,00**	**57,09**			
64. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	11.400.000,00	7.759.000,00	68,06	Efisiensi belanja		
65. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	0	0	SR	2.190.000,00	-	0,00	Efisiensi belanja		
CABANG DINAS LINGGA												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							**61.460.000,00**	**32.131.000,00**	**52,28**			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							**9.120.000,00**	**5.310.000,00**	**58,22**			
66. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	1	100,00	ST	9.120.000,00	5.310.000,00	58,22	Efisiensi belanja		
Administrasi Umum Perangkat Daerah							**37.160.000,00**	**26.521.400,00**	71,37			
67. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Paket	1	0	0	SR	949.200,00	-	0,00	Efisiensi belanja		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Status				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
	Bangunan Kantor yang Disediakan											
68. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3	0	0	SR	1.916.000,00	-	0,00	Efisiensi belanja		
69. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	0	0	SR	2.673.100,00	-	0,00	Efisiensi belanja		
70. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	Paket	2	0	0	SR	1.779.300,00	-	0,00	Efisiensi belanja		
71. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	100,00	ST	2.822.400,00	2.288.000,00	81,07			
72. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	100,00	ST	27.020.000,00	24.233.400,00	89,69			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**15.180.000,00**	**299.600,00**	**1,97**			
73. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	12.990.000,00	299.600,00	2,31	Efisiensi belanja		
74. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	0	0	SR	2.190.000,00	-	0,00	Efisiensi belanja		
CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NATUNA												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							**61.798.500,00**	**21.797.597,00**	35,27			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Status				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							**14.400.000,00**	**8.720.000,00**	60,56			
75. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	1	100,00	ST	14.400.000,00	8.720.000,00	60,56	Efisiensi belanja		
Administrasi Umum Perangkat Daerah							**32.922.700,00**	**10.467.500,00**	31,79			
76. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	SR	1.045.000,00	-	0,00	Efisiensi belanja		
77. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	0	0	SR	1.295.800,00	-	0,00	Efisiensi belanja		
78. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	0	0	SR	3.008.600,00	-	0,00	Efisiensi belanja		
79. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	0	0	SR	2.438.100,00	-	0,00	Efisiensi belanja		
80. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	0	0	SR	2.314.200,00		0,00	Efisiensi belanja		
81. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	100,00	ST	22.821.000,00	10.467.500,00	45,87	Efisiensi belanja		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**14.475.800,00**	**2.610.097,00**	18,03			
82. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	12.285.800,00	2.610.097,00	21,24	Efisiensi belanja		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Status				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
83. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	0	0	SR	2.190.000,00	-	0,00	Efisiensi belanja		
CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							**57.874.000,00**	**9.878.400,00**	**17,07**			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							**15.000.000,00**	**0,00**	0,00			
84. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	0	0	SR	15.000.000,00	-	0,00	Efisiensi Anggaran		
Administrasi Umum Perangkat Daerah							**34.444.000,00**	**9.878.400,00**	**28,68**			
85. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	SR	673.800,00	-	0,00	Efisiensi Anggaran		
86. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3	0	0	SR	1.218.300,00	-	0,00	Efisiensi Anggaran		
87. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	0	0	SR	2.837.300,00	-	0,00	Efisiensi Anggaran		
88. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	0	0	SR	2.252.200,00	-	0,00	Efisiensi Anggaran		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Status				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
89. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	0	0	SR	686.400,00	-	0,00	Efisiensi Anggaran		
90. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	100,00	ST	26.776.000,00	9.878.400,00	36,89	Efisiensi Anggaran		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**8.430.000,00**	**0,00**	**0,00**			
91. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	0	0	SR	6.240.000,00	-	0,00	Pengajuan TU tidak keluar		
92. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	0	0	SR	2.190.000,00	-	0,00	Efisiensi Anggaran		
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							**365.322.687.666,79**	**347.171.060.242,89**	**95,03**			
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	**Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK**	**%**	**100**	**91,61**	**91,61**	**ST**						
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	**%**	**100**	**126,28**	**126,28**	**ST**						
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK	**%**	**88,44**	**76,12**	**86,07**	**T**						
	Angka Putus Sekolah SMA/SMK/SLB	**%**	**0,013**	**0,035**	**69,23**	**S**						
	Rasio peserta didik per kelas (Rasio)	**%**	**36**	**31**	**113,89**	**ST**						
	Persentase Konten Pendidikan	**%**	**20**	**20**	**100,00**	**ST**						
	Rata Rata Kemampuan Literasi Siswa	**Nilai**	**65,23**	**63,6**	**97,50**	**ST**						
	Rata Rata Kemampuan Numerasi Siswa	**Nilai**	**60,84**	**56,38**	**92,67**	**ST**						

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Status				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas							**197.192.262.277,51**	**188.876.996.872,48**	**95,78**			
93. Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	1	1	100,00	ST	3.100.000.000,00	2.662.002.340,00	85,87	Tunda Bayar		
94. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	10	15	150,00	ST	3.285.673.380,00	2.633.469.700,00	80,15	Tunda Bayar		
95. Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Unit	10	9	90,00	T	1.503.048.000,00	1.224.740.000,00	81,48	Tunda Bayar		
96. Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Unit	1	1	100,00	ST	116.112.001,00	5.850.000,00	5,04	Tunda Bayar		
97. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Unit	17190	16514	96,07	ST	5.935.494.986,20	5.021.283.883,00	84,60			
98. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Unit	4	4	100,00	ST	445.976.000,00	439.530.000,00	98,55			
99. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Orang	2231	3826	171,49	ST	7.007.451.100,00	6.812.574.085,00	97,22			
100. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Orang	84	84	100,00	ST	189.130.000,01	143.366.900,00	75,80	Tunda Bayar		
101. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Orang	1298	1298	100,00	ST	50.078.859.872,30	49.652.091.437,48	99,15			
102. Pengembangan Karir Pendidik	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Orang	100	100	100,00	ST	382.771.000,00	367.602.791,00	96,04			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Status				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi											
103. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	93	93	100,00	ST	199.424.300,00	126.612.400,00	63,49	Tunda Bayar		
104. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	Unit	93	93	100,00	ST	115.202.195.150,00	112.116.262.654,00	97,32			
105. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1	1	100,00	ST	81.836.000,00	8.062.000,00	9,85	Efisiensi Belanja		
106. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	kegiatan	1	1	100,00	ST	123.892.000,00	121.046.333,00	97,70			
107. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Sarana	1	2	200,00	ST	300.000.000,00	120.915.960,00	40,31	Tunda Bayar		
108. Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Unit	20	21	105,00	ST	8.954.742.588,00	7.152.482.449,00	79,87	Tunda Bayar		
109. Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Unit	93	93	100,00	ST	285.655.900,00	269.103.940,00	94,21			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Status				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan							**147.715.209.122,28**	**139.880.776.957,51**	**94,70**			
110. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Unit	2	2	100,00	ST	335.585.000,00	116.036.126,60	34,58	Tunda Bayar		
111. Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	Unit	2	2	100,00	ST	751.648.867,00	741.590.869,77	98,66			
112. Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Unit	3	3	100,00	ST	549.214.106,25	540.493.504,98	98,41			
113. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	1	1	100,00	ST	23.163.426,00	22.696.354,54	97,98			
114. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun		9	9	100,00	ST	3.935.399.009,00	3.340.656.470,31	84,89	Tunda Bayar		
115. Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	Unit	1	1	100,00	ST	195.585.000,00	191.865.417,72	98,10			
116. Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Unit	1	1	100,00	ST	883.585.000,00	607.719.980,00	68,78	Tunda Bayar		
117. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Unit	12500	13122	104,98	ST	4.915.787.000,00	4.601.402.659,00	93,60			
118. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Unit	12	12	100,00	ST	12.303.466.000,00	10.779.788.286,00	87,62	Tunda Bayar		
119. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Orang	380	380	100,00	ST	2.555.015.500,00	2.228.175.500,00	87,21			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Status				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
120. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Orang	100	100	100,00	ST	155.175.970,00	114.930.600,00	74,06			
121. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Orang	833	833	100,00	ST	31.764.237.052,03	31.508.094.258,00	99,19			
122. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	25	25	100,00	ST	401.195.000,00	378.712.028,00	94,40			
123. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	37	37	100,00	ST	37.740.600,00	36.993.398,00	98,02			
124. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	Unit	36	36	100,00	ST	80.601.468.910,00	80.091.960.644,84	99,37			
125. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1	1	100,00	ST	56.290.000,00	9.265.000,00	16,46	Efisiensi Belanja		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Status				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
di Bidang Pendidikan												
126. Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Unit	8	13	162,50	ST	8.080.020.682,00	4.411.854.659,75	54,60	Tunda Bayar		
127. Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Unit	36	36	100,00	ST	170.632.000,00	158.541.200,00	92,91			
Pengelolaan Pendidikan Khusus							**20.415.216.267,00**	**18.413.286.412,90**	**90,19**			
128. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	1	1	100,00	ST	1.400.000.000,00	1.193.765.493,00	85,27	Tunda Bayar		
129. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	6	6	100,00	ST	799.688.340,00	582.451.715,90	72,83	Tunda Bayar		
130. Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Unit	1	1	100,00	ST	200.000.000,00	-	0,00	Tunda Bayar		
131. Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Unit	1	0	0	SR	40.196.671,00	-	0,00	Tidak sesuai juknis SILPA DAK 2024		
132. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Unit	298	298	100,00	ST	1.043.485.000,00	934.966.754,00	89,60			
133. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Orang	50	50	100,00	ST	474.557.320,00	338.993.353,00	71,43			
134. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Khusus	Orang	137	137	100,00	ST	4.639.444.223,00	4.513.273.732,00	97,28			
135. Pengembangan Karir Pendidik	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Orang	136	136	100,00	ST	104.704.000,00	99.615.989,00	95,14			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Status				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi											
136. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	10	10	100,00	ST	291.651.750,00	94.581.191,00	32,43			
137. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	Unit	10	10	100,00	ST	10.344.744.423,00	10.329.652.162,00	99,85			
138. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1	1	100,00	ST	16.376.000,00	2.402.000,00	14,67			
139. Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1	1	100,00	ST	68.519.000,00	59.811.228,00	87,29			
140. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	6	6	100,00	ST	950.000.000,00	228.953.909,00	24,10	Tunda Bayar		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Status				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
141. Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Unit	10	10	100,00	ST	41.849.540,00	34.818.886,00	83,20			
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM							**114.475.500,00**	**70.519.443,00**	**61,60**			
Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	**Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal**	**%**	**6,94**	**6,94**	**100,00**	**ST**	**114.475.500,00**	**70.519.443,00**	**61,60**			
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah							**52.734.500,00**	**11.250.000,00**	**21,33**			
142. Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkat Kompetensinya	Orang	100	100	100,00	ST	52.734.500,00	11.250.000,00	21,33			
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus							**61.741.000,00**	**59.269.443,00**	**96,00**			
143. Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkat Kompetensinya	Orang	50	50	100,00	ST	61.741.000,00	59.269.443,00	96,00			
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN												
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	**Rasio Guru SMA/SMK terhadap Murid Sekolah Menengah (Rasio)**	**Rasio**	**627,99**	**603,49**	**96,10**	**ST**	**187.656.000,00**	**153.676.514,00**	**81,89**			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Status				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi							**187.656.000,00**	**153.676.514,00**	**81,89**			
144. Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Dokumen	4	4	100,00	ST	91.218.000,00	89.034.905,00	97,61			
145. Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Laporan	4	4	100,00	ST	96.438.000,00	64.641.609,00	67,03	Tunda Bayar		
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN							**42.439.000,00**	**26.028.317,00**	**61,33**			
Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	**Persentase SMA/SMK/SLB Swasta yang Memperoleh Izin**	**%**	**100**	**100**	**100,00**	**ST**	**42.439.000,00**	**26.028.317,00**	**61,33**			
Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat							**27.055.000,00**	**14.970.000,00**	**55,33**			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Status				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
146. Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	2	2	100,00	ST	27.055.000,00	14.970.000,00	55,33			
Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat							**15.384.000,00**	**11.058.317,00**	**71,88**			
147. Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	1	100,00	ST	15.384.000,00	11.058.317,00	71,88			

3.2.2a. Urusan Kesehatan

Urusan Kesehatan Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kepulauan Riau didukung alokasi anggaran sebesar Rp97.023.121.254,54, sementara realisasi anggaran sampai akhir tahun 2025 mencapai Rp90.082.755.763,25 atau setara 92,85 persen, yang mencerminkan tingkat pelaksanaan anggaran program dan kegiatan yang sangat optimal. Kinerja program menunjukkan 22 indikator program telah ditetapkan dan 19 diantaranya termasuk dalam kategori Sangat Tinggi, 2 indikator kategori Tinggi dan 1 Indikator kategori Rendah.

Berdasarkan dokumen perencanaan dan penganggaran, indikator kegiatan sama dengan indikator sub kegiatan, sehingga dalam dokumen LKPJ ini hanya disajikan indikator sub kegiatan. Terlihat dari sebanyak 72 indikator sub kegiatan, semuanya sebanyak 69 indikator telah mencapai target kinerja yang ditetapkan dengan status sangat tinggi, 2 indikator dengan status tinggi dan 1 indikator dengan status sangat rendah. Secara umum kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam dokumen penganggaran dan perjanjian kinerja tergolong baik.

Uraian lebih rinci mengenai capaian kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan, berikut permasalahan yang dihadapi, upaya penanganan, serta tindak lanjut rekomendasi DPRD pada Urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.2.2a.

Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Kesehatan yang Dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Realiasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realiasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
		Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN-DINAS KESEHATAN – DINAS KESEHATAN DAN UPTD INSTALASI FARMASI PROVINSI KEPULAUAN RIAU						**97.023.121.254,54**	**90.082.755.763,25**	**92,85**			
Dinas Kesehatan						**90.194.025.364,54**	**83.968.182.079,00**	**93,10**			
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						**25.727.853.316,54**	**25.371.965.378,00**	**98,62**			
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pemerintahan Urusan Kesehatan	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)**	**BB**	**A**	**120,00**	**ST**						
	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	**80**	**85,24**	**106,55**	**ST**						
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	**91,40**	**91,41**	**100,01**	**ST**						
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						**117.195.385**	**104.511.325,00**	**89,18**			
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1	100,00	ST	15.328.000	6.366.260,00	41,53			
2. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	100,00	ST	69.535.570	66.113.915,00	95,08			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Realiasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realiasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
		Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	22	22	100,00	ST	32.331.815	32.031.150,00	99,07			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						**23.119.448.415**	**22.928.595.760,00**	**99,17**			
4. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	100	170	170,00	ST	22.368.648.340	22.202.635.160,00	99,26			
5. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	100,00	ST	741.620.000	717.288.000,00	96,72			
6. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	1	100,00	ST	9.180.075	8.672.600,00	94,47			
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						**14.765.550**	**13.960.000,00**	**94,54**			
7. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	100,00	ST	14.765.550	13.960.000,00	94,54			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						**20.650.000**	**8.101.000,00**	**39,23**			
8. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	102	102	100,00	ST	20.650.000	8.101.000,00	39,23			
Administrasi Umum Perangkat Daerah						**582.458.251**	**556.877.205,00**	**95,61**			
9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	100,00	ST	25.000.000	23.777.310,00	95,11			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Realiasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realiasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
		Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	100,00	ST	81.372.000	74.423.866,00	91,46			
11. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	0	0	SR	2.736.500	-	0,00			
12. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	100,00	ST	60.000.000	55.019.620,00	91,70			
13. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	100,00	ST	18.000.000	15.351.500,00	85,29			
14. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	100,00	ST	11.619.000	11.140.910,00	95,89			
15. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	100,00	ST	27.264.000	26.209.850,00	96,13			
16. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	100,00	ST	356.466.751	350.954.149,00	98,45			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						**77.123.600**	**26.697.499,00**	**34,62**			
17. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	5	100,00	ST	77.123.600	26.697.499,00	34,62	Tunda Bayar sebesar : 49,950,000		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						**1.393.712.115,54**	**1.332.358.965,00**	**95,60**			
18. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	100,00	ST	35.178.700	23.337.340,00	66,34			
19. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan	1	1	100,00	ST	68.350.000	65.399.480,00	95,68			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Realiasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realiasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
		Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
	dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)										
20. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2	2	100,00	ST	1.290.183.415,54	1.243.622.145,00	96,39			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						**402.500.000**	**400.863.624,00**	**99,59**			
21. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	20	20	100,00	ST	387.500.000	386.803.624,00	99,82			
22. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20	20	100,00	ST	15.000.000	14.060.000,00	93,73			
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						**57.597.319.147**	**52.052.827.220,00**	**90,37**			
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Cakupan Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (%)	92,50	87,24	94,31	ST						
	Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1000 Kelahiran Hidup) (Angka)	11	10,2	107,26	ST						
	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe. (Persentase)	6,1	6,3	96,72	ST						
	Persentase Warga Negara Yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana	100	100	100,00	ST						

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Realiasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realiasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
		Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
	Dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi YangMendapatkan Layanan Kesehatan										
	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan Berisiko Pada Situasi KLB Provinsi (%)	100	100	100,00	ST						
	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) ((%))	55	49,4	89,88	T				Treatmant and coverage dengan definisi operasional penemuan kasus TBC positif barutdk mencapai target dikarenakan : 2. Perubahan biaya klaim pemeriksaan yg ditanggung oleh GF Komponen TB. Sebelumnya 25 rb / sampel pada bulan juli turun menjadi 10 rb / sampel dan bulan Oktober sdh tdk dibayarkan sehingga menurunkan kinerja petugas pkm dlm melakukan pelacakan dan		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Realiasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realiasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
		Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
									pencarian kasus 3. Input data masih berproses dari manual ke sistem pelaporan SITB s.d maret 2026 sesuai dengan ketentuan kementrian kesehatan direktur Penyakit menular 4.tidak tersedianya anggaran pemeriksaan sampel TBCdari daerah dan juga penghentian bantuan anggaran pemeriksaan sampel dari GF per oktober 2025. (sehingga menyebabkan sampel yg telah diambil bertumpuk dan tidak dilanjutkan pemeriksaan oleh layanan)		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Realiasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realiasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
		Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
	Jumlah infeksi baru HIV per 1.000 penduduk tidak terinfeksi (Per 1000)	0,33	0,45	62,93	R						
	Jumlah kabupaten/ kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)	6	7	116,67	ST						
	Hipertensi dalam pengendalian (%)	12	15	123,35	ST						
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (%)	90	75	83,62	T						
	Persentase Puskesmas terakreditasi (%)	97	99	102,02	ST						
	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan (Per 1000)	1,98	1,83	92,34	ST						
	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) ((%))	98	98,20	100,21	ST						
	Jumlah Kabupaten/Kota Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (kabupaten/kota)	0	0	100,00	ST						
	Persentase Instalasi farmasi sesuai standar (skor minimal 80) (%)	88,9	89,7	100,90	ST						
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						**23.919.225.569**	**23.403.845.545,00**	**97,85**			
23. Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)	1	1	100,00	ST	19.913.140.414	19.434.043.211,00	97,59			
24. Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	1	1	100,00	ST	31.120.000	23.006.196,00	73,93			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Realiasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realiasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
		Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
25. Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan (Layanan)	1	1	100,00	ST	94.921.400	78.529.170,00	82,73			
26. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	56	56	100,00	ST	3.880.043.755	3.868.266.968,00	99,70			
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						**33.387.033.070**	**28.376.572.819,00**	**84,99**			
27. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar (Orang)	250	350	140,00	ST	33.773.000	11.768.694,00	34,85			
28. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	636	636	100,00	ST	39.664.720	31.668.630,00	79,84			
29. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (Dokumen)	4	4	100,00	ST	360.265.470	337.725.650,00	93,74			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Realiasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realiasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
		Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
30. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif (Dokumen)	1	1	100,00	ST	54.872.600	54.770.240,00	99,81			
31. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	4	4	100,00	ST	557.722.000	555.250.170,00	99,56			
32. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	4	4	100,00	ST	81.838.232	81.538.975,00	99,63			
33. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	4	4	100,00	ST	392.462.350	379.245.850,00	96,63			
34. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	1	1	100,00	ST	62.211.925	55.979.872,00	89,98			
35. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	8	8	100,00	ST	4.383.094.785	949.501.662,00	21,66	Tunda bayar sebesar :1.127.302.347		
36. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji (Dokumen)	1	1	100,00	ST	17.897.220	17.728.584,00	99,06			
37. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) (Dokumen)	1	1	100,00	ST	76.737.000	75.268.540,00	98,09			
38. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1	1	100,00	ST	26.251.486.888	24.771.833.525,00	94,36	Tunda bayar sebesar : 420,247,200		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Realiasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realiasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
		Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
39. Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	4	4	100,00	ST	156.684.000	155.734.698,00	99,39			
40. Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan (Dokumen)	1	1	100,00	ST	878.896.230	868.221.897,00	98,79			
41. Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas (Dokumen)	1	1	100,00	ST	27.634.650	19.060.840,00	68,97			
42. Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	100,00	ST	11.792.000	11.274.992,00	95,62			
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi						**255.977.258**	**241.677.056,00**	**94,41**			
43. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	15	15	100,00	ST	255.977.258	241.677.056,00	94,41			
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi						**35.083.250**	**30.731.800,00**	**87,60**			
44. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)	8	7	87,50	T	13.910.000	12.633.800,00	90,83	Tahun 2025 terdapat 1 Rumah sakit menjadi tipe A		
45. Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator	18	77	427,78	ST	21.173.250	18.098.000,00	85,48			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Realiasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realiasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
		Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
	Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan (Unit)										
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						**5.823.901.401**	**5.525.552.090,00**	**94,88**			
46. Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan	Rasio Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Terhadap Populasi (Rasio)	4,28	4,22	98,60	ST						
Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi						**5.744.225.204**	**5.451.966.270,00**	**94,91**			
47. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	118	130	110,17	ST	5.713.168.904	5.421.376.970,00	94,89			
48. Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi (Orang)	230	250	108,70	ST	31.056.300	30.589.300,00	98,50			
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi						**79.676.197**	**73.585.820,00**	**92,36**			
49. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat (Orang)	30	30	100,00	ST	55.190.247	49.434.070,00	89,57			
50. Pembinaan dan Pengawasan Sumber	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya	1	1	100,00	ST	24.485.950	24.151.750,00	98,64			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Realiasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realiasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
		Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Daya Manusia Kesehatan	Manusia Kesehatan (Dokumen)										
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN						**59.063.500**	**58.833.365,00**	**99,61**			
51. Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Sedian Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase sarana distribusi farmasi cabang yang sesuai standar (%)	89	81	91,01	ST						
Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)						**45.347.500**	**45.183.665,00**	**99,64**			
52. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan (Sarana)	14	11	78,57	T	45.347.500	45.183.665,00	99,64			
Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)						**13.716.000**	**13.649.700,00**	**99,52**			
53. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (Sarana)	1	1	100,00	ST	13.716.000	13.649.700,00	99,52			
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						**985.888.000**	**959.004.026,00**	**97,27**			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Realiasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realiasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
		Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	**Persentase Kab/Kota dengan Kader Posyandu Madya minimal 10% (%)**	**14,29**	**43**	**300**	**ST**						
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi						**255.730.800**	**247.987.718,00**	**96,97**			
54. Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi (Dokumen)	8	10	125,00	ST	255.730.800	247.987.718,00	96,97			
Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi						**730.157.200**	**711.016.308,00**	**97,38**			
55. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	10	10	100,00	ST	730.157.200	711.016.308,00	97,38			
UPTD INSTALASI FARMASI PROVINSI KEPULAUAN RIAU						**6.829.095.890**	**6.114.573.684,25**	**89,54**			
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						**1.203.147.571**	**1.124.511.606,00**	**93,46**			
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pemerintahan Urusan Kesehatan	**Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)**	**98,6**	**98,6**	**99,96**	**ST**						

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Realiasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realiasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
		Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						**11.454.000**	**10.924.170,00**	**95,37**			
56. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	100,00	ST	11.454.000	10.924.170,00	95,37			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						**128.712.000**	**119.680.500,00**	**92,98**			
57. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	100,00	ST	128.712.000	119.680.500,00	92,98			
Administrasi Umum Perangkat Daerah						**58.428.600**	**55.108.880,00**	**94,32**			
58. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	100,00	ST	9.567.000	9.045.000,00	94,54			
59. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	100,00	ST	9.000.000	8.818.880,00	97,99			
60. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	100,00	ST	4.500.000	3.750.000,00	83,33			
61. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	100,00	ST	35.361.600	33.495.000,00	94,72			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						**51.268.000**	**49.282.924,00**	**96,13**			
62. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	100,00	ST	51.268.000	49.282.924,00	96,13			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Realiasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realiasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
		Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						**899.316.471**	**876.092.932,00**	**97,42**			
63. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	100,00	ST	385.177.240	378.807.897,00	98,35			
64. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	100,00	ST	514.139.231	497.285.035,00	96,72			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						**53.968.500**	**13.422.200,00**	**24,87**			
65. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4	4	100,00	ST	43.560.000	9.672.200,00	22,20			
66. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	100,00	ST	10.408.500	3.750.000,00	36,03			
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						**5.589.777.819**	**4.954.342.078,25**	**88,63**			
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						**5.349.987.859**	**4.714.744.692,25**	**88,13**			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Realiasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realiasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
		Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
67. Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	1	1	100,00	ST	619.337.416	618.280.416,00	99,83			
68. Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara (Unit)	1	1	100,00	ST	43.020.600	42.568.300,00	98,95			
69. Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Dokumen)	1	1	100,00	ST	707.180.809	701.154.338,00	99,15			
70. Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	1	1	100,00	ST	3.980.449.034	3.352.741.638,00	84,23			
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi						**239.789.960**	**239.597.386,00**	**99,92**			
71. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1	1	100,00	ST	239.789.960	239.597.386,00	99,92			
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						**36.170.500**	**35.720.000,00**	**98,75**			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Realiasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realiasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
		Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi						**36.170.500**	**35.720.000,00**	**98,75**			
72. Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi (Dokumen)	1	1	100,00	ST	36.170.500	35.720.000,00	98,75			

3.2.2b. Kesehatan - RSUD Raja Ahmad Tabib (RAT)

Urusan Kesehatan Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan RSUD Raja Ahmad Tabib (RAT) Provinsi Kepulauan Riau. Pelaksanaan urusan tersebut didukung alokasi anggaran sebesar Rp266.643.813.304,00, sementara realisasi anggaran sampai akhir tahun 2025 mencapai Rp262.650.041.010,93 atau setara 98,50 persen, yang mencerminkan tingkat pelaksanaan program dan kegiatan yang sangat tinggi. Aspek kinerja menunjukkan 4 indikator program telah ditetapkan dan seluruhnya (4 indikator) tergolong dalam kategori sangat tinggi.

Berdasarkan dokumen perencanaan dan penganggaran, indikator kegiatan sama dengan indikator sub kegiatan, sehingga dalam dokumen LKPJ ini hanya disajikan indikator sub kegiatan. Terlihat dari sebanyak 20 indikator sub kegiatan, semuanya sebanyak 20 indikator telah mencapai target kinerja yang ditetapkan dengan status sangat tinggi. Secara umum kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam dokumen penganggaran dan perjanjian kinerja tergolong baik.

Uraian lebih rinci mengenai capaian kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan, berikut permasalahan yang dihadapi, upaya penanganan, serta tindak lanjut rekomendasi DPRD pada Urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh RSUD Raja Ahmad Tabib (RAT) Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.2.2b
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Kesehatan yang Dilaksanakan RSUD Raja Ahmad Tabib (RAT) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN - RSUD RAJA AHMAD TABIB (RAT)							**266.643.813.304,00**	**262.650.041.010,93**	**98,50**			
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							**252.266.183.815,47**	**253.880.112.376,93**	**100,64**			
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pemerintahan Urusan Kesehatan	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah RSUD Raja Ahmad Tabib**	**Predikat**	**B**	**B**	**100,00**	**ST**						
	Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Raja Ahmad Tabib	**Indeks**	**91,5**	**93,01**	**101,65**	**ST**						
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							**23.357.410,00**	**20.360.508,00**	**87,17**			
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	6	100,00	ST	23.357.410,00	20.360.508,00	87,17		Target koefisien kegiatan telah tercapai, sehingga sisa anggaran yang tersedia tidak dapat digunakan	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							**95.740.318.943,15**	**94.606.016.604,00**	**98,82**			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	465	785	169	ST	94.993.527.681,15	93.862.968.604,00	98,81			
3. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	100,00	ST	746.791.262,00	743.048.000,00	99,50			
Administrasi Umum Perangkat Daerah							**163.568.520,00**	**127.933.578,00**	**78,21**			
4. Penyediaan Bahan Logistik kantor	jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	100.739.920,00	95.207.000,00	94,51			
5. penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi antar SKPD	Laporan	1	1	100,00	ST	62.828.600,00	32.726.578,00	52,09		Realisasi tidak terserap sepenuhnya dikarenakan adanya upaya efisiensi anggaran. Sebagian besar kegiatan koordinasi yang semula direncanakan melalui perjalanan dinas tatap muka dialihkan melalui media komunikasi digital (video conference), sehingga menekan biaya transportasi dan penginapan tanpa mengurangi substansi koordinasi	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							**4.262.006.249,00**	**4.190.398.963,00**	**98,32**			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
6. Pengadaan Mebel	jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	1	3	300,00	ST	201.019.685,00	197.080.500,00	98,04			
7. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	4	4	100,00	ST	4.060.986.564,00	3.993.318.463,00	98,33			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**10.691.968.238,50**	**9.992.242.249,00**	**93,46**			
8. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	1	100,00	ST	8.004.150,00	7.081.750,00	88,48		Target koefisien kegiatan telah tercapai, sehingga sisa anggaran yang tersedia tidak dapat digunakan	
9. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	12	100,00	ST	6.647.729.568,91	5.998.972.808,00	90,24			
10. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	12	100,00	ST	4.036.234.519,59	3.986.187.691,00	98,76			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**1.160.980.680,82**	**612.481.000,00**	**52,76**			
11. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Kendaraan	10	10	100,00	ST	83.650.000,00	83.025.000,00	99,25			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	dan dibayarkan pajaknya											
12. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kendaraan	20	20	100,00	ST	176.000.000,00	175.500.000,00	99,72			
13. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Gedung	6	6	100,00	ST	901.330.680,82	353.956.000,00	39,27	**Tunda Bayar**	Melakukan penyusunan dan penataan dokumen Pertanggungjawaban (SPJ) secara komprehensif dalam rangka persiapan reviu oleh Tim Inspektorat	
Peningkatan Pelayanan BLUD							**140.223.983.774,00**	**144.330.679.474,93**	**102,93**			
14. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Blud	1	1	100,00	ST	140.223.983.774,00	144.330.679.474,93	102,93		Pelampaun anggaran ini terjadi sehubungan dengan adanya peningkatan volume pelayanan/pendapatan yang melampaui target proyeksi awal. Sesuai dengan fleksibilitas pengelolaan keuangan BLUD yang diatur dalam Permendagri 78 Tahun 2018 tentang	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
											Badan Layanan Umum Daerah, dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penganggaran dan Penatausahaan BLUD Provinsi Kepulauan Riau	
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							**11.438.038.540,87**	**5.839.250.538,00**	**51,05**			
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	**Status Rumah Sakit Pendidikan RSUD Raja Ahmad Tabib**	**Rumah**	**Utama**	**Utama**	**100,00**	**ST**						
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi							**11.204.079.664,87**	**5.663.009.038,00**	**50,54**			
15. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Sarana	3	3	100,00	ST	3.080.582.190,00	2.308.529.182,00	74,94		Realisasi pekerjaan belum dapat mencapai target dikarenakan keterbatasan durasi waktu pelaksanaan serta ketersediaan tenaga teknis yang belum memadai untuk mencakup	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
											seluruh beban kerja yang direncanakan	
16. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang disediakan	Alat	2	2	100,00	ST	3.177.048.000,00	3.043.898.000,00	95,81			
17. Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang terpelihara sesuai standar	Alat	90	90	100,00	ST	3.139.874.851,00	244.758.856,00	7,80	**Tunda Bayar**	Melakukan penyusunan dan penataan dokumen Pertanggungjawaban (SPJ) secara komprehensif dalam rangka persiapan reviu oleh Tim Inspektorat	
18. Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan	jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Obat	12	12	100,00	ST	1.806.574.623,87	65.823.000,00	3,64	**Tunda Bayar**	Melakukan penyusunan dan penataan dokumen Pertanggungjawaban (SPJ) secara komprehensif dalam rangka persiapan reviu oleh Tim Inspektorat	
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi							**233.958.876,00**	**176.241.500,00**	**75,33**			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
19. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan	Dokumen	1	1	100,00	ST	233.958.876,00	176.241.500,00	75,33	**Tunda Bayar**	Melakukan penyusunan dan penataan dokumen Pertanggungjawaban (SPJ) secara komprehensif dalam rangka persiapan reviu oleh Tim Inspektorat	
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							**2.939.590.947,66**	**2.930.678.096,00**	**99,70**			
Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan	**Persentase Named dan Nakes RSUD Raja Ahmad Tabib yang mengikuti Diklat >20 Jam/Tahun**	**Named**	**80**	**90**	**112,50**	**ST**						
Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi							**2.939.590.947,66**	**2.930.678.096,00**	**99,70**			
20. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Sumber	481	27	5,61	SR	2.939.590.947,66	2.930.678.096,00	99,70	sudah berubah Status menjadi PPPK		

3.2.2c. Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud

Urusan Kesehatan Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau. Pelaksanaan urusan tersebut didukung alokasi anggaran sebesar Rp146.827.835.328,00, sementara realisasi anggaran sampai akhir tahun 2025 mencapai Rp140.443.480.779,00 atau setara 95,65 persen, yang mencerminkan tingkat pelaksanaan program dan kegiatan yang sangat optimal. Kinerja program menunjukkan dari sejumlah 5 indikator program yang telah ditetapkan, seluruhnya (5 indikator) tergolong dalam kategori Sangat Tinggi.

Berdasarkan dokumen perencanaan dan penganggaran, indikator kegiatan sama dengan indikator sub kegiatan, sehingga dalam dokumen LKPJ ini hanya disajikan indikator sub kegiatan. Terlihat dari sebanyak 29 indikator sub kegiatan, semuanya sebanyak 29 indikator telah mencapai target kinerja yang ditetapkan dengan status sangat tinggi. Secara umum kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam dokumen penganggaran dan perjanjian kinerja tergolong baik.

Uraian lebih rinci mengenai capaian kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan, berikut permasalahan yang dihadapi, upaya penanganan, serta tindak lanjut rekomendasi DPRD pada Urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.2.2c
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Kesehatan yang Dilaksanakan Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN - RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD							**146.827.835.328,00**	**140.443.480.779,00**	**95,65**			
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							**82.250.349.467,95**	**78.072.518.187,00**	**94,92**			
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pemerintahan Urusan Kesehatan	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**Indeks**	**83**	**84,29**	**101,55**	**ST**						
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	**Predikat**	**BB**	**BB**	**100,00**	**ST**						
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							**141.856.946,00**	**137.232.000,00**	**96,74**			
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	6	100,00	ST	118.032.946,00	114.424.000,00	96,94			
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	100,00	ST	23.824.000,00	22.808.000,00	95,74			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							**52.947.853.189,00**	**52.049.252.895,00**	**98,30**			
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	1.428	1.428	100,00	ST	52.190.195.189,00	51.298.704.895,00	98,29			
4. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1	100,00	ST	739.658.000,00	733.388.000,00	99,15			
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	2	200,00	ST	18.000.000,00	17.160.000,00	95,33			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							**13.000.000,00**	**12.920.000,00**	**99,38**			
6. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	100,00	ST	13.000.000,00	12.920.000,00	99,38			
Administrasi Umum Perangkat Daerah							**653.760.119,00**	**621.383.807,00**	**95,05**			
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	7	7	100,00	ST	43.371.001,00	42.529.000,00	98,06			
8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	260.685.280,00	255.667.600,00	98,08			
9. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	100,00	ST	58.806.200,00	58.262.508,00	99,08			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
10. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	6	100,00	ST	191.473.638,00	185.795.699,00	97,03			
11. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	100,00	ST	81.660.000,00	64.219.000,00	78,64			
12. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	100,00	ST	17.764.000,00	14.910.000,00	83,93			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**1.872.112.599,95**	**1.594.824.765,00**	**85,19**			
13. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100,00	ST	1.872.112.599,95	1.594.824.765,00	85,19			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**2.484.212.362,00**	**2.427.703.240,00**	**97,73**			
14. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	25	23	92,00	ST	96.367.320,00	79.983.910,00	83,00			
15. Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	100	100	100,00	ST	100.000.000,00	99.870.000,00	99,87			
16. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20	20	100,00	ST	85.766.200,00	81.235.000,00	94,72			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
17. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	Unit	10	10	100,00	ST	50.000.000,00	17.380.000,00	34,76	Anggaran seharusnya digunakan untuk rehab gedung IGD, namun ternyata mendapatkan anggaran yang bersumber dari DAK.		
18. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak berwujud yang dipelihara	Unit	5	5	100,00	ST	48.994.500,00	46.150.000,00	94,19			
19. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	5	100,00	ST	2.103.084.342,00	2.103.084.330,00	100,00			
Peningkatan Pelayanan BLUD							**24.137.554.252,00**	**21.229.201.480,00**	**87,95**			
20. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			1	1	100,00	ST	24.137.554.252,00	21.229.201.480,00	87,95			
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							**62.257.639.859,05**	**60.080.293.151,00**	**96,50**			
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	**Status Rumah Sakit Pendidikan RSJKO Engku Haji Daud (Peringkat)**	**Peringkat**	**Satelit**	**Satelit**	**100,00**	**ST**						
	Status Akreditasi Rumah Sakit RSJKO Engku Haji Daud	**Peringkat**	**Paripurna**	**Paripurna**	**100,00**	**ST**						

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi							**60.912.095.799,05**	**58.751.851.277,00**	**96,45**			
21. Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	**75**	75	100,00	ST	35.495.700.000,00	33.911.619.272,00	95,54			
22. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	2	2	100,00	ST	21.492.822.150,00	20.931.631.000,00	97,39			
23. Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit			1	**1**	100,00	ST	206.060.000,00	205.874.800,00	99,91			
24. Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	Angka	20	20	100,00	ST	3.717.513.649,05	3.702.726.205,00	99,60			
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi							**1.279.837.600,00**	**1.265.487.874,00**	**98,88**			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
25. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	**86**	86	100,00	ST	1.015.237.600,00	1.004.137.874,00	98,91			
26. Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Unit	1	1	100,00	ST	264.600.000,00	261.350.000,00	98,77			
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi							**43.143.460,00**	**42.297.000,00**	**98,04**			
27. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	**71**	71	100,00	ST	43.143.460,00	42.297.000,00	98,04			
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi							**22.563.000,00**	**20.657.000,00**	**91,55**			
Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan tata kelola sesuai standar	Unit	**95**	95	100,00	ST	22.563.000,00	20.657.000,00	91,55			
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							**2.319.846.001,00**	**2.290.669.441,00**	**98,74**			
Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan	**Persentase Named dan Nakes RSJKO Engku Haji Daud yang mengikuti Diklat >20 Jam/Tahun (%)**	**%**	**55**	**97**	**176,36**	**ST**						
Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi							**2.241.063.936,00**	**2.229.718.334,00**	**99,49**			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
28. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	250	250	100,00	ST	2.241.063.936,00	2.229.718.334,00	99,49			
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi							**78.782.065,00**	**60.951.107,00**	**77,37**			
29. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang	75	73	97,33	ST	78.782.065,00	60.951.107,00	77,37			

3.2.3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Riau. Pelaksanaan urusan tersebut didukung alokasi anggaran sebesar Rp137.030.002.320,00, sementara realisasi anggaran sampai akhir tahun 2025 mencapai Rp101.674.366.826,14 atau setara 74,20 persen. Kinerja menunjukkan dari sejumlah 13 indikator program telah ditetapkan, sebanyak 10 indikator tergolong dalam kategori sangat tinggi, 1 indikator kategori tinggi, 1 indikator kategori sedang.

Berdasarkan dokumen perencanaan dan penganggaran, indikator kegiatan sama dengan indikator sub kegiatan, sehingga dalam dokumen LKPJ ini hanya disajikan indikator sub kegiatan. Terlihat dari sebanyak 73 indikator sub kegiatan, sebanyak 65 indikator telah mencapai target kinerja yang ditetapkan dengan status sangat tinggi, 1 indikator memiliki kinerja tinggi, 1 indikator dengan kinerja sedang, dan 6 indikator dengan kinerja sangat rendah. Secara umum kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam dokumen penganggaran dan perjanjian kinerja tergolong baik.

Uraian lebih rinci mengenai capaian kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan, berikut permasalahan yang dihadapi, upaya penanganan, serta tindak lanjut rekomendasi DPRD pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.2.3
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang Dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
		Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						**137.030.002.320,00**	**101.674.366.826,14**	**74,20**			
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						**32.050.814.067,47**	**29.950.306.691,00**	**93,45**	**Penyerapan Anggaran yang tidak maksimal dikarenakan defisit anggaran**		
Terwujudnya Tata Kelola Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan yang transparan dan akuntabel	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)**	**BB**	**BB**	**100,00**	**ST**						
	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah (Indeks)	**84,53**	**85,36**	**100,00**	**ST**						
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	**88,80**	**88,94**	**100,00**	**ST**						
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang											
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						**446.883.168,77**	**432.908.785,00**	**96,87**			
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	2	2	100,00	ST	150.695.008,00	138.669.778,00	92,02			
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1	1	100,00	ST	227.773.020,77	225.823.867,00	99,14			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
		Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)										
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)	1	1	100,00	ST	68.415.140,00	68.415.140,00	100,00			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						**23.900.774.139,66**	**22.845.713.275,00**	**95,59**			
4. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	74	222	100,00	ST	22.384.556.199,66	21.329.695.335,00	95,29	total seluruh ASN DPUPP (PNS + P3K penuh waktu dan paruh waktu)		
5. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dokumen)	12	12	100,00	ST	1.450.080.000,00	1.449.880.000,00	99,99			
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (laporan)	1	1	100,00	ST	66.137.940,00	66.137.940,00	100,00			
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						**36.776.000,00**	**36.671.600,00**	**99,72**			
7. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (laporan)	12	12	100,00	ST	36.776.000,00	36.671.600,00	99,72			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						**265.768.038,00**	**209.680.045,00**	**78,90**			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
		Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
8. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	77	77	100,00	ST	157.723.038,00	151.980.045,00	96,36			
9. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10	8	80,00	T	108.045.000,00	57.700.000,00	53,40	Optimalisasi penyerapan anggaran terhambat oleh kondisi defisit anggaran, dikarenakan realisasi fisik/output sangat bergantung pada ketersediaan alokasi anggaran yang terealisasi	Penyusunan skala prioritas pendidikan dan pelatihan (diklat)	
Administrasi Umum Perangkat Daerah						**1.801.989.313,37**	**1.629.231.274,00**	**90,41**			
10. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	8,33	SR	31.852.626,00	31.675.618,00	99,44	adanya penyesuaian indikator satuan target diawal dan di akhir pada proses perencanaan dan pelaksanaan		
11. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	15	100,00	ST	429.244.900,00	331.995.980,00	77,34	Tunda bayar 2025 74.250.001,00, Terdiri dari 1 paket non fisik yaitu Belanja Modal Personal Computer (Laptop dan Komputer)	Perbaikan Timeframe Pengadaan secara periodik	
12. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	12	12	33,33	SR	66.390.600,00	63.254.056,00	95,28	adanya penyesuaian indikator satuan target diawal dan di akhir pada proses perencanaan dan pelaksanaan		
13. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	33,33	SR	144.849.100,00	133.331.799,00	92,05	adanya penyesuaian indikator satuan target diawal dan di akhir pada proses		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
		Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
									perencanaan dan pelaksanaan		
14. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	16,67	SR	74.362.000,00	40.122.000,00	53,95	1. adanya penyesuaian indikator satuan target diawal dan di akhir pada proses perencanaan dan pelaksanaan 2. Tunda bayar 2025 Rp29.250.000,00, Terdiri dari 1 paket non fisik yaitu Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Map Dinas		
15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)	12	12	100,00	ST	153.278.750,00	140.970.000,00	91,97			
16. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	1	1	100,00	ST	157.198.571,37	149.508.500,00	95,11			
17. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	12	12	100,00	ST	744.812.766,00	738.373.321,00	99,14			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						**125.000.000,00**	**124.398.900,00**	**99,52**			
18. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	3	2	66,67	S	70.000.000,00	69.652.500,00	99,50	Realisasi kinerja sub kegiatan dipengaruhi oleh rasionalisasi item pada perubahan anggaran serta kurangnya sinkronisasi	Melakukan penguatan koordinasi antar unit penyusun program serta melakukan	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
		Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
									administratif dalam penyesuaian target kinerja	reviu target kinerja secara periodik	
19. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	1	1	100,00	ST	55.000.000,00	54.746.400,00	99,54			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						**2.963.928.100,67**	**2.602.657.352,00**	**87,81**			
20. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	12	12	100,00	ST	24.249.851,31	14.994.000,00	61,83	Penyerapan Anggaran yang tidak maksimal dikarenakan defisit anggaran	Hanya menganggarkan paket-paket yang diperlukan saja	
21. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	12	12	100,00	ST	975.956.971,36	866.647.579,00	88,80			
22. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	12	12	100,00	ST	1.963.721.278,00	1.721.015.773,00	87,64	Tunda bayar 2025 Rp 129.186.690,00, Terdiri dari 1 paket non fisik yaitu belanja tenaga kebersihan/outsourcing dengan 2 spm	melakukan Perbaikan Timeframe Pengadaan secara periodik	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						**1.235.226.237,00**	**891.595.243,00**	**72,18**			
23. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan (Unit)	53	53	100,00	ST	432.661.602,00	424.831.958,00	98,19			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
		Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
24. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	90	90	100,00	ST	75.660.000,00	74.070.000,00	97,90			
25. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemenuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Unit)	2	2	100,00	ST	726.904.635,00	392.693.285,00	54,02	Tunda bayar 2025 Rp 331.026.058,67, Terdiri dari 3 paket, 2 paket fisik, dan 1 pengawasan 1. PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR PAKET REHABILITASI GEDUNG UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DAN PERALATAN 2. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat KerjaBangunan Gedung Kantor 3. PENGAWASAN TEKNIS PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR PAKET REHABILITASI GEDUNG UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DAN PERALATAN	Hanya menganggarkan paket-paket yang diperlukan saja	
UPT Laboratorium Bahan Konstruksi dan Peralatan											
Administrasi Umum Perangkat Daerah						**358.083.880,00**	**342.846.946,00**	**95,74**			
26. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	1	1	100,00	ST	22.606.390,00	20.263.111,00	89,63			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
		Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
	Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)										
27. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	100,00	ST	49.997.300,00	45.688.975,00	91,38			
28. Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1	1	100,00	ST	59.691.500,00	58.781.715,00	98,48			
29. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	1	1	100,00	ST	225.788.690,00	218.113.145,00	96,60			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						**313.382.988,00**	**271.596.023,00**	**86,67**			
30. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (laporan)	1	1	100,00	ST	54.862.700,00	48.722.588,00	88,81			
31. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1	1	100,00	ST	258.520.288,00	222.873.435,00	86,21			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						**216.800.500,00**	**186.270.300,00**	**85,92**			
32. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	30	25	83,33	T	126.241.000,00	95.715.300,00	75,82	Tunda bayar 2025 Rp 29.953.350,00, Terdiri dari 1 paket non fisik yaitu belanja alat laboratorium		
33. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (unit)	22	22	100,00	ST	90.559.500,00	90.555.000,00	100,00			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
		Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
UPTD Pengelolaan dan Pemeliharaan Infrastruktur											
Administrasi Umum Perangkat Daerah						**227.088.330,00**	**222.511.254,00**	**97,98**			
34. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket	1	1	100,00	ST	141.713.700,00	137.396.624,00	96,95			
35. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	1	1	100,00	ST	85.374.630,00	85.114.630,00	99,70			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						**159.113.372,00**	**154.225.694,00**	**96,93**			
36. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	1	1	100,00	ST	159.113.372,00	154.225.694,00	96,93			
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)						**9.922.127.560,00**	**6.194.807.295,00**	**62,43**	**Penyerapan Anggaran yang tidak maksimal dikarenakan defisit anggaran**		
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	**Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir (%)**	**0,103**	**0,492**	**100,00**	**ST**						
	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada (%)	**10,26**	**10,26**	**100,00**	**ST**				**target kinerja tidak tercapai dikarenakan tidak di anggarkannya kegiatan untuk mendukung indikator kinerja Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat**	**berupaya menyesuaikan indikator kinerja sesuai kemampuan anggaran dan kewenangan dinas pupp di**	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
		Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
									pada sistem irigasi yang sudah ada sehingga tidak ada peningkatan capaian. Untuk indikator kinerja ini juga masih terkendala dengan belum terpenuhinya luasan irigasi primer yang harus menjadi kewenangan provinsi, yaitu 1000-3000 ha (Permen PU No.14/PRT/M/2015)	**penyusunan RPJMD tahun berikutnya**	
	Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk (%)	**76,84**	**60,76**	79,07	**T**				**Target kinerja tidak tercapai dikarenakan tidak di anggarkannya kegiatan untuk mendukung indikator kinerja**	**berupaya menyesuaikan indikator kinerja sesuai kemampuan anggaran dan kewenangan dinas pupp di penyusunan RPJMD tahun berikutnya**	
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten / Kota						**9.922.127.560,00**	**6.194.807.295,00**	**62,43**			
37. Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun (Km)					68.465.900,00	68.465.900,00	100,00	Sub kegiatan hanya berisi paket tunda bayar 2024		
38. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui	2	2	100,00	ST	231.550.180,00	192.941.113,00	83,33	Defisit anggaran menyebabkan realisasi keuangan pada sub kegiatan ini hanya sebesar 83,33%, tidak ada		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
		Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Kewenangan Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi (lembaga)								tunda bayar pada sub kegiatan ini		
39. Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi / Direstorasi (Km)	4,5	16,465	100,00	ST	6.657.490.700,00	4.294.670.940,00	64,51	tunda bayar 2025 Rp 2.354.575.846,86, Terdiri dari 18 Paket, 3 paket perencanaan, 12 fisik dan 3 pengawasan yaitu		
40. Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai terbangun (Km)	5,1	0,0265	0,52	SR	1.389.340.880,00	891.684.603,00	64,18	Dukungan anggaran yang tersedia, tidak mencukupi untuk mencapai target yang ditetapkan tunda bayar 2025 Rp 262.325.461,46, Terdiri dari 4 Paket, 2 paket perencanaan, 1 fisik dan 1 pengawasan yaitu 1. Perencanaan PEMBANGUNAN TEMBOK PENAHAN TEBING/PEMECAH OMBAK PANTAI DESA PENGADAH. KEC. BUNGURAN TIMUR LAUT KAB. NATUNA 2. Perencanaan Pembangunan Pintu Air Dusun 4 Desa Sebesi Kec. Kundur 3. PEMBANGUNAN TEMBOK PENAHAN TEBING/PEMECAH OMBAK PANTAI DESA PENGADAH. KEC. BUNGURAN TIMUR LAUT KAB. NATUNA 4. Pengawasan PEMBANGUNAN	Mengusulkan penambahan anggaran untuk sub kegiatan pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Perlu ada kebijakan dalam penetapan anggaran, mengingat kondisi geografis kepri berupa wilayah kepulauan yang rawan akan abrasi

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
		Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
									TEMBOK PENAHAN TEBING/PEMECAH OMBAK PANTAI DESA PENGADAH. KEC. BUNGURAN TIMUR LAUT KAB. NATUNA		
41. Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang saluran utama yang terbangun (Km)	2,5	0,25	10,17	SR	1.185.209.900,00	449.234.339,00	37,90	Dukungan anggaran yang tersedia, tidak mencukupi untuk mencapai target yang ditetapkan tunda bayar 2025 Rp 731.490.189,89, Terdiri dari 7 Paket, 2 paket perencanaan, 3 fisik dan 2 pengawasan yaitu 1. PERENCANAAN PEMBANGUNAN BATU MIRING SUNGAI PARIT JEPUN JL. MUHARAL KEBUN PINANG RT.02 RW.03 KEL. GADING SARI KEC. KUNDUR KAB. KARIMUN KUNDUR KARIMUN 2. Perencanaan Pembangunan Batu Miring Sungai Desa Ceruk dan Sungai Silas, belakang Kantor Desa Kelanga, Desa Kelanga, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kab. Natuna 3. Pengawasan Pembangunan Batu Miring Sungai Desa Ceruk dan Sungai	Mengusulkan penambahan anggaran untuk sub kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Perlu ada kebijakan dalam penetapan anggaran, mengingat kondisi geografis kepri berupa wilayah kepulauan yang rawan akan abrasi

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
		Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
									Silas, belakang Kantor Desa Kelanga, Desa Kelanga, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kab. Natuna 4. PENGAWASAN PEMBANGUNAN BATU MIRING SUNGAI PARIT JEPUN JL. MUHARAL KEBUN PINANG RT.02 RW.03 KEL. GADING SARI KEC. KUNDUR KAB. KARIMUN KUNDUR KARIMUN 5. PEMBANGUNAN BATU MIRING SUNGAI PARIT JEPUN JL. MUHARAL KEBUN PINANG RT.02 RW.03 KEL. GADING SARI KEC. KUNDUR KAB. KARIMUN 6. Pembangunan Batu Miring Sungai Silas, belakang Kantor Desa Kelanga, Desa Kelanga, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kab. Natuna 7. Pembangunan Batu Miring Sungai Desa Ceruk Kec. Bunguran Timur Laut Kab. Natuna		
42. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan,	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung,	2	3	100,00	ST	390.070.000,00	297.810.400,00	76,35	tunda bayar 2025 Rp85.877.956,08, Terdiri dari 1 Paket perencanaan yaitu 1. Perencanaan Teknis Drainase Desa Pangke		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
		Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang tersusun (dokumen)								Barat, Kecamatan Merah Barat Kabupaten Karimun		
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM						**2.481.419.725,00**	**1.410.577.574,20**	**56,85**	**Penyerapan Anggaran yang tidak maksimal dikarenakan adanya defisit anggaran**		
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	**Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)**	**50,35**	**34,33**	**68,18**	**S**				**Capaian output belum dapat terpenuhi dikarenakan kapasitas sarana dan prasarana eksisting belum memadai untuk mendukung target yang telah ditetapkan. Selain itu, terdapat diskoneksi antara target nasional yang cukup tinggi dengan kapasitas fiskal serta operasional daerah dalam merealisasikan target tersebut secara simultan**	**Melakukan koordinasi dan sinkronisasi terkait sinergitas dukungan antara pemerintah pusat dan daerah guna melakukan akselerasi pembangunan sarana serta prasarana air siap minum perpipaan agar selaras dengan standar nasional**	
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota						**2.481.419.725,00**	**1.410.577.574,20**	**56,85**			
43. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem	Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang tersusun (dokumen)	3	3	100,00	ST	977.065.815,00	941.011.363,00	96,31			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
		Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Penyediaan Air Minum (SPAM)											
44. Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan (Liter/detik)	1	1	100,00	ST	1.504.353.910,00	469.566.211,20	31,21	tunda bayar 2025 Rp 1.020.750.100,58, Terdiri dari 1 Paket fisik dan pengawasan yaitu 1. Pengembangan Jaringan Perpipaan Di Kawasan LANUDAL Tanjungpinang 2. Pengawasan Teknis Pengembangan Jaringan Perpipaan Di Kawasan LANUDAL Tanjungpinang		
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH						**105.381.749,00**	**62.139.665,00**	**58,97**	**Penyerapan Anggaran yang tidak maksimal dikarenakan tunda bayar dan defisit anggaran**		
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	**Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)**	**7,76**	**8,82**	**113,66**	**ST**						
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional						**105.381.749,00**	**62.139.665,00**	**58,97**			
45. Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) (Kabupaten/kota)	7	7	100,00	ST	105.381.749,00	62.139.665,00	58,97	tunda bayar 2025 Rp25.300.000,00, Terdiri dari 1 Paket non fisik yaitu 1. Belanja Makanan dan Minuman Rapat		
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG						**23.298.513.417,53**	**13.403.899.707,88**	**57,53**	**Penyerapan Anggaran yang tidak maksimal**		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
		Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
									dikarenakan defisit anggaran		
Terwujudnya tertib penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan Strategis Daerah Provinsi	**Persentase Penataan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi (%)**	**29,63**	**29,63**	**100,00**	**ST**						
Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi						**23.298.513.417,53**	**13.403.899.707,88**	**57,53**			
46. Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	Jumlah Rumah Negara yang dikelola (Rumah Negara)					1.673.424.700,00	1.673.424.700,00	100,00	Sub kegiatan hanya berisi paket tunda bayar 2024		
47. Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan (Gedung)					13.925.800,00	13.925.800,00	100,00	Sub kegiatan hanya berisi paket tunda bayar 2024		
48. Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi (Dokumen)	9	9	100,00	ST	13.938.663.235,03	7.709.447.213,67	55,31	tunda bayar 2025 Rp 5.871.382.193,33, Terdiri dari 13 Paket dengan rincian, 1 non fisik, 3 Perencanaan, 5 Fisik dan 4 pengawasan yaitu 1. Belanja Baju Lapangan 2.DED Pembangunan Gedung Assesment Centre Provinsi Kepulauan Riau 3. DED Pembangunan Perkantoran Terpadu Pemerintahan Provinsi Kepulauan		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
		Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
									Riau di Pulau Dompak 4. Perencanaan Teknis Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Pemuda di Kabupaten Karimun 5. Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Dirkrimsus Polda Kepri, Kota Batam (Lanjutan) 6. Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Persatuan Istri Tentara (Persit), di KOREM 033 WIRA PRATAMA, Tanjungpinang 7. Pengawasan Teknis Pembangunan RS Angkatan darat Bengkong Kota Batam (Lanjutan) 8. Pengawasan Teknis Renovasi Ruang Samsat Batam Centre Lt. 3 Graha Kepri, Kota Batam 9. Renovasi Ruang Samsat Batam Centre Lt. 3 Graha Kepri, Kota Batam 10. Pembangunan Gedung Dirkrimsus Polda Kepri, Kota Batam (Lanjutan) 11. Pembangunan Gedung Persatuan Istri Tentara (Persit) di KOREM 033 WIRA		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
		Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
									PRATAMA, Tanjungpinang 12. Pembangunan RS Angkatan darat Bengkong Kota Batam (Lanjutan) 13. Pembangunan Ruang Baca di Kejati Kota Tanjungpinang		
49. Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala (Gedung)	5	5	100,00	ST	7.672.499.682,50	4.007.101.994,21	52,23	tunda bayar 2025 Rp 3.185.879.581,51, Terdiri dari 2 Paket Perencanaan, 2 Fisik dan 1 pengawasan yaitu 1. Perencanaan Teknis Pemeliharaan/Renovasi Gedung Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau di Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang 2. Perencanaan Teknis Rehabilitasi Masjid Baitul Karim Kel. Tanjung Balai Kota Kec. Karimun Kabupaten Karimun 3. Pengawasan Teknis Pemeliharaan/ Renovasi Gedung Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau di Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang 4. Pemeliharaan, Interior dan		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
		Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
									Pengadaan Meubeler pada Gedung Ex Bintan Expo 5. Pemeliharaan/Renovasi Gedung Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau di Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang		
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA						**12.909.985.662,00**	**10.068.063.546,37**	**77,99**	**Penyerapan Anggaran yang tidak maksimal dikarenakan defisit anggaran**		
Terwujudnya tertib penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	**Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (%)**	**27,27**	**27,27**	**100,00**	**ST**						
Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						**12.909.985.662,00**	**10.068.063.546,37**	**77,99**			
50. Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata (Kawasan)	6	6	100,00	ST	12.909.985.662,00	10.068.063.546,37	77,99	tunda bayar 2025 Rp 2.049.159.422,00, Terdiri dari total 4 paket, 1 paket fisik, 2 paket perencanaan dan 1 paket pengawasan 1. PENGAWASAN TEKNIS PENATAAN KAWASAN TAMAN GURINDAM 12		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
		Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
									(Lanjutan) 2. JASA NASEHAT DAN PRA DESAIN ARSITEKTURAL PAKET PEKERJAAN DED PEMBANGUNAN MONUMEN TUGU BAHASA NASIONAL DI PULAU PENYENGAT 3. PENATAAN KAWASAN TAMAN GURINDAM 12 (LANJUTAN) 4. PERENCANAAN TEKNIS KAWASAN KOTA LAMA (JL. POS - JL. PASAR IKAN - JL. PASAR BARU) KOTA TANJUNGPINANG		
UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR											
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						**800.011.600,00**	**681.399.250,00**	**85,17**			
51. Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata (Kawasan)	1	2	100,00	ST	800.011.600,00	681.399.250,00	85,17	tunda bayar 2025 Rp99.805.532,00, Terdiri dari 1 paket fisik yaitu Pengecatan Dinding Penahan Tanah di Kawasan Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
		Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						54.045.251.091,00	38.501.040.878,69	71,24	**Penyerapan Anggaran yang tidak maksimal dikarenakan defisit anggaran**		
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	**Persentase Jalan Kondisi Mantap (%)**	**81,10**	**81,11**	**100,00**	**ST**						
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan											
Penyelenggaraan Jalan Provinsi						**51.052.297.552,00**	**35.855.146.664,69**	**70,23**			
52. Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi (Km)	1,581	1,5706	99,34	ST	1.284.702.180,00	729.708.161,00	56,80	tunda bayar 2025 Rp 415.129.311,00, Terdiri dari 4 Paket pengawasan yaitu 1. Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jembatan 2 Pulau Dompak,Kota Tanjungpinang 2. Pengawasan Teknis Rekonstruksi JL. Pelantar II Kota Tanjungpinang 3. Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Sp. Budus - Pelabuhan Roro Penarik, Kab. Lingga 4. Pengawasan Teknis Pembangunan Jembatan Semala, Kab Natuna		
53. Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi (Jembatan)	2	2	100,00	ST	3.507.879.740,00	3.498.774.800,00	99,74			
54. Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang direkonstruksi (Km)	0,641	0,63	98,28	ST	8.128.239.887,00	5.491.858.049,00	67,57	tunda bayar 2025 Rp 1.735.850.860,00,		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
		Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
									Terdiri dari 2 Paket fisik yaitu 1. Peningkatan Jalan Sp. Budus - Pelabuhan Roro Penarik, Kab. Lingga 2. Rekonstruksi Jl. Pelantar II, Kota Tanjungpinang		
55. Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun (Jembatan)	1	1	100,00	ST	12.154.000.000,00	8.906.948.443,69	73,28	tunda bayar 2025 Rp 3.228.307.256,31, Terdiri dari 1 Paket fisik yaitu pembangunan jembatan semala		
56. Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (Km)	0,551	0,578	100,00	ST	8.709.331.921,00	6.426.603.170,00	73,79	tunda bayar 2025 Rp 2.049.879.979,00, Terdiri dari 3 Paket fisik dan 4 pengawasan fisik dengan total 8 SPM 1. Pengawasan Teknis Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Kepulauan Anambas 2. Konsultan Individual Pengawasan Pemeliharaan Rutin Swakelola Jalan Provinsi Di Kota Tanjungpinang Dan Kabupaten Bintan 3. Pengawasan Teknis Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Karimun 4. Pengawasan Teknis Pemeliharaan Rutin		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
		Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
									Jalan Provinsi Di Kabupaten Bintan 5. Belanja Pemeliharaan Tanah - Lapangan untuk Taman Median dan Pedestrian 6. Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Karimun 7. Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Bintan		
57. Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala (Km)	2,052	2,248	100,00	ST	7.175.434.000,00	6.262.529.638,00	87,28	tunda bayar 2025 Rp 848.004.108,00, Terdiri dari 1 paket fisik dan 1 pengawasan fisik dengan total 2 spm 1. Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi di Kota Tanjungpinang 2. Pengawasan Teknis Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Di Kota Tanjungpinang		
58. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)	8	8	100,00	ST	2.158.458.934,00	973.510.876,00	45,10	tunda bayar 2025 Rp 1.098.195.943,00, Terdiri dari 4 paket perencanaan dengan total 4 SPM 1. Review Desain Pembangunan Jembatan Batam - Bintan 2. DED Pembangunan Flyover Simpang Kota Piring 3. Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
		Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
									Dusun 2 Parit Gantung Desa Sei Ungar Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun 4. Review Desain Pembangunan Jembatan Batam - Bintan		
59. Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun (Km)	0,41	0,41	100,00	ST	6.736.217.800,00	2.367.280.437,00	35,14	penyerapan anggaran yang tidak maksimal karena adanya paket pekerjaan yang tidak realisasi anggaran seperti sei ladi, alasan karena untuk proses pencairan membutuhkan dokumen nphd dan belum ditanda tangani. Bp batam meminta 2 dokumen yaitu lo dari kejati dan audit dari bpkp, keduanya sudah ditindaklanjuti namun untuk dokumen lo dari kejati belum ada ditindaklanjuti sampai dengan sekarang. sehingga anggaran yang tersisa kembali lagi ke kas daerah atau SILPA	follow up terkait kelengkapan dokumen dan melapor kepada inspektorat terkait pekerjaan yang belum realisasi spm untuk diinput pada tunda bayar tahun 2026	
60. Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (Km)					1.198.033.090,00	1.197.933.090,00	99,99	Sub kegiatan hanya berisi paket tunda bayar 2024, namun pada saat penginputan target untuk APBDP belum dirubah sehingga	Melakukan reviu target kinerja secara periodik	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
		Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
									tercatat capaian kinerja menjadi 0		
UPTD Pengelolaan Dan Pemeliharaan Infrastruktur											
Penyelenggaraan Jalan Provinsi						2.992.953.539,00	2.645.894.214,00	88,40			
61. Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang dipelihara secara rutin (Jembatan)					99.088.800,00	99.088.800,00	100,00	Sub kegiatan hanya berisi paket tunda bayar 2024		
62. Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (Km)	1	3	100,00	ST	1.560.389.439,00	1.221.833.870,00	78,30	Tunda bayar Rp 189.836.831,00 Terdiri dari 1 Paket non fisik yaitu gaji outsourcing dengan 3 nomor SPM		
63. Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun (Km)	0,2	0,19	93,10	ST	1.333.475.300,00	1.324.971.544,00	99,36			
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI						**495.825.345,00**	**482.288.515,00**	**97,27**			
Meningkatnya pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	**Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli (%)**	**8**	**9,78**	**100,00**	**ST**						
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi						**426.648.275,00**	**421.220.244,00**	**98,73**			
64. Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih (Orang)	90	100	100,00	ST	179.439.875,00	177.987.101,00	99,19			
65. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan	1	1	100,00	ST	86.408.400,00	82.733.143,00	95,75			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
		Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
	Kapasitasnya (Lembaga)										
66. Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi (Orang)	90	100	100,00	ST	160.800.000,00	160.500.000,00	99,81			
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi						**34.750.000,00**	**27.532.256,00**	**79,23**			
67. Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan (Layanan Informasi)	1	1	100,00	ST	34.750.000,00	27.532.256,00	79,23	Defisit anggaran menyebabkan realisasi keuangan pada sub kegiatan ini hanya sebesar 79,23%, tidak ada tunda bayar pada sub kegiatan ini		
Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi						**34.427.070,00**	**33.536.015,00**	**97,41**			
68. Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan (Paket Pekerjaan)	20	30	100,00	ST	24.427.070,00	23.611.494,00	96,66			
69. Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi yang Disusun (Dokumen)	1	1	100,00	ST	10.000.000,00	9.924.521,00	99,25			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
		Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG						920.672.103,00	919.843.703,00	99,91			
Terwujudnya ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang (%)	70	68,63	98,04	ST				Berdasarkan evaluasi melalui aplikasi SIWASTEK, capaian Persentase Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang ditentukan oleh beberapa variabel penilaian. Secara keseluruhan, seluruh aspek kinerja menunjukkan hasil yang baik. target capaian sebesar 70% belum tercapai. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa hal salah satunya proses RTRW Provinsi yang masih berlangsung, sehingga menghambat kinerja pada aspek Pengendalian Pemanfaatan Ruang, khususnya dalam penyusunan Perda pemberian insentif dan disinsentif, serta penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang yang memerlukan dasar hukum RTRW yang telah ditetapkan		
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah						192.248.703,00	191.762.545,00	99,75			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
		Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi											
70. Penetapan RTRW Provinsi	Jumlah Perda RTRW Provinsi (Dokumen)	1	1	100,00	ST	192.248.703,00	191.762.545,00	99,75			
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang						**203.316.400,00**	**203.265.364,00**	**99,97**			
71. Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	100,00	ST	203.316.400,00	203.265.364,00	99,97			
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi						**372.899.000,00**	**372.770.138,00**	**99,97**			
72. Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang (Dokumen)	1	1	100,00	ST	372.899.000,00	372.770.138,00	99,97			
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi						**152.208.000,00**	**152.045.656,00**	**99,89**			
73. Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)	1	1	100,00	ST	152.208.000,00	152.045.656,00	99,89			

3.2.4 Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau. Pelaksanaan urusan tersebut didukung alokasi anggaran sebesar Rp216.020.164.024,00, sementara realisasi anggaran sampai akhir tahun 2025 mencapai Rp183.780.153.764,82 atau setara 85,08 persen, yang mencerminkan tingkat pelaksanaan program dan kegiatan yang sangat optimal. Aspek kinerja menunjukkan 8 indikator program telah ditetapkan, semuanya sebanyak 8 indikator tergolong dalam kategori Sangat Tinggi.

Berdasarkan dokumen perencanaan dan penganggaran, indikator kegiatan sama dengan indikator sub kegiatan, sehingga dalam dokumen LKPJ ini hanya disajikan indikator sub kegiatan. Terlihat dari sebanyak 37 indikator sub kegiatan, semuanya sebanyak 37 indikator telah mencapai target kinerja yang ditetapkan dengan status sangat tinggi. Secara umum kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam dokumen penganggaran dan perjanjian kinerja tergolong baik.

Uraian lebih rinci mengenai capaian kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan, berikut permasalahan yang dihadapi, upaya penanganan, serta tindak lanjut rekomendasi DPRD pada Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.2.4
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Dilaksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							**216.020.164.204,00**	**183.780.153.764,82**	**85,08**			
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							**18.271.159.676,95**	**16.731.914.008,00**	**91,58**			
Meningkatnya Kualitas Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**Predikat**	**A**	**A**	**100,00**	**ST**						
	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	**Indeks**	**77,39**	**86,38**	**111,62**	**ST**						
	Indeks Kepuasan Masyarakat	**Indeks**	**84,98**	**84,98**	**100,00**	**ST**						
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							**528.172.659,47**	**522.492.863,00**	**98,92**			
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	100,00	ST	248.032.800,00	244.834.531,00	98,71			
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	100,00	ST	14.939.859,47	14.274.045,00	95,54			
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	100,00	ST	265.200.000,00	263.384.287,00	99,32			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							**9.652.655.496,30**	**9.458.739.305,00**	**97,99**			
4. 1.04.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	29	29	100,00	ST	8.922.586.924,30	8.744.445.455,00	98,00			
5. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1	100,00	ST	730.068.572,00	714.293.850,00	97,84			
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							**151.459.291,00**	**151.234.413,00**	**99,85**			
6. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	100,00	ST	31.591.291,00	31.591.291,00	100,00			
7. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	100,00	ST	119.868.000,00	119.643.122,00	99,81			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							**227.651.256,00**	**210.368.488,00**	**92,41**			
8. Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	100,00	ST	206.651.256,00	189.368.488,00	91,64			
9. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pegawai	7	7	100,00	ST	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00			
Administrasi Umum Perangkat Daerah							**1.360.599.022,18**	**1.325.038.676,00**	**97,39**			
10. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	12.000.000,00	11.788.200,00	98,24			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
11. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	36.143.000,00	30.840.400,00	85,33			
12. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	332.666.851,18	325.577.825,00	97,87			
13. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	72.686.400,00	68.633.370,00	94,42			
14. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	100,00	ST	113.968.000,00	113.480.000,00	99,57			
15. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	100,00	ST	5.500.000,00	3.151.000,00	57,29			
16. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	100,00	ST	555.762.000,00	546.064.298,00	98,26			
17. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	100,00	ST	157.392.118,00	151.022.930,00	95,95			
18. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	1	100,00	ST	74.480.653,00	74.480.653,00	100,00			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							**2.279.081.860,00**	**2.132.303.212,00**	**93,56**			
19. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	1	100,00	ST	916.075.900,00	770.006.756,00	84,05			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
20. Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	100,00	ST	382.910.000,00	382.910.000,00	100,00			
21. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	100,00	ST	980.095.960,00	979.386.456,00	99,93			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**829.187.432,00**	**765.707.069,00**	**92,34**			
22. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00			
23. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	315.940.000,00	252.539.637,00	79,93			
24. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	96.000.000,00	95.920.000,00	99,92			
25. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	407.247.432,00	407.247.432,00	100,00			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**3.242.352.660,00**	**2.166.029.982,00**	**66,80**			
26. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	100,00	ST	21.877.800,00	21.430.900,00	97,96			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Kendaraan Dinas Jabatan												
27. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	2	100,00	ST	79.175.600,00	70.256.690,00	88,74			
28. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	5	100,00	ST	46.700.000,00	46.041.930,00	98,59			
29. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100,00	ST	3.094.599.260,00	2.028.300.462,00	65,54		Tunda Bayar Tahun 2025 / Fisik Gedung Kantor	
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN							**865.593.600,00**	**808.757.305,00**	**93,43**			
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	**Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni**	**%**	**100**	**100**	**100,00**	**ST**						
	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	**%**	**100**	**100**	**100,00**	**ST**						
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi							**865.593.600,00**	**808.757.305,00**	**93,43**			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
30. Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi	Rumah	2	2	100,00	ST	865.593.600,00	808.757.305,00	93,43			
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN							**8.356.429.499,05**	**8.142.372.014,00**	**97,44**			
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	**Persentase Luas kawasan kumuh 10 â€“ 15 Ha yang ditangani**	**%**	**1,83**	**1,83**	**100,00**	**ST**						
	Jumlah Rumah Layak Huni Yang Di Bangun	**Unit**	**99**	**99**	**100,00**	**ST**						
Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha							**29.043.000,00**	**29.043.000,00**	**100,00**			
31. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Laporan	1	1	100,00	ST	13.020.000,00	13.020.000,00	100,00		Tunda Bayar Tahun 2024 / Honorarium KI	
32. Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Orang	50	50	100,00	ST	16.023.000,00	16.023.000,00	100,00		Tunda Bayar Tahun 2024 / Honorarium KI	
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha							**8.327.386.499,05**	**8.113.329.014,00**	**97,43**			
33. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai	Rumah	99	99	100,00	ST	7.417.386.499,05	7.248.330.934,00	97,72			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki											
34. Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Terlaksananya Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas)	Ha	5	5	100,00	ST	910.000.000,00	864.998.080,00	95,05			
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)							**188.526.981.428,00**	**158.097.110.437,82**	**83,86**			
Meningkatnya Penyediaan PSU Permukiman	**Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU**	**%**	**53,00**	**54,40**	**102,64**	**ST**						
Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman							**188.526.981.428,00**	**158.097.110.437,82**	**83,86**			
35. Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Dokumen	1	1	100,00	ST	894.786.000,00	394.146.000,00	44,05		Tunda Bayar Tahun 2025 / 8 Paket Dokumen Perencanaan	
36. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Unit	200	423	211,50	ST	187.105.636.428,00	157.178.901.938,82	84,01		Tunda Bayar Tahun 2025 / 129 Paket Paket Fisik PSU	
37. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Laporan	1	1	100,00	ST	526.559.000,00	524.062.499,00	99,53			

3.2.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

3.2.5a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Pelaksanaan urusan tersebut didukung alokasi anggaran sebesar Rp9.208.666.358,00, sementara realisasi anggaran sampai akhir tahun 2025 mencapai Rp8.962.203.403,00 atau setara 97,32 persen, yang mencerminkan tingkat pelaksanaan program dan kegiatan yang sangat optimal. Kinerja program menunjukkan 6 indikator program telah ditetapkan dan 5 di antaranya termasuk dalam kategori sangat tinggi, dan 1 indikator kategori tinggi.

Berdasarkan dokumen perencanaan dan penganggaran, indikator kegiatan sama dengan indikator sub kegiatan, sehingga dalam dokumen LKPJ ini hanya disajikan indikator sub kegiatan. Terlihat dari sebanyak 27 indikator sub kegiatan, semuanya sebanyak 27 indikator telah mencapai target kinerja yang ditetapkan dengan status sangat tinggi. Secara umum kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam dokumen penganggaran dan perjanjian kinerja tergolong baik.

Uraian lebih rinci mengenai capaian kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan, berikut permasalahan yang dihadapi, upaya penanganan, serta tindak lanjut rekomendasi DPRD pada Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.2.5a

Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat yang Dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Status Capaian	Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025		Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT – BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							**9.208.666.358,00**	**8.962.203.403,00**	**97,32**	1. Dalam rangka menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-62/PK/2025 tanggal 23 September 2025 hal penyampaian Rancangan Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2026. Berdasarkan hal tersebut dilakukan desk dengan OPD di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau guna melakukan efisiensi akibat dari menurunnya Alokasi Transfer ke Daerah pada tahun 2026. 2. Indikator Program Belum dapat dinilai dikarenakan masih menunggu hasil	Mengoptimalkan seluruh anggaran belanja dengan tidak mengurangi indikator Keluaran sesuai Target, salah satu cara dengan melaksanakan kegiatan menggunakan fasilitas daring	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							**8.172.857.514,00**	**8.060.629.273,00**	**98,63**			
Meningkatnya Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)**	**Predikat**	**BB**	**BB**	**100,00**	**ST**						
	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	**Indeks**	**87,00**	**83,00**	**95,40**	**ST**						
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	**Imdeks**	**87,75**	**87,64**	**99,87**	**ST**						
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							**79.227.733,00**	**71.636.471,00**	**90,42**			
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2,00	2,00	100,00	ST	47.383.381,00	43.551.045,00	91,91			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Status Capaian	Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025		Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1,00	1,00	100,00	ST	9.565.900,00	9.535.900,00	99,69	Pangilinan oleh BNPB		
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2,00	2,00	100,00	ST	22.278.452,00	18.549.526,00	83,26			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							**6.912.409.566,00**	**6.831.558.080,00**	**98,83**			
4. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	59,00	59,00	100,00	ST	6.645.037.966,00	6.570.064.080,00	98,87			
5. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	2,00	2,00	100,00	ST	267.371.600,00	261.494.000,00	97,80			
Administrasi Umum Perangkat Daerah							**220.818.504,00**	**212.760.555,00**	**96,35**			
6. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1,00	1,00	100,00	ST	5.735.500,00	5.217.000,00	90,96			
7. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	1,00	100,00	ST	20.427.680,00	18.108.542,00	88,65			
8. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1,00	1,00	100,00	ST	8.366.800,00	8.179.190,00	97,76			
9. Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	Paket	1,00	1,00	100,00	ST	12.043.800,00	11.945.070,00	99,18			
10. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1,00	1,00	100,00	ST	5.000.000,00	4.740.000,00	94,80			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Status Capaian	Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025		Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
11. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1,00	1,00	100,00	ST	169.244.724,00	164.570.753,00	97,24			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							**150.258.400,00**	**150.000.000,00**	**99,83**			
12. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2,00	2,00	100,00	ST	150.258.400,00	150.000.000,00	99,83			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**605.332.292,00**	**591.524.488,00**	**97,72**			
13. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2,00	2,00	100,00	ST	128.037.600,00	115.129.796,00	89,92			
14. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1,00	1,00	100,00	ST	477.294.692,00	476.394.692,00	99,81			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**204.811.019,00**	**203.149.679,00**	**99,19**			
15. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	22,00	22,00	100,00	ST	155.503.619,00	154.439.890,00	99,32			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Status Capaian	Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025		Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Kendaraan Dinas Jabatan												
16. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	17,00	17,00	100,00	ST	13.401.800,00	12.834.301,00	95,77			
17. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1,00	1,00	100,00	ST	35.905.600,00	35.875.488,00	99,92			
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA							**1.035.808.844,00**	**901.574.130,00**	**87,04**			
Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan, Kesiapsiagaan, Tanggap Darurat dan saat Pasca Bencana	**Indeks Pencegahan Bencana (Indeks)**	**Indeks**	**2,70**	**2,99**	**110,24**	**ST**						
	Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana (Indeks)	**Indeks**	**0,28**	**0,27**	**96,43**	**ST**						
	Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana (Indeks)	**Indeks**	**0,54**	**0,47**	**87,04**	**T**						
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana							**225.936.989,40**	**133.640.793,00**	**59,15**			
18. Pengelolaan Risiko Bencana	Jumlah akar masalah Risiko Bencana lintas Kabupaten/ kota yang tertangani	Kegiatan	1,00	1,00	100,00	ST	79.037.538,00	33.492.267,00	42,38			
19. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/ Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Keluarga	10,00	10,00	100,00	ST	20.580.000,00	20.580.000,00	100,00			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Status Capaian	Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025		Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
20. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Dokumen	1,00	1,00	100,00	ST	54.726.049,40	54.141.126,00	98,93			
21. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/ Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	Orang	40,00	40,00	100,00	ST	71.593.402,00	25.427.400,00	35,52			
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana							**574.815.068,60**	**562.374.739,00**	**97,84**			
22. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencariaan, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Laporan	1,00	1,00	100,00	ST	14.662.000,00	14.563.680,00	99,33			
23. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	100,00	100,00	100,00	ST	321.222.786,00	309.665.374,00	96,40			
24. Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Laporan	2,00	2,00	100,00	ST	225.454.182,00	224.745.702,00	99,69			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Status Capaian	Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025		Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
25. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan	1,00	1,00	100,00	ST	13.476.100,60	13.399.983,00	99,44			
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana							**235.056.786,00**	**205.558.598,00**	**87,45**			
26. Penanganan pasca bencana Provinsi	Jumlah dokumen pengkajian kebutuhan pasca bencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana (R3P) yang disusun	Dokumen	1,00	1,00	100,00	ST	211.015.742,00	191.743.298,00	90,87			
27. Koordinasi penanganan pasca bencana provinsi	Jumlah penyelesaian kegiatan pasca bencana di semua sektor sesuai berdasarkan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (R3P) Provinsi yang di legalkan.	Kegiatan	1,00	1,00	100,00	ST	24.041.044,00	13.815.300,00	57,47			

3.2.5b. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Riau. Pelaksanaan urusan tersebut didukung alokasi anggaran sebesar Rp25.677.685.026,00, sementara realisasi anggaran sampai akhir tahun 2025 mencapai Rp24.832.206.577,00 atau setara 96,71 persen, yang mencerminkan tingkat pelaksanaan program dan kegiatan yang sangat optimal.

Berdasarkan dokumen perencanaan dan penganggaran, indikator kegiatan sama dengan indikator sub kegiatan, sehingga dalam dokumen LKPJ ini hanya disajikan indikator sub kegiatan. Terlihat dari sebanyak 34 indikator sub kegiatan, semuanya sebanyak 34 indikator telah mencapai target kinerja yang ditetapkan dengan status sangat tinggi. Secara umum kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam dokumen penganggaran dan perjanjian kinerja tergolong baik.

Kinerja program menunjukkan 9 indikator program telah ditetapkan dan seluruhnya sebanyak 9 indikator termasuk dalam kategori sangat tinggi. Uraian lebih rinci mengenai capaian kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan, berikut permasalahan yang dihadapi, upaya penanganan, serta tindak lanjut rekomendasi DPRD pada Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.2.5b
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat yang Dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							**25.677.685.026,00**	**24.832.206.577,00**	**96,71**			
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							**23.053.041.332,00**	**22.600.977.851,00**	**98,04**			
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**Predikat**	**BB**	**BB**	**100,00**	**ST**						
	Indeks Kepuasan Masyarakat	**Indeks**	**84,43**	**84,68**	**100,30**	**ST**						
	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	**Indeks**	**77,61**	**78,58**	**101,25**	**ST**						
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							**123.009.443,00**	**111.564.540,00**	**90,70**			
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	100,00	ST	84.234.600,00	81.837.112,00	97,15			
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Laporan	6	6	100,00	ST	38.774.843,00	29.727.428,00	76,67			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							**17.203.638.135,00**	**16.970.751.596,00**	**98,65**			
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	216	216	100,00	ST	16.767.601.135,00	16.545.804.796,00	98,68			
4. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1	100,00	ST	409.752.000,00	399.148.000,00	97,41			
5. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	1	100,00	ST	12.884.500,00	12.572.200,00	97,58			
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	100,00	ST	13.400.500,00	13.226.600,00	98,70			
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							**9.464.000,00**	**7.864.518,00**	**83,10**			
7. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Laporan	1	1	100,00	ST	9.464.000,00	7.864.518,00	83,10			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							**580.844.000,00**	**580.844.000,00**	**100,00**			
8. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	1	100,00	ST	580.844.000,00	580.844.000,00	100,00			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Administrasi Umum Perangkat Daerah							**447.437.475,00**	**409.098.713,00**	**91,43**			
9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	8.962.700,00	8.858.910,00	98,84			
10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	32.677.000,00	6.551.000,00	20,05			
11. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	4.118.100,00	4.118.100,00	100,00			
12. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	23.565.935,00	21.524.565,00	91,34			
13. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	22.056.261,00	21.303.261,00	96,59			
14. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	100,00	ST	349.852.579,00	340.537.977,00	97,34			
15. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	100,00	ST	6.204.900,00	6.204.900,00	100,00			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							**386.225.000,00**	**386.225.000,00**	**100,00**			
16. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	100,00	ST	241.025.000,00	241.025.000,00	100,00			
17. Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	145.200.000,00	145.200.000,00	100,00			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							**3.228.244.091,00**	**3.174.290.342,00**	**98,33**			
18. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	160.000.000,00	146.950.000,00	91,84			
19. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	32.593.000,00	30.140.500,00	92,48			
20. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	3.035.651.091,00	2.997.199.842,00	98,73			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							**1.074.179.188,00**	**960.339.142,00**	**89,40**			
21. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	5	5	100,00	ST	63.325.000,00	61.918.050,00	97,78			
22. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	10	100,00	ST	302.489.093,00	298.119.767,00	98,56			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
23. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	5	100,00	ST	31.914.395,00	30.136.035,00	94,43			
24. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100,00	ST	676.450.700,00	570.165.290,00	84,29			
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							**2.525.214.394,00**	**2.132.456.256,00**	**84,45**			
Meningkatnya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	**Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan**	**%**	**100**	**100**	**100,00**	**ST**						
	Persentase anggota Satlinmas yang telah ditingkatkan kapasitasnya	**%**	**2,17**	**2,17**	**100,00**	**ST**						
	Persentase SDM aparatur satpol PP yang ditingkatkan kompetensinya	**%**	**64,55**	**64,55**	**100,00**	**ST**						
	Persentase perda dan/atau perkada yang ditegakkan	**%**	**100**	**100**	**100,00**	**ST**						
	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	**%**	**73,49**	**73,49**	**100,00**	**ST**						
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota							**2.335.954.394,00**	**1.981.028.056,00**	**84,81**			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
dalam 1 (satu) Daerah Provinsi												
25. Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dokumen	1	1	100,00	ST	42.807.000,00	30.809.120,00	71,97			
26. Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Dokumen	1	1	100,00	ST	139.737.104,00	117.028.180,00	83,75			
27. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	50	50	100,00	ST	158.409.115,00	155.060.784,00	97,89			
28. Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Dokumen	1	1	100,00	ST	1.253.808.075,00	1.000.268.537,00	79,78			
29. Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada	Laporan	1	1	100,00	ST	3.500.000,00	-	0,00			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
30. Pencegahan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	Laporan	1	1	100,00	ST	683.025.500,00	636.806.440,00	93,23			
31. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti pelatihan teknis Satuan Polisi Pamong Praja	Orang	15	15	100,00	ST	54.667.600,00	41.054.995,00	75,10			
Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur							**189.260.000,00**	**151.428.200,00**	**80,01**			
32. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	1	1	100,00	ST	109.150.230,00	105.706.300,00	96,84			
33. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	1	1	100,00	ST	80.109.770,00	45.721.900,00	57,07			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN							**99.429.300,00**	**98.772.470,00**	**99,34**			
Meningkatnya Pencegahan kebakaran	**Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran**	**%**	**14,29**	**14,29**	**100,00**	**ST**						
Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran							**99.429.300,00**	**98.772.470,00**	**99,34**			
34. Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Laporan	1	1	100,00	ST	99.429.300,00	98.772.470,00	99,34			

Keterangan: *) menggunakan data tahun 2020, karena data tahun 2025 belum dirilis BPS

3.2.6 Urusan Sosial

Urusan Sosial Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau. Pelaksanaan urusan tersebut didukung alokasi anggaran sebesar Rp22.713.060.507,00, sementara realisasi anggaran sampai akhir tahun 2025 mencapai Rp20.612.046.900,00 atau setara 90,75 persen, yang mencerminkan tingkat pelaksanaan program dan kegiatan yang sangat optimal. Kinerja menunjukkan 15 indikator program telah ditetapkan dan seluruhnya (15 indikator) tergolong dalam kategori sangat tinggi.

Berdasarkan dokumen perencanaan dan penganggaran, indikator kegiatan sama dengan indikator sub kegiatan, sehingga dalam dokumen LKPJ ini hanya disajikan indikator sub kegiatan. Terlihat dari sebanyak 63 indikator sub kegiatan, semuanya sebanyak 63 indikator telah mencapai target kinerja yang ditetapkan dengan status sangat tinggi. Secara umum kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam dokumen penganggaran dan perjanjian kinerja tergolong baik.

Uraian lebih rinci mengenai capaian kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan, berikut permasalahan yang dihadapi, upaya penanganan, serta tindak lanjut rekomendasi DPRD pada Urusan Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.2.6
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Sosial yang Dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							**22.713.060.507,00**	**20.612.046.900,00**	**90,75**			
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							**13.239.229.566,00**	**12.668.221.788,00**	**95,69**			
Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)**	**Predikat**	**BB**	**BB**	**100,00**	**ST**						
	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	**Indeks**	**83,30**	**83,82**	**100,62**	**ST**						
Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial	**Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)**	**Indeks**	**83,43**	**88,04**	**105,53**	**ST**						
1.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							**337.047.521,79**	**327.456.637,00**	**97,15**			
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	100,00	ST	11.559.318,00	9.906.728,00	85,70			
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	100,00	ST	42.880.976,00	40.439.276,00	94,31			
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Laporan	2	2	100,00	ST	77.793.014,00	75.061.179,00	96,49			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	100,00	ST	204.814.213,79	202.049.454,00	98,65			
1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							**10.868.509.432,00**	**10.376.451.029,00**	**95,47**			
5. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	612	612	100,00	ST	10.378.841.432,00	9.894.737.749,00	95,34			
6. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1	100,00	ST	489.668.000,00	481.713.280,00	98,38			
1.06.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							**33.187.451,00**	**32.756.607,00**	**98,70**			
7. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	100,00	ST	33.187.451,00	32.756.607,00	98,70			
1.06.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							**24.588.000,00**	**22.945.000,00**	**93,32**			
8. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		1	1	100,00	ST	24.588.000,00	22.945.000,00	93,32			
Administrasi Umum Perangkat Daerah							**732.135.859,00**	**717.039.495,00**	**97,94**			
9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	15.559.226,00	14.800.851,00	95,13			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
10. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	34.939.743,00	34.110.300,00	97,63			
11. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	59.476.492,00	51.643.547,00	86,83			
12. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	47.058.098,00	44.959.498,00	95,54			
13. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	100,00	ST	7.822.500,00	4.830.000,00	61,74	Adanya penurunan jumlah kunjungan tamu		
14. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	100,00	ST	567.279.800,00	566.695.299,00	99,90			
1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							**417.153.607,21**	**399.489.570,00**	**95,77**			
15. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		11	11	100,00	ST	329.112.915,00	316.140.000,00	96,06			
16. Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	8.919.522,21	8.624.370,00	96,69			
17. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	7	7	100,00	ST	79.121.170,00	74.725.200,00	94,44			
1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**559.981.769,00**	**546.880.781,00**	**97,66**			
18. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	100,00	ST	53.141.170,00	52.830.000,00	99,41			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
19. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	MBER DAYAniS	1	1	100,00	ST	85.588.360,00	79.389.430,00	92,76			
20. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	421.252.239,00	414.661.351,00	98,44			
1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**266.625.926,00**	**245.202.669,00**	**91,97**			
21. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	4	4	100,00	ST	188.152.346,00	173.933.454,00	92,44			
22. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	58	58	100,00	ST	37.801.280,00	32.098.980,00	84,92			
23. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100,00	ST	40.672.300,00	39.170.235,00	96,31			
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL							**600.895.841,00**	**596.713.086,00**	**99,30**			
Meningkatnya pemberdayaan sosial	**Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial**	**%**	**31,37**	**31,37**	**100,00**	**ST**						
	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat	**%**	**0,89**	**0,89**	**100,00**	**ST**						

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
	Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial											
1.06.02.1.01 Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi							8.527.300,00	8.000.892,00	93,83			
24. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Dokumen	1	1	100,00	ST	8.527.300,00	8.000.892,00	93,83			
1.06.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi							**592.368.541,00**	**588.712.194,00**	**99,38**			
25. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Provinsi	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	Kegiatan	80	80	100,00	ST	81.730.881,00	78.926.082,00	96,57			
26. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	Lembaga	3	3	100,00	ST	510.637.660,00	509.786.112,00	99,83			
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL							**2.374.083.895,00**	**2.110.879.453,00**	**88,91**			
Meningkatnya rehabilitasi sosial	**Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**ST**						

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
	kebutuhan dasarnya di dalam panti											
	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**ST**						
	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**ST**						
	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**ST**						
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/ AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**ST**						
1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti							**700.969.508,00**	**641.204.128,00**	**91,47**			
27. Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	65	65	100,00	ST	294.483.373,00	266.383.640,00	90,46			
28. Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	65	65	100,00	ST	21.957.909,00	18.096.028,00	82,41			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
29. Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	65	65	100,00	ST	31.481.451,00	26.979.156,00	85,70			
30. Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	12	12	100,00	ST	155.366.000,00	139.700.004,00	89,92			
31. Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	65	65	100,00	ST	7.807.962,00	5.408.000,00	69,26			
32. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Peserta	65	65	100,00	ST	177.721.380,00	175.028.200,00	98,48			
33. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Dokumen	1	1	100,00	ST	12.151.433,00	9.609.100,00	79,08			
1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti							**858.193.670,00**	**825.719.512,00**	**96,22**			
34. Pengasuhan	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	Anak	3	3	100,00	ST	4.001.645,00	3.672.675,00	91,78			
35. Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi	Orang	595	595	100,00	ST	131.210.287,00	124.838.260,00	95,14			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
	Minimal Kewenangan Provinsi											
36. Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	310	310	100,00	ST	283.534.000,00	277.008.014,00	97,70			
37. Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	9	9	100,00	ST	287.431.045,00	279.468.546,00	97,23			
38. Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	595	595	100,00	ST	26.580.597,00	23.165.700,00	87,15			
39. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	595	595	100,00	ST	110.999.111,00	103.695.517,00	93,42			
40. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Dokumen	1	1	100,00	ST	14.436.985,00	13.870.800,00	96,08			
1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti							**220.338.884,00**	**214.770.233,00**	**97,47**			
41. Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	103	103	100,00	ST	47.956.100,00	46.229.115,00	96,40			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
42. Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	103	103	100,00	ST	34.653.000,00	33.873.331,00	97,75			
43. Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	4	4	100,00	ST	31.000.000,00	30.736.248,00	99,15			
44. Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	103	103	100,00	ST	26.834.796,00	25.483.412,00	94,96			
45. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	103	103	100,00	ST	52.696.399,00	51.450.842,00	97,64			
46. Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Pemulasaraan	2	2	100,00	ST	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00			
47. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	1	100,00	ST	17.198.589,00	16.997.285,00	98,83			
1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti							**47.012.132,00**	**40.785.896,00**	**86,76**			
48. Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai	Orang	10	10	100,00	ST	4.983.768,00	4.014.606,00	80,55			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
	dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi											
49. Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	10	10	100,00	ST	4.591.883,00	3.077.364,00	67,02	Anggaran yang tidak terserap pada kegiatan pendukung seperti ATK dan kegiatan-kegiatan lainnya yang tidak mendukung langsung sesuai rekomendasi dari hasil rekonsiliasi dengan DPKAD		
50. Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	10	10	100,00	ST	963.036,00	887.112,00	92,12			
51. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	10	10	100,00	ST	5.323.000,00	5.026.972,00	94,44			
52. Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	Orang	10	10	100,00	ST	16.706.841,00	15.522.206,00	92,91			
53. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Dokumen	1	1	100,00	ST	14.443.604,00	12.257.636,00	84,87			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Terlantar di dalam Panti												
1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti							**547.569.701,00**	**388.399.684,00**	**70,93**			
54. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	425	393	92,47	ST	531.807.259,00	374.262.800,00	70,38	Terdapat SPM LS tunda bayar Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan Rumah Singgah Batam Rp. 120.080.000	Koordinasi dengan BKAD	
55. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Dokumen	1	1	100,00	ST	15.762.442,00	14.136.884,00	89,69			
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL							**3.757.605.625,00**	**3.529.964.795,00**	**93,94**			
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	**Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar**	**%**	**4,34**	**3,86**	**89,07**	**T**						
	Persentase Daerah yang Melaksanakan	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**ST**						

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
	Pengelolaan dan Pendataan Fakir Miskin											
	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi	**%**	**0,17**	**0,18**	**106,27**	**ST**						
1.06.05.1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi							**3.757.605.625,00**	**3.529.964.795,00**	**93,94**			
56. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	8.150	8.150	100,00	ST	1.902.342.830,00	1.748.337.215,00	91,90			
57. Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Aktif Melaksanakan Pemutakhiran Data Fakir Miskin	Kabupaten/Kota	7	7	100,00	ST	620.554.490,00	564.563.126,00	90,98			
58. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Orang	392	390	99,49	ST	1.234.708.305,00	1.217.064.454,00	98,57	Terdapat Bansos UEP yang tidak dapat dicairkan karena tidak memenuhi syarat		
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA							**2.191.863.580,00**	**1.168.939.253,00**	**53,33**			
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	**Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**ST**						
1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial							**2.191.863.580,00**	**1.168.939.253,00**	**53,33**			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi												
59. Penyediaan Permakanan	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Orang	100	100	100,00	ST	2.015.518.059,00	994.184.535,00	49,33	Terdapat Bansos Bencana yg tidak dapat dicairkan Rp. 1.016.005.000 karena tidak memenuhi syarat (Data awal penerima bansos dari BTT sebanyak 220 yang pelaksanaannya menjadi bantuan terencana melalui Dinsos. Setelah dilakukan verifikasi ulang yang memenuhi syarat menjadi 120 penerima manfaat, sehingga yang bisa dicairkan sebesar Rp. 837.440.000)		
60. Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat	Orang	100	100	100,00	ST	39.754.427,00	38.605.850,00	97,11			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
61. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	Orang	100	100	100,00	ST	24.002.119,00	23.569.168,00	98,20			
62. Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	Korban	100	100	100,00	ST	112.588.975,00	112.579.700,00	99,99			
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN							**549.382.000,00**	**537.328.525,00**	**97,81**			
Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan	**Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik**	**%**	**11,11**	**11,11**	**100,00**	**ST**						
1.06.07.1.01 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi							**549.382.000,00**	**537.328.525,00**	**97,81**			
63. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Makam	1	1	100,00	ST	549.382.000,00	537.328.525,00	97,81			

3.2.7. Urusan Tenaga Kerja

Urusan Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau. Pelaksanaan urusan tersebut didukung alokasi anggaran sebesar Rp37.958.769.556,00, sementara realisasi anggaran sampai akhir tahun 2025 mencapai Rp36.165.860.057,26 atau setara 95,28 persen, yang mencerminkan tingkat pelaksanaan program dan kegiatan yang sangat optimal. Kinerja program menunjukkan dari sebanyak 9 indikator program telah ditetapkan, 8 diantaranya termasuk dalam kategori sangat tinggi, dan sebanyak 1 indikator kategori tinggi.

Berdasarkan dokumen perencanaan dan penganggaran, indikator kegiatan sama dengan indikator sub kegiatan, sehingga dalam dokumen LKPJ ini hanya disajikan indikator sub kegiatan. Terlihat dari sebanyak 34 indikator sub kegiatan, sebanyak 28 indikator telah mencapai target kinerja yang ditetapkan dengan status sangat tinggi, sebanyak 4 indikator kategori Tinggi, dan sebanyak 2 indikator kategori sedang. Secara umum kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam dokumen penganggaran dan perjanjian kinerja tergolong baik.

Uraian lebih rinci mengenai capaian kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan, berikut permasalahan yang dihadapi, upaya penanganan, serta tindak lanjut rekomendasi DPRD pada Urusan Tenaga Kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.2.7
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Tenaga Kerja yang Dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							**37.958.769.556,00**	**36.165.860.057,26**	**95,28**			
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							**29.461.805.774,00**	**28.211.432.436,26**	**95,76**	**Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja Pegawai**	**Pengadaan Fasilitas kerja dan sarana dan prasarana gedung kantor secara berkala disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang ada termasuk pengadaan mebel maupun belanja modal sarana dan Prasarana pendukung**	
Meningkatnya Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**Predikat**	**BB**	**BB**	**100,00**	**ST**						
	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	**Indeks**	**78,93**	**87,07**	**110,31**	**ST**						
	Indeks Kepuasan Masyarakat	**Indeks**	**86,31**	**82,67**	**95,78**	**ST**						
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							**41.907.510,00**	**24.872.335,00**	**59,35**			
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	100,00	ST	7.162.000,00	2.288.455,00	31,95	Adanya kebijakan efisiensi anggaran		
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	3	100,00	ST	13.941.200,00	4.156.839,00	29,82	Adanya kebijakan efisiensi anggaran		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	3	100,00	ST	20.804.310,00	18.427.041,00	88,57			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							**26.251.820.342,00**	**25.551.271.534,00**	**97,33**			
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	106	134	126,42	ST	25.696.580.342,00	25.019.956.534,00	97,37			
4. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	100,00	ST	555.240.000,00	531.315.000,00	95,69			
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							**46.740.000,00**	**45.940.000,00**	**98,29**			
5. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	1	100,00	ST	44.240.000,00	44.240.000,00	100,00			
6. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	15	15	100,00	ST	2.500.000,00	1.700.000,00	68,00	Adanya kebijakan efisiensi anggaran		
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah							**605.948.590,00**	**497.396.947,00**	**82,09**			
7. 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	100,00	ST	10.431.000,00	9.718.510,00	93,17			
8. 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	100,00	ST	140.122.200,00	123.989.000,00	88,49			
9. 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	2	100,00	ST	54.743.000,00	17.798.755,00	32,51			
10. 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	7	7	100,00	ST	114.253.994,00	111.304.521,00	97,42			
11. 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	4	100,00	ST	29.845.600,00	28.808.622,00	96,53			
12. 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	72	72	100,00	ST	6.120.000,00	5.760.000,00	94,12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
13.07 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	360	360	100,00	ST	250.432.796,00	200.017.539,00	79,87			
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**662.908.800,00**	**544.256.551,00**	**82,10**			
14.09 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	3	3	100,00	ST	87.635.000,00	87.635.000,00	100,00			
15.10 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	18	15	83,33	T	494.094.800,00	375.442.551,00	75,99			
16.12 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	100,00	ST	81.179.000,00	81.179.000,00	100,00			
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**1.129.899.031,00**	**1.036.833.294,00**	**91,76**			
17.13 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5	5	100,00	ST	428.554.657,00	370.805.271,00	86,52			
18.14 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	2	2	100,00	ST	39.520.000,00	37.335.000,00	94,47			
19.15 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	4	100,00	ST	661.824.374,00	628.693.023,00	94,99			
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**722.581.501,00**	**510.861.775,26**	**70,70**			
20.16 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	13	11	84,62	T	156.573.501,00	147.776.094,00	94,38			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
21.17 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20	20	100,00	ST	17.160.000,00	16.006.200,00	93,28			
22.18 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100,00	ST	548.848.000,00	347.079.481,26	63,24			
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA							**8.252.000,00**	**1.419.005,00**	**17,20**			
Terkelolanya informasi tenaga kerja	**Persentase dokumen perencanaan ketenagakerjaan (RTKD) yang berkualitas**	**dokumen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**ST**						
Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja							**8.252.000,00**	**1.419.005,00**	**17,20**			
23. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen	1	1	100,00	ST	8.252.000,00	1.419.005,00	17,20	Adanya kebijakan efisiensi anggaran		
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA							**7.386.480.453,00**	**6.997.858.597,00**	**94,74**			
Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	**Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi**	**%**	**66,67**	**61,53**	**92,29**	**ST**				**1. Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi belum sepenuhnya *link and match* dengan kebutuhan dunia usaha dan industri 2. Penyerapan peserta lulusan pelatihan 3. Sarana dan Prasarana untuk beberapa jurusan pelatihan masih membutuhkan pembaharuan**	**1. Melaksanakan kegiatan TNA (Training Needs Analysis) dan melaksanakan kerjasama dengan beberapa perusahaan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama 2. Melakukan Market Signal Analysis dan koordinasi intensif dengan asosiasi pengusaha/industri. 3. Melaksanakan kerjasama dengan beberapa perusahaan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama 4. Usulan dukungan anggaran**	
Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi							**7.364.430.453,00**	**6.977.600.197,00**	**94,75**			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
24. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	Orang	400	362	90,50	T	2.528.914.700,00	2.493.043.400,00	98,58			
25. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n (Balai Latihan Kerja)	Orang	500	362	72,40	S	3.494.952.000,00	3.374.405.182,00	96,55			
26. Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta Untuk Penyediaan Infrastruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Dokumen	15	15	100,00	ST	20.000.000,00	19.688.000,00	98,44			
27. Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja (UPTD BLK)	Kegiatan	16	16	100,00	ST	1.320.563.753,00	1.090.463.615,00	82,58			
Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi							**22.050.000,00**	**20.258.400,00**	**91,87**			
28. Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran produktivitas dan daya saing tenaga kerja di tingkat Daerah	Dokumen	3	3	100,00	ST	22.050.000,00	20.258.400,00	91,87			
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL							**392.760.000,00**	**375.039.998,00**	**95,49**	**Dua Kabupaten Kota Belum Membentuk tripartit yaitu Kab. Natuna dan Kab. Anambas**	**Perlu dilakukan Pembinaan dan koordinasi dengan Instansi terkait**	
Meningkatnya pekerja Provinsi Kepri yang terlindungi	**Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak**	**%**	**50**	**59,45**	**118,91**	**ST**				**Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Provinsi dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan daya beli**	**a. Melakukan sosialisasi kepada unsur pengusaha dan unsur pekerja dalam rangka penerapan upah minimum di tempat kerja.**	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
										masyarakat terhadap kebutuhan sehari-hari	**b. Melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota untuk melakukan sosialisasi dan pembinaan agar penerapan upah minimum dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dengan harapan produksi atau usaha tetap berjalan dengan memperhatikan kesejahteraan pekerja/karyawan.**	
Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi							**159.091.600,00**	**156.617.600,00**	**98,44**			
29. Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Dokumen	8	6	75,00	S	159.091.600,00	156.617.600,00	98,44	Terdapat 2 kabupaten/kota yang belum membentuk kelembagaan LKS Tripartit untuk membahas isu-isu Ketenagakerjaan.	Mendorong Kabupaten/Kota yang belum memiliki LKS tripartit untuk segera membentuk Kelembagaan LKS tripartit	
Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)							**233.668.400,00**	**218.422.398,00**	**93,48**			
30. Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP	Dokumen	1	1	100,00	ST	85.622.400,00	77.627.000,00	90,66			
31. Penetapan Upah Minimum	Jumlah penetapan UMK	Dokumen	7	7	100,00	ST	148.046.000,00	140.795.398,00	95,10			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Kabupaten/Kota (UMK)												
2.07.06 - PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN							**709.471.329,00**	**580.110.021,00**	**81,77**			
Terlindunginya hak-hak pekerja	**Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan**	**%**	**51,98**	**50,8**	**97,73**	**ST**				Kurangnya pengetahuan para pengusaha dan pekerja mengenai BPJS Ketenagakerjaan dan manfaatnya.	Mengoptimalkan Koordinasi dengan instansi terkait termasuk (BPJS Ketenagakerjaan/Kementerian dan kabupaten/Kota dalam menunjang kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau	
	Persentase kasus ketenagakerjaan yang tertangani	**%**	**77,00**	**64,38**	**83,61**	**T**				a) Kurangnya pemahaman manajemen perusahaan terkait hak hak pekerja/ Pengelolaan SDM b) Belum optimalnya pelaksanaan pemeriksaan ketenagakerjaan dan pembinaan ke perusahaan/badan usaha.	Mengoptimalkan sosialisasi terhadap peraturan ketenagakerjaan ke perusahaan melalui pelaksanaan pemeriksaan dan pembinaan ke perusahaan/badan usaha.	
	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	**%**	**14,80**	**22,54**	**152,30**	**ST**				Keterbatasan SDM di perusahaan dalam pemahaman SMK3 di perusahaan yang disebabkan faktor pendidikan dan faktor belum optimalnya pembinaan SMK3 di perusahaan sehingga karyawan belum memahami manfaat maupun tujuan dari penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan	a. Melaksanakan Pembinaan Penerapan SMK3 Di Perusahaan sesuai dengan target Kinerja Pejabat Pengawas Ketenagakerjaan b. Mengoptimalkan Koordinasi dengan instansi terkait termasuk kabupaten/Kota dalam menunjang Kinerja Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
										Keselamatan Kerja (SMK3) di perusahaan		
Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan							**709.471.329,00**	**580.110.021,00**	**81,77**			
32. Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	Unit	500	500	100	ST	259.805.720,00	249.903.591,00	96,19			
33. Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	Kasus	40	35	87,5	T	349.554.000,00	240.936.520,00	68,93			
34. Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	Unit	150	150	100	ST	100.111.609,00	89.269.910,00	89,17			

3.2.8 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kepulauan Riau. Pelaksanaan urusan tersebut didukung alokasi anggaran sebesar Rp21.900.477.218,00, sementara realisasi anggaran sampai akhir tahun 2025 mencapai Rp20.199.282.663,00 atau sebesar 92,23 persen, yang mencerminkan tingkat pelaksanaan program dan kegiatan yang sangat tinggi. Kinerja program menunjukkan dari 12 indikator program telah ditetapkan, sebanyak 11 indikator tergolong dalam kategori sangat tinggi, dan 1 indikator kategori tinggi.

Berdasarkan dokumen perencanaan dan penganggaran, indikator kegiatan sama dengan indikator sub kegiatan, sehingga dalam dokumen LKPJ ini hanya disajikan indikator sub kegiatan. Terlihat dari sebanyak 36 indikator sub kegiatan, sebanyak 33 indikator telah mencapai target kinerja yang ditetapkan dengan status sangat tinggi, sebanyak 2 indikator kategori Tinggi, dan sebanyak 1 indikator kategori sangat rendah. Secara umum kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam dokumen penganggaran dan perjanjian kinerja tergolong baik.

Uraian lebih rinci mengenai capaian kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan, berikut permasalahan yang dihadapi, upaya penanganan, serta tindak lanjut rekomendasi DPRD pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.2.8
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang Dilaksanakan Dinas Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							**21.900.477.218,00**	**20.199.282.663,00**	**92,23**			
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							**12.811.114.981,00**	**12.396.265.517,00**	**96,76**			
Meningkatnya Akuntabilitas, Kualitas, Efektivitas Kinerja dan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau	**Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah**	**Indeks**	**77,00**	**80,69**	**104,79**	**ST**						
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	**Predikat**	**BB**	**BB**	**100,00**	**ST**						
	Indeks Kepuasan Masyarakat	**Indeks**	**76,65**	**76,775**	**100,16**	**ST**						
Meningkatnya Akuntabilitas, Kualitas, Efektivitas Kinerja dan Pelayanan UPTD PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**Indeks**	**93,00**	**88,8**	**95,48**	**ST**						
Perencanaan, Penganggaran, dan							198.892.900,00	152.398.626,00	76,62			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	100,00	ST	133.199.200,00	104.420.525,00	78,39	Sesuai arahan BPKAD sub kegiatan ini tidak bisa dicairkan keseluruhan		
2. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	100,00	ST	29.426.100,00	28.865.101,00	98,09			
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	100,00	ST	36.267.600,00	19.113.000,00	52,70	Sesuai arahan BPKAD sub kegiatan ini tidak bisa dicairkan keseluruhan		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							10.066.736.185,00	9.799.613.340,00	97,35			
4. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	Orang/Bulan	87	83	95,40	ST	9.655.029.885,00	9.394.909.840,00	97,31	Terdapat Silpa sebesar Rp. 677.243.662 dikarenakan pajak Progresif dan ada pegawai yang pensiun		
5. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	100,00	ST	408.302.000,00	401.396.500,00	98,31			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	100,00	ST	3.404.300,00	3.307.000,00	97,14			
Administrasi Umum Perangkat Daerah							753.777.882,00	708.131.396,00	93,94			
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	2	200,00	ST	10.766.200,00	10.296.595,00	95,64			
8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	4	400,00	ST	111.337.000,00	102.627.600,00	92,18			
9. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	2	200,00	ST	42.821.892,00	41.908.467,00	97,87			
10. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	39.924.900,00	39.635.099,00	99,27			
11. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	2	200,00	ST	334.495.600,00	332.798.019,00	99,49			
12. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	100,00	ST	14.770.000,00	14.664.000,00	99,28			
13. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	2	200,00	ST	199.662.290,00	166.201.616,00	83,24			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1.395.526.215,00	1.360.304.563,00	97,48			
14. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	2	200,00	ST	207.567.635,00	199.288.483,00	96,01			
15. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	42.000.000,00	38.479.000,00	91,62			
16. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100,00	ST	1.145.958.580,00	1.122.537.080,00	97,96			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							396.181.799,00	375.817.592,00	94,86			
17. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	Unit	5	10	200,00	ST	209.681.200,00	199.436.372,00	95,11			
18. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	8	160,00	ST	126.490.599,00	116.723.160,00	92,28			
19. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100,00	ST	60.010.000,00	59.658.060,00	99,41			
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN							865.726.115,00	719.459.695,00	83,10			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN												
Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan Dalam Pembangunan	**Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD**	**%**	**12,41**	**12,67**	**102,10**	**ST**						
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	**%**	**53,86**	**52,15**	**96,83**	**ST**						
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi							50.000.000,00	16.986.450,00	33,97			
20. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat Provinsi	Laporan	43	43	100,00	ST	50.000.000,00	16.986.450,00	33,97	Sesuai arahan BPKAD sub kegiatan ini tidak bisa dicairkan keseluruhan		
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi							815.726.115,00	702.473.245,00	86,12			
21. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik,	Orang	40	0	0	SR	29.636.200,00	10.879.500,00	36,71	Adanya efisiensi anggaran dan pelaksanaan sub kegiatan baru pada tahapan persiapan antara lain untuk perlengkapan		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
	hukum, sosial dan ekonomi									dan ATK Pendukung		
22. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Lembaga	40	77	192,5	ST	786.089.915,00	691.593.745,00	87,98			
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN							3.720.363.867,00	3.197.789.501,00	85,95			
Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan	**Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan.**	**%**	**43,51**	**23,04**	**147,05**	**ST**						
	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	**%**	**95**	**100**	**94,74**	**ST**						
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota							242.328.850,00	123.868.280,00	51,12			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
23. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	1	100,00	ST	50.808.000,00	50.777.580,00	99,94			
24. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Perangkat Daerah	1	1	100,00	ST	191.520.850,00	73.090.700,00	38,16	Terdapat tunda Bayar sebesar 113 jt	Berkoordinasi dengan BPKAD Provinsi Kepulauan Riau	
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota							2.939.320.638,00	2.554.529.261,00	86,91			
25. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	Orang	140	139	99,29	ST	140.361.200,00	138.776.600,00	98,87			
26. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi	Layanan	11	9	81,82	T	2.798.959.438,00	2.415.752.661,00	86,31			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi											
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi							538.714.379,00	519.391.960,00	96,41			
27. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	1	100,00	ST	469.694.379,00	452.413.560,00	96,32			
28. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	30	38	126,67	ST	69.020.000,00	66.978.400,00	97,04			
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA							1.814.930.080,00	1.774.742.851,00	97,79			
Meningkatnya Kualitas Keluarga Dalam Mendukung Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak, Serta Perlindungan Perempuan dan Anak	**Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga*)**	**%**	**72,18**	**72,07**	**99,85**	**ST**						
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG)							1.614.930.080,00	1.595.086.742,00	98,77			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
dan Hak Anak Kewenangan Provinsi												
29. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	1	100,00	ST	1.614.930.080,00	1.595.086.742,00	98,77			
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi							200.000.000,00	179.656.109,00	89,83			
30. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	20	35	175,00	ST	200.000.000,00	179.656.109,00	89,83			
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)							572.151.400,00	276.246.067,00	48,28			
Terjaminnya Pemenuhan Hak Semua Anak Secara Komprehensif	**Persentase Kabupaten/Kota yang mendapatkan Peringkat dalam KLA**	**%**	**71,43**	**57,14**	**79,99**	**T**				**Disparitas anggaran untuk mendukung ketercapaian KLA, dan Kurangnya koordinasi dan dukungan stakeholder terkait**	**Perlu ditingkatkan nya Advokasi, pendamping an KLA Kab/Kota**	
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan							50.000.000,00	18.416.449,00	36,83			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Dunia Usaha Kewenangan Provinsi												
31. Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi	Perangkat Daerah	7	7	100,00	ST	50.000.000,00	18.416.449,00	36,83	Sesuai arahan BPKAD sub kegiatan ini tidak bisa dicairkan keseluruhan		
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi							522.151.400,00	257.829.618,00	49,38			
32. Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Orang	3000	13547	451,60	ST	247.118.800,00	171.340.040,00	69,34	Terdapat tunda Bayar sebesar 40 juta, dan Sesuai arahan BPKAD sub kegiatan ini tidak bisa dicairkan keseluruhan	Berkoordinasi dengan BPKAD Provinsi Kepulauan Riau	
33. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak	Kegiatan	1	1	100,00	ST	275.032.600,00	86.489.578,00	31,45	Terdapat tunda Bayar sebesar 176 jtan	Berkoordinasi dengan BPKAD Provinsi Kepulauan Riau	
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK							2.116.190.775,00	1.834.779.032,00	86,70			
	Rasio Kekerasan Anak	**Rasio**	**6,03**	**4,62**	**123,38**	**ST**						

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan dan Perlakuan Salah Lainnya Terhadap Anak	**Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif**	**%**	**95**	**100**	**105,30**	**ST**						
Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota							50.692.000,00	49.688.942,00	98,02			
34. Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	1	100,00	ST	50.692.000,00	49.688.942,00	98,02			
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi							1.925.278.775,00	1.646.218.890,00	85,51			
35. Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi	Layanan	11	9	81,82	T	1.925.278.775,00	1.646.218.890,00	85,51			
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi							140.220.000,00	138.871.200,00	99,04			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota												
36. Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi	Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	1	100,00	ST	140.220.000,00	138.871.200,00	99,04			

3.2.9. Urusan Pangan

Urusan Pangan Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau. Pelaksanaan urusan tersebut didukung alokasi anggaran sebesar Rp 26.263.998.288,02 dengan realisasi anggaran sampai akhir tahun 2025 mencapai Rp 24.752.290.564,00 atau sebesar 94,24 persen, yang mencerminkan tingkat pelaksanaan program dan kegiatan yang sangat optimal. Kinerja program menunjukkan dari sebanyak 6 indikator program telah ditetapkan seluruhnya (6 indikator) berada pada kategori sangat tinggi.

Berdasarkan dokumen perencanaan dan penganggaran, indikator kegiatan sama dengan indikator sub kegiatan, sehingga dalam dokumen LKPJ ini hanya disajikan indikator sub kegiatan. Terlihat dari sebanyak 34 indikator sub kegiatan, sebanyak 34 indikator telah mencapai target kinerja yang ditetapkan dengan status sangat tinggi. Secara umum kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam dokumen penganggaran dan perjanjian kinerja tergolong baik.

Uraian lebih rinci mengenai capaian kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan, berikut permasalahan yang dihadapi, upaya penanganan, serta tindak lanjut rekomendasi DPRD pada Urusan Pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.2.9

Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Pangan yang Dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							**26.263.998.288,02**	**24.752.290.564,00**	**94,24**			
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							**24.058.753.882,29**	**23.029.783.635,00**	**95,72**			
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas	**Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah**	**Indeks**	**82,15**	**88,62**	**107,88**	**ST**						
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	**Predikat**	**A**	**A**	**100,00**	**ST**						
	Indeks Kepuasan Masyarakat	**Indeks**	**85**	**85,20**	**100,24**	**ST**						
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							**208.308.698,29**	**181.557.577,00**	**87,16**			
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	100,00	ST	118.085.400,29	115.668.337,00	97,95			
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	100,00	ST	90.223.298,00	65.889.240,00	73,03	Adanya Pembatasan Pencairan		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							**19.835.015.111,74**	**19.386.070.450,00**	**97,74**			
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	137	137	100,00	ST	19.161.593.111,74	18.727.684.450,00	97,74			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
4. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1	100,00	ST	673.422.000,00	658.386.000,00	97,77			
Administrasi Umum Perangkat Daerah							**851.137.522,00**	**768.048.671,00**	**90,24**			
5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	11.829.800,00	8.678.580,00	73,36	Adanya Pembatasan Pencairan		
6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	84.300.000,00	84.300.000,00	100,00			
7. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	5.335.776,00	5.191.800,00	97,30			
8. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	100.185.890,00	87.329.010,00	87,17			
9. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	8.121.100,00	7.981.150,00	98,28			
10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	100,00	ST	1.960.000,00	1.960.000,00	100,00			
11. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	57.398.340,00	57.369.100,00	99,95			
12. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	100,00	ST	52.505.736,00	17.782.000,00	33,87	Adanya Pembatasan Pencairan		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
dan Konsultasi SKPD												
13. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	100,00	ST	529.500.880,00	497.457.031,00	93,95			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							**745.349.103,65**	**545.174.581,00**	**73,14**			
14. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	1	100,00	ST	511.900.000,00	511.900.000,00	100,00			
15. Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	69.231.270,65	12.167.820,00	17,58	Adanya tunda bayar sebesar Rp. 54.483.700		
16. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	5	100,00	ST	164.217.833,00	21.106.761,00	12,85	Adanya tunda bayar sebesar Rp. 142.057.800		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**1.359.175.828,61**	**1.304.383.016,00**	**95,97**			
17. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	100,00	ST	8.805.500,00	8.000.000,00	90,85			
18. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	311.257.820,00	289.515.201,00	93,01			
19. Penyediaan Jasa Peralatan dan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan	Laporan	1	1	100,00	ST	66.117.400,00	54.390.000,00	82,26	Adanya tunda bayar sebesar Rp. 11.655.000		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Perlengkapan Kantor	Perlengkapan Kantor yang Disediakan											
20. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	972.995.108,61	952.477.815,00	97,89			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**1.059.767.618,00**	**844.549.340,00**	**79,69**			
21. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	8	8	100,00	ST	561.797.250,00	460.151.429,00	81,91	Adanya tunda bayar sebesar Rp. 59.807.050		
22. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	21	21	100,00	ST	104.533.000,00	91.086.374,00	87,14	Adanya tunda bayar sebesar Rp. 11.383.050		
23. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	3	100,00	ST	393.437.368,00	293.311.537,00	74,55	Adanya tunda bayar sebesar Rp. 10.930.000		
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT							**1.309.110.070,73**	**1.185.245.185,00**	**90,54**			
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	**Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi**	**%**	**89,3**	**92,46**	**103,54**	**ST**						

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan							**872.711.800,73**	**753.278.556,00**	**86,31**			
24. Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Laporan	1	1	100,00	ST	479.411.260,73	429.088.592,00	89,50			
25. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis	Laporan	1	1	100,00	ST	588.600,00	588.600,00	100,00			
26. Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	Laporan	1	1	100,00	ST	370.829.282,00	305.135.984,00	82,28	Adanya tunda bayar sebesar Rp. 18.039.720		
27. Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Dokumen	1	1	100,00	ST	21.882.658,00	18.465.380,00	84,38			
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi							**316.302.000,00**	**316.302.000,00**	**100,00**			
28. Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang Terpelihara	Ton	1,244	1,244	100,00	ST	26.124.000,00	26.124.000,00	100,00			
29. Pengadaaan Cadangan Pangan	Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Ton	23,5	23,5	100,00	ST	290.178.000,00	290.178.000,00	100,00			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Pemerintah Provinsi												
Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi							**120.096.270,00**	**115.664.629,00**	**96,31**			
30. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Laporan	1	1	100,00	ST	120.096.270,00	115.664.629,00	96,31			
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN							**409.553.435,00**	**123.415.685,00**	**30,13**			
Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	**Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan**	**%**	**≤10**	**7,5**	**125,00**	**ST**						
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi							**17.312.665,00**	**8.053.925,00**	**46,52**			
31. Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	Dokumen	1	1	100,00	ST	17.312.665,00	8.053.925,00	46,52	Adanya Pembatasan Pencairan		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi							**392.240.770,00**	**115.361.760,00**	**29,41**			
32. Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dokumen	1	1	100,00	ST	392.240.770,00	115.361.760,00	29,41	kegiatan ini seyogyanya dilaksanakan sampai dengan penyelesaian/pengesahan Perda penyelenggaraan cadangan pangan. DPRD Provinsi tidak melanjutkan pembahasan setelah pemerintah daerah menyampaikan RANPERDA. Penambahan Anggaran yang dialokasikan pada perubahan tidak dapat dilaksanakan karena pembahasan Ranperda tidak dilanjutkan. Adapun anggaran yang menjadi sisa/silpa terdiri dari Perjalanan Dinas, belanja Cetak, Makan-minum dan belanja	mengalokasikan kembali anggaran dan melanjutkan pembahasan	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
										honorarium Narasumber.		
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN							**486.580.900,00**	**413.846.059,00**	**85,05**			
Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	**Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan**	**%**	**83**	**98,84**	**119,08**	**ST**						
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota							**486.580.900,00**	**413.846.059,00**	**85,05**			
33. Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Sertifikat	2	5	250,00	ST	76.580.900,00	61.491.410,00	80,30	Adanya tunda bayar sebesar Rp. 7.026.300		
34. Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Dokumen	1	1	100,00	ST	410.000.000,00	352.354.649,00	85,94			

3.2.10 Urusan Pertanahan

Urusan Pertanahan Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau. Pelaksanaan urusan tersebut didukung alokasi anggaran sebesar Rp1.145.804.044,00, sementara realisasi anggaran sampai akhir tahun 2025 mencapai Rp1.112.605.938,00 atau setara 97,10 persen, yang mencerminkan tingkat pelaksanaan program dan kegiatan yang sangat optimal. Kinerja program menunjukkan 1 indikator program telah ditetapkan tergolong dalam kategori sangat tinggi.

Berdasarkan dokumen perencanaan dan penganggaran, indikator kegiatan sama dengan indikator sub kegiatan, sehingga dalam dokumen LKPJ ini hanya disajikan indikator sub kegiatan. Terlihat dari sebanyak 1 indikator sub kegiatan, sebanyak 1 indikator telah mencapai target kinerja yang ditetapkan dengan status sangat tinggi. Secara umum kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam dokumen penganggaran dan perjanjian kinerja tergolong baik.

Uraian lebih rinci mengenai capaian kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan, berikut permasalahan yang dihadapi, upaya penanganan, serta tindak lanjut rekomendasi DPRD pada Urusan Pertanahan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.2.10
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Pertanahan yang Dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							**1.145.804.044,00**	**1.112.605.938,00**	**97,10**			
2.10.03 - PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM							**1.145.804.044,00**	**1.112.605.938,00**	**97,10**			
Terwujudnya pengadaan lahan untuk kepentingan umum	**Persentase luas lahan yang dibebaskan untuk kepentingan umum (%)**	**%**	**0**	**10**	**100,00**	**ST**	**1.145.804.044,00**	**1.112.605.938,00**	**97,10**			
Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi							**1.145.804.044,00**	**1.112.605.938,00**	**97,10**			
Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan pengadaan tanah (Dokumen)	Dokumen	1	1	100,00	ST	1.145.804.044,00	1.112.605.938,00	97,10			

3.2.11 Urusan Lingkungan Hidup

Urusan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau. Pelaksanaan urusan tersebut didukung alokasi anggaran sebesar RP35.021.564.235,00, sementara realisasi anggaran sampai akhir tahun 2025 mencapai Rp33.130.097.849,00 atau setara 94,60 persen, yang mencerminkan tingkat pelaksanaan program dan kegiatan yang sangat tinggi. Kinerja program ditunjukkan dari sebanyak 11 indikator program yang telah ditetapkan, sebanyak 10 indikator tergolong dalam kategori sangat tinggi, dan 1 indikator program dalam kategori tinggi.

Berdasarkan dokumen perencanaan dan penganggaran, indikator kegiatan sama dengan indikator sub kegiatan, sehingga dalam dokumen LKPJ ini hanya disajikan indikator sub kegiatan. Terlihat dari sebanyak 24 indikator sub kegiatan, sebanyak 23 indikator telah mencapai target kinerja yang ditetapkan dengan status sangat tinggi, dan 1 indikator memiliki kinerja sangat rendah yaitu Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan, disebabkan oleh alokasi anggaran pada APBD-P dan ketersediaan kendaraan di dealer kosong sampai nunggu awal tahun 2026. Secara umum kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam dokumen penganggaran dan perjanjian kinerja tergolong baik.

Uraian lebih rinci mengenai capaian kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan, berikut permasalahan yang dihadapi, upaya penanganan, serta tindak lanjut rekomendasi DPRD pada Urusan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.2.11
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Status Capaian	Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025		Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							**35.021.564.235,00**	**33.130.097.849,00**	**94,60**			
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							**32.916.355.852,00**	**31.345.163.297,00**	**95,23**			
Meningkatnya Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**Predikat**	**75,95**	**79,71**	**104,95**	**ST**						
	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	**Indeks**	**80,29**	**79,96**	**99,59**	**ST**						
	Indeks Kepuasan Masyarakat	**Indeks**	**84,25**	**84,25**	**100,00**	**ST**						
	Indeks Kepuasan Masyarakat (UPTD Lab. Lingkungan Hidup)	**Indeks**	**84,25**	**76,92**	**91,30**	**ST**						
2.11.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							**244.514.054,00**	**224.726.086,00**	91,91			
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	100,00	ST	102.480.854,00	87.679.630,00	85,56	anggaran tidak terserap karena di hold pada rekon dengan BKAD		
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	100,00	ST	142.033.200,00	137.046.456,00	96,49			
2.11.01.1.02 - Administrasi							**29.684.648.735,00**	**28.868.708.555,00**	97,25			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Status Capaian	Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025		Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Keuangan Perangkat Daerah												
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	132	132	100,00	ST	29.161.296.735,00	28.352.080.555,00	97,23			
4. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1	100,00	ST	523.352.000,00	516.628.000,00	98,72			
2.11.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah							**460.907.205,00**	**434.304.878,00**	94,23			
5. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	7.924.000,00	1.970.600,00	24,87	anggaran tidak terserap karena di hold pada rekon dengan BKAD		
6. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	62.301.900,00	56.477.440,00	90,65			
7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	61.935.441,00	59.530.169,00	96,12			
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	100,00	ST	106.573.600,00	106.236.000,00	99,68			
9. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	100,00	ST	21.942.800,00	18.713.710,00	85,28	anggaran tidak terserap karena di hold pada rekon dengan BKAD		
10. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	100,00	ST	184.229.464,00	175.392.959,00	95,20			
11. Dukungan Pelaksanaan Sistem	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Dokumen	1	1	100,00	ST	16.000.000,00	15.984.000,00	99,90			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Status Capaian	Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025		Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Berbasis Elektronik pada SKPD											
2.11.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							**973.609.980,00**	**347.595.112,00**	35,70			
12. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	12	0	0	SR	621.432.900,00	-	0,00	Pengadaan kendaraan tidak terealisasi karena alokasi anggaran pada APBD-P dan ketersediaan kendaraan di dealer kosong sampai nunggu awal tahun 2026		
13. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	5	100,00	ST	352.177.080,00	347.595.112,00	98,70			
2.11.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**1.156.657.578,00**	**1.055.260.666,00**	**91,23**			
14. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	80.535.000,00	62.175.418,00	77,20	anggaran tidak terserap karena di hold pada rekon dengan BKAD		
15. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	1.076.122.578,00	993.085.248,00	92,28			
2.11.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang							**631.490.000,00**	**575.718.075,00**	**91,17**			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Status Capaian	Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025		Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Urusan Pemerintahan Daerah												
16. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	6	6	100,00	ST	278.337.000,00	277.644.418,00	99,75			
17. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	8	8	100,00	ST	19.080.000,00	18.695.000,00	97,98			
18. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100,00	ST	334.073.000,00	279.378.657,00	83,63	Terdapat tunda bayar sebesar Rp.53.893.500,- pada UPTD Lab. Lingkungan Hidup		
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP							**212.761.498,00**	**202.033.517,00**	**94,96**			
Meningkatnya Efektivitas Kajian Lingkungan untuk Memitigasi Dampak KRP	**Persentase ketersediaan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (%)**	**Persentase**	**100**	**100**	**100,00**	**ST**						
2.11.02.1.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi							**212.761.498,00**	**202.033.517,00**	**94,96**			
19. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	Dokumen	1	1	100,00	ST	212.761.498,00	202.033.517,00	94,96			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Status Capaian	Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025		Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP							**376.608.737,00**	**152.492.320,00**	**40,49**			
Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	**Penurunan intensitas emisi GRK ((%))**	**%**	**3,76**	**4,23**	**112,50**	**ST**						
	Persentase Lokasi Air Baku yang di Analisa (%)	**%**	**46,67**	**46,67**	**100,00**	**ST**						
2.11.03.1.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup							**376.608.737,00**	**152.492.320,00**	**40,49**			
20. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Dokumen	1	1	100,00	ST	376.608.737,00	152.492.320,00	40,49	sebagian anggaran di hold pada rekon dengan BKAD sebesar Rp. 87.371.000,- dan terdapat tunda bayar sebesar Rp. 116.422.350,- berupa pembelian peralatan Lab.		
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)							**72.117.000,00**	**71.758.000,00**	**99,50**			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Status Capaian	Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025		Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3)	**Persentase pengawasan terhadap izin pengelolaan limbah B3 (%)**	**%**	**50,00**	**100**	**200,00**	**ST**	**72.117.000,00**	**71.758.000,00**	**99,50**			
2.11.05.1.01 - Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							**72.117.000,00**	**71.758.000,00**	**99,50**			
21. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	Dokumen	1	1	100,00	ST	72.117.000,00	71.758.000,00	99,50			
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP							**10.428.400,00**	**9.568.650,00**	**91,76**			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Status Capaian	Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025		Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Meningkatnya Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	**Persentase Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (%)**	**%**	**9,76**	**19,51**	**199,90**	**ST**						
2.11.10.1.01 - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi							**10.428.400,00**	**9.568.650,00**	**91,76**			
22. Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani	Pengaduan	4	8	200,00	ST	10.428.400,00	9.568.650,00	91,76			
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN							**1.197.821.048,00**	**1.187.931.990,00**	**99,17**			
Meningkatnya tata Kelola Persampahan	**Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)) (%)**	**%**	**12,00**	**16,95**	**141,25**	**ST**						
	Persentase Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT) (%)	**%**	**85,00**	**65,40**	**76,94**	**T**						
Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional							**1.197.821.048,00**	**1.187.931.990,00**	**99,17**			
23. Penyediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan	Unit	1	1	100,00	ST	1.187.700.000,00	1.187.700.000,00	100,00			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Status Capaian	Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025		Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia											
24. Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Dokumen	1	1	100,00	ST	10.121.048,00	231.990,00	2,29	Anggaran tidak terserap karena di hold pada rekon dengan BKAD		

3.2.12 Urusan Administrasi Penduduk dan Pencatatan Sipil

Urusan Administrasi Penduduk dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau. Pelaksanaan urusan tersebut didukung alokasi anggaran sebesar Rp11.989.281.374,00, sementara realisasi anggaran sampai akhir tahun 2025 mencapai Rp11.792.071.314,00 atau setara 98,36 persen, yang mencerminkan tingkat pelaksanaan program dan kegiatan yang sangat tinggi. Kinerja program menunjukkan 8 indikator program telah ditetapkan seluruhnya (8 indikator) tergolong dalam kategori sangat tinggi.

Berdasarkan dokumen perencanaan dan penganggaran, indikator kegiatan sama dengan indikator sub kegiatan, sehingga dalam dokumen LKPJ ini hanya disajikan indikator sub kegiatan. Terlihat dari sebanyak 20 indikator sub kegiatan, sebanyak 20 indikator telah mencapai target kinerja yang ditetapkan dengan status sangat tinggi. Secara umum kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam dokumen penganggaran dan perjanjian kinerja tergolong baik.

Uraian lebih rinci mengenai capaian kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan, berikut permasalahan yang dihadapi, upaya penanganan, serta tindak lanjut rekomendasi DPRD pada Urusan Administrasi Penduduk dan Pencatatan Sipil yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.2.12
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Administrasi Penduduk dan Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							**11.989.281.374,00**	**11.792.071.314,00**	**98,36**			
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							**11.843.894.744,00**	**11.694.663.564,00**	**98,74**			
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan	**Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah**	**Indeks**	**80,46**	**86,94**	**108,05**	**ST**						
	Indeks Kepuasan Masyarakat	**Indeks**	**86**	**87,64**	**101,91**	**ST**						
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	**Predikat**	**BB**	**BB**	**100,00**	**ST**						
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							**89.059.600,00**	**73.492.300,00**	**82,52**			
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	100,00	ST	18.821.900,00	10.827.400,00	57,53	efisiensi anggaran setelah Perubahan APBD Tahun 2025		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	4	100,00	ST	33.477.400,00	31.523.600,00	94,16			
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	100,00	ST	36.760.300,00	31.141.300,00	84,71	efisiensi anggaran setelah Perubahan APBD Tahun 2025		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							**10.575.154.736,00**	**10.451.944.088,00**	**98,83**			
4. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	70	70	100,00	ST	10.104.809.736,00	9.982.142.287,00	98,79			
5. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1	100,00	ST	465.760.000,00	465.760.000,00	100,00			
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	100,00	ST	4.585.000,00	4.041.801,00	88,15			
Administrasi Barang Milik Daerah pada							**3.557.400,00**	**3.438.700,00**	**96,66**			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Perangkat Daerah												
7. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	100,00	ST	3.557.400,00	3.438.700,00	96,66			
Administrasi Umum Perangkat Daerah							**461.718.660,00**	**459.692.893,00**	**99,56**			
8. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	6	100,00	ST	74.334.800,00	73.773.562,00	99,24			
9. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	100,00	ST	16.217.500,00	15.343.250,00	94,61			
10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	100,00	ST	182.319.900,00	182.254.621,00	99,96			
11. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	100,00	ST	188.846.460,00	188.321.460,00	99,72			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**581.712.848,00**	**574.657.648,00**	**98,79**			
12. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	100,00	ST	3.120.000,00	3.120.000,00	100,00			
13. Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air danListrik yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	6.058.000,00	6.058.000,00	100,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
14. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	13.200.000,00	13.200.000,00	100,00			
15. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	559.334.848,00	552.279.648,00	98,74			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							132.691.500,00	131.437.935,00	99,06			
16. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	8	8	100,00	ST	112.231.500,00	111.379.735,00	99,24			
17. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	5	100,00	ST	20.460.000,00	20.058.200,00	98,04			
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK							**39.395.400,00**	**36.870.500,00**	**93,59**			
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Kependudukan	**Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)**	**%**	**62,95**	**68,98**	**109,58**	**ST**						
	Persentase Kepemilikan KTP-el	**%**	**99,77**	**98,93**	**99,15**	**ST**						
Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan							39.395.400,00	36.870.500,00	93,59			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
18. Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi Terkait Pendaftaran Penduduk .	Laporan	1	1	100,00	ST	39.395.400,00	36.870.500,00	93,59			
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL							**7.447.290,00**	**-**	**0,00**			
Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	**Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan**	**%**	**100**	**100**	**100,00**	**ST**						
	Persentase Akta Kelahiran Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan	**%**	**100**	**100**	**100,00**	**ST**						
Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil							7.447.290,00	-	0,00			
19. Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Laporan	1	1	100,00	ST	7.447.290,00	-	0,00	Belanja pendukung yang tidak direalisasikan		
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN							**98.543.940,00**	**60.537.250,00**	**61,43**			
Meningkatnya Kualitas Profil Kependudukan	**Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan oleh Perangkat Daerah Provinsi**	**%**	**36,36**	**45,45**	**125,00**	**ST**						

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi							**98.543.940,00**	**60.537.250,00**	**61,43**			
20. Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Laporan	1	1	100,00	ST	98.543.940,00	60.537.250,00	61,43	efisiensi anggaran setelah Perubahan APBD Tahun 2025		

3.2.13 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau. Pelaksanaan urusan tersebut didukung alokasi anggaran sebesar Rp2.780.225.896,00, dengan realisasi anggaran sampai akhir tahun 2025 mencapai Rp2.421.831.959,00 atau setara 87,11 persen, yang mencerminkan tingkat pelaksanaan program dan kegiatan yang sangat tinggi. Kinerja program menunjukkan 4 indikator program telah ditetapkan, sebanyak 3 indikator tergolong dalam kategori sangat tinggi, dan sebanyak 1 indikator kategori rendah.

Berdasarkan dokumen perencanaan dan penganggaran, indikator kegiatan sama dengan indikator sub kegiatan, sehingga dalam dokumen LKPJ ini hanya disajikan indikator sub kegiatan. Terlihat dari sebanyak 12 indikator sub kegiatan, sebanyak 11 indikator telah mencapai target kinerja yang ditetapkan dengan status sangat tinggi, dan sebanyak 1 indikator memiliki kinerja rendah, yaitu Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM,dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat. Secara umum kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam dokumen penganggaran dan perjanjian kinerja tergolong baik.

Uraian lebih rinci mengenai capaian kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan, berikut permasalahan yang dihadapi, upaya penanganan, serta tindak lanjut rekomendasi DPRD pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.2.13
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang Dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							**2.780.225.896,00**	**2.421.831.959,00**	**87,11**			
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA							**24.771.500,00**	**15.361.200,00**	**62,01**			
Meningkatnya Kualitas Penataan Desa	**Jumlah Desa yang telah ditata kelembagaan Desanya sesuai standar**	**Desa**	**10**	**10**	**100,00**	**ST**						
Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat							**24.771.500,00**	**15.361.200,00**	62,01			
1. Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Dokumen	1	1	100,00	ST	24.771.500,00	15.361.200,00	62,01	efisiensi anggaran setelah Perubahan APBD Tahun 2025		
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA							**37.054.400,00**	**29.018.720,00**	**78,31**			
Meningkatnya Efektivitas Kerja Sama Desa	**Persentase Desa Yang Difasilitasi Kerjasamanya**	**%**	**50,55**	**50,55**	**100,00**	**ST**						

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi							**37.054.400,00**	**29.018.720,00**	78,31			
2. Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan pihak ketiga yang Dilaksanakan	Dokumen	1	1	100,00	ST	19.172.400,00	15.144.020,00	78,99	efisiensi anggaran setelah Perubahan APBD Tahun 2025		
3. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen	1	1	100,00	ST	17.882.000,00	13.874.700,00	77,59	efisiensi anggaran setelah Perubahan APBD Tahun 2025		
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA							**156.997.400,00**	**106.338.685,00**	**67,73**			
Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya**	**%**	**41,64**	**39,82**	**95,63**	**ST**						
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa							**156.997.400,00**	**106.338.685,00**	**67,73**			
4. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen	1	1	100,00	ST	122.180.700,00	88.427.125,00	72,37			
5. Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Dokumen	1	1	100,00	ST	18.296.200,00	17.316.660,00	94,65			
6. Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peran BPD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Dokumen	1	1	100,00	ST	16.520.500,00	594.900,00	3,60	efisiensi anggaran setelah Perubahan APBD Tahun 2025		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT							2.561.402.596,00	2.271.113.354,00	88,67			
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna Yang Sudah Dibina	%	5,72	5,72	100,00	ST						
Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota							2.561.402.596,00	2.271.113.354,00	88,67			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
7. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	1	1	100,00	ST	336.494.600,00	223.391.301,00	66,39	Terdapat Penambahan Anggaran pada Perubahan APBD untuk pembinaan Posyandu tetapi karena keterbatasan kas daerah maka terdapat tahapan kegiatan/ belanja yang tidak terlaksana. Dan terdapat 1 belanja mengalami Tunda Bayar		
8. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	Lembaga	20	20	100,00	ST	25.760.000,00	25.760.000,00	100,00			
9. Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu,	Unit	24	15	62,50	R	305.000.000,00	184.830.710,00	60,60	Terdapat belanja hibah uang yang tidak terealisasi karena permasalahan interna pengusul/l		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	LPM,dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat									Lembaga Kemasyarakatan		
10. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen	1	1	100,00	ST	108.979.800,00	104.658.962,00	96,04			
11. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Dokumen	1	1	100,00	ST	102.409.350,00	101.522.824,00	99,13			
12. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Laporan	1	1	100,00	ST	1.682.758.846,00	1.630.949.557,00	96,92			

3.2.14 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau. Pelaksanaan urusan tersebut didukung alokasi anggaran sebesar Rp5.585.490.080,00, sementara realisasi anggaran sampai akhir tahun 2025 mencapai Rp5.492.225.716,00 atau setara 98,33 persen, yang mencerminkan tingkat pelaksanaan program dan kegiatan yang sangat tinggi. Kinerja program menunjukkan 7 indikator program telah ditetapkan, sebanyak 6 tergolong dalam kategori sangat tinggi, dan 1 indikator kategori rendah.

Berdasarkan dokumen perencanaan dan penganggaran, indikator kegiatan sama dengan indikator sub kegiatan, sehingga dalam dokumen LKPJ ini hanya disajikan indikator sub kegiatan. Terlihat dari sebanyak 4 indikator sub kegiatan, sebanyak 4 indikator telah mencapai target kinerja yang ditetapkan dengan status sangat tinggi. Secara umum kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam dokumen penganggaran dan perjanjian kinerja tergolong baik.

Uraian lebih rinci mengenai capaian kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan, berikut permasalahan yang dihadapi, upaya penanganan, serta tindak lanjut rekomendasi DPRD pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.2.14

Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang Dilaksanakan Dinas Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							5.585.490.080,00	5.492.225.716,00	98,33			
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK							0,00	0,00	0			
Terkendalinya Pertambahan Jumlah Penduduk	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) **	Indeks	69,25	68,70	99,21	ST				Tahun 2025 program tersebut tidak mendapatkan alokasi anggaran sehingga seluruh kegiatan dan sub kegiatan tidak dapat dilaksanakan. Data yang diterbitkan pada tahun 2025 merupakan data yang bersumber dari BKKBN		
	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR) 15-19)	%	10,8	12,5	115,74	ST						
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)							5.303.733.750,00	5.234.501.266,00	98,69			
Meningkatnya Pemberdayaan dan	Persentase kebutuhan ber-KB	%	11,75	16,4	60,43	R						

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Peran Serta Masyarakat Dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	**yang tidak terpenuhi (unmet need)**											
	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern **	**%**	**81,19**	**78,6**	**96,81**	**ST**						
	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	**%**	**57,2**	**55,8**	**97,55**	**ST**						
Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal							**1.295.723.750,00**	**1.227.101.266,00**	**94,70**			
1. Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal	Laporan	1	1	100,00	ST	1.295.723.750,00	1.227.101.266,00	94,70			
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB							**4.008.010.000,00**	**4.007.400.000,00**	**99,98**			
2. Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring	Organisasi	1115	1113	99,82	ST	4.008.010.000,00	4.007.400.000,00	99,98			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Program Bangga Kencana	Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana											
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)							**281.756.330,00**	**257.724.450,00**	**91,47**			
Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat Dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	**Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)**	**Indeks**	**67**	**75,6**	**112,84**	**ST**						
	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri	**%**	**33,11**	**36,12**	**109,09**	**ST**						
Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga							**281.756.330,00**	**257.724.450,00**	**91,47**			
3. Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	1	1	100,00	ST	200.000.000,00	182.382.860,00	91,19			
4. Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Dokumen	1	1	100,00	ST	81.756.330,00	75.341.590,00	92,15			

3.2.15. Urusan Perhubungan

Urusan Perhubungan Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau. Pelaksanaan urusan tersebut didukung alokasi anggaran sebesar Rp29.737.235.569,00, sementara realisasi anggaran sampai akhir tahun 2025 mencapai Rp24.107.258.007,91 atau setara 81,07 persen, yang mencerminkan tingkat pelaksanaan program dan kegiatan yang cukup baik.

Berdasarkan dokumen perencanaan dan penganggaran, indikator kegiatan sama dengan indikator sub kegiatan, sehingga dalam dokumen LKPJ ini hanya disajikan indikator sub kegiatan. Terlihat dari sebanyak 44 indikator sub kegiatan, sebanyak 43 indikator telah mencapai target kinerja yang ditetapkan dengan status sangat tinggi, dan 1 indikator memiliki kinerja sangat rendah yaitu Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan. Secara umum kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam dokumen penganggaran dan perjanjian kinerja tergolong baik.

Kinerja menunjukkan 7 indikator program telah ditetapkan seluruhnya (7 indikator) termasuk dalam kategori sangat tinggi. Uraian lebih rinci mengenai capaian kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan, berikut permasalahan yang dihadapi, upaya penanganan, serta tindak lanjut rekomendasi DPRD pada Urusan Perhubungan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.2.15
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Perhubungan yang Dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2025				Capaian Anggaran Tahun 2025			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian Target	Status Capaian	Anggaran APBD-P 2025	Realisasi 2025	% Realisasi Anggaran			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							**29.737.235.569,00**	**24.107.258.007,91**	**81,07**			
2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							**18.739.207.951,53**	**17.961.025.658,00**	**95,85**			
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Bidan	**Nilai SAKIP Dinas Perhubungan**	**Nilai**	**72,00**	**73,39**	**101,93**	**ST**						
	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan	**Indeks**	**81,00**	**80,33**	**99,17**	**ST**						
	Indeks Kepuasan Masyarakat	**Indeks**	**78,07**	**82,56**	**105,75**	**ST**						
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							**114.677.959,00**	**98.683.094,00**	**86,05**			
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang di susun	Dokumen	1	1	100,00	ST	34.425.380,00	32.115.330,00	93,29	defisit APBD		
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja serta Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Dokumen	3	3	100,00	ST	80.252.579,00	66.567.764,00	82,95	defisit APBD		

Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2025				Capaian Anggaran Tahun 2025			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian Target	Status Capaian	Anggaran APBD-P 2025	Realisasi 2025	% Realisasi Anggaran			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							**14.814.790.286,22**	**14.593.716.922,00**	**98,51**			
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	784	784	100,00	ST	14.010.005.286,22	13.842.208.922,00	98,80			
4. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengadaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1	100,00	ST	772.494.000,00	720.032.000,00	93,21			
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	1	100,00	ST	32.291.000,00	31.476.000,00	97,48			
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							**21.971.300,00**	**21.885.900,00**	**99,61**			
6. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan,Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	100,00	ST	21.971.300,00	21.885.900,00	99,61			
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah							**58.520.475,00**	**57.469.610,00**	**98,20**			
7. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	1	1	100,00	ST	58.520.475,00	57.469.610,00	98,20			

Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2025				Capaian Anggaran Tahun 2025			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian Target	Status Capaian	Anggaran APBD-P 2025	Realisasi 2025	% Realisasi Anggaran			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							**22.679.300,00**	**22.314.600,00**	**98,39**			
8. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	1	100,00	ST	22.679.300,00	22.314.600,00	98,39			
Administrasi Umum Perangkat Daerah							**587.885.800,00**	**558.555.366,00**	**95,01**			
9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	10.000.000,00	9.834.045,00	98,34			
10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	1	1	100,00	ST	25.894.400,00	22.443.645,00	86,67	defisit APBD		
11. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	3	100,00	ST	200.000.000,00	189.850.130,00	94,93	defisit APBD		
12. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	100,00	ST	60.000.000,00	57.442.500,00	95,74	defisit APBD		
13. Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	100,00	ST	89.875.000,00	79.972.111,00	88,98	defisit APBD		
14. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	100,00	ST	202.116.400,00	199.012.935,00	98,46			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							**130.814.000,00**	**106.400.000,00**	**81,34**			

Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2025				Capaian Anggaran Tahun 2025			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian Target	Status Capaian	Anggaran APBD-P 2025	Realisasi 2025	% Realisasi Anggaran			
15. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	1	33,33	SR	55.803.600,00	31.400.000,00	56,27	defisit APBD		
16. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	100,00	ST	75.010.400,00	75.000.000,00	99,99			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							**2.493.101.831,31**	**2.080.442.573,00**	**83,45**			
17. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	100,00	ST	10.000.000,00	6.000.000,00	60,00	defisit APBD		
18. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	252.000.000,00	170.039.131,00	67,48	defisit APBD		
19. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	96.000.000,00	95.760.000,00	99,75			
20. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dinas)	Laporan	1	1	100,00	ST	1.048.757.045,00	855.747.219,00	81,60			
21. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (UPTPP Wilayah I Kota Batam)	Laporan	1	1	100,00	ST	79.683.628,19	79.683.606,00	100,00			
22. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Laporan	1	1	100,00	ST	204.487.007,00	181.189.939,00	88,61			

Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2025				Capaian Anggaran Tahun 2025			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian Target	Status Capaian	Anggaran APBD-P 2025	Realisasi 2025	% Realisasi Anggaran			
	Kantor yang Disediakan (UPTPP Wilayah II Kabupaten Karimun)											
23. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (UPTPP Wilayah III Kota Tanjungpinang)	Laporan	1	1	100,00	ST	448.091.180,00	404.378.856,00	90,24			
24. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (UPTPP Wilayah IV Kabupaten Natuna)	Laporan	1	1	100,00	ST	251.251.477,12	201.816.650,00	80,32			
25. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (UPTPP Wilayah V Kabupaten Lingga)	Laporan	1	1	100,00	ST	102.831.494,00	85.827.172,00	83,46			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							**494.767.000,00**	**421.557.593,00**	**85,20**			
26. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	JumlahKendaraanPeroranganDinasatau Kendaraan Dinas Jabatan yangDipeliharadan Dibayarkan Pajaknya	Unit	6	6	100,00	ST	413.167.000,00	351.162.503,00	84,99	defisit APBD		

Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2025				Capaian Anggaran Tahun 2025			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian Target	Status Capaian	Anggaran APBD-P 2025	Realisasi 2025	% Realisasi Anggaran			
27. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	4	100,00	ST	81.600.000,00	70.395.090,00	86,27	defisit APBD		
2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)							**2.399.399.626,47**	**1.505.883.128,36**	**62,76**			
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	**Persentase layanan angkutan darat**	**%**	**30,00**	**30,00**	100,00	ST						
	Persentase Peningkatan Ketersedian Perlengkapan Jalan	**%**	**58,85**	**58,88**	100,05	ST						
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi							1.391.308.807,47	504.296.061,36	36,25			
28. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	Unit	15	16	106,67	ST	1.391.308.807,47	504.296.061,36	36,25	Pekerjaan telah selesai 100% namun realisasi keuangan tidak sesuai target karena terjadi tunda bayar	Menganggarkan pembayaran pada tahun 2026	
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi							18.146.800,00	14.588.478,00	80,39			
29. Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	Laporan	1	1	100,00	ST	18.146.800,00	14.588.478,00	80,39	defisit APBD		
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu							17.520.000,00	15.881.240,00	90,65			

Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2025				Capaian Anggaran Tahun 2025			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian Target	Status Capaian	Anggaran APBD-P 2025	Realisasi 2025	% Realisasi Anggaran			
Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi												
30. Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Laporan	1	1	100,00	ST	17.520.000,00	15.881.240,00	90,65	defisit APBD		
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							**953.373.676,00**	**953.373.676,00**	**100,00**			
31. Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Laporan	1	1	100,00	ST	953.373.676,00	953.373.676,00	100,00			
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							**19.050.343,00**	**17.743.673,00**	**93,14**			
32. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin	Laporan	1	1	100,00	ST	19.050.343,00	17.743.673,00	93,14	defisit APBD		

Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2025				Capaian Anggaran Tahun 2025			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian Target	Status Capaian	Anggaran APBD-P 2025	Realisasi 2025	% Realisasi Anggaran			
Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Penyelenggaraan Angkutan Orangdalam Trayek Kewenangan Provinsi											
2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN							**8.598.627.991,00**	**4.640.349.221,55**	**53,97**			
Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	**Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Laut**	**%**	**52,50**	**52,50**	**100,00**	**ST**						
	Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	**%**	**84,62**	**84,62**	**100,00**	**ST**						
Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi							**18.091.400,00**	**11.063.900,00**	**61,16**			
33. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan IzinUsaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Laporan	1	1	100,00	ST	18.091.400,00	11.063.900,00	61,16	defisit APBD		
Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan							**14.101.600,00**	**8.613.600,00**	**61,08**			

Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2025				Capaian Anggaran Tahun 2025			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian Target	Status Capaian	Anggaran APBD-P 2025	Realisasi 2025	% Realisasi Anggaran			
yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional												
34. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	Laporan	1	1	100,00	ST	14.101.600,00	8.613.600,00	61,08	defisit APBD		
Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan							**17.416.000,00**	**17.297.500,00**	**99,32**			
35. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kapal yang Melayani Trayek	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan PelaksanaanIzinUsaha Angkutan SungaidanDanau untukKapalyang	Laporan	1	1	100,00	ST	17.416.000,00	17.297.500,00	99,32			

Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2025				Capaian Anggaran Tahun 2025			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian Target	Status Capaian	Anggaran APBD-P 2025	Realisasi 2025	% Realisasi Anggaran			
Kewenangan Provinsi	Melayani Trayek Kewenangan Provinsi											
Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas							**18.673.600,00**	**14.081.000,00**	**75,41**			
36. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait BerupaBongkarMuat Barang,Jasa Pengurusan Transportasi,Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau PeralatanJasaTerkaitdenganAngkutanLaut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Laporan	1	1	100,00	ST	18.673.600,00	14.081.000,00	75,41	defisit APBD		
Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian							**8.208.502.273,00**	**4.371.434.071,55**	**53,25**			

Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2025				Capaian Anggaran Tahun 2025			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian Target	Status Capaian	Anggaran APBD-P 2025	Realisasi 2025	% Realisasi Anggaran			
Pelabuhan Pengumpan Regional												
37. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah PelabuhanPengumpan Regional yang MemenuhiPersyaratanPerizinanPembangunan dan Pengoperasian	Unit	2	2	100,00	ST	50.589.000,00	48.837.794,00	96,54			
38. Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun	Unit	2	2	100,00	ST	6.795.627.773,00	3.670.810.561,01	54,02	Pekerjaan telah selesai 100% namun realisasi keuangan tidak sesuai target karena terjadi tunda bayar dan defisit APBD	Menganggarkan pembayaran pada tahun 2026	
39. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara (DINAS)	Unit	1	1	100,00	ST	1.362.285.500,00	651.785.716,54	47,85	defisit APBD		
40. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara (UPTPP Wilayah I Kota Batam)	Unit	1	1	100,00	ST	34.715.700,00	19.538.100,00	56,28	defisit APBD		
41. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara (UPTPP Wilayah II Kab. Karimun)	Unit	1	1	100,00	ST	42.352.943,00	33.009.545,00	77,94	defisit APBD		
42. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan	Unit	3	3	100,00	ST	41.287.600,00	31.991.195,00	77,48	defisit APBD		

Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2025				Capaian Anggaran Tahun 2025			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian Target	Status Capaian	Anggaran APBD-P 2025	Realisasi 2025	% Realisasi Anggaran			
Pengumpan Regional	terpelihara (UPTPP Wilayah III Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan)											
43. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara (UPTPP Wilayah IV Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas)	Unit	1	1	100,00	ST	121.907.700,00	65.822.227,00	53,99	Pekerjaan telah selesai 100% namun realisasi keuangan tidak sesuai target karena terjadi tunda bayar dan defisit APBD	Menganggarkan pembayaran pada tahun 2026	
44. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara (UPTPP Wilayah V Kab. Lingga)	Unit	1	1	100,00	ST	81.579.175,00	67.498.083,00	82,74	defisit APBD		

3.2.16 Urusan Komunikasi dan Informatika

Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau. Pelaksanaan urusan tersebut didukung alokasi anggaran sebesar Rp34.881.878.468,00, sementara realisasi anggaran sampai akhir tahun 2025 mencapai Rp30.096.474.805,00 atau sebesar 86,28 persen, yang mencerminkan tingkat pelaksanaan program dan kegiatan yang sangat tinggi. Aspek kinerja menunjukkan 6 indikator program telah ditetapkan, sebanyak 6 indikator tergolong dalam kategori sangat tinggi.

Berdasarkan dokumen perencanaan dan penganggaran, indikator kegiatan sama dengan indikator sub kegiatan, sehingga dalam dokumen LKPJ ini hanya disajikan indikator sub kegiatan. Terlihat dari sebanyak 29 indikator sub kegiatan, sebanyak 26 indikator telah mencapai target kinerja yang ditetapkan dengan status sangat tinggi, sebanyak 3 indikator kategori sedang. Secara umum kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam dokumen penganggaran dan perjanjian kinerja tergolong baik.

Uraian lebih rinci mengenai capaian kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan, berikut permasalahan yang dihadapi, upaya penanganan, serta tindak lanjut rekomendasi DPRD pada Urusan Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.2.16
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Komunikasi dan Informatika yang Dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							**34.881.878.468,00**	**30.096.474.805,00**	**86,28**			
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							**14.317.877.304,28**	**13.867.717.934,00**	**96,86**			
Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Pemerintah Urusan Komunikasi dan Informatika, urusan Statistik dan urusan Persandian	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**Predikat**	**BB**	**BB**	**100,00**	**ST**						
	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah	**Indeks**	**75**	**78,96**	**105,28**	**ST**						
	Indeks Kepuasan Masyarakat	**Indeks**	**81**	**82,75**	**102,16**	**ST**						
2.16.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							**141.822.299,23**	**140.758.403,00**	**99,25**			
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	100,00	ST	98.818.399,26	98.591.145,00	99,77			
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	5	100,00	ST	43.003.899,97	42.167.258,00	98,05			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
2.16.01.1.02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							**12.384.047.078,00**	**11.962.639.992,00**	**96,60**			
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	158	158	100,00	ST	11.944.795.078,00	11.552.448.992,00	96,72			
4. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	**1**	100,00	ST	439.252.000,00	410.191.000,00	93,38			
2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah							**362.874.162,05**	**354.206.088,00**	**97,61**			
5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	100,00	ST	7.157.500,00	6.696.520,00	93,56			
6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	100,00	ST	2.684.000,00	2.294.998,00	85,51	Terkena Hold rekon BKAD		
7. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	4	100,00	ST	15.053.500,00	13.278.459,00	88,21	Terkena Hold rekon BKAD		
8. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	100,00	ST	73.229.160,00	72.296.666,00	98,73			
9. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	4	100,00	ST	44.072.900,00	40.748.126,00	92,46			
10. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	100,00	ST	24.696.500,00	24.250.000,00	98,19			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
11. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	100,00	ST	195.980.602,05	194.641.319,00	99,32			
2.16.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							**121.600.000,00**	**121.424.999,00**	**99,86**			
12. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	5	100,00	ST	121.600.000,00	121.424.999,00	99,86			
2.16.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**1.156.583.765,00**	**1.139.605.210,00**	**98,53**			
13. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	38.730.800,00	36.480.772,00	94,19			
14. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	52.707.900,00	52.206.400,00	99,05			
15. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	1.065.145.065,00	1.050.918.038,00	98,66			
2.16.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**150.950.000,00**	**149.083.242,00**	**98,76**			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
16. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	2	2	100,00	ST	142.900.000,00	141.250.390,00	98,85			
17. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20	20	100,00	ST	8.050.000,00	7.832.852,00	97,30			
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK							**16.024.306.519,00**	**12.387.079.556,00**	**77,30**			
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	**Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik**	**Indeks**	**71**	**76,32**	**107,49**	**ST**						
	Nilai Keterbukaan informasi Publik	**Nilai**	**66**	**97,25**	**147,35**	**ST**						
2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi							**16.024.306.519,00**	**12.387.079.556,00**	**77,30**			
18. Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Konten	2000	2000	100,00	ST	449.927.249,00	430.987.738,00	95,79			
19. Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	%	35	35	100,00	ST	3.635.930.960,00	3.054.795.691,00	84,02	Tunda Bayar		
20. Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian	Laporan	1	1	100,00	ST	749.287.378,00	745.070.378,00	99,44			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
	Komunikasi dan Informatika											
21. Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Permohonan	12	12	100,00	ST	633.401.753,00	631.208.465,00	99,65			
22. Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Rekomendasi	12	12	100,00	ST	24.967.000,00	24.411.721,00	97,78			
23. Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Media	88	67	76,13	S	10.530.792.179,00	7.500.605.563,00	71,23	Tunda Bayar		
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA							**4.539.694.644,72**	**3.841.677.315,00**	**84,62**			
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	**Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi**	**Indeks**	**6,80**	**6,80**	**100**	**ST**						
2.16.03.1.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi							**20.400.751,00**	**19.911.692,00**	**97,60**			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
24. Pengelolaan Nama Domain dan Subdomain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah	Dokumen	1	1	100,00	ST	20.400.751,00	19.911.692,00	97,60			
2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi							**4.519.293.893,72**	**3.821.765.623,00**	**84,57**			
25. Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	Dokumen	1	1	100,00	ST	37.498.603,00	33.134.991,00	88,36	Terkena Hold rekon BKAD		
26. Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Aplikasi	2	2	100,00	ST	16.212.320,26	8.062.279,00	49,73	Terkena Hold rekon BKAD		
27. Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Aplikasi	12	12	100,00	ST	850.720.162,00	834.968.386,00	98,15			
28. Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Perangkat	31	26	83,87	S	3.018.235.220,00	2.527.180.283,00	83,73	Tunda Bayar		
29. Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan	Perangkat Daerah	35	31	88,57	S	596.627.588,46	418.419.684,00	70,13	Tunda Bayar		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
	Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi											

3.2.17 Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kepulauan Riau. Pelaksanaan urusan tersebut didukung alokasi anggaran sebesar Rp38.427.480.191,00, sementara realisasi anggaran sampai akhir tahun 2025 mencapai Rp32.950.071.736,00 atau setara 85,75 persen, yang mencerminkan tingkat pelaksanaan program dan kegiatan yang cukup tinggi. Kinerja program menunjukkan dari sebanyak 11 indikator program telah ditetapkan, sebanyak 10 indikator tergolong dalam kategori sangat tinggi, dan sebanyak 1 indikator kategori tinggi.

Berdasarkan dokumen perencanaan dan penganggaran, indikator kegiatan sama dengan indikator sub kegiatan, sehingga dalam dokumen LKPJ ini hanya disajikan indikator sub kegiatan. Terlihat dari sebanyak 32 indikator sub kegiatan, sebanyak 29 indikator telah mencapai target kinerja yang ditetapkan dengan status sangat tinggi, sebanyak 1 indikator kategori sedang, 1 indikator kategori rendah, dan 1 indikator kategori sangat rendah. Secara umum kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam dokumen penganggaran dan perjanjian kinerja tergolong baik.

Uraian lebih rinci mengenai capaian kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan, berikut permasalahan yang dihadapi, upaya penanganan, serta tindak lanjut rekomendasi DPRD pada Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.2.17
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang Dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capain	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							**38.427.480.191,00**	**32.953.071.736,00**	**85,75**			
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							**12.333.035.559,62**	**12.129.610.936,00**	**98,35**			
Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang koperasi dan UKM	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**Predikat**	**BB**	**BB**	**100,00**	**ST**						
	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah	**Indeks**	**80,99**	**82,03**	**101,28**	**ST**						
	Indeks Kepuasan Masyarakat	**Indeks**	**83,22**	**82,22**	**98,80**	**ST**						
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							**86.322.207,00**	**78.979.700,00**	**91,49**			
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	100,00	ST	86.322.207,00	78.979.700,00	91,49			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							**9.936.268.236,08**	**9.824.362.142,00**	**98,87**			
2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	30	32	106,67	ST	9.499.963.136,08	9.406.028.642,00	99,01			
3. Penyediaan Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	Dokumen	4	4	100,00	ST	436.305.100,00	418.333.500,00	95,88			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capain	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Pelaksanaan Tugas ASN	Pelaksanaan Tugas ASN											
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							**24.582.000,00**	**24.291.000,00**	**98,82**			
4. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	1	1	100,00	ST	24.582.000,00	24.291.000,00	98,82			
Administrasi Umum Perangkat Daerah							**1.154.298.540,00**	**1.094.793.939**	**94,84**			
5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	3.250.200,00	3.063.600,00	94,26			
6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	45.167.400,00	44.992.001,00	99,61			
7. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	3.155.800,00	2.724.000,00	86,32			
8. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	19.754.600,00	19.071.842,00	96,54			
9. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	2.074.300,00	1.640.000,00	79,06			
10. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	100,00	ST	185.758.340,00	181.266.196,00	97,58			
11. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	100,00	ST	2.120.000,00	1.800.000,00	84,91			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capain	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
12. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	1	100,00	ST	893.017.900,00	840.236.300,00	94,09			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							**122.800.000,00**	**120.000.000,00**	**97,72**			
13. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	100,00	ST	122.800.000,00	120.000.000,00	97,72			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**866.328.176,54**	**846.684.437,00**	**97,73**			
14. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	4	100,00	ST	24.490.000,00	24.037.238,00	98,15			
15. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	2	2	100,00	ST	48.906.600,00	48.854.000,00	99,89			
16. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	4	100,00	ST	792.931.576,54	773.793.199,00	97,59			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**142.436.400,00**	**140.499.718,00**	**98,64**			
17. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	Unit	9	9	100,00	ST	117.520.500,00	115.730.818,00	98,48			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capain	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya											
18. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20	20	100,00	ST	24.915.900,00	24.768.900,00	99,41			
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM							**13.000.000,00**	**13.000.000,00**	**100,00**			
Meningkatnya Kualitas Layanan Izin Usaha Simpan Pinjam	**Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam**	**%**	**18,46**	**33,33**	**180,57**	**ST**						
Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							**13.000.000,00**	**13.000.000,00**	**100,00**			
19. Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Unit	5	5	100,00	ST	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00			
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI							**2.990.000,00**	**1.281.000,00**	**42,84**			
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	**Persentase Koperasi yang Diawasi**	**%**	**5,44**	**5,67**	**104,23**	**ST**						

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capain	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							**2.990.000,00**	**1.281.000,00**	**42,84**			
20. Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Unit Usaha	5	11	220,00	ST	2.990.000,00	1.281.000,00	42,84			
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI							**2.990.000,00**	**2.160.000,00**	**72,24**			
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Koperasi	**Persentase KSP/UPS yang Dinilai Kesehatannya**	**%**	**8,74**	**7,10**	**81,20**	**T**						
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							**2.990.000,00**	**2.160.000,00**	**72,24**			
21. Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha	3	11	366,67	ST	2.990.000,00	2.160.000,00	72,24			
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN							**100.063.100,00**	**99.200.000,00**	**99,14**			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capain	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Meningkatnya Kualitas SDM Perkoperasian	**Persentase Koperasi yang Mengikuti Pelatihan**	**%**	**28,80**	**79,40**	**275,68**	**ST**						
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							100.063.100,00	99.200.000,00	99,14			
22. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	40	854	2135	ST	100.063.100,00	99.200.000,00	99,14			
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI							**2.606.117.098,00**	**2.279.207.603,00**	**87,46**			
Meningkatnya Produktivitas Koperasi	**Persentase Koperasi yang Mendapat Dukungan Pemberdayaan**	**%**	**37,18**	**69,72**	**187,51**	**ST**						
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							**2.606.117.098,00**	**2.279.207.603,00**	**87,46**			
23. Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan,	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan,	Unit Usaha	10	416	4160	ST	2.603.127.098,00	2.276.227.603,00	87,44			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capain	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha											
24. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	3	3	100,00	ST	2.990.000,00	2.980.000,00	99,67			
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)							**17.068.663.172,00**	**14.576.871.921,00**	**85,40**			
Meningkatnya Produktivitas UMKM	**Rasio Kewirausahaan Daerah**	**%**	**3,31**	**3,57**	**107,83**	**ST**						
	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Non Pertanian	**%**	**14,95**	**16,48**	**110,20**	**ST**						
Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan							**17.068.663.172,00**	**14.576.871.921,00**	**85,40**			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capain	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
25. Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Unit	538	1800	334,57	ST	5.092.891.972,00	4.918.454.819,00	96,57			
26. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Orang	5250	5250	100,00	ST	10.606.245.000,00	9.182.799.059,00	86,58			
27. Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata	Unit Usaha	1000	6317	631,70	ST	325.200.000,00	307.260.000,00	94,48			
28. Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Unit Usaha	1	1	100,00	ST	450.126.200,00	27.749.902,00	6,16			
29. Fasilitasi Sertifikasi dan Standarisasi Usaha	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Unit Usaha	300	150	50,00	SR	594.200.000,00	140.608.141,00	23,66	Tunda bayar sertifikasi halal reguler untuk 100 pelaku usaha dan Uji mutu untuk 20 Pelaku Usaha	Penyiapan berkas pengajuan Tunda Bayar pada Tahun Anggaran 2026	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capain	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
										tidak dilaksanakan karena keterbatasan waktu di Desember 2025		
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM							**6.300.621.261,38**	**3.951.340.276,00**	**62,71**			
Meningkatnya Daya Saing UMKM	**Persentase UMKM yang dikembangkan**	**%**	**34,89**	**86,33**	**247,42**	**ST**						
Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah							**6.300.621.261,38**	**3.951.340.276,00**	**62,71**			
30. Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	850	463	54,47	R	3.602.141.261,38	1.547.260.896,00	42,95	Dinamika pengelolaan anggaran, perubahan kebijakan fiskal sehingga waktu pelaksanaan terbatas	Berkoordinasi dengan bank penyalur dan Distribusi anggaran kas dilakukan secara proporsional secara periodik agar terlaksananya sosialisasi, pendataan dan verifikasi UMKM calon debitur lebih awal	
31. Pengembangan Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Unit Usaha	88	60	68,18	S	1.698.480.000,00	1.511.458.000,00	88,99			
32. Fasilitasi Pengembangan	Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi	Lembaga	1	1	100,00	ST	1.000.000.000,00	892.621.380,00	89,26			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capain	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang												

3.2.18 Penanaman Modal

Urusan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan Dinas Penanaman Modal Daerah dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau. Pelaksanaan urusan tersebut didukung alokasi anggaran sebesar Rp15.071.210.290,00, dengan realisasi anggaran sampai akhir tahun 2025 mencapai Rp14.805.451.792,00 atau setara 99,24 persen, yang mencerminkan tingkat pelaksanaan program dan kegiatan yang sangat tinggi. Aspek kinerja menunjukkan 8 indikator program telah ditetapkan, seluruhnya (8 indikator) tergolong dalam kategori sangat tinggi.

Berdasarkan dokumen perencanaan dan penganggaran, indikator kegiatan sama dengan indikator sub kegiatan, sehingga dalam dokumen LKPJ ini hanya disajikan indikator sub kegiatan. Terlihat dari sebanyak 33 indikator sub kegiatan, semuanya sebanyak 33 indikator telah mencapai target kinerja yang ditetapkan dengan status sangat tinggi. Secara umum kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam dokumen penganggaran dan perjanjian kinerja tergolong baik.

Uraian lebih rinci mengenai capaian kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan, berikut permasalahan yang dihadapi, upaya penanganan, serta tindak lanjut rekomendasi DPRD pada Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Daerah dan pelayanan Terpadu Satu Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.2.25
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Penanaman Modal yang Dilaksanakan Dinas Penanaman Modal Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2025				Capaian Anggaran Tahun 2025			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Target	Status Capaian	Anggaran APBD-P 2025	Realisasi 2025	% Realisasi Anggaran			
URUSAN PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							**15.071.210.290,00**	**14.805.451.792,00**	**98,24**			
2.18.01PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							**14.226.638.966,00**	**13.998.637.104,00**	**98,40**			
Meningkatnya akuntabilitas kinerja DPMPTSP	**Nilai Sakip Perangkat Daerah**	**Predikat**	**BB**	**A**	**100,00**	**ST**						
	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah	**Indeks**	**86,36**	**86,36**	**100,00**	**ST**						
	Indeks Kepuasan Masyarakat	**Indeks**	**3,48**	**3,48**	**100,00**	**ST**						
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							**185.564.264,00**	**184.429.211,00**	**99,39**			
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	9	9	100,00	ST	150.951.707,00	150.596.291,00	99,76	dalam penyusunan dokumen perencanaan masih terdapat kesalahan dalam penyusunan indikator dan target kegiatan	memberikan sosialisasi dan pelaksanaan desk perencanaan terkait penyusunan dokumen perencanaan	
2. Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan	Laporan	4	4	100,00	ST	6.315.912,00	6.201.180,00	98,18	pengumpulan data dari	jemput bola untuk	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2025				Capaian Anggaran Tahun 2025			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Target	Status Capaian	Anggaran APBD-P 2025	Realisasi 2025	% Realisasi Anggaran			
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									bidang-bidang pengampu kegiatan sering terlambat	mengumpulkan data ke bidang-bidang pengampu kegiatan	
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	7	7	100,00	ST	28.296.645,00	27.631.740,00	97,65	untuk mengukur salah satu indikator kinerja yaitu capaian nilai realisasi investasi, data baru tersedia setelah batas waktu pengumpulan laporan dilaksanakan	menggunakan data berdasarkan rilis periode sebelumnya	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							**12.495.970.503,00**	**12.304.096.808,00**	**98,46**			
4. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	40	40	100,00	ST	12.015.389.365,00	11.835.017.567,00	98,50			
5. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1	100,00	ST	439.680.000,00	428.332.000,00	97,42			
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Laporan	1	1	100,00	ST	40.901.138,00	40.747.241,00	99,62			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2025				Capaian Anggaran Tahun 2025			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Target	Status Capaian	Anggaran APBD-P 2025	Realisasi 2025	% Realisasi Anggaran			
	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
Administrasi Umum Perangkat Daerah							**553.854.151,00**	**529.975.753,00**	**95,69**			
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	100,00	ST	5.294.800,00	5.179.815,00	97,83			
8. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	2	2	100,00	ST	3.038.500	3.030.300	99,73			
9. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	100,00	ST	30.283.795,00	29.649.212,00	97,90			
10. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	100,00	ST	252.648.353,00	229.579.720,00	90,87			
11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	4	100,00	ST	111.660.000,00	111.648.800,00	99,99			
12. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	4	100,00	ST	17.400.000,00	17.359.275,00	99,77			
13. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100,00	ST	133.528.703,00	133.528.631,00	100			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							**42.278.431,00**	**42.217.850,00**	**99,86**			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2025				Capaian Anggaran Tahun 2025			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Target	Status Capaian	Anggaran APBD-P 2025	Realisasi 2025	% Realisasi Anggaran			
14. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	100,00	ST	42.278.431,00	42.217.850,00	99,86			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**855.199.369,00**	**848.379.930,00**	**99,20**			
15. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100,00	ST	180.857.264,00	174.379.930,00	96,28			
16. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	43.200.000,00	43.200.000,00	100			
17. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100,00	ST	631.142.105,00	631.055.105,00	99,99			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**93.772.248,00**	**89.537.552,00**	**95,48**			
18. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	11	11	100,00	ST	85.110.448,00	80.887.552,00	95,04			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2025				Capaian Anggaran Tahun 2025			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Target	Status Capaian	Anggaran APBD-P 2025	Realisasi 2025	% Realisasi Anggaran			
19. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	7	7	100,00	ST	8.661.800,00	8.650.000,00	99,86			
2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL							**219.614.350,00**	**202.641.291,00**	**92,27**			
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	**Persentase pemenuhan dokumen peta potensi investasi provinsi (Dengan Satuan:%)**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**ST**						
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi							**202.179.800,00**	**185.598.117,00**	**91,80**			
20. Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen	1	1	100,00	ST	202.179.800,00	185.598.117,00	91,80	adanya pergantian anggota pansus penyusunan perda dikarenakan berakhirnya periode anggota DPRD provinsi sehingga anggaran di refocusing	kegiatan direncanakan pada tahun 2025	
Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi							**17.434.550,00**	**17.043.174,00**	**97,76**			
21. Pemutakhiran data potensi investasi	Jumlah Peraturan Daerah (Perda)	Dokumen	1	1	100,00	ST	17.434.550,00	17.043.174,00	97,76			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2025				Capaian Anggaran Tahun 2025			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Target	Status Capaian	Anggaran APBD-P 2025	Realisasi 2025	% Realisasi Anggaran			
daerah pada sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi											
2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL							**348.266.180,00**	**343.536.124,00**	**98,64**			
Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	**Persentase Terselenggaranya Event Promosi Penanaman Modal (Dengan Satuan:100)**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**ST**						
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi							**348.266.180,00**	**343.536.124,00**	**98,64**			
22. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	1	100,00	ST	12.053.700,00	12.036.300,00	100			
23. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	Dokumen	1	1	100,00	ST	336.212.480,00	331.499.824,00	98,60	minimnya anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan promosi	menganggarkan kegiatan promosi pada tahun 2025	
2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL							**211.876.799,00**	**198.918.230,00**	**93,88**			
Meningkatnya Perizinan berusaha Berbasis Risiko	**Persentase Pelayanan Perizinan yang terlayani (Dengan Satuan:%)**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**ST**						

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2025				Capaian Anggaran Tahun 2025			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Target	Status Capaian	Anggaran APBD-P 2025	Realisasi 2025	% Realisasi Anggaran			
Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota							**60.954.695,00**	**58.873.095,00**	**96,59**			
24. Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah	Kegiatan Usaha	20	20	100,00	ST	50.260.995,00	49.101.495,00	97,69			
25. Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	25	25	100,00	ST	10.693.700,00	9.771.600,00	91,38			
Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi							**150.922.104,00**	**140.045.135,00**	**92,79**			
26. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	1	100,00	ST	18.401.390,00	14.427.700,00	78,41			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2025				Capaian Anggaran Tahun 2025			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Target	Status Capaian	Anggaran APBD-P 2025	Realisasi 2025	% Realisasi Anggaran			
27. Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	1	1	100,00	ST	36.611.348,00	36.585.860,00	99,93			
28. Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	40	40	100,00	ST	78.258.666,00	74.654.115,00	95,39			
29. Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Kegiatan Usaha	15	15	100,00	ST	17.650.700,00	14.377.460,00	81,46			
2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL							**51.106.895,00**	**48.201.398,00**	**94,31**			
Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal	**Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM (Dengan Satuan:%)**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**ST**						
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi							**51.106.895,00**	**48.201.398,00**	**94,31**			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2025				Capaian Anggaran Tahun 2025			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Target	Status Capaian	Anggaran APBD-P 2025	Realisasi 2025	% Realisasi Anggaran			
Kewenangan Daerah Provinsi												
30. Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha	25	25	100,00	ST	18.040.540,00	17.892.100,00	99,18	terdapat kegiatan pengawasan yang terkendala lokasi perusahaan	melaksanakan kegiatan pengawasan melalui zoom (online)	
31. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan Usaha	24	24	100,00	ST	12.019.105,00	9.414.200,00	78,33			
32. Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Kegiatan Usaha	549	549	100,00	ST	21.047.250,00	20.895.098,00	99,28			
2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM							**13.707.100,00**	**13.517.645,00**	**98,62**			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2025				Capaian Anggaran Tahun 2025			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Target	Status Capaian	Anggaran APBD-P 2025	Realisasi 2025	% Realisasi Anggaran			
INFORMASI PENANAMAN MODAL												
Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi penanaman Modal	**Persentase Ketersediaan Data/Informasi Perkembangan Investasi Di Kepulauan Riau (Dengan Satuan:%)**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**ST**						
Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi							**13.707.100,00**	**13.517.645,00**	**98,62**			
33. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Kegiatan Usaha	4	4	100,00	ST	13.707.100,00	13.517.645,00	98,62			

3.2.19 Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau. Pelaksanaan urusan tersebut didukung alokasi anggaran sebesar Rp34.233.552.898,77, sementara realisasi anggaran sampai akhir tahun 2025 mencapai Rp30.930.990.144,04 atau setara 90,35 persen, yang mencerminkan tingkat pelaksanaan program dan kegiatan yang sangat tinggi. Kinerja program menunjukkan dari sebanyak 8 indikator program telah ditetapkan, sebanyak 8 indikator tergolong dalam kategori sangat tinggi.

Berdasarkan dokumen perencanaan dan penganggaran, indikator kegiatan sama dengan indikator sub kegiatan, sehingga dalam dokumen LKPJ ini hanya disajikan indikator sub kegiatan. Terlihat dari sebanyak 31 indikator sub kegiatan, sebanyak 30 indikator telah mencapai target kinerja yang ditetapkan dengan status sangat tinggi, sebanyak 1 indikator kategori sedang. Secara umum kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam dokumen penganggaran dan perjanjian kinerja tergolong baik.

Uraian lebih rinci mengenai capaian kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan, berikut permasalahan yang dihadapi, upaya penanganan, serta tindak lanjut rekomendasi DPRD pada Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.2.19
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang Dilaksanakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							**34.233.552.898,77**	**30.930.990.144,04**	**90,35**			
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							**13.930.416.799,27**	**12.364.334.184,04**	**88,76**			
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pemerintahan di Bidang Olahraga	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**Predikat**	**BB**	**BB**	**100,00**	**ST**						
	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	**Indeks**	**76**	**73,32**	**96,47**	**ST**						
	Indeks Kepuasan Masyarakat	**Indeks**	**80**	**90,69**	**113,36**	**ST**						
2.19.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							**685.529.904,27**	**596.925.617,00**	**87,08**			
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	100,00	ST	318.679.504,27	268.421.955,00	84,23	Efisiensi Anggaran		
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Laporan	1	1	100,00	ST	87.122.000,00	74.370.600,00	85,36	Efisiensi Anggaran		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	100,00	ST	279.728.400,00	254.133.062,00	90,85	Efisiensi Anggaran		
2.19.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							**10.242.773.946,55**	**9.075.724.730,04**	**88,61**			
4. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	41	41	100,00	ST	9.617.856.546,55	8.651.666.090,04	89,95			
5. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1	100,00	ST	570.298.000,00	382.907.540,00	67,14			
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	100,00	ST	54.619.400,00	41.151.100,00	75,34	Efisiensi Anggaran		
2.19.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daera							**148.276.301,10**	**127.793.076,00**	**86,19**			
7. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	100,00	ST	148.276.301,10	127.793.076,00	86,19			
2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah							**847.347.104,19**	**730.410.854,00**	**86,20**			
8. Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Paket Peralatan dan	Paket	6	4	66,67	S	219.881.300,00	158.920.000,00	72,28	Efisiensi Anggaran		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Perlengkapan Kantor	Perlengkapan Kantor yang Disediakan											
9. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	8	8	100,00	ST	45.000.000,00	43.045.800,00	95,66			
10. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	6	100,00	ST	67.383.500,00	65.596.965,00	97,35			
11. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	5	100,00	ST	35.161.800,00	31.421.880,00	89,36	Efisiensi Anggaran		
12. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	100,00	ST	10.000.000,00	1.380.000,00	13,80	Efisiensi Anggaran		
13. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	100,00	ST	417.312.055,00	389.780.809,00	93,40			
14. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	1	100,00	ST	52.608.449,19	40.265.400,00	76,54	Efisiensi Anggaran		
2.19.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**1.611.005.943,16**	**1.441.711.959,00**	**89,49**			
15. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	249.146.950,00	218.115.491,00	87,54			
16. Penyediaan Jasa Peralatan dan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan	Laporan	1	1	100,00	ST	47.455.000,00	44.726.000,00	94,25			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Perlengkapan Kantor	Perlengkapan Kantor yang Disediakan											
17. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	1.314.403.993,16	1.178.870.468,00	89,69			
2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**395.483.600,00**	**391.767.948,00**	**99,06**			
18. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	13	13	100,00	ST	291.830.000,00	288.127.948,00	98,73			
19. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	1	100,00	ST	103.653.600,00	103.640.000,00	99,99			
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN							**838.857.400,00**	**564.859.622,00**	**67,34**			
Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan	**Rasio Wirausaha Pemuda (Rasio)**	**%**	**1,47**	**1,47**	**100,00**	**ST**						
	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kepeloporan, Kepemimpinan dan Organisasi	**%**	**0,21**	**0,21**	**100,00**	**ST**						

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
2.19.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi							**738.857.400,00**	**464.859.622,00**	**62,92**			
20. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang di Fasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	Orang	100	100	100,00	ST	638.857.400,00	370.499.289,00	57,99	Efisiensi Anggaran		
21. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi yang di Fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Orang	100	100	100,00	ST	100.000.000,00	94.360.333,00	94,36			
2.19.02.1.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi							**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**100**			
22. Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan	Persentase Organisasi Kepemudaan yang di Berdayakan Melalui Kemitraan Berbasis Peneguhan Kemandirian Ekonomi Pemuda	Persentase	2	2	100,00	ST	100.000.000,00	100.000.000,00	100			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
kemandirian ekonomi pemuda												
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN							**18.564.278.699,50**	**17.106.633.538,00**	**92,15**			
Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olahraga	**Cakupan atlet yang berpartisipasi dalam event kejuaraan tingkat Nasional**	**%**	**0,61**	**0,87**	**142,62**	**ST**						
	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	**%**	**4,20**	**4,20**	**100,00**	**ST**						
2.19.03.1.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi							**4.529.906.000,00**	**4.239.100.167,00**	**93,58**			
23. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	Unit	6	6	100,00	ST	2.210.656.000,00	2.037.089.600,00	92,15			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
24. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Dokumen	2	2	100,00	ST	70.000.000,00	67.933.000,00	97,05			
25. Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi	Jumlah Prasarana Olahraga di Tingkat Provinsi yang Tersedia	Unit	2	2	100,00	ST	2.249.250.000,00	2.134.077.567,00	94,88			
2.19.03.1.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga							**5.224.372.699,50**	**4.367.850.229,00**	**83,61**			
26. Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Anggota Kontingen Provinsi yang Ikut Serta dalam Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga	Orang	140	140	100,00	ST	953.441.000,00	895.001.490,00	93,87			
27. Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang Terselenggara	Kegiatan	6	6	100,00	ST	4.270.931.699,50	3.472.848.739,00	81,31	Efisiensi Anggaran		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Nasional dan Provinsi												
2.19.03.1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional							**100.000.000,00**	**89.406.300,00**	**89,41**			
28. Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah Penerima Penghargaan Olahraga	Orang	20	20	100,00	ST	100.000.000,00	89.406.300,00	89,41	Efisiensi Anggaran		
2.19.03.1.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga							**8.710.000.000,00**	**8.410.276.842,00**	**96,56**			
29. Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Dokumen	1	1	100,00	ST	8.310.000.000,00	8.240.000.000,00	99,16			
30. Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Standar Nasional Pengelolaan Organisasi Keolahragaan di Provinsi	Dokumen	2	2	100,00	ST	400.000.000,00	170.276.842,00	42,57	Efisiensi Anggaran		
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN							**900.000.000,00**	**895.162.800,00**	**99,46**			
Meningkatnya Kualitas Kepramukaan	**Persentase Kwartir terfasilitasi**	**%**	**14,85**	**14,85**	**100,00**	**ST**						

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
	Pengembangan Kepramukaan											
2.19.04.1.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan							**900.000.000,00**	**895.162.800,00**	**99,46**			
31. Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya	Organisasi	1	1	100,00	ST	900.000.000,00	895.162.800,00	99,46			

3.2.20 Urusan Statistik

Urusan Statistik Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau. Pelaksanaan urusan tersebut didukung alokasi anggaran sebesar Rp48.595.643,00, dengan realisasi anggaran sampai akhir tahun 2025 mencapai Rp38.441.840,00 atau setara 79,11 persen, yang mencerminkan tingkat pelaksanaan program dan kegiatan yang sangat rendah. Kinerja menunjukkan 1 indikator program telah ditetapkan dan tergolong dalam kategori sangat tinggi.

Berdasarkan dokumen perencanaan dan penganggaran, indikator kegiatan sama dengan indikator sub kegiatan, sehingga dalam dokumen LKPJ ini hanya disajikan indikator sub kegiatan. Terlihat dari sebanyak 1 indikator sub kegiatan, sebanyak 1 indikator telah mencapai target kinerja yang ditetapkan dengan status sangat tinggi. Secara umum kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam dokumen penganggaran dan perjanjian kinerja tergolong baik.

Uraian lebih rinci mengenai capaian kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan, berikut permasalahan yang dihadapi, upaya penanganan, serta tindak lanjut rekomendasi DPRD pada Urusan Statistik yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.2.20
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Statistik yang Dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							**48.595.643,00**	**38.441.840,00**	**79,11**			
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL							**48.595.643,00**	**38.441.840,00**	**79,11**			
Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	**Indeks Pembangunan Statistik**	**Indeks**	**2,70**	**2,61*)**	**96,67**	**ST**						
2.20.02.1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi							**48.595.643,00**	**38.441.840,00**				
1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Kegiatan	1	1	100	ST	48.595.643,00	38.441.840,00	79,11	Terkena Hold rekon BKAD		

3.2.21 Urusan Persandian

Urusan Persandian Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau. Pelaksanaan urusan tersebut didukung alokasi anggaran sebesar Rp36.231.702,00, sementara realisasi anggaran sampai akhir tahun 2025 mencapai Rp23.247.051,00 atau setara 64,16 persen, yang mencerminkan tingkat pelaksanaan program dan kegiatan yang sangat rendah. Kinerja menunjukkan dari sejumlah 1 indikator program yang telah ditetapkan, tergolong dalam kategori sangat tinggi.

Berdasarkan dokumen perencanaan dan penganggaran, indikator kegiatan sama dengan indikator sub kegiatan, sehingga dalam dokumen LKPJ ini hanya disajikan indikator sub kegiatan. Terlihat dari sebanyak 1 indikator sub kegiatan, sebanyak 1 indikator telah mencapai target kinerja yang ditetapkan dengan status sangat tinggi. Secara umum kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam dokumen penganggaran dan perjanjian kinerja tergolong baik.

Uraian lebih rinci mengenai capaian kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan, berikut permasalahan yang dihadapi, upaya penanganan, serta tindak lanjut rekomendasi DPRD pada Urusan Persandian yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.2.21
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Persandian yang Dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							**36.231.702,00**	**23.247.051,00**	**64,16**			
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI							**36.231.702,00**	**23.247.051,00**	**64,16**			
Meningkatnya keamanan siber dan sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	**Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah**	**%**	**40**	**55**	**137,5**	**ST**						
2.21.02.1.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi							**36.231.702,00**	**23.247.051,00**	**64,16**			
1. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat	36	36	100	ST	36.231.702,00	23.247.051,00	64,16	Terkena Hold rekon BKAD		

3.2.22 Kebudayaan

Urusan Kebudayaan Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau. Pelaksanaan urusan tersebut didukung alokasi anggaran sebesar Rp14.725.421.971,00, sementara realisasi anggaran sampai akhir tahun 2025 mencapai Rp14.057.867.362,31 atau setara 95,47 persen, yang mencerminkan tingkat pelaksanaan program dan kegiatan yang sangat tinggi. Kinerja program menunjukkan dari sebanyak 11 indikator program telah ditetapkan, seluruhnya (11 indikator) tergolong dalam kategori sangat tinggi.

Berdasarkan dokumen perencanaan dan penganggaran, indikator kegiatan sama dengan indikator sub kegiatan, sehingga dalam dokumen LKPJ ini hanya disajikan indikator sub kegiatan. Terlihat dari sebanyak 26 indikator sub kegiatan, sebanyak 22 indikator telah mencapai target kinerja yang ditetapkan dengan status sangat tinggi, dan sebanyak 1 indikator dengan status kinerja rendah, dan sebanyak 3 indikator dengan status kinerja sangat rendah. Secara umum kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam dokumen penganggaran dan perjanjian kinerja tergolong baik.

Uraian lebih rinci mengenai capaian kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan, berikut permasalahan yang dihadapi, upaya penanganan, serta tindak lanjut rekomendasi DPRD pada Urusan Kebudayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.2.22
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Kebudayaan yang Dilaksanakan Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realiasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realiasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
222 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							**14.725.421.971,00**	**14.057.867.362,31**	**95,47**			
22201 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							**11.669.551.179,51**	**11.157.859.636,00**	**95,62**			
Meningkatnya Kinerja dan Efisiensi Aparatur Dinas Kebudayaan	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**Predikat**	**BB**	**BB**	**100,00**	**ST**				**nilai Sakip sementara menggunakan tahun 2024, karena belum keluar untuk 2025**		
	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	**Indeks**	**86,5**	**86,36**	**99,84**	**ST**						
	Indeks Kepuasan Masyarakat	**Indeks**	**88,3**	**85,58**	**96,92**	**ST**						
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja							**171.947.808,65**	**145.380.540,00**	**84,55**			
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	100,00	ST	73.072.000,00	64.058.131,00	87,66			
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Laporan	1	1	100,00	ST	83.862.208,65	72.341.649,00	86,26			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realiasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realiasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	100,00	ST	15.013.600,00	8.980.760,00	59,82	ada kebijakan dari BKAD untuk menahan penggunaan anggaran		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							**8.890.362.380,64**	**8.557.153.188,00**	**96,25**			
4. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	Orang	65	67	100,00	ST	8.489.443.380,64	8.184.419.188,00	96,41			
5. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	100,00	ST	400.919.000,00	372.734.000,00	92,97			
Administrasi Umum Perangkat Daerah							**512.412.260,00**	**484.566.745,00**	**94,57**			
6. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100,00	ST	280.315.700,00	270.388.395,00	96,46			
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100,00	ST	219.096.560,00	201.192.460,00	91,83			
8. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	1	100,00	ST	13.000.000,00	12.985.890,00	99,89			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realiasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realiasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**2.013.655.360,22**	**1.893.737.592,00**	**94,04**			
9. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	100,00	ST	63.707.836,00	63.707.836,00	100,00			
10. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100,00	ST	570.398.240,22	543.327.707,00	95,25			
11. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100,00	ST	44.000.000,00	43.450.000,00	98,75			
12. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100,00	ST	1.335.549.284,00	1.243.252.049,00	93,09			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**81.173.370,00**	**77.021.571,00**	**94,89**			
13. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	11	11	100,00	ST	62.833.370,00	58.888.988,00	93,72			
14. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	35	35	100,00	ST	18.340.000,00	18.132.583,00	98,87			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realiasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realiasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
22202 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN							**1.948.428.405,00**	**1.932.034.295,00**	**99,16**			
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kebudayaan	**Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan**	**%**	**25,84**	**32,59**	**126,12**	**ST**						
	Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	**%**	**1,69**	**1,71**	**101,18**	**ST**						
	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	**%**	**7,3**	**7,3**	**100,00**	**ST**						
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							**304.907.385,00**	**291.696.276,00**	**95,67**			
15. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi	Objek	2	8	400,00	ST	213.890.000,00	213.750.000,00	99,93			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realiasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realiasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
16. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Lembaga dan Pranata Kebudayaan yang Dibina	Lembaga	50	29	58,00	R	91.017.385,00	77.946.276,00	85,64	capaian indikator pada sub kegiatan ini dengan target 50 org hanya tercapai 29 org dikarenakan anggaran yang tidak maksimal dalam mendukung ketercapaian indikator ini	ditahun 2026 akan di upayakan kegiatan ini dapat terlaksana sehingga apa yang sudah menjadi target dapat tercapai	
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi							**298.607.520,00**	**297.273.686,00**	**99,55**			
17. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek	23	25	108,70	ST	298.607.520,00	297.273.686,00	99,55			
Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							**1.344.913.500,00**	**1.343.064.333,00**	**99,86**			
18. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah Dilakukan Pelindungan,	Objek	1	1	100,00	ST	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realiasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realiasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
	Pengembangan dan Pemanfaatan											
19. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	Orang	80	100	125,00	ST	244.913.500,00	243.064.333,00	99,24			
20. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	Unit	1	1	100,00	ST	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00			
22203 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL							**717.890.436,83**	**587.479.841,00**	**81,83**			
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kesenian Tradisional	**Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas)**	**%**	**0,15**	**0,18**	**120,00**	**ST**						
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota							**717.890.436,83**	**587.479.841,00**	**81,83**			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realiasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realiasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
21. Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	Sertifikat	1	1	100,00	ST	20.699.258,83	19.400.000,00	93,72			
22. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	2	2	100,00	ST	697.191.178,00	568.079.841,00	81,48	masih ada tunda bayar	akan diselesaikan di tahun anggaran 2026	
22205 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA							**198.972.165,66**	**196.442.806,31**	**98,73**			
Meningkatnya Warisan Budaya yang dilestarikan	**Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan**	**%**	**6,94**	**10,76**	**155,04**	**ST**						
	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	**%**	**45,53**	**43,65**	**95,87**	**ST**						
	Persentase Penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dan atau Cagar budaya yang telah Ditetapkan	**%**	**17,26**	**18,33**	**106,20**	**ST**						

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realiasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realiasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi							**4.588.910,00**	**3.600.000,00**	**78,45**	ditahun 2025 Tidak dapat dilakukan penetapan cagar budaya tingkat provinsi sehingga target yang ditetapkan pada sub kegiatan tidak tercapai	Direncanakan akan di usulkan kembali di APBD perubahan tahun 2026	
23. Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Objek	1	0	0,00	SR	4.588.910,00	3.600.000,00	78,45			
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi							**194.383.255,66**	**192.842.806,31**	**99,21**			
24. Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi (Objek	Objek	2	1	50,00	SR	137.801.567,00	136.367.760,31	98,96			
25. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	16	0	0,00	SR	56.581.688,66	56.475.046,00	99,81	target capaian sub kegiatan tidak tercapai dikarenakan adanya dampak refocusing dan berdasarkan aturan Non ASN jupel menjadi OC sehingga pagu yang ada di dalam SSH 2025 Belum ada tersedia rekening belanja jupel	Anggaran untuk jupel sdh diusulkan di dalam SSH 2026 Dan telah dianggarkan di tahun 2026 dengan 7 org menyesuaikan dengan alokasi pagu yang di berikan	
22206 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN							**190.579.784,00**	**184.050.784,00**	**96,57**			
Meningkatnya tata kelola museum	**Persentase peningkatan upaya konservasi**	**%**	**11,14**	**12,10**	**108,62**	**ST**						

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realiasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realiasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
	koleksi museum setiap tahun											
Pengelolaan Museum Provinsi							**190.579.784,00**	**184.050.784,00**	**96,57**			
26. Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	Unit	1	1	100,00	ST	190.579.784,00	184.050.784,00	96,57			

3.2.23 Urusan Perpustakaan

Urusan Perpustakaan Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau. Pelaksanaan urusan tersebut didukung alokasi anggaran sebesar Rp21.308.335.398,00, dengan realisasi anggaran sampai akhir tahun 2025 mencapai Rp20.310.797.800,40 atau sebesar 95,32 persen, yang mencerminkan tingkat pelaksanaan program dan kegiatan yang sangat tinggi. Kinerja program menunjukkan dari sebanyak 8 indikator program telah ditetapkan, sebanyak 7 indikator tergolong dalam kategori sangat tinggi, dan 1 indikator kategori tinggi.

Berdasarkan dokumen perencanaan dan penganggaran, indikator kegiatan sama dengan indikator sub kegiatan, sehingga dalam dokumen LKPJ ini hanya disajikan indikator sub kegiatan. Terlihat dari sebanyak 34 indikator sub kegiatan, sebanyak 32 indikator telah mencapai target kinerja yang ditetapkan dengan status sangat tinggi, dan sebanyak 2 indikator dengan status kinerja tinggi. Secara umum kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam dokumen penganggaran dan perjanjian kinerja tergolong baik.

Uraian lebih rinci mengenai capaian kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan, berikut permasalahan yang dihadapi, upaya penanganan, serta tindak lanjut rekomendasi DPRD pada Urusan Perpustakaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.2.23
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Perpustakaan yang Dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realiasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realiasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							**21.308.335.398,00**	**20.310.797.800,40**	**95,32**			
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							**19.089.942.761,00**	**18.585.706.813,40**	**97,36**			
Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur Pemerintah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**Predikat**	**BB**	**BB**	**100,00**	**ST**						
	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	**Indeks**	**78,01**	**84**	**107,68**	**ST**						
	Indeks Kepuasan Masyarakat	**Indeks**	**88,25**	**88,30**	**100,06**	**ST**						
	Indeks Kepuasan Masyarakat UPT	**Indeks**	**81,00**	**81,05**	**100,06**	**ST**						
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							**173.123.329,00**	**166.244.612,00**	**96,03**			
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan	1	1	100	ST	105.777.189,00	100.986.712,00	95,47			
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Laporan	1	1	100	ST	67.346.140,00	65.257.900,00	96,90			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realiasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realiasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							**15.026.871.066,00**	**14.705.584.654,00**	**97,86**			
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	67	67	100,00	ST	14.600.995.842,00	14.304.506.654,00	97,97			
4. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	15	15	100,00	ST	425.875.224,00	401.078.000,00	94,18			
Administrasi Umum Perangkat Daerah							**469.830.577,00**	**408.491.725,00**	**86,94**			
5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	14	14	100,00	ST	27.533.600,00	27.028.500,00	98,17			
6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	4	80,00	T	92.562.100,00	44.222.200,00	47,78	Tunda Bayar 2025		
7. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	100,00	ST	91.505.870,00	85.348.011,00	93,27			
8. Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPT)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	100,00	ST	19.978.526,00	18.393.150,00	92,06			
9. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	22.971.600,00	21.800.700,00	94,90			
10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	Dokumen	5	5	100,00	ST	9.960.000,00	9.930.000,00	99,70			
11. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	Laporan	25	25	100,00	ST	134.965.381,00	134.797.396,00	99,88			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realiasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realiasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
12. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	100,00	ST	43.717.200,00	40.852.668,00	93,45			
13. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	100,00	ST	26.636.300,00	26.119.100,00	98,06			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**3.107.987.812,00**	**2.999.423.312,00**	**96,51**			
14. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	100,00	ST	2.990.000,00	2.990.000,00	100			
15. Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPT)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	100,00	ST	754.100,00	750.000,00	99,46			
16. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	893.886.480,00	844.806.689,00	94,51			
17. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPT)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	66.297.800,00	60.444.048,00	91,17			
18. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	2.144.059.432,00	2.090.432.575,00	97,50			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**312.129.977,00**	**305.962.510,40**	**98,02**			
19. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Unit	5	5	100,00	ST	157.453.986,00	156.841.320,00	99,61			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realiasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realiasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya											
20. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (UPT)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	100,00	ST	38.156.600,00	37.600.100,00	98,54			
21. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100,00	ST	43.155.291,00	43.155.290,40	100,00			
22. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	35	35	100,00	ST	69.700.000,00	64.855.800,00	93,05			
23. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (UPT)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	3	100,00	ST	3.664.100,00	3.510.000,00	95,79			
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN							**2.177.602.637,00**	**1.688.357.812,00**	**77,53**			
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	**Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat**	**Nilai**	**74,69**	**59,33**	**79,43**	**T**						
	Jumlah Masyarakat yang memanfaatkan Perpustakaan	**Orang**	**50.700**	**47.575**	**93,84**	**ST**						
	Jumlah Kunjungan Pemustaka ke UPT	**Orang**	**4.004**	**6.109**	**152,57**	**ST**						

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realiasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realiasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
	Perpustakaan M. Sani Batam											
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi							**1.582.945.037,00**	**1.143.014.428,00**	**72,21**			
24. Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan	Eksemplar	22	22	100,00	ST	602.248.000,00	575.630.935,00	95,58			
25. Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Orang	50	50	100,00	ST	165.135.800,00	153.894.100,00	93,19			
26. Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi	Layanan	1	1	100,00	ST	702.785.237,00	305.553.235,00	43,48	Tunda Bayar 2025		
27. Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Eksemplar	150	155	103,33	ST	20.000.000,00	17.467.908,00	87,34			
28. Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK	Perpustakaan	1	1	100,00	ST	92.776.000,00	90.468.250,00	97,51			
Pembudayaan Gemar							**594.657.600,00**	**545.343.384,00**	**91,71**			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realiasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realiasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Membaca Tingkat Daerah Provinsi												
29. Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	Lokus	5	5	100,00	ST	59.000.000,00	56.611.053,00	95,95			
30. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Perpustakaan	1	1	100,00	ST	49.400.000,00	47.377.500,00	95,91			
31. Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Orang	50	60	120,00	ST	433.600.000,00	391.317.831,00	90,25			
32. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	Perpustakaan	10	8	80,00	T	52.657.600,00	50.037.000,00	95,02			
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO							**40.790.000,00**	**36.733.175,00**	**90,05**			
Meningkatnya Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	**Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki**	**%**	**12**	**12**	**100,00**	**ST**						
Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi							**40.790.000,00**	**36.733.175,00**	**90,05**			
33. Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang	Eksemplar	5	5	100,00	ST	30.790.000,00	27.123.800,00	88,09			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realiasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realiasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan											
34. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	Orang	8	8	100,00	ST	10.000.000,00	9.609.375,00	96,09			

3.2.24 Urusan Kearsipan

Urusan Kearsipan Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau. Pelaksanaan urusan tersebut didukung alokasi anggaran sebesar Rp129.858.500,00, dengan realisasi anggaran sampai akhir tahun 2025 mencapai Rp114.643.431,00 atau sebesar 88,28 persen, yang mencerminkan tingkat pelaksanaan program dan kegiatan yang sangat tinggi. Kinerja program menunjukkan dari sebanyak 1 indikator program telah ditetapkan, tergolong dalam kategori sangat tinggi.

Berdasarkan dokumen perencanaan dan penganggaran, indikator kegiatan sama dengan indikator sub kegiatan, sehingga dalam dokumen LKPJ ini hanya disajikan indikator sub kegiatan. Terlihat dari sebanyak 2 indikator sub kegiatan, sebanyak 2 indikator telah mencapai target kinerja yang ditetapkan dengan status sangat tinggi. Secara umum kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam dokumen penganggaran dan perjanjian kinerja tergolong baik.

Uraian lebih rinci mengenai capaian kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan, berikut permasalahan yang dihadapi, upaya penanganan, serta tindak lanjut rekomendasi DPRD pada Urusan Kearsipan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.2.24
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Kearsipan yang Dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realiasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realiasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							**129.858.500,00**	**114.643.431,00**	**88,28**			
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP							**129.858.500,00**	**114.643.431,00**	**88,28**			
Meningkatnya Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis	**Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Psl40 dan 59 U 43/2009)**	**%**	**22,63**	**22,68**	**100,22**	**ST**						
Pengelolaan Arsip Dinamis Provins							**122.275.400,00**	**107.764.021,00**	**88,13**			
1. Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan	Lembaga	41	41	100,00	ST	122.275.400,00	107.764.021,00	88,13			
Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi							**7.583.100,00**	**6.879.410,00**	**90,72**			
2. Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Pengguna	80	82	102,50	ST	7.583.100,00	6.879.410,00	90,72			

3.2.25 Urusan Kelautan dan Perikanan

Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau. Pelaksanaan urusan tersebut didukung alokasi anggaran sebesar Rp54.164.879.734,00, dengan realisasi anggaran sampai akhir tahun 2025 mencapai Rp52.349.880.797,92 atau sebesar 96,65 persen, yang mencerminkan tingkat pelaksanaan program dan kegiatan yang sangat tinggi. Kinerja program menunjukkan 9 indikator program telah ditetapkan, sebanyak 8 indikator tergolong dalam kategori sangat tinggi, dan 1 indikator kategori rendah.

Berdasarkan dokumen perencanaan dan penganggaran, indikator kegiatan sama dengan indikator sub kegiatan, sehingga dalam dokumen LKPJ ini hanya disajikan indikator sub kegiatan. Terlihat dari sebanyak 36 indikator sub kegiatan, sebanyak 36 indikator telah mencapai target kinerja yang ditetapkan dengan status sangat tinggi. Secara umum kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam dokumen penganggaran dan perjanjian kinerja tergolong baik.

Uraian lebih rinci mengenai capaian kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan, berikut permasalahan yang dihadapi, upaya penanganan, serta tindak lanjut rekomendasi DPRD pada Urusan Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.2.25
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Kelautan dan Perikanan yang Dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							**54.164.879.734,00**	**52.349.880.797,92**	**96,65**			
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							**36.708.156.347,75**	**35.613.298.611,00**	**97,02**			
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**Predikat**	**BB**	**BB**	**100,00**	**ST**						
	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	**Indeks**	**80,20**	**85,53**	**106,65**	**ST**						
	Indeks Kepuasan Masyarakat	**Indeks**	**85,81**	**87,23**	**101,65**	**ST**						
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							**185.528.146,76**	**181.692.315,00**	**97,93**			
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	100,00	ST	151.325.300,02	149.821.015,00	99,01			
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	Laporan	2	2	100,00	ST	11.443.974,04	9.146.600,00	79,93			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
	Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4	100,00	ST	22.758.872,70	22.724.700,00	99,85			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							**30.989.403.553,00**	**30.057.999.270,00**	**96,99**			
4. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dan Tunjangang ASN	Orang/Bulan	111	111	100,00	ST	29.879.634.853,00	28.979.693.270,00	96,99			
5. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Adm.Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	100,00	ST	1.109.768.700,00	1.078.306.000,00	97,16			
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							**37.624.000,00**	**32.918.800,00**	**87,49**			
6. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	100,00	ST	37.624.000,00	32.918.800,00	87,49			
Administrasi Umum Perangkat Daerah							**764.902.875,98**	**749.594.090,00**	**98,00**			
7. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	10	10	100,00	ST	27.205.900,00	27.172.956,00	99,88			
8. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket	10	10	100,00	ST	211.950.880,98	202.891.481,00	95,73			
9. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	100,00	ST	17.000.000,00	16.575.000,00	97,50			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
10. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100,00	ST	508.746.095,00	502.954.653,00	98,86			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							**147.724.040,00**	**143.235.480,00**	**96,96**			
11. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit	8	8	100,00	ST	147.724.040,00	143.235.480,00	96,96			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**3.910.873.920,01**	**3.808.918.661,00**	**97,39**			
12. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	12	100,00	ST	909.778.912,00	859.994.942,00	94,53			
13. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	12	12	100,00	ST	3.001.095.008,01	2.948.923.719,00	98,26			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**672.099.812,00**	**638.939.995,00**	**95,07**			
14. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	3	3	100,00	ST	189.797.462,00	179.057.459,00	94,34			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
15. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	23	23	100,00	ST	361.512.500,00	346.722.502,00	95,91			
16. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	46	46	100,00	ST	120.789.850,00	113.160.034,00	93,68			
3.25.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL							**257.192.505,46**	**250.764.855,00**	**97,50**			
Terkelolanya kawasan konservasi perairan daerah	**Persentase Luas Kawasan Konservasi yang Dikelola Minimum**	**%**	**87,81**	**87,81**	**100,00**	**ST**						
Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi							**26.722.605,46**	**21.794.955,00**	**81,56**			
17. Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luas Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang terkelola	Ha	2.613.290,18	2.613.290,18	100,00	ST	26.722.605,46	21.794.955,00	81,56			
Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi							**25.260.000,00**	**25.260.000,00**	**100,00**			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
18. Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	Dokumen	150	150,00	100,00	ST	25.260.000,00	25.260.000,00	100,00			
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil							**205.209.900,00**	**203.709.900,00**	**99,27**			
19. Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	25	25	100,00	ST	205.209.900,00	203.709.900,00	99,27			
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP							**13.496.177.809,12**	**12.947.287.223,12**	**95,93**			
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	**Jumlah Produksi Perikanan Tangkap**	**Ton**	**315.281,97**	**316.749,93**	**100,00**	**ST**					**Angka Sementara**	
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil							**12.814.608.014,12**	**12.291.810.712,00**	**95,92**			
20. Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Yang Tersedia Di Wilayah laut Sampai Dengan 12 Mil	Unit	1	1	100,00	ST	6.768.192.500,00	6.558.772.384,00	96,91			
21. Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Unit	5310	5310	100,00	ST	6.046.415.514,12	5.733.038.328,00	94,82	Tunda bayar sebesar 288.046.268 pembayaran pengerjaan kelong apung dengan kapal		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT							**33.350.800,00**	**32.710.560,00**	**98,08**			
22. Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	%	90	90	100,00	ST	33.350.800,00	32.710.560,00	98,08			
Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi							**648.218.995,00**	**622.765.951,12**	**96,07**			
23. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia Unit)	Unit	1	1	100,00	ST	546.524.595,00	541.593.951,12	99,10			
24. Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Layanan	4	4	100,00	ST	101.694.400,00	81.172.000,00	79,82			
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA							**2.887.067.836,00**	**2.746.081.044,80**	**95,12**			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	**Jumlah Produksi Perikanan Budidaya**	**Ton**	**39.899,26**	**40.656,10**	**100**	**ST**					**Angka Sementara**	
Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi							**33.395.733,00**	**33.395.733,00**	**100,00**			
25. Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rekomendasi	15	15	100,00	ST	33.395.733,00	33.395.733,00	100,00			
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut							**2.853.672.103,00**	**2.712.685.311,80**	**95,06**			
26. Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan (Dokumen)	Dokumen	1	1	100,00	ST	17.724.500,00	16.480.700,00	92,98			
27. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit	4	4	100,00	ST	1.088.973.034,00	1.055.660.525,80	96,94			
28. Penjaminan Ketersediaan Sarana	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit	7	7	100,00	ST	1.111.987.230,00	1.062.046.100,00	95,51			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Pembudidayaan Ikan di Laut												
29. Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	Dokumen	2	2	100,00	ST	626.419.539,00	571.110.486,00	91,17			
30. Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100,00	ST	8.567.800,00	7.387.500,00	86,22			
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN							**689.204.554,99**	**669.728.925,00**	**97,17**			
Meningkatnya kepatuhan,kelestarian laut dan keanekaragaman hayati	**Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan**	**%**	**90**	**99,5**	**111**	**ST**						
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil							**689.204.554,99**	**669.728.925,00**	**97,17**			
31. Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Hasil Operasi	15	15	100,00	ST	331.812.064,99	325.024.308,00	97,95			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
32. Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	11	11	100,00	ST	219.390.022,00	219.294.652,00	99,96			
33. Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Kelompok	5	5	100,00	ST	135.452.468,00	122.859.965,00	90,70			
34. Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	Kelompok Masyarakat	5	5	100,00	ST	2.550.000,00	2.550.000,00	100,00			
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN							**127.080.680,68**	**122.720.139,00**	**96,57**			
Meningkatnya produksi Olahan Hasil Perikanan	**Angka Konsumsi Ikan**	**Kg/Kapita**	**40,61**	**69,64**	**171**	**ST**					**Angka 2025 belum dirilis**	
	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan	**Ton**	**13.400**	**19.592,02**	**146**	**ST**					**Angka Sementara**	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							**57.083.886,00**	**55.092.632,00**	**96,51**			
35. Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Perikanan (Rekomendasi SIPPHP) yang diterbitkan	Rekomendasi	45	45	100,00	ST	57.083.886,00	55.092.632,00	96,51			
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar							**69.996.794,68**	**67.627.507,00**	**96,62**			
36. Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka	Kegiatan	1	1	100,00	ST	69.996.794,68	67.627.507,00	96,62			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing											

3.2.26 Urusan Pariwisata

Urusan Pariwisata Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau. Pelaksanaan urusan tersebut didukung alokasi anggaran sebesar Rp23.086.667.902,00, sementara realisasi anggaran sampai akhir tahun 2025 mencapai Rp20.400.695.006,00 atau setara 88,37 persen, yang mencerminkan tingkat pelaksanaan program dan kegiatan yang sangat tinggi. Kinerja ditunjukkan dengan sebanyak 9 indikator program, sebanyak 8 indikator memiliki kinerja sangat tinggi, dan 1 indikator dengan kinerja tinggi.

Berdasarkan dokumen perencanaan dan penganggaran, indikator kegiatan sama dengan indikator sub kegiatan, sehingga dalam dokumen LKPJ ini hanya disajikan indikator sub kegiatan. Terlihat dari sebanyak 25 indikator sub kegiatan, sebanyak 25 indikator telah mencapai target kinerja yang ditetapkan dengan status sangat tinggi. Secara umum kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam dokumen penganggaran dan perjanjian kinerja tergolong baik.

Uraian lebih rinci mengenai capaian kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan, berikut permasalahan yang dihadapi, upaya penanganan, serta tindak lanjut rekomendasi DPRD pada Urusan Pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.2.26
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Pariwisata yang Dilaksanakan Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							**23.086.667.902,00**	**20.400.695.006,00**	**88,37**			
3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							**13.439.744.552,00**	**12.952.160.365,00**	**96,37**			
Meningkatnya Kualitas Kinerja Dinas Pariwisata	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**Predikat**	**BB**	**BB**	**100,00**	**ST**						
	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	**Indeks**	**83,46**	**81,05**	**97,11**	**ST**						
	Indeks Kepuasan Masyarakat	**Indeks**	**88,9**	**93,63**	**105,32**	**ST**						
3.26.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							**132.265.002,00**	**123.643.131,00**	**93,48**			
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	6	100,00	ST	119.816.872,00	112.430.883,00	93,84			
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	5	100,00	ST	12.448.130,00	11.212.248,00	90,07			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
3.26.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							**11.058.176.404,00**	**10.722.773.204,00**	**96,97**			
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	72	72	100,00	ST	10.547.538.404,00	10.235.310.166,00	97,04			
4. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1	100,00	ST	500.638.000,00	479.826.000,00	95,84			
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	100,00	ST	10.000.000,00	7.637.038,00	76,37			
3.26.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah							**1.036.981.737,00**	**947.570.902,00**	**91,38**			
6. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	3	100,00	ST	261.667.700,00	215.418.113,00	82,33			
7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	100,00	ST	349.344.332,00	316.345.506,00	90,55			
8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100,00	ST	425.969.705,00	415.807.283,00	97,61			
3.26.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**1.008.121.409,00**	**967.762.396,00**	**96,00**			
9. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	100,00	ST	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00			
10. Penyediaan Jasa Komunikasi,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Laporan	12	12	100,00	ST	38.440.000,00	22.521.237,00	58,59	ada efisiensi dari anggaran		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Sumber Daya Air dan Listrik	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan									untuk penambahan daya listrik dan pembayaran rekening listrik		
11. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100,00	ST	956.681.409,00	932.241.159,00	97,45			
3.26.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**204.200.000,00**	**190.410.732,00**	**93,25**			
12. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	2	2	100,00	ST	50.400.000,00	50.074.184,00	99,35			
13. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6	6	100,00	ST	129.780.000,00	121.776.546,00	93,83			
14. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	30	30	100,00	ST	24.020.000,00	18.560.002,00	77,27			
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA							**220.725.000,00**	**220.725.000,00**	**100,00**			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	**Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara**	**Hari**	**1,9**	**2,02**	**106,32**	**ST**						
	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan Nusantara	**Hari**	**1,65**	**1,77**	**107,27**	**ST**						
3.26.02.1.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	**Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi**	**Dokumen**	**1**	**1**	**100,00**	ST	**220.725.000,00**	**220.725.000,00**	**100,00**			
15. Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi	Dokumen	1	1	100,00	ST	220.725.000,00	220.725.000,00	100,00			
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA							**7.758.633.839,00**	**5.647.330.979,00**	**72,79**			
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	**Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara**	**Ribu Orang**	**2.497,8**	**2.027,0**	**81,15**	**T**						
	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara	**Perjalanan**	**3.500.450**	**4.294.670**	**122,69**	**ST**						
3.26.03.1.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi							**7.758.633.839,00**	**5.647.330.979,00**	**72,79**			
16. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	4	4	100,00	ST	1.791.599.129,00	926.608.040,00	51,72	Rendahnya realisasi keuangan pada sub kegiatan ini disebabkan adanya tunda bayar sebesar	Penyelesaian tunda bayar dilakukan pada tahun anggaran 2026	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
										Rp. 828.595.784		
17. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Kegiatan	28	28	100,00	ST	5.967.034.710,00	4.720.722.939,00	79,11	Rendahnya realisasi keuangan pada sub kegiatan ini disebabkan adanya tunda bayar	Penyelesaian tunda bayar dilakukan pada tahun anggaran 2026	
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL							**1.307.813.811,00**	**1.253.032.729,00**	**95,81**			
Meningkatnya Pengembangan Sektor Ekonomi Kreatif	**Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual**	**%**	**4,65**	**4,69**	**100,86**	**ST**						
3.26.04.1.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif							**1.307.813.811,00**	**1.253.032.729,00**	**95,81**			
18. Perlindungan Hasil Kreativitas	Jumlah Dokumen Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif	Dokumen	1	1	100,00	ST	20.402.000,00	20.271.600,00	99,36			
19. Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif	Jumlah terlaksananya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif	Promosi	6	6	100,00	ST	1.227.778.351,00	1.173.127.779,00	95,55			
20. Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak	Produk	60	60	100,00	ST	59.633.460,00	59.633.350,00	100,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
	Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif											
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF							**359.750.700,00**	**327.445.933,00**	**91,02**			
Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	**Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan Kapasitasnya**	**%**	**9,61**	**10,11**	**105,20**	**ST**						
3.26.05.1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan							**359.750.700,00**	**327.445.933,00**	**91,02**			
21. Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Orang	50	50	100,00	ST	91.362.000,00	83.676.963,00	91,59			
22. Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Laporan	1	1	100,00	ST	72.257.400,00	62.953.000,00	87,12			
23. Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Orang	40	40	100,00	ST	82.674.000,00	76.251.770,00	92,23			
24. Pengembangan Kompetensi Sumber Daya	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitasi	Orang	40	40	100,00	ST	89.944.000,00	83.069.200,00	92,36			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Manusia Ekonomi Kreatif	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif											
25. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Laporan	1	1	100,00	ST	23.513.300,00	21.495.000,00	91,42			

3.2.5b. Urusan Pertanian

Urusan Pertanian Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau. Pelaksanaan urusan tersebut didukung alokasi anggaran sebesar Rp 15.925.730.686,98, sementara realisasi anggaran sampai akhir tahun 2025 mencapai Rp 11.576.100.771,50 atau setara 72,69 persen, yang mencerminkan tingkat pelaksanaan program dan kegiatan yang sangat optimal. Kinerja menunjukkan 9 indikator program telah ditetapkan, seluruhnya (9 indikator) kategori sangat tinggi.

Berdasarkan dokumen perencanaan dan penganggaran, indikator kegiatan sama dengan indikator sub kegiatan, sehingga dalam dokumen LKPJ ini hanya disajikan indikator sub kegiatan. Terlihat dari sebanyak 13 indikator sub kegiatan, sebanyak 12 indikator telah mencapai target kinerja yang ditetapkan dengan status sangat tinggi, dan 1 indikator dengan status sangat rendah. Secara umum kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam dokumen penganggaran dan perjanjian kinerja tergolong baik.

Uraian lebih rinci mengenai capaian kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan, berikut permasalahan yang dihadapi, upaya penanganan, serta tindak lanjut rekomendasi DPRD pada Urusan Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.2.5b
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Pertanian yang Dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							**15.925.730.686,98**	**11.576.100.771,50**	**72,69**			
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN							**5.267.932.343,98**	**4.823.211.896,00**	**91,56**			
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	**Produksi Tanaman Pangan**	**Ton**	**17.510,40**	**19.364,33**	**110,59**	**ST**						
	Produksi Tanaman Hortikultura	**Ton**	**28.205,63**	**38.577,48**	**136,77**	**ST**						
	Produksi Tanaman Perkebunan	**Ton**	**29.722,5**	**27.613,37**	**92,90**	**ST**						
	Produksi Ternak	**Ton**	**19.034,55**	**26.874,63**	**141,19**	**ST**						
Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian							**3.705.218.980,00**	**3.702.717.280,00**	**99,93**			
1. Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	1	1	100	ST	3.705.218.980,00	3.702.717.280,00	99,93			
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman							**960.012.174,98**	**909.405.256,00**	**94,73**			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
2. Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	Sertifikat	825	4675	566,67	ST	100.762.000,00	89.506.336,00	88,83			
3. Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	Batang	1100	2686	244,18	ST	859.250.174,98	819.898.920,00	95,42			
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi							**194.530.150,00**	**194.153.780,00**	**99,81**			
4. Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Jumlah benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan yang beredar	Dokumen	1	1	100,00	ST	194.530.150,00	194.153.780,00	99,81			
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain							**408.171.039,00**	**16.935.580,00**	**4,15**			
5. Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	Ekor	17	508	2988,24	ST	408.171.039,00	16.935.580,00	4,15	Adanya tunda bayar sebesar Rp. 300.191.860		
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN							**7.961.668.173,00**	**4.369.268.152,50**	**54,88**			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	**Luas Lahan Pertanian yang di manfaatkan**	**Ha**	**82**	**292,75**	**357,01**	**ST**						
Penataan Prasarana Pertanian							**7.961.668.173,00**	**4.369.268.152,50**	**54,88**			
6. Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen	1	0	0,00	SR	61.312.000,00	-	0,00	1. Belum adanya dasar hukum pembuatan Pergub terbaru yang bersifat mandatory dari peraturan yang lebih tinggi tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Sawit Berkelanjutan. Sampai Desember 2025 masih tahap harmonisasi di Kementerian. 2. Masih berlaku dasar hukum yang lama inpres 2019 s.d 2024 telah habis	Pada tahun 2026 dapat di usulkan kembali RAD Sawit Berkelanjutan, dengan beberapa tahapan dimulai dengan pembentukan Pergub, SK Gub, Panitia dan Aksi Daerah Sawit Berkelanjutan	
7. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan	Laporan	1	1	100,00	ST	411.518.825,00	411.518.824,50	100,00			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya											
8. Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	Ha	82	292,75	357,01	ST	7.488.837.348,00	3.957.749.328,00	52,85	Adanya tunda bayar sebesar Rp. 1.981.340.277		
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER							**418.871.943,00**	**192.269.775,00**	**45,90**			
Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	**Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)**	**%**	**64**	**78,88**	**123,25**	**ST**						
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							**4.919.200,00**	**4.919.200,00**	**100,00**			
9. Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis	Jumlah dokumen pelaksanaan manajemen risiko zoonosis	Dokumen	1	1	100,00	ST	4.919.200,00	4.919.200,00	100,00			
Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit							**299.694.799,00**	**142.680.631,00**	**47,61**			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
dan Unit Usaha Produk Hewan												
10. Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dokumen	1	1	100,00	ST	299.694.799,00	142.680.631,00	47,61	Adanya tunda bayar sebesar Rp. 144.842.044		
Kesejahteraan Hewan							**114.257.944,00**	**44.669.944,00**	**39,10**			
11. Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Jumlah sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Sertifikat	2	2	100,00	ST	114.257.944,00	44.669.944,00	39,10	Adanya Pembatasan Pencairan		
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN							**10.000.000,00**	**8.505.000,00**	**85,05**			
Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	**Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT**	**%**	**42**	**48,98**	**116,62**	**ST**						
	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim terhadap Pertanian	**%**	**73,9**	**100**	**135,32**	**ST**						
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi							**10.000.000,00**	**8.505.000,00**	**85,05**			
12. Pengendalian Organisme	Jumlah Luas Serangan	Ha	75	245,55	327,40	ST	10.000.000,00	8.505.000,00	85,05			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan											
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN							**2.267.258.227,00**	**2.182.845.948,00**	**96,28**			
Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian	**Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan**	**%**	**52**	**52**	**100,00**	**ST**						
Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian							**2.267.258.227,00**	**2.182.845.948,00**	**96,28**			
13. Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Kelompok	25	25	100,00	ST	2.267.258.227,00	2.182.845.948,00	96,28			

3.2.28 Urusan Kehutanan

Urusan Kehutanan Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau. Pelaksanaan urusan tersebut didukung alokasi anggaran sebesar Rp2.865.022.014,00, sementara realisasi anggaran sampai akhir tahun 2025 mencapai Rp2.517.887.504,00 atau sebesar 87,88 persen, yang mencerminkan tingkat pelaksanaan program dan kegiatan yang sangat tinggi. Kinerja program menunjukkan 14 indikator program telah ditetapkan, seluruhnya (14 indikator) tergolong dalam kategori sangat tinggi.

Berdasarkan dokumen perencanaan dan penganggaran, indikator kegiatan sama dengan indikator sub kegiatan, sehingga dalam dokumen LKPJ ini hanya disajikan indikator sub kegiatan. Terlihat dari sebanyak 17 indikator sub kegiatan, sebanyak 17 indikator telah mencapai target kinerja yang ditetapkan dengan status sangat tinggi. Secara umum kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam dokumen penganggaran dan perjanjian kinerja tergolong baik.

Uraian lebih rinci mengenai capaian kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan, berikut permasalahan yang dihadapi, upaya penanganan, serta tindak lanjut rekomendasi DPRD pada Urusan Kehutanan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.2.28
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Kehutanan yang Dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Status Capaian	Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025		Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN							2.865.022.014,00	2.517.887.504,00	87,88			
3.28.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							272.880.504,00	258.449.679,00	94,71			
Meningkatnya Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks) KPHP UNIT I KARIMUN	Indeks	84,25	84,5	100,30	ST						
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks) KPHP UNIT II BATAM	Indeks	84,25	89,25	105,93	ST						
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks) KPHP UNIT III LINGGA	Indeks	84,25	86,67	102,87	ST						
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks) KPHP UNIT IV TANJUNGPINANG-BINTAN	Indeks	84,25	86,67	102,87	ST						
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks) (KPHP UNIT V NATUNA	Indeks	84,25	88,23	104,72	ST						
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks) (KPHP UNIT VI ANAMBAS	Indeks	84,25	85,00	100,89	ST						

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Status Capaian	Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025		Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
2.11.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah							**102.259.050,00**	**91.955.880,00**	**89,92**			
1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	6.337.200,00	5.583.650,00	88,11			
2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	81.356.700,00	75.755.320,00	93,12			
3. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	100,00	ST	1.746.600,00	1.712.910,00	98,07			
4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	100,00	ST	12.818.550,00	8.904.000,00	69,46			
2.11.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**170.621.454,00**	**166.493.799,00**	**97,58**			
5. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	68.621.454,00	64.493.799,00	93,98			
6. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	102.000.000,00	102.000.000,00	100,00			
3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN							**2.288.386.160,00**	**1.966.812.325,00**	**85,95**			
Menurunnya Kerusakan hutan	**Persentase tutupan lahan berhutan di Wilayah Prov. Kepri yang dipertahankan**	**%**	**100**	**100**	**100,00**	**ST**						

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Status Capaian	Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025		Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
	Persentase area yang dilindungi dari perambahan dan penebangan liar KPHP UNIT I KARIMUN	%	22,50	22,51	100,04	ST						
	Persentase area yang dilindungi dari perambahan dan penebangan liar KPHP UNIT II BATAM	%	17,00	19,41	114,18	ST						
	Persentase area yang dilindungi dari perambahan dan penebangan liar KPHP UNIT III LINGGA	%	11,22	14,25	127,01	ST						
	Persentase area yang dilindungi dari perambahan dan penebangan liar KPHP UNIT IV TANJUNGPINANG-BINTAN	%	17,66	33,01	186,92	ST						
	Persentase area yang dilindungi dari perambahan dan penebangan liar KPHP UNIT V NATUNA	%	15,56	14,17	91,09	ST						
	Persentase area yang dilindungi dari perambahan dan penebangan liar KPHP UNIT VI ANAMBAS	%	22,80	31,10	136,40	ST						
3.28.03.1.01 - Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi							111.814.400,00	100.605.775,00	89,98			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Status Capaian	Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025		Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
7. Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	Unit	18	18	100,00	ST	111.814.400,00	100.605.775,00	89,98			
3.28.03.1.03 - Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung							**142.702.200,00**	**127.977.219,00**	**89,68**			
8. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen	1	1	100,00	ST	131.740.400,00	117.729.219,00	89,36	anggaran tidak terserap karena di hold pada rekon dengan BKAD		
9. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	Dokumen	1	1	100,00	ST	10.961.800,00	10.248.000,00	93,49			
3.28.03.1.04 - Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara							**838.258.300,00**	**738.659.244,00**	**88,12**			
10. Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Dokumen	1	1	100,00	ST	118.000.000,00	88.093.490,00	74,66			
11. Pembangunan Penghijauan Lingkungan di	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar	Ha	13,5	17,5	129,63	ST	640.610.300,00	572.915.752,00	89,43			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Status Capaian	Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025		Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Luar Kawasan Hutan Negara	Kawasan Hutan Negara											
12. Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Laporan	1	1	100,00	ST	79.648.000,00	77.650.002,00	97,49			
3.28.03.1.05 - Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi							**1.128.825.560,00**	**934.295.547,00**	**82,77**			
13. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	1	1	100,00	ST	177.000.000,00	161.984.508,00	91,52			
14. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan	1	1	100,00	ST	58.000.000,00	54.965.464,00	94,77			
15. Pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan patroli pengamanan hutan	Ha	1110	5144,5	463,47	ST	893.825.560,00	717.345.575,00	80,26	Alokasi anggaran pada APBD-P sehingga salah satu KPHP yang belum bisa merealisasikan anggaran secara optimal karena bersamaan dengan		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Status Capaian	Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025		Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
										melaksanakan kegiatan anggaran FOLU		
3.28.03.1.07 - Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun							**66.785.700,00**	**65.274.540,00**	**97,74**			
16. Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan	1	1	100,00	ST	66.785.700,00	65.274.540,00	97,74			
3.28.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN							**303.755.350,00**	**292.625.500,00**	**96,34**			
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dibidang Kehutanan	**Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Masyarakat Hutan (SBM/Milyar Rupiah)**	**SBM/ Milyar Rupiah**	**1,175**	**1,186**	**100,94**	**ST**						
3.28.05.1.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan							**303.755.350,00**	**292.625.500,00**	**96,34**			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Status Capaian	Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025		Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
17. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	4	4	100,00	ST	303.755.350,00	292.625.500,00	96,34			

3.2.29. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau. Pelaksanaan urusan tersebut didukung alokasi anggaran sebesar Rp46.006.620.418,00, sementara realisasi anggaran sampai akhir tahun 2025 mencapai Rp37.517.314.104,93 atau sebesar 81,55 persen, yang mencerminkan tingkat pelaksanaan program dan kegiatan yang sangat optimal. Kinerja program ditunjukkan dari sebanyak 8 indikator program telah ditetapkan, seluruhnya (8 indikator) tergolong dalam kategori sangat tinggi.

Berdasarkan dokumen perencanaan dan penganggaran, indikator kegiatan sama dengan indikator sub kegiatan, sehingga dalam dokumen LKPJ ini hanya disajikan indikator sub kegiatan. Terlihat dari sebanyak 37 indikator sub kegiatan, sebanyak 37 indikator telah mencapai target kinerja yang ditetapkan dengan status sangat tinggi. Secara umum kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam dokumen penganggaran dan perjanjian kinerja tergolong baik.

Uraian lebih rinci mengenai capaian kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan, berikut permasalahan yang dihadapi, upaya penanganan, serta tindak lanjut rekomendasi DPRD pada Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.2.29
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral yang Dilaksanakan Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL							**46.006.620.418,00**	**37.517.314.104,93**	**81,55**			
3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							**12.344.547.775,00**	**11.764.117.895,00**	**95,30**			
Meningkatnya Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**Predikat**	**BB**	**BB**	**100,00**	**ST**						
	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah	**Indeks**	**87**	**85**	**97,70**	**ST**						
	Indeks Kepuasan Masyarakat	**Indeks**	**87,55**	**91,84**	**104,90**	**ST**						
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							**143.494.210,00**	**142.333.400,00**	**99,19**			
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen	4	4	100,00	ST	61.751.380,00	61.360.400,00	99,37			
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	4	100,00	ST	31.780.030,00	31.538.200,00	99,24			
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	4	4	100,00	ST	49.962.800,00	49.434.800,00	98,94			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							**10.766.016.222,00**	**10.341.064.764,00**	**96,05**			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
4. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	38	38	100,00	ST	10.324.028.860,00	9.922.255.246,00	96,11			
5. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terpenuhinya Penyediaan Administrasi ASN	Dokumen	4	4	100,00	ST	378.369.920,00	355.644.000,00	93,99			
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun	Laporan	4	4	100,00	ST	63.617.442,16	63.165.518,00	99,29			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							**4.016.000,00**	**3.496.500,00**	**87,06**			
7. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	2	2	100,00	ST	4.016.000,00	3.496.500,00	87,06			
Administrasi Umum Perangkat Daerah							**507.548.591,00**	**422.858.958,00**	**83,31**			
8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	3	3	100,00	ST	136.582.196,00	83.534.300,00	61,16	Tunda Bayar	Berkoordinasi dengan BAKD terkait Penyelesaian Kegiatan yang Mengalami Tunda Bayar	
9. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemenuhan kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	Paket	4	4	100,00	ST	9.707.800,00	9.525.909,00	98,13			
10. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pemenuhan kebutuhan Bahan logistik kantor	Paket	2	2	100,00	ST	33.344.795,00	31.401.051,00	94,17			
11. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pemenuhan kebutuhan jasa Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	4	4	100,00	ST	48.975.000,00	48.893.098,00	99,83			
12. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	100	ST	278.938.800,00	249.504.600,00	89,45	Terkena efisiensi anggaran		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**651.888.648,00**	**641.625.073,00**	**98,43**			
13. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Laporan	4	4	100,00	ST	34.004.100,00	31.028.765,00	91,25			
14. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemenuhan kebutuhan jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	4	4	100,00	ST	617.884.548,00	610.596.308,00	98,82			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**271.584.104,00**	**212.739.200,00**	**78,33**			
15. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	9	9	100,00	ST	177.162.504,00	165.189.200,00	93,24			
16. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemenuhan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Unit	35	35	100,00	ST	31.340.000,00	22.550.000,00	71,95			
17. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemenuhan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Unit	1	1	100,00	ST	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00			
18. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemenuhan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	1	1	100,00	ST	38.081.600,00	0	0,00	Terkena efisiensi anggaran		
PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN							**97.995.300,00**	**96.282.900,00**	**98,25**			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Meningkatnya Tata Kelola Kegeologian	**Persentase zona konservasi air tanah yang terpetakan**	**%**	**18,18**	**18,18**	**100,00**	**ST**						
Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi							**29.594.000,00**	**28.917.900,00**	**97,72**			
19. Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Dokumen	4	4	100,00	ST	29.594.000,00	28.917.900,00	97,72			
Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi							**68.401.300,00**	**67.365.000,00**	**98,48**			
20. Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul	Dokumen	4	4	100,00	ST	42.880.000,00	41.843.700,00	97,58			
21. Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Laporan	4	4	100,00	ST	25.521.300,00	25.521.300,00	100,00			
PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA							**620.047.000,00**	**606.354.000,00**	**97,79**			
Meningkatnya Tata Kelola Mineral dan Batubara	**Persentase pelaku usaha pertambangan tahap operasi produksi yang melaksanakan kaidah pertambangan yang baik**	**%**	**57**	**57**	**100,00**	**ST**						

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Penetapan Harga Patokan Batuan							**21.309.600,00**	**19.012.100,00**	**89,22**			
22. Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Batuan	Jumlah Dokumen Harga Patokan Batuan yang telah Ditentukan dan Ditetapkan	Dokumen	4	4	100,00	ST	21.309.600,00	19.012.100,00	89,22	Terkena efisiensi anggaran		
Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan							**598.737.400,00**	**587.341.900,00**	**98,10**			
23. Pembinaan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	Jumlah Hasil Laporan Pembinaan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	Laporan	4	4	100,00	ST	538.343.800,00	533.894.200,00	99,17			
24. Pelaksanaan pengawasan atas kaidah teknik Pertambangan yang baik dan tata kelola pengusahaan Pertambangan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas kaidah teknik Pertambangan yang baik dan tata kelola pengusahaan Pertambangan	Laporan	1	1	100	ST	60.393.600,00	53.447.700,00	88,50	Terkena efisiensi anggaran		
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN							**25.899.052.024,00**	**18.229.179.493,00**	**70,39**	**Tunda Bayar**	**Berkoordinasi dengan BAKD terkait Penyelesaian Kegiatan yang Mengalami Tunda Bayar**	
Meningkatnya Tata Kelola Energi Baru Terbarukan	**Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer**	**%**	**15,9**	**15,43*)**	**97,04**	**ST**						
	Intensitas energi primer	**SBM/Milyar Rupiah**	**135,7**	**136*)**	**99,78**	**ST**						
Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan							**25.589.819.624,00**	**18.123.254.493,44**	**70,82**			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi												
25. Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Unit	230	230	100,00	ST	24.234.413.050,00	16.859.755.920,00	69,57	Tunda Bayar	Berkoordinasi dengan BAKD terkait Penyelesaian Kegiatan yang Mengalami Tunda Bayar	
26. Pemeliharaan infrastruktur aneka EBT	Jumlah unit infrastruktur aneka EBT yang dipelihara	Unit	1	1	100,00	ST	1.355.406.574,00	1.263.498.573,44	93,22			
Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi							**309.232.400,00**	**105.925.000,00**	**34,25**			
27. Sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	Laporan	4	4	100,00	ST	309.232.400,00	105.925.000,00	34,25	Tunda Bayar	Berkoordinasi dengan BAKD terkait Penyelesaian Kegiatan yang Mengalami Tunda Bayar	
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN							**7.044.978.319,00**	**6.821.379.816,49**	**96,83**			
Meningkatnya Cakupan Pelayanan Kelistrikan	**Rasio Elektrifikasi**	**%**	**98,80**	**99,21**	**100,41**	**ST**						
Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta							**19.921.000,00**	**14.591.100,00**	**73,24**			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi												
28. Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Rekomendasi Teknis Permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	Dokumen	4	4	100,00	ST	7.761.000,00	5.415.800,00	69,78	Terkena efisiensi anggaran		
29. Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Laporan	4	4	100,00	ST	12.160.000,00	9.175.300,00	75,45	Terkena efisiensi anggaran		
Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi							**19.426.000,00**	**16.348.600,00**	**84,16**			
30. Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi yang Ditetapkan	Dokumen	1	1	100,00	ST	7.261.000,00	7.150.000,00	98,47			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
31. Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Laporan	1	1	100	ST	12.165.000,00	9.198.600,00	75,62			
Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri							**14.434.000,00**	**11.364.200,00**	**78,73**			
32. Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	Dokumen	4	4	100,00	ST	6.221.000,00	3.889.300,00	62,52	Terkena efisiensi anggaran		
33. Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Laporan	4	4	100,00	ST	8.213.000,00	7.474.900,00	91,01	Terkena efisiensi anggaran		
Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu,							**6.991.197.319,00**	**6.779.075.916,49**	**96,97**			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan												
34. Penetapan Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Keluarga	73	73	100,00	ST	313.944.400,00	225.570.200,00	71,85	Terkena efisiensi anggaran		
35. Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah dokumen Data desa-desa berlistrik dan belum berlistrik di Provinsi Kepulauan Riau	Dokumen	4	4	100,00	ST	9.809.000,00	6.708.900,00	68,40	Terkena efisiensi anggaran		
36. Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Unit	8	8	100,00	ST	6.632.649.719,00	6.515.805.416,49	98,24			
37. Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Pembangkit Listrik Desa dipelihara	Laporan	4	4	100,00	ST	34.794.200,00	30.991.400,00	89,07	Terkena efisiensi anggaran		

3.2.30. Urusan Perdagangan

Urusan Perdagangan Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau. Pelaksanaan urusan tersebut didukung alokasi anggaran sebesar Rp 21.295.837.371,00 sementara realisasi anggaran sampai akhir tahun 2025 mencapai Rp20.402.503.487,00 atau setara 95,81 persen, yang mencerminkan tingkat pelaksanaan program dan kegiatan yang sangat optimal. Kinerja program menunjukkan dari sejumlah 8 indikator program, sebanyak 8 indikator program yang telah ditetapkan, seluruhnya (8 indikator) berada pada kategori sangat tinggi.

Berdasarkan dokumen perencanaan dan penganggaran, indikator kegiatan sama dengan indikator sub kegiatan, sehingga dalam dokumen LKPJ ini hanya disajikan indikator sub kegiatan. Terlihat dari sebanyak 23 indikator sub kegiatan, sebanyak 23 indikator telah mencapai target kinerja yang ditetapkan dengan status sangat tinggi. Secara umum kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam dokumen penganggaran dan perjanjian kinerja tergolong baik.

Uraian lebih rinci mengenai capaian kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan, berikut permasalahan yang dihadapi, upaya penanganan, serta tindak lanjut rekomendasi DPRD pada Urusan Perdagangan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.2.30
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Perdagangan yang Dilaksanakan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
3.30 URUSAN PERDAGANGAN							**21.295.837.371,00**	**20.402.503.487,00**	**95,81**			
3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							**16.149.005.036,00**	**15.532.590.474,00**	**96,18**			
Meningkatnya Kualitas Layanan Pemerintahan Urusan Perindustrian dan Perdagangan	**Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah**	**Indeks**	**86,75**	**84,88**	**97,84**	**ST**						
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**Predikat**	**BB**	**BB**	**100,00**	**ST**						
	Indeks Kepuasan Masyarakat	**Indeks**	**86,8**	**89,26**	**102,82**	**ST**						
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							**153.255.428,00**	**134.025.300,00**	**87,45**			
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	100,00	ST	68.552.950,00	58.142.650,00	84,81			
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Laporan	2	2	100,00	ST	13.093.011,00	10.832.450,00	82,73			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
	Realisasi Kinerja SKPD											
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4	100,00	ST	71.609.467,00	65.050.200,00	90,84			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							**12.593.572.875,00**	**12.301.731.020,00**	**97,68**			
4. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	40	40	100,00	ST	12.141.306.875,00	11.860.089.020,00	97,68			
5. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	4	100,00	ST	452.266.000,00	441.642.000,00	97,65			
Administrasi Umum Perangkat Daerah							**1.793.377.558,00**	**1.525.407.639,00**	**85,06**			
6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	100,00	ST	269.010.400,00	263.464.900,00	97,94			
7. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	100,00	ST	115.212.600,00	112.837.570,00	97,94			
8. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	4	100,00	ST	208.300.000,00	203.946.000,00	97,91			
9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	4	100,00	ST	806.553.072,00	743.800.669,00	92,22			
10. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	4	100,00	ST	195.870.600,00	195.870.600,00	100,00			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
11. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	4	4	100,00	ST	198.430.886,00	5.487.900,00	2,77	Tunda bayar	sudah pembahasan untuk dilaksanakan dan diselesaikan	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**1.437.194.175,00**	**1.406.674.815,00**	**97,88**			
12. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	4	100,00	ST	196.910.000,00	196.910.000,00	100,00			
13. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	4	100,00	ST	1.240.284.175,00	1.209.764.815,00	97,54			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**171.605.000,00**	**164.751.700,00**	**96,01**			
14. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	10	100,00	ST	154.695.000,00	151.986.700,00	98,25			
15. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	25	25	100,00	ST	16.910.000,00	12.765.000,00	75,49			
3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN							**895.148.980,00**	**852.569.168,00**	**95,24**			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN												
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	**Persentase Fasilitasi Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan Provinsi Kepri**	**%**	**2,03**	**2,01**	**99,01**	**ST**						
Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas							**895.148.980,00**	**852.569.168,00**	**95,24**			
16. Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Laporan	4	4	100,00	ST	895.148.980,00	852.569.168,00	95,24			
3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING							**875.197.376,00**	**805.842.764,00**	**92,08**			
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	**Koefisien Variasi Harga antar Wilayah Tingkat Provinsi**	**%**	**5,64**	**10,21**	**181,03**	**ST**				Penutupan Jalur distribusi barang daerah FTZ sehingga jalur distribusi makin jauh yang menyebabkan harga barang naik di daerah non FTZ		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan							**875.197.376,00**	**805.842.764,00**	**92,08**			
17. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Laporan	12	12	100,00	ST	253.672.739,00	250.427.000,00	98,72			
18. Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan	4	4	100,00	ST	621.524.637,00	555.415.764,00	89,36			
3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR							**48.984.746,00**	**47.549.026,00**	**97,07**			
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	**Persentase Fasilitasi**	**%**	**100**	**100**	**100,00**	**ST**						

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
	Pengembangan Ekspor											
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi							**48.984.746,00**	**47.549.026,00**	**97,07**			
19. Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha	1	1	100,00	ST	26.270.485,00	26.108.509,00	99,38			
20. Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	Produk	1	1	100,00	ST	22.714.261,00	21.440.517,00	94,39			
3.30.06 PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN							**1.386.447.742,00**	**1.263.116.640,00**	**91,10**			
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	**Indeks Tertib Niaga**	**Indeks**	**61-80**	**71,19**	**116,70**	**ST**						
Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota							**1.374.886.714,00**	**1.251.679.840,00**	**91,04**			
21. Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan	Jumah Badan Penyelesaian	BPSK	2	2	100,00	ST	1.374.886.714,00	1.251.679.840,00	91,04			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Perlindungan Konsumen	Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif											
Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota							**11.561.028,00**	**11.436.800,00**	**98,93**			
22. Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	Laporan	12	12	100,00	ST	11.561.028,00	11.436.800,00	98,93			
3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI							**1.941.053.491,00**	**1.900.835.415,00**	**97,93**			
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	**Persentase Promosi Produk Lokal yang difasilitasi**	**%**	**30**	**35**	**116,67**	**ST**						
Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri							**1.941.053.491,00**	**1.900.835.415,00**	**97,93**			
23. Sosialisasi Peningkatan Penggunaan	Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan	Laporan	4	4	100,00	ST	1.941.053.491,00	1.900.835.415,00	97,93			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Produk Dalam Negeri	Penggunaan Produk Dalam Negeri											

3.2.31. Urusan Perindustrian

Urusan Perindustrian Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau. Pelaksanaan urusan tersebut didukung alokasi anggaran sebesar Rp7.511.099.193,00 sementara realisasi anggaran sampai akhir tahun 2025 mencapai Rp7.239.486.646,00 atau setara 96,38 persen, yang mencerminkan tingkat pelaksanaan program dan kegiatan yang sangat optimal. Aspek kinerja menunjukkan 4 indikator program telah ditetapkan, seluruhnya (4 indikator) kategori sangat tinggi.

Berdasarkan dokumen perencanaan dan penganggaran, indikator kegiatan sama dengan indikator sub kegiatan, sehingga dalam dokumen LKPJ ini hanya disajikan indikator sub kegiatan. Terlihat dari sebanyak 7 indikator sub kegiatan, sebanyak 7 indikator telah mencapai target kinerja yang ditetapkan dengan status sangat tinggi. Secara umum kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam dokumen penganggaran dan perjanjian kinerja tergolong baik.

Uraian lebih rinci mengenai capaian kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan, berikut permasalahan yang dihadapi, upaya penanganan, serta tindak lanjut rekomendasi DPRD pada Urusan Perindustrian yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.2.31
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Perindustrian yang Dilaksanakan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
3.31 URUSAN PERINDUSTRIAN							**7.511.099.193,00**	**7.239.486.646,00**	**96,38**			
3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI							**7.284.662.863,00**	**7.016.299.700,00**	**96,32**			
Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri	**Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Non Migas**	**%**	**7**	**6,82**	**97,43**	**ST**				Data s.d TW III		
	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM)	**%**	**2,81**	**72,98**	**2597,15**	**ST**				Target Imperatif Pusat, capaian sesuai DO		
Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi							**7.284.662.863,00**	**7.016.299.700,00**	**96,32**			
1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Dokumen	1	1	100,00	ST	1.200.000.000,00	1.172.862.164,00	97,74			
2. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan	Dokumen	1	1	100,00	ST	1.000.000.000,00	888.305.467,00	88,83			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Pembangunan Sumber Daya Industri	Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri											
3. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	1	1	100,00	ST	3.098.350.137,00	2.975.918.069,00	96,05			
4. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	1	1	100,00	ST	1.978.000.000,00	1.971.214.000,00	99,66			
5. Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	1	1	100,00	ST	8.312.726,00	8.000.000,00	96,24			
3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI							**26.436.330,00**	**24.458.051,00**	**92,52**			
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	**Persentase Pengawasan Izin Usaha Industri**	**%**	**0,20**	**0,20**	**100,00**	**ST**						
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi							**26.436.330,00**	**24.458.051,00**	**92,52**			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
6. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Dokumen	1	1	100,00	ST	26.436.330,00	24.458.051,00	92,52			
3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL							**200.000.000,00**	**198.728.895,00**	**99,36**			
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	**Jumlah Dokumen Informasi Industri yang Komprehensif**	**Dokumen**	**1**	**1**	**100,00**	**ST**						
Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)							**200.000.000,00**	**198.728.895,00**	**99,36**			
7. Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri,	Dokumen	1	1	100,00	ST	200.000.000,00	198.728.895,00	99,36			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)											

3.3.32. Urusan Transmigrasi

Urusan Transmigrasi Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau. Pelaksanaan urusan tersebut didukung alokasi anggaran sebesar Rp50.546.880,00, sementara realisasi anggaran sampai akhir tahun 2025 mencapai Rp50.298.140,00 atau sebesar 99,51 persen, yang mencerminkan tingkat pelaksanaan program dan kegiatan yang sangat optimal. Kinerja menunjukkan 1 indikator program telah ditetapkan, termasuk dalam kategori sangat tinggi.

Berdasarkan dokumen perencanaan dan penganggaran, indikator kegiatan sama dengan indikator sub kegiatan, sehingga dalam dokumen LKPJ ini hanya disajikan indikator sub kegiatan. Terlihat dari sebanyak 1 indikator sub kegiatan, sebanyak 1 indikator telah mencapai target kinerja yang ditetapkan dengan status sangat tinggi. Secara umum kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam dokumen penganggaran dan perjanjian kinerja tergolong baik.

Uraian lebih rinci mengenai capaian kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan, berikut permasalahan yang dihadapi, upaya penanganan, serta tindak lanjut rekomendasi DPRD pada Urusan Transmigrasi yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.2.32
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Transmigrasi yang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							**50.546.880,00**	**50.298.140,00**	**99,51**			
3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI												
Meningkatnya pelaksanaan transmigrasi	**Persentase bidang lahan/KK yang tertata di lokasi kawasan transmigrasi**	**%**	**34,4**	**33,3**	**96,80**	**ST**	**50.546.880,00**	**50.298.140,00**	**99,51**	Pendistribusian tanah dan legalisasi aset transmigrasi belum optimal (Pencadangan tanah –penyusunan dan penetapan RKT – pengurusan sertifikasi HPL – perencanaan dan pembangunan pemukiman –penempatan transmigrasi – pengukuran dan pembagian lahan/ inventarisasi kepemilikan lahan (IPL) – penerbitan SHM).	Pelepasan Kawasan HPK di Kab. Natuna seluas ± 1.712 Ha, yang disetujui seluas ± 1461 ha, sedang dalam proses penyelesaian penerbitan sertifikat HPL di pusat, dan sisanya seluas ± 250 ha adalah lahan hutan rawa sekunder.	
Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi							**50.546.880,00**	**50.298.140,00**	**99,51**			
1. Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan	Lokasi	2	2	100,00	ST	50.546.880,00	50.298.140,00	99,51	Monitoring dan evaluasi ke lokasi kawasan eks. Transmigrasi di Pulau Air Raja Kota Batam (sebelum masuk Kabupaten Bintan) karena	Koordinasi kepada pihak terkait untuk menelusuri sertifikat lahan dalam hal ini ke BPN Kota Batam dan BPN Kabupaten Bintan	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
	Monitoring dan Evaluasi									adanya pengembangan wilayah kemudian menjadi wilayah Kota Batam dan monev ke Kabupaten Kepulauan Anambas, sebagian warga eks transmigrasi sudah tidak di tempat dan lahan/ sertifikat tanah sudah diperjual belikan/ pindah tangan ke pihak lain.	untuk meninjau sertifikat tanah yang telah dikeluarkan. Tetapi BPN Batam dan Bintan kurang merespon dengan alasan karena adanya pengembangan wilayah (wilayah Pulau Air Raja sebelumnya masuk Kabupaten Bintan) saat ini sudah menjadi wilayah Kota Batam, begitu juga terkait sertifikat.	

3.2.33 Fungsi Penunjang Sekretariat Daerah

3.2.33a. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 didukung alokasi anggaran sebesar Rp2.674.150.158,93 dengan realisasi anggaran sampai akhir tahun 2025 mencapai Rp2.596.935.967,00 atau setara 97,11 persen, yang mencerminkan tingkat pelaksanaan program dan kegiatan yang sangat optimal.

Berdasarkan dokumen perencanaan dan penganggaran, indikator kegiatan sama dengan indikator sub kegiatan, sehingga dalam dokumen LKPJ ini hanya disajikan indikator sub kegiatan. Terlihat dari sebanyak 25 indikator sub kegiatan, sebanyak 25 indikator telah mencapai target kinerja yang ditetapkan dengan status sangat tinggi. Secara umum kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam dokumen penganggaran dan perjanjian kinerja tergolong baik.

Kinerja program menunjukkan 5 indikator program telah ditetapkan seluruhnya (5 indikator) kategori sangat tinggi. Uraian lebih rinci mengenai capaian kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan, berikut permasalahan yang dihadapi, upaya penanganan, serta tindak lanjut rekomendasi DPRD yang dilaksanakan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.2.33a
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Dilaksanakan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah							**2.674.150.158,93**	**2.596.935.967,00**	**97,11**			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							**1.234.201.346,93**	**1.184.470.718,00**	**95,97**			
Meningkatnya Akuntabilitas, Kualitas, Efektivitas Kinerja dan Pelayanan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**Predikat**	**A**	**A**	**100,00**	**ST**						
	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	**Indeks**	**72**	**86,07**	**119,54**	**ST**						
	Indeks Kepuasan Masyarakat	**Indeks**	**84,90**	**85,32**	**100,49**	**ST**						
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							**50.527.700,00**	**49.964.796,00**	**98,89**			
1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	2	2	100,00	ST	50.527.700,00	49.964.796,00	98,89			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							**95.744.400,00**	**92.784.700,00**	**96,91**			
2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	4	4	100,00	ST	56.650.000,00	54.933.900,00	96,97			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	12	12	100,00	ST	39.094.400,00	37.850.800,00	96,82			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**462.660.553,00**	**434.462.134,00**	**93,91**			
4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	4	4	100,00	ST	421.160.553,00	393.717.324,00	93,48			
5. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	100,00	ST	800.000,00	800.000,00	100,00			
6. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	4	4	100,00	ST	2.300.000,00	1.544.810,00	67,17	Harga SSH di SIPD lebih tinggi dari jumlah tagihan operator	kedepannya akan diusulkan kembali ke BKAD terkait harga SSH disesuaikan dengan harga operator (Pasar)	
7. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	38.400.000,00	38.400.000,00	100,00			
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah							**181.510.893,93**	**176.982.541,00**	**97,51**			
8. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	4	4	100,00	ST	7.880.000,00	6.808.503,00	86,40			
9. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	4	4	100,00	ST	9.500.000,00	7.964.538,00	83,84			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
10. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	2	2	100,00	ST	4.000.000,00	2.519.877,00	63,00	Harga SSH di SIPD lebih tinggi dari jumlah harga rekanan (Pasar)	kedepannya akan diusulkan kembali ke BKAD terkait harga SSH disesuaikan dengan harga rekanan (Pasar)	
11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	**Dokumen**	1	1	100,00	ST	1.920.000,00	1.920.000,00	100,00			
12. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	2	100,00	ST	158.210.893,93	157.769.623,00	99,72			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**218.300.000,00**	**208.710.068,00**	**95,61**			
13. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	5	5	100,00	ST	175.300.000,00	166.603.928,00	95,04			
14. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	unit	10	10	100,00	ST	3.000.000,00	2.760.000,00	92,00			
15. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	1	100,00	ST	40.000.000,00	39.346.140,00	98,37			
Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan							**225.457.800,00**	**221.566.479,00**	**98,27**			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
16. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	4	4	100,0	ST	225.457.800,00	221.566.479,00	98,27			
4.01.03 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH							**1.439.948.812,00**	**1.412.465.249,00**	**98,09**			
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	**Skor LPPD**	**Skor**	**2,55**	**2,87**	**112,55**	**ST**						
	Persentase Kerjasama Daerah yang diimplementasikan	**Persentase**	**85**	**85**	**100,00**	**ST**						
Pelaksanaan Tugas Pemerintahan							**354.394.000,00**	**351.237.488,00**	**99,11**			
17. Pengelolaan Administrasi Kebijakan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Dokumen	1	1	100,00	ST	1.378.500,00	1.012.600,00	73,46	Harga SSH di SIPD lebih tinggi dari jumlah tagihan	kedepannya akan diusulkan kembali ke BKAD terkait harga SSH disesuaikan dengan harga pasar	
18. Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Dokumen	2	2	100,00	ST	317.666.020,00	315.371.421,00	99,28			
19. Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	Dokumen	1	1	100,00	ST	35.349.480,00	34.853.467,00	98,60			
Pelaksanaan Otonomi Daerah							**299.558.352,00**	**289.645.891,00**	**96,69**			
20. Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Dokumen	3	3	100,00	ST	14.080.800,00	13.191.516,00	93,68			
21. Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan	Dokumen	1	1	100,00	ST	168.617.052,00	162.278.612,00	96,24			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
	Penataan Urusan yang Dilaksanakan											
22. Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Laporan	2	2	100,00	ST	116.860.500,00	114.175.763,00	97,70			
Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah							**785.996.460,00**	**771.581.870,00**	**98,17**			
23. Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	Dokumen	2	2	100,00	ST	703.114.038,00	692.259.706,00	98,46			
24. Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	Laporan	2	2	100,00	ST	37.136.756,00	35.868.776,00	96,59			
25. Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	Laporan	1	1	100,00	ST	45.745.666,00	43.453.388,00	94,99			

3.2.33b. Biro Kesejahteraan Rakyat

Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 didukung alokasi anggaran sebesar Rp76.117.790.635,58, dengan realisasi anggaran sampai akhir tahun 2025 mencapai Rp72.088.974.425,00 atau setara 94,71 persen, yang mencerminkan tingkat pelaksanaan program dan kegiatan yang sangat optimal. Kinerja menunjukkan 4 indikator program telah ditetapkan dan seluruhnya (4 indikator) tergolong dalam kategori sangat tinggi.

Berdasarkan dokumen perencanaan dan penganggaran, indikator kegiatan sama dengan indikator sub kegiatan, sehingga dalam dokumen LKPJ ini hanya disajikan indikator sub kegiatan. Terlihat dari sebanyak 19 indikator sub kegiatan, sebanyak 18 indikator telah mencapai target kinerja yang ditetapkan dengan status sangat tinggi, dan 1 indikator memiliki kinerja kategori Sedang. Secara umum kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam dokumen penganggaran dan perjanjian kinerja tergolong baik.

Uraian lebih rinci mengenai capaian kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan, berikut permasalahan yang dihadapi, upaya penanganan, serta tindak lanjut rekomendasi DPRD yang dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.2.33b
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Biro Kesejahteraan Rakyat							**76.117.790.635,58**	**72.088.974.425,00**	**94,71**			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							**998.195.204,00**	**820.526.784,00**	**82,20**			
Meningkatnya Akuntabilitas, Kualitas, Efektivitas Kinerja dan Pelayanan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**Predikat**	**A**	**A**	**100,00**	**ST**						
	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	**Indeks**	**72**	**86,07**	**119,54**	**ST**						
	Indeks Kepuasan Masyarakat	**Indeks**	**84,90**	**85,32**	**100,49**	**ST**						
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							**80.036.100,00**	**39.026.100,00**	**48,76**			
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	100,00	ST	21.425.500,00	18.394.700,00	85,85			
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	100,00	ST	26.038.600,00	3.666.600,00	14,08			
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	Laporan	1	1	100,00	ST	32.572.000,00	16.964.800,00	52,08			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							**10.500.000,00**	**2.280.000,00**	**21,71**			
4. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	3	1	100,00	ST	10.500.000,00	2.280.000,00	21,71			
Administrasi Umum Perangkat Daerah							427.978.751,00	331.780.192,00	77,52			
5. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	59.471.751,00	44.092.915,00	74,14			
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	100,00	ST	368.507.000,00	287.687.277,00	78,07			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							**34.410.000,00**	**34.410.000,00**	**100,00**			
7. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	0	0	100,00	ST	34.410.000,00	34.410.000,00	100,00			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**245.258.441,00**	**235.523.262,00**	**96,03**			
8. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	103.740.000,00	96.745.390,00	93,26			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
9. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	141.518.441,00	138.777.872,00	98,06			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**200.011.912,00**	**177.507.230,00**	**88,75**			
10. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit	7	7	100,00	ST	200.011.912,00	177.507.230,00	88,75			
4.01.04 - PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT							75.119.595.431,58	71.268.447.641,00	94,87			
Meningkatnya kualitas kebijakan Kesejahteraan Rakyat	**Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**%**	**0**	**100**	**100,00**	**ST**						
Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spritual							**66.255.989.176,58**	**62.784.174.619,00**	**94,76**			
11. Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	Unit	387	284	73,39	S	48.946.560.216,00	46.285.645.267,00	94,56			
12. Sub Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Bina Spritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	Lembaga	6	6	100,00	ST	17.309.428.960,58	16.498.529.352,00	95,32			
13. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan	Persentase Fasilitasi Pengembangan	%	100	100	100,00	ST	8.758.500.655,00	8.405.375.022,00	95,97			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar											
14. Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Dokumen	1	1	100,00	ST	8.690.413.855,00	8.358.805.822,00	96,18			
15. Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Dokumen	1	1	100,00	ST	30.567.600,00	20.490.400,00	67,03			
16. Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Dokumen	1	1	100,00	ST	37.519.200,00	26.078.800,00	69,51			
Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	**Persentase Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar**						**105.105.600,00**	**78.898.000,00**	**75,07**			
17. Sub Kegiatan Koordinasi dan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan	Dokumen	1	1	100,00	ST	40.797.200,00	33.828.800,00	82,92			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata											
18. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Dokumen	1	1	100,00	ST	32.271.200,00	23.565.000,00	73,02			
19. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika,	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Dokumen	1	1	100,00	ST	32.037.200,00	21.504.200,00	67,12			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Statistik, Persandian, dan Perhubungan												

3.2.33c. Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 didukung alokasi anggaran sebesar Rp1.402.420.130,00 dengan realisasi anggaran sampai akhir tahun 2025 mencapai Rp1.357.399.816,00 atau sebesar 96,79 persen, yang mencerminkan tingkat pelaksanaan program dan kegiatan yang sangat optimal.

Berdasarkan dokumen perencanaan dan penganggaran, indikator kegiatan sama dengan indikator sub kegiatan, sehingga dalam dokumen LKPJ ini hanya disajikan indikator sub kegiatan. Terlihat dari sebanyak 18 indikator sub kegiatan, semuanya sebanyak 18 indikator telah mencapai target kinerja yang ditetapkan dengan status sangat tinggi. Secara umum kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam dokumen penganggaran dan perjanjian kinerja tergolong baik.

Kinerja program menunjukkan dari sebanyak 4 indikator program yang telah ditetapkan, seluruhnya (4 indikator) memiliki kinerja kategori sangat tinggi. Uraian lebih rinci mengenai capaian kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan, berikut permasalahan yang dihadapi, upaya penanganan, serta tindak lanjut rekomendasi DPRD yang dilaksanakan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.2.33c
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Dilaksanakan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA							**1.402.420.130,00**	**1.357.399.816,00**	**96,79**			
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							**1.248.562.998,00**	**1.203.743.816,00**	**96,41**			
Meningkatnya Akuntabilitas, Kualitas, Efektifitas Kinerja dan Pelayanan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kepulaun Riau	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)**	**predikat**	**A**	**A**	**100,00**	**ST**						
	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	**indeks**	**72**	**86,07**	**119,54**	**ST**						
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	**indeks**	**84,90**	**85,32**	**100,49**	**ST**						
4.01.01.1.06 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							**215.772.410,00**	**204.482.654,00**	**94,77**			
1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	laporan	3	3	100,00	ST	215.772.410,00	204.482.654,00	94,77			
4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah							**394.662.266,00**	**367.100.444,00**	**93,02**			
2. Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	paket	4	4	100,00	ST	5.072.600,00	5.024.970,00	99,06			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)											
3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket	4	4	100,00	ST	29.697.746,00	21.983.550,00	74,02	Karena efisiensi anggaran		
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket	4	4	100,00	ST	124.171.600,00	120.973.120,00	97,42			
5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Paket	4	4	100,00	ST	13.004.400,00	11.328.240,00	87,11	Karena efisiensi anggaran		
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	Dokumen	4	4	100,00	ST	11.520.000,00	11.280.000,00	97,92			
7. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	Laporan	4	4	100,00	ST	4.950.000,00	1.050.000,00	21,21	Karena efisiensi anggaran		
8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Laporan	4	4	100,00	ST	206.245.920,00	195.460.564,00	94,77			
4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							443.549.560,00	438.518.660,00	98,87			
9. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	Laporan	1	1	100,00	ST	2.666.000,00	2.660.000,00	99,77			
10. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Laporan	1	1	100,00	ST	8.592.000,00	6.959.129,00	81,00	Karena efisiensi anggaran		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
11. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa/Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	Laporan	1	1	100,00	ST	84.000.000,00	84.000.000,00	100,00			
12. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Laporan	1	1	100,00	ST	348.291.560,00	344.899.531,00	99,03			
4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**194.578.762,00**	**193.642.058,00**	**99,52**			
13. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	Unit	5	5	100,00	ST	184.638.762,00	184.151.558,00	99,74			
14. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Unit	5	5	100,00	ST	9.940.000,00	9.490.500,00	95,48			
4.01.07 - PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA							**153.857.132,00**	**153.656.000,00**	**99,87**			
Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	**Indeks Tata Kelola Pengadaan (Predikat)**	**Predikat**	**Sangat baik**	**Sangat baik**	**100,00**	**ST**						
4.01.07.1.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa							**19.891.800,00**	**19.787.000,00**	**99,47**			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
15. Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	Laporan	12	12	100,00	ST	10.570.900,00	10.525.000,00	99,57			
16. Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	Laporan	12	12	100,00	ST	9.320.900,00	9.262.000,00	99,37			
4.01.07.1.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik							**133.965.332,00**	**133.869.000,00**	**99,93**			
17. Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (Laporan)	Laporan	12	12	100,00	ST	3.620.900,00	3.525.000,00	97,35			
18. Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	Laporan	12	12	100,00	ST	130.344.432,00	130.344.000,00	100,00			

3.2.33d. Biro Perekonomian dan Pembangunan

Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 didukung alokasi anggaran sebesar Rp1.696.019.757,25 dengan realisasi anggaran sampai akhir tahun 2025 mencapai Rp1.578.967.948,00 atau setara 93,10 persen, yang mencerminkan tingkat pelaksanaan program dan kegiatan yang sangat optimal. Kinerja program menunjukkan 4 indikator program telah ditetapkan, seluruhnya (4 indikator) berada pada kategori sangat tinggi.

Berdasarkan dokumen perencanaan dan penganggaran, indikator kegiatan sama dengan indikator sub kegiatan, sehingga dalam dokumen LKPJ ini hanya disajikan indikator sub kegiatan. Terlihat dari sebanyak 21 indikator sub kegiatan, semuanya sebanyak 21 indikator telah mencapai target kinerja yang ditetapkan dengan status sangat tinggi. Secara umum kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam dokumen penganggaran dan perjanjian kinerja tergolong baik.

Uraian lebih rinci mengenai capaian kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan, berikut permasalahan yang dihadapi, upaya penanganan, serta tindak lanjut rekomendasi DPRD yang dilaksanakan oleh Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.2.33d
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Dilaksanakan Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Biro Perekonomian dan Pembangunan							**1.696.019.757,25**	**1.578.967.948,00**	**93,10**			
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							**1.201.436.712,25**	**1.106.911.301,00**	**92,13**			
Meningkatnya Akuntabilitas, Kualitas, Efektivitas Kinerja dan Pelayanan Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	**SAKIP Sekretariat Daerah**	**Predikat**	**A**	**A**	**100,00**	**ST**						
	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	**Indeks**	**72**	**86,07**	**119,54**	**ST**						
	Indeks Kepuasan Masyarakat	**Indeks**	**84,90**	**84,90**	**100,00**	**ST**						
Kegiatan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							**131.930.833,00**	**123.112.686,00**	**93,32**			
1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	Dokumen	1	1	100,00	ST	99.621.833,00	91.644.426,00	91,99			
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	100,00	ST	32.309.000,00	31.468.260,00	97,40			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah							**224.740.109,00**	**217.390.273,00**	**96,73**			
3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	67.703.609,00	65.689.803,00	97,03			
4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	16.847.500,00	16.600.280,00	98,53			
5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	100,00	ST	140.189.000,00	135.100.190,00	96,37			
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**442.353.658,00**	**424.047.498,00**	**95,86**			
6. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	22.008.048,00	9.901.908,00	44,99	Realisasi Keuangan dibawah 50% disebabkan oleh tidak terealisasinya pemasangan jaringan internet pada Biro Perekonomian dan Pembangunan	Sudah dialokasikan pada anggaran tahun 2026 untuk pemasangan jaringan internet pada Biro Perekonomian dan Pembangunan untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.	
7. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	96.706.200,00	96.636.000,00	99,93			
8. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Laporan	1	1	100,00	ST	323.639.410,00	317.509.590,00	98,11			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Pelayanan Umum Kantor	Kantor Yang Disediakan											
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**125.557.500,00**	**124.133.826,00**	**98,87**			
9. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	12	12	100,00	ST	113.337.500,00	112.682.376,00	99,42			
10. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	Unit	2	2	100,00	ST	12.220.000,00	11.451.450,00	93,71			
Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan							**276.854.612,25**	**218.227.018,00**	**78,82**			
11. Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	1	1	100,00	ST	276.854.612,25	218.227.018,00	78,82			
4.01.06 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN							**351.320.920,00**	**337.295.059,00**	**96,01**			
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	**Persentase Rekomendasi Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang diusulkan menjadi Kebijakan**	**%**	**100**	**100**	**100,00**	**ST**						
Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian							**98.168.837,00**	**94.077.770,00**	**95,83**			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
12. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Dokumen	1	1	100,00	ST	44.608.657,00	42.535.980,00	95,35			
13. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Dokumen	1	1	100,00	ST	53.560.180,00	51.541.790,00	96,23			
Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam							**44.514.417,00**	**43.947.185,00**	**98,73**			
14. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Dokumen	1	1	100,00	ST	44.514.417,00	43.947.185,00	98,73			
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD							**208.637.666,00**	**199.270.104,00**	**95,51**			
15. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Dokumen	1	1	100,00	ST	41.820.117,00	40.150.280,00	96,01			
16. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Dokumen	1	1	100,00	ST	67.119.928,00	65.997.552,00	98,33			
17. Sub Kegiatan Koordinasi,	Koordinasi, Sinkronisasi dan	Kegiatan	1	1	100,00	ST	81.309.687,00	78.406.722,00	96,43			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD											
18. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Kegiatan	1	1	100,00	ST	18.387.934,00	14.715.550,00	80,03			
4.01.08 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	**Persentase Regulasi Administrasi Pembangunan Daerah yang diimplementasikan**	**%**	**100**	**100**	**100,00**	**ST**	**143.262.125,00**	**134.761.588,00**	**94,07**			
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah							**110.920.207,00**	**106.031.022,00**	**95,59**			
19. Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Laporan	1	1	100,00	ST	76.346.749,00	72.500.070,00	94,96			
20. Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Laporan	1	1	100,00	ST	34.573.458,00	33.530.952,00	96,98			
Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah							**32.341.918,00**	**28.730.566,00**	**88,83**			
21. Sub Kegiatan Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Dokumen	1	1	100,00	ST	32.341.918,00	28.730.566,00	88,83			

3.2.33e. Biro Organisasi

Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 didukung alokasi anggaran sebesar Rp927.894.796,63 dengan realisasi anggaran sampai akhir tahun 2025 mencapai Rp881.263.370,00 atau setara 94,97 persen, yang mencerminkan tingkat pelaksanaan program dan kegiatan yang sangat optimal. Kinerja program menunjukkan 7 indikator program telah ditetapkan, seluruhnya (7 indikator) berada pada kategori sangat tinggi.

Berdasarkan dokumen perencanaan dan penganggaran, indikator kegiatan sama dengan indikator sub kegiatan, sehingga dalam dokumen LKPJ ini hanya disajikan indikator sub kegiatan. Terlihat dari sebanyak 19 indikator sub kegiatan, semuanya sebanyak 19 indikator telah mencapai target kinerja yang ditetapkan dengan status sangat tinggi. Secara umum kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam dokumen penganggaran dan perjanjian kinerja tergolong baik.

Uraian lebih rinci mengenai capaian kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan, berikut permasalahan yang dihadapi, upaya penanganan, serta tindak lanjut rekomendasi DPRD yang dilaksanakan oleh Organisasi Biro Sekretariat Daerah Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.2.33e
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
BIRO ORGANISASI							**927.894.795,63**	**881.263.370,00**	**94,97**			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							**683.423.729,63**	**667.750.184,00**	**97,71**			
Meningkatnya akuntabilitas, efektifitas kinerja dan pelayanan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**Predikat**	**A**	**A**	**100,00**	**ST**						
	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	**Indeks**	**72**	**86,07**	**119,72**	**ST**						
	Indeks Kepuasan Masyarakat	**Indeks**	**84,90**	**85,32**	**100,49**	**ST**						
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							**100.934.382,00**	**98.521.346,00**	**97,61**			
1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	1	1	100,00	ST	100.934.382,00	98.521.346,00	97,61			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							**19.800.000,00**	**17.400.000,00**	**87,88**			
2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	5	5	100,00	ST	19.800.000,00	17.400.000,00	87,88			
Administrasi Umum Perangkat Daerah							**170.238.345,63**	**169.391.527,00**	**99,50**			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	45.451.358,63	44.868.820,00	98,72			
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	2.242.200,00	2.242.200,00	100,00			
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokumen	1	1	100,00	ST	4.920.000,00	4.903.590,00	99,67			
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	1	1	100,00	ST	117.624.787,00	117.376.917,00	99,79			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**268.083.902,00**	**259.981.911,00**	**96,98**			
7. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	laporan	1	1	100,00	ST	7.950.270,00	4.682.777,00	58,90			
8. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	laporan	1	1	100,00	ST	46.620.000,00	46.620.000,00	100,00			
9. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	laporan	1	1	100,00	ST	213.513.632,00	208.679.134,00	97,74			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							**124.367.100,00**	**122.455.400,00**	**98,46**			
10. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	unit	3	3	100,00	ST	116.486.100,00	114.931.300,00	98,67			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya											
11. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	unit	10	10	100,00	ST	7.881.000,00	7.524.100,00	95,47			
4.01.02 - PROGRAM PENATAAN ORGANISASI							**244.471.066,00**	**213.513.186,00**	**87,34**			
Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah	**Skor Rencana Aksi Pembangunan RB General**	**Skor**	**2,17**	**2,42**	**112,00**	**ST**						
	Nilai Evaluasi Kelembagaan Dimensi Struktur Organisasi	**Indeks**	**39,2**	**39,3**	**100,26**	**ST**						
	Persentase OPD yang menerapkan Tatalaksana sesuai ketentuan	**%**	**79,07**	**79,07**	**100,00**	**ST**						
	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja pada hasil evaluasi SAKIP	**Nilai**	**11,89**	**11,92**	**100,25**	**ST**						
Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan							**72.838.062,00**	**64.057.071,00**	**87,94**			
12. Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100,00	ST	18.260.352,00	15.510.955,00	84,94			
13. Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100,00	ST	17.322.677,00	16.670.600,00	96,24			
14. Sub Kegiatan Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	Dokumen	1	1	100,00	ST	37.255.033,00	31.875.516,00	85,56			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja							**171.633.004,00**	**149.456.115,00**	**87,08**			
15. Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dokumen	1	1	100,00	ST	54.424.314,00	40.882.838,00	75,12			
16. Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Dokumen	1	1	100,00	ST	23.324.068,00	23.102.724,00	99,05			
17. Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Laporan	1	1	100,00	ST	20.395.130,00	17.506.748,00	85,84			
18. Sub Kegiatan Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	Dokumen	1	1	100,00	ST	38.913.351,00	35.044.531,00	90,06			
19. Sub Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Dokumen	1	1	100,00	ST	34.576.141,00	32.919.274,00	95,21			

3.2.33f. Biro Administrasi Pimpinan

Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah pada Tahun Anggaran 2025 didukung alokasi anggaran sebesar Rp6.098.561.124,40 dengan realisasi anggaran sampai akhir tahun 2025 mencapai Rp6.000.053.714,00 atau setara 98,38 persen, yang mencerminkan tingkat pelaksanaan program dan kegiatan yang sangat optimal. Kinerja program menunjukkan dari sejumlah 3 indikator program telah ditetapkan, seluruhnya sebanyak 3 indikator berada pada kategori sangat tinggi.

Berdasarkan dokumen perencanaan dan penganggaran, indikator kegiatan sama dengan indikator sub kegiatan, sehingga dalam dokumen LKPJ ini hanya disajikan indikator sub kegiatan. Terlihat dari sebanyak 17 indikator sub kegiatan, semuanya sebanyak 17 indikator telah mencapai target kinerja yang ditetapkan dengan status sangat tinggi. Secara umum kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam dokumen penganggaran dan perjanjian kinerja tergolong baik.

Uraian lebih rinci mengenai capaian kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan, berikut permasalahan yang dihadapi, upaya penanganan, serta tindak lanjut rekomendasi DPRD yang dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.2.33f
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Dilaksanakan Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Biro Administrasi Pimpinan							**6.098.561.124,40**	**6.000.053.714,00**	**98,38**			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							**6.098.561.124,40**	**6.000.053.714,00**	**98,38**			
Meningkatnya Akuntabilitas, Kualitas, Efektivitas Kinerja dan Pelayanan Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**Predikat**	**A**	**A**	**100,00**	**ST**						
	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	**Indeks**	**72**	**86,07**	**119,54**	**ST**						
	Indeks Kepuasan Masyarakat	**Indeks**	**84,90**	**85,32**	**100,49**	**ST**						
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							**74.419.650,00**	**74.290.479,00**	**99,83**			
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	4	4	100,00	ST	74.419.650,00	74.290.479,00	99,83			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							**63.272.800,00**	**55.820.347,00**	**88,22**			
2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	1	1	100,00	ST	63.272.800,00	55.820.347,00	88,22			
Administrasi Umum Perangkat Daerah							**386.148.290,40**	**386.121.109,00**	**99,99**			
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah	Paket	1	1	100,00	ST	16.302.900,00	16.302.900,00	100,00			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
	Tangga yang disediakan											
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	9.608.000,00	9.608.000,00	100,00			
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	100,00	ST	360.237.390,40	360.210.209,00	99,99			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							**8.398.000,00**	**8.397.594,00**	**100,00**			
6. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	2	100,00	ST	8.398.000,00	8.397.594,00	100,00			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**1.886.430.218,00**	**1.839.348.578,00**	**97,50**			
7. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	123.173.558,00	122.374.000,00	99,35			
8. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	171.600.000,00	171.400.000,00	99,88			
9. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	1.591.656.660,00	1.545.574.578,00	97,10			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**193.408.000,00**	**193.200.558,00**	**99,89**			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
10. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	2	2	100,00	ST	151.238.000,00	151.032.558,00	99,86			
11. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Unit	19	19	100,00	ST	42.170.000,00	42.168.000,00	100,00			
Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan							**1.150.744.107,00**	**1.129.323.045,00**	**98,14**			
12. Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	Dokumen	1	1	100,00	ST	51.688.300,00	51.688.300,00	100,00			
13. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	1	1	100,00	ST	534.916.344,00	513.685.015,00	96,03			
14. Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Laporan	1	1	100,00	ST	564.139.463,00	563.949.730,00	99,97			
Fasilitasi Keprotokolan							**2.335.740.059,00**	**2.313.552.004,00**	**99,05**			
15. Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Laporan	1	1	100,00	ST	1.376.008.161,82	1.355.772.495,00	98,53			
16. Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Laporan	1	1	100,00	ST	586.156.100,00	584.809.240,00	99,77			
17. Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Laporan	1	1	100,00	ST	373.575.797,18	372.970.269,00	99,84			

3.2.33g. Biro Hukum

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau didukung alokasi anggaran sebesar Rp1.907.268.509,00 dengan realisasi anggaran sampai akhir tahun 2025 mencapai Rp1.769.154.969,00 atau setara 92,76 persen, yang mencerminkan tingkat pelaksanaan program dan kegiatan yang sangat optimal. Aspek kinerja menunjukkan 4 indikator program telah ditetapkan seluruhnya (4 indikator) berada pada kategori sangat tinggi.

Berdasarkan dokumen perencanaan dan penganggaran, indikator kegiatan sama dengan indikator sub kegiatan, sehingga dalam dokumen LKPJ ini hanya disajikan indikator sub kegiatan. Terlihat dari sebanyak 14 indikator sub kegiatan, semuanya sebanyak 13 indikator telah mencapai target kinerja yang ditetapkan dengan status sangat tinggi, dan sebanyak 1 indikator memiliki kinerja Tinggi yaitu Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan. Secara umum kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam dokumen penganggaran dan perjanjian kinerja tergolong baik.

Uraian lebih rinci mengenai capaian kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan, berikut permasalahan yang dihadapi, upaya penanganan, serta tindak lanjut rekomendasi DPRD yang dilaksanakan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.2.33g
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Dilaksanakan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
BIRO HUKUM							**1.907.268.509,00**	**1.769.154.969,00**	**92,76**			
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							**595.439.876,00**	**536.301.731,00**	**90,07**			
Meningkatnya Akuntabilitas, Kualitas, Efektifitas Kinerja dan Pelayanan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**Predikat**	**A**	**A**	**100**	**ST**						
	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	**Indeks**	**72**	**86,2**	**119,72**	**ST**						
	Indeks Kepuasan Masyarakat	**Indeks**	**84,9**	**85,32**	**100,49**	**ST**						
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							**43.500.314,00**	**41.046.400,00**	**94,36**			
1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	dokumen	4	4	100,00	**ST**	43.500.314,00	41.046.400,00	94,36			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)											
Administrasi Umum Perangkat Daerah							**255.943.254,00**	**206.442.293,00**	**80,66**			
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (paket)	Paket	6	5	83,33	T	126.371.300,00	93.522.550,00	74,01			
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (paket)	Paket	4	4	100,00	ST	8.000.000,00	7.027.000,00	87,84			
4. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	Laporan	2	2	100,00	ST	10.118.893,00	5.164.000,00	51,03			
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	Laporan	2	2	100,00	ST	111.453.061,00	100.728.743,00	90,38			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**183.637.364,00**	**183.553.828,00**	**99,95**			
6. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	183.637.364,00	183.553.828,00	99,95			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah							**112.358.944,00**	**105.259.210,00**	**93,68**			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
7. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	2	2	100,00	ST	105.372.984,00	98.552.210,00	93,53			
8. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	unit	20	19	95,00	ST	6.985.960,00	6.707.000,00	96,01			
4.01.05 - PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM							**1.311.828.633,00**	**1.232.853.238,00**	**93,98**			
Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah yang dihasilkan	**Persentase produk hukum yang dihasilkan dan kasus hukum yang diselesaikan (Persentase)**	**%**	**95**	**100**	**105,26**	**ST**						
Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan							**741.757.634,00**	**679.045.314,00**	**91,55**	1. Penyelesaian Peraturan Daerah	Komitmen Perangkat	Draf Ranperda yang belum

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
9. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	dokumen	4	4	100,00	ST	249.606.829,00	226.094.472,00	90,58	yang Belum Rampung Pemerintah Daerah melalui Biro Hukum diharapkan dapat mempercepat proses penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang belum selesai, terutama yang telah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun berjalan. Langkah percepatan dapat dilakukan melalui: • Penguatan koordinasi lintas perangkat daerah pengusul, • Percepatan harmonisasi dan legal drafting, serta • Pengaturan ulang tahapan pembahasan bersama DPRD sesuai skala prioritas	Daerah dalam penyusunan produk hukum daerah serta Peningkatan kompetensi melalui keikutsertaan pelatihan tenaga Perancang peraturan perundang-undangan	disampaikan oleh PD teknis terkait sehingga tidak dapat ditindaklanjuti oleh Biro Hukum
10. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	dokumen	4	4	100,00	ST	256.484.180,00	244.791.814,00	95,44			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
11. Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang didokumentasi dan dikelola Informasi Hukumnya	dokumen	4	4	100,00	ST	55.797.732,00	45.239.690,00	81,08	2. Pemrosesan Awal Terhadap Perda Prioritas yang Belum Diawali Perlu adanya inisiatif segera dari perangkat daerah pengusul untuk memulai proses perumusan awal terhadap Ranperda yang belum diproses, meskipun telah ditetapkan dalam Propemperda. Biro Hukum dapat mengambil peran aktif dengan: • Melakukan asistensi terhadap penyusunan naskah akademik, • Menyusun jadwal teknis pembahasan internal, • Memberikan penguatan kepada OPD terkait pentingnya ketepatan waktu pengajuan draft.		1. Biro Hukum tidak memiliki anggaran penyusunan naskah akademik dan Ranperda sehingga asistensi terhadap Naskah Akademik dan Ranperda tidak dapat dilaksanakan secara maksimal 2. dalam pemprosesan awal Ranperda Biro Hukum telah menyampaikan kepada PD Teknis terkait yang menyampaikan Ranperda pada Propemperda tahun berjalan untuk menyampaikan Naskah Akademi dan Ranperda pada kesempatan pertama hal ini sering kali tidak
12. Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang difasilitasi dan dievaluasi	dokumen	4	4	100,00	ST	179.868.893,00	162.919.338,00	90,58			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
												ditindaklanjuti oleh PD Teknis terkait.
Fasilitasi Bantuan Hukum							**570.070.999,00**	**553.807.924,00**	**97,15**			
13. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang diselesaikan	kasus	8	8	100,00	ST	342.274.549,00	336.334.397,00	98,26			
14. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang diselesaikan	kasus	6	6	100,00	ST	227.796.450,00	217.473.527,00	95,47			

3.2.33h. Biro Umum

Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 didukung alokasi anggaran sebesar Rp184.113.876.278,00 dengan realisasi anggaran sampai akhir tahun 2025 mencapai Rp176.665.178.765,05 atau setara 95,95 persen, yang mencerminkan tingkat pelaksanaan program dan kegiatan yang sangat optimal. Kinerja program menunjukkan 3 indikator program telah ditetapkan seluruhnya kategori sangat tinggi.

Berdasarkan dokumen perencanaan dan penganggaran, indikator kegiatan sama dengan indikator sub kegiatan, sehingga dalam dokumen LKPJ ini hanya disajikan indikator sub kegiatan. Terlihat dari sebanyak 35 indikator sub kegiatan, semuanya sebanyak 34 indikator telah mencapai target kinerja yang ditetapkan dengan status sangat tinggi, dan sebanyak 1 indikator memiliki kinerja Sangat Rendah, yaitu Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, akibat dari Medical check up tidak terlaksana karena tidak dimanfaatkan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Secara umum kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam dokumen penganggaran dan perjanjian kinerja tergolong baik.

Uraian lebih rinci mengenai capaian kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan, berikut permasalahan yang dihadapi, upaya penanganan, serta tindak lanjut rekomendasi DPRD yang dilaksanakan oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.2.33h
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Dilaksanakan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH							**184.113.876.278,00**	**176.665.178.765,05**	**95,95**			
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							**184.113.876.278,00**	**176.665.178.765,05**	**95,95**			
Meningkatnya Akuntabilitas, Kualitas, Efektivitas Kinerja dan Pelayanan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	**Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)**	**Predikat**	**A**	**A**	**100,00**	**ST**						
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	**Indeks**	**72**	**86,2**	**119,72**	**ST**						
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	**Indeks**	**84,9**	**85,32**	**100,49**	**ST**						
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							**119.396.005,00**	**116.421.281,00**	**97,51**			
1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	2	100,00	ST	119.396.005,00	116.421.281,00	97,51			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							**88.131.664.384,95**	**84.985.620.887,00**	**96,43**			
2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	283	283	100,00	ST	84.879.138.084,95	82.193.330.030,00	96,84			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
3. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1	100,00	ST	3.108.299.300,00	2.649.206.965,00	85,23			
4. Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	1	100,00	ST	64.594.000,00	63.572.439,00	98,42			
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	3	3	100,00	ST	79.633.000,00	79.511.453,00	99,85			
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							**653.226.230,80**	**644.627.817,00**	**98,68**			
6. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	100,00	ST	514.881.730,80	506.676.317,00	98,41			
7. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan,dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	100,00	ST	138.344.500,00	137.951.500,00	99,72			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							253.498.030,00	251.826.115,00	99,34			
8. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Peket	6	6	100,00	ST	253.498.030,00	251.826.115,00	99,34			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Administrasi Umum Perangkat Daerah							17.942.335.082,03	17.460.329.036,00	97,31			
9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	100,00	ST	1.869.558.035,00	1.693.944.984,00	90,61			
10. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	239.318.200,00	73.503.070,00	30,71	Alokasi pada subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ada penambahan pada saat Perubahan APBD untuk mendukung pelaksanaan program MBG. Akan tetapi ada kebijakan bahwa program MBG pendanaan nya ditanggung oleh pemerintah pusat, sehingga anggaran tersisa sebesar 69,29% merupakan anggaran untuk mendukung MBG yang tidak jadi dilaksanakan.		
11. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	9.891.542.745,00	9.858.429.824,00	99,67			
12. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	314.321.505,00	299.773.934,00	95,37			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
13. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	100,00	ST	53.565.315,00	51.606.822,00	96,34			
14. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	100,00	ST	4.635.953.031,03	4.554.708.248,00	98,25			
15. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	100,00	ST	826.702.901,00	817.532.032,00	98,89			
16. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	100,00	ST	111.373.350,00	110.830.122,00	99,51			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							23.526.666.724,00	23.208.161.251,00	98,65			
17. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	30	30	100,00	ST	22.593.102.404,00	22.281.815.253,00	98,62			
18. Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	933.564.320,00	926.345.998,00	99,23			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**31.363.784.091,91**	**29.637.141.179,00**	**94,49**			
19. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	100,00	ST	169.011.435,00	164.692.366,00	97,44			
20. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	7.122.266.020,00	6.466.890.226,00	90,80			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
21. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	6.882.781.337,30	6.829.210.494,00	99,22			
22. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	17.189.725.299,61	16.176.348.093,00	94,10			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**10.598.339.451,82**	**9.630.465.061,05**	**90,87**			
23. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	38	38	100,00	ST	598.061.004,00	593.496.722,00	99,24			
24. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	189	189	100,00	ST	4.203.315.111,00	4.101.038.407,00	97,57			
25. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	5	100,00	ST	1.165.328.827,00	1.100.893.145,00	94,47			
26. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	6	6	100,00	ST	772.049.030,00	765.777.633,00	99,19			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
27. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	18	18	100,00	ST	3.859.585.479,82	3.069.259.154,05	79,52			
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							**4.691.326.335,00**	**4.204.146.122,00**	**89,62**			
28. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	orang	28	28	100,00	ST	1.636.639.187,00	1.186.363.100,00	72,49	Realisasi Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mencapai 72,49%. Belum optimalnya capaian tersebut disebabkan oleh belum direalisasikannya pembayaran insentif pajak triwulan IV karena belum diterbitkannya Surat Keputusan penetapan besaran insentif pajak pada triwulan dimaksud. Pembayaran akan direalisasikan setelah Surat Keputusan ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
29. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	6	6	100,00	ST	350.869.000,00	347.236.836,00	98,96			
30. Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	orang	6	0	-	SR	33.089.792,00	-	0,00	Medical check up tidak terlaksana karena tidak dimanfaatkan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
31. Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	orang	24	24	100,00	ST	2.670.728.356,00	2.670.546.186,00	99,99			
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah							**6.317.243.702,00**	**6.128.801.183,00**	**97,02**			
32. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	2.576.628.313,00	2.515.912.420,00	97,64			
33. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Peket	1	1	100,00	ST	2.526.746.144,00	2.485.616.361,00	98,37			
34. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Peket	1	1	100,00	ST	1.213.869.245,00	1.127.272.402,00	92,87			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan							**516.396.240,49**	**397.638.833,00**	**77,00**			
35. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	1	1	100,00	ST	516.396.240,49	397.638.833,00	77,00	tidak terlaksananya belanja perjalanan dinas luar negeri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Hal tersebut terjadi sebagai bagian dari penyesuaian kebijakan dan pertimbangan prioritas pelaksanaan kegiatan, sehingga sebagian anggaran yang telah direncanakan tidak direalisasikan. Kondisi ini turut mencerminkan upaya efisiensi dan kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran daerah		

3.2.34. Fungsi Penunjang Sekretariat DPRD

Fungsi Penunjang Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Pelaksanaan urusan tersebut didukung alokasi anggaran sebesar Rp137.467.613.579,00 sementara realisasi anggaran sampai akhir tahun 2025 mencapai Rp132.946.566.381,00 atau setara 96,71 persen, yang mencerminkan tingkat pelaksanaan program dan kegiatan yang sangat optimal. Kinerja program menunjukkan 6 indikator program telah ditetapkan, seluruhnya (6 indikator) kategori sangat tinggi.

Berdasarkan dokumen perencanaan dan penganggaran, indikator kegiatan sama dengan indikator sub kegiatan, sehingga dalam dokumen LKPJ ini hanya disajikan indikator sub kegiatan. Terlihat dari sebanyak 44 indikator sub kegiatan, semuanya sebanyak 43 indikator telah mencapai target kinerja yang ditetapkan dengan status sangat tinggi, dan sebanyak 1 indikator memiliki status kinerja Sangat Rendah, yaitu Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD. Belanja Pelaksanaan Medical Check Up DPRD dengan realisasi tidak optimal dikarenakan tidak digunakan oleh sebagian Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Secara umum kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam dokumen penganggaran dan perjanjian kinerja tergolong baik.

Uraian lebih rinci mengenai capaian kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan, berikut permasalahan yang dihadapi, upaya penanganan, serta tindak lanjut rekomendasi DPRD pada Fungsi Penunjang Sekretariat DPRD Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.2.34
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Dilaksanakan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
4.02 - SEKRETARIAT DPRD							**137.467.613.579,00**	**132.946.566.381,00**	**96,71**			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH							**82.165.695.368,82**	**78.593.673.315,00**	**96,65**			
Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**Predikat**	**BB**	**BB**	**100,00**	**ST**						
	Indeks Kepuasan Masyarakat	**Indeks**	**78**	**79,50**	**101,92**	**ST**						
	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	**Indeks**	**80**	**83,14**	**103,92**	**ST**						
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							**583.138.236,81**	**459.551.417,00**	**78,81**			
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	7	100,00	ST	165.442.058,81	162.799.254,00	98,40			
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	2	100,00	ST	97.528.404,00	96.928.627,00	99,39			
3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	2	100,00	ST	92.742.834,00	91.865.641,00	99,05			
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	100,00	ST	20.000.000,00	19.609.620,00	98,05			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	100	100	207.424.940,00	88.348.275,00	42,59	Adanya penyesuaian kebijakan efisiensi belanja OPD oleh BKAD dengan mempertimbangkan kondisi ketersediaan kas daerah di Tahun 2025	Belanja pada 2 bukan terakhir difokuskan pada kegiatan yang bersifat prioritas. Oleh karena itu, Belanja Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp207.424.940 tidak direalisasikan sesuai target	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							**20.007.165.827,49**	**19.226.116.644,00**	**96,10**			
6. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	348	348	100,00	ST	18.989.788.649,49	18.337.953.776,00	96,57			
7. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1	100,00	ST	804.936.000,00	701.919.390,00	87,20			
8. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	1	100,00	ST	73.016.178,00	64.082.278,00	87,76			
9. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	1	100,00	ST	93.519.900,00	81.185.000,00	86,81			
10. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	1	100,00	ST	45.905.100,00	40.976.200,00	89,26			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							**88.949.300,00**	**85.431.000,00**	**96,04**			
11. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	60	60	100,00	ST	34.949.300,00	31.431.000,00	89,93			
12. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	60	60	100,00	ST	54.000.000,00	54.000.000,00	100,00			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Administrasi Umum Perangkat Daerah							**17.545.790.741,89**	**17.394.982.927,00**	**99,14**			
13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	622.350.000,00	620.997.670,00	99,78			
14. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	11.766.168.578,89	11.684.853.139,00	99,31			
15. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	100,00	ST	4.996.520.063,00	4.962.355.218,00	99,32			
16. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	100,00	ST	160.752.100,00	126.776.900,00	78,86			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							**2.665.900.000,00**	**2.363.914.675,00**	**88,67**			
17. Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	500	500	100,00	ST	2.305.650.000,00	2.303.704.675,00	99,92			
18. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	8	8	100,00	ST	360.250.000,00	60.210.000,00	16,71	Telah dilakukan proses pengajuan dan menjadi tunda bayar oleh BKAD dengan mempertimbangkan kondisi ketersediaan kas daerah di Tahun 2025	Akan dilakukan reviu terhadap belanja Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya oleh Inspektorat Daerah dan pembayaran di tahun 2026 oleh BKAD	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**4.158.305.605,00**	**3.864.866.353,00**	**92,94**			
19. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	2.024.333.165,00	1.747.095.491,00	86,30			
20. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	2.133.972.440,00	2.117.770.862,00	99,24			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**6.555.566.504,00**	**5.634.403.352,00**	**85,95**			
21. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	60	60	100,00	ST	3.023.064.460,00	3.016.536.222,00	99,78			
22. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	8	8	100,00	ST	249.445.000,00	247.270.200,00	99,13			
23. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	6	6	100,00	ST	292.280.000,00	283.026.890,00	96,83			
24. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	4	100,00	ST	437.440.000,00	91.193.160,00	20,85			
25. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	4	100,00	ST	167.226.888,00	167.226.888,00	100,00	Telah dilakukan proses pengajuan dan menjadi tunda bayar oleh BKAD dengan mempertimbangkan kondisi ketersediaan kas daerah di Tahun 2025	Akan dilakukan reviu terhadap belanja Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya oleh Inspektorat Daerah dan pembayaran di tahun 2026 oleh BKAD	
26. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	8	8	100,00	ST	2.386.110.156,00	1.829.149.992,00	76,66			
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD							**30.419.238.361,63**	**29.444.319.474,00**	**96,80**			
27. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/Bulan	45	45	100,00	ST	29.998.611.361,63	29.383.911.364,00	97,95			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
28. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	45	19	42,22	SR	420.627.000,00	60.408.110,00	14,36	Belanja Pelaksanaan Medical Check Up DPRD dengan realisasi tidak optimal dikarenakan tidak digunakan oleh sebagian Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau	Perlunya sosialisasi Medical check up secara intens bagi Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau	
Layanan Administrasi DPRD							**141.640.792,00**	**120.087.473,00**	**84,78**			
29. Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Laporan	1	1	100,00	ST	141.640.792,00	120.087.473,00	84,78			
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD							**55.301.918.210,18**	**54.352.893.066,00**	**98,28**			
Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Dalam Pelaksanaan Demokrasi Daerah oleh DPRD sebagai Lembaga Legislatif	**Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N**	**%**	**100**	**100**	**100,00**	**ST**						
	Partisipasi Masyarakat dalam Mempengaruhi Kebijakan Publik Melalui Lembaga Perwakilan (Dengan	**%**	**100**	**100**	**100,00**	**ST**						
	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	**%**	**100**	**100**	**100,00**	**ST**						
Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD							**610.000.000,00**	**521.800.973,00**	**85,54**			
30. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	4	4	100,00	ST	120.000.000,00	114.057.760,00	95,05			
31. Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	Dokumen	4	4	100,00	ST	330.000.000,00	322.764.560,00	97,81			
32. Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Dokumen	4	4	100,00	ST	80.000.000,00	46.127.163,00	57,66	Adanya penyesuaian kebijakan efisiensi belanja OPD oleh BKAD dengan mempertimbangkan	Belanja pada 2 bukan terakhir difokuskan pada kegiatan yang bersifat prioritas. Oleh karena itu, Belanja	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
										kondisi ketersediaan kas daerah di Tahun 2025	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan Rp80.000.000 tidak direalisasikan sesuai target	
33. Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Dokumen	4	4	100,00	ST	80.000.000,00	38.851.490,00	48,56	Adanya penyesuaian kebijakan efisiensi belanja OPD oleh BKAD dengan mempertimbangkan kondisi ketersediaan kas daerah di Tahun 2025	Belanja pada 2 bukan terakhir difokuskan pada kegiatan yang bersifat prioritas. Oleh karena itu, Belanja - Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik Rp80.000.000 tidak direalisasikan sesuai target	
Pembahasan Kebijakan Anggaran							**347.937.000,00**	**341.643.722,00**	**98,19**			
34. Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	2	2	100,00	ST	347.937.000,00	341.643.722,00	98,19			
Peningkatan Kapasitas DPRD							**5.950.866.768,00**	**5.732.686.156,00**	**96,33**			
35. Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	1	1	100,00	ST	1.007.560.000,00	798.848.363,00	79,29			
36. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang	36	36	100,00	ST	2.119.000.000,00	2.118.000.000,00	99,95			
37. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang	7	7	100,00	ST	506.695.000,00	505.695.000,00	99,80			
38. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen	1	1	100,00	ST	1.118.903.624,00	1.117.611.008,00	99,88			
39. Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Dokumen	1	1	100,00	ST	1.198.708.144,00	1.192.531.785,00	99,48			
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat							**24.625.230.072,00**	**24.340.653.069,00**	**98,84**			
40. Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	3	3	100,00	ST	24.625.230.072,00	24.340.653.069,00	98,84			
Fasilitasi Tugas DPRD							**23.767.884.370,18**	**23.416.109.146,00**	**98,52**			
41. Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan	Dokumen	1	1	100,00	ST	20.545.756.330,18	20.296.172.750,00	98,79			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Pelaksanaan Tugas DPRD	Tugas DPRD											
42. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Laporan	2	2	100,00	ST	100.000.000,00	44.302.150,00	44,30	Adanya penyesuaian kebijakan efisiensi belanja OPD oleh BKAD dengan mempertimbangkan kondisi ketersediaan kas daerah di Tahun 2025	Belanja pada 2 bukan terakhir difokuskan pada kegiatan yang bersifat prioritas. Oleh karena itu, Belanja Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Rp100.000.000 tidak direalisasikan sesuai target	
43. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen	12	12	100,00	ST	254.562.540,00	217.454.394,00	85,42			
44. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen	1	1	100,00	ST	2.867.565.500,00	2.858.179.852,00	99,67			

3.2.35. Fungsi Penunjang Perencanaan

Fungsi Penunjang Perencanaan Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau. Pelaksanaan urusan tersebut didukung alokasi anggaran sebesar Rp27.709.605.534,93, sementara realisasi anggaran sampai akhir tahun 2025 mencapai Rp27.430.596.487,00 atau setara 98,99 persen, yang mencerminkan tingkat pelaksanaan program dan kegiatan yang sangat optimal. Kinerja perencanaan ditunjukkan dari sebanyak 26 indikator program telah ditetapkan, sebanyak 25 indikator memiliki kategori sangat tinggi, dan 1 indikator belum diketahui capaiannya yaitu indikator Persentase Tingkat Penurunan Nilai Risiko Daerah (Residual risk) melalui Penerapan Manajemen Risiko yang disebabkan oleh pada tahun 2025 penerapan manajemen risiko pemerintah daerah difokuskan pada penyusunan/ identifikasi risiko, sehingga proses penilaian terhadap manajemen risiko belum dapat dilakukan.

Berdasarkan dokumen perencanaan dan penganggaran, indikator kegiatan sama dengan indikator sub kegiatan, sehingga dalam dokumen LKPJ ini hanya disajikan indikator sub kegiatan. Terlihat dari sebanyak 38 indikator sub kegiatan, semuanya sebanyak 38 indikator telah mencapai target kinerja yang ditetapkan dengan status sangat tinggi. Secara umum kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam dokumen penganggaran dan perjanjian kinerja tergolong baik.

Uraian lebih rinci mengenai capaian kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan, berikut permasalahan yang dihadapi, upaya penanganan, serta tindak lanjut rekomendasi DPRD pada Fungsi Penunjang Perencanaan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.2.35
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Fungsi Penunjang Perencanaan yang Dilaksanakan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
5.01 - PERENCANAAN							**27.709.605.534,93**	**27.430.596.487,00**	**98,99**			
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							**24.589.827.003,93**	**24.378.274.522,00**	**99,14**			
Meningkatnya Akuntabilitas, Kualitas, Efektivitas Kinerja dan Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**Predikat**	**A**	**A**	**100,00**	**ST**						
	Indeks Kepuasan Masyarakat	**Indeks**	**90,50**	**91,25**	**100,83**	**ST**						
	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah	**Indeks**	**78,48**	**82,94**	**105,68**	**ST**						
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							**154.751.300,00**	**153.689.109,00**	**99,31**			
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	100,00	ST	154.751.300,00	153.689.109,00	99,31			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							**21.572.701.259,00**	**21.409.292.787,00**	**99,24**			
2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	77	77	100,00	ST	21.019.501.259,00	20.866.488.787,00	99,27			
3. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1	100,00	ST	553.200.000,00	542.804.000,00	98,12			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							**27.100.000,00**	**26.600.000,00**	**98,15**			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
4. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	2	2	100,00	ST	27.100.000,00	26.600.000,00	98,15			
Administrasi Umum Perangkat Daerah							**812.598.922,00**	**794.497.176,00**	**97,77**			
5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	10.278.711,00	10.036.953,00	97,65			
6. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	15.499.596,00	15.162.600,00	97,83			
7. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	124.171.273,00	122.435.012,00	98,60			
8. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	124.197.502,00	123.952.040,00	99,80			
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	100,00	ST	44.950.000,00	39.980.000,00	88,94			
10. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	100,00	ST	59.237.840,00	50.746.673,00	85,67			
11. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	100,00	ST	434.264.000,00	432.183.898,00	99,52			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							**64.582.771,83**	**63.825.000,00**	**98,83**			
12. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	6	6	100,00	ST	64.582.771,83	63.825.000,00	98,83			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**1.337.515.029,10**	**1.320.479.494,00**	**98,73**			
13. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	100,00	ST	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00			
14. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	70.000.000,00	64.980.680,00	92,83			
15. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	194.000.000,00	189.800.000,00	97,84			
16. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	1.061.515.029,10	1.053.698.814,00	99,26			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**620.577.722,00**	**609.890.956,00**	**98,28**			
17. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	2	2	100,00	ST	95.757.900,00	94.444.866,00	98,63			
18. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	34	34	100,00	ST	325.975.822,00	317.615.230,00	97,44			
19. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	39	39	100,00	ST	32.550.000,00	31.984.650,00	98,26			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
20. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100,00	ST	166.294.000,00	165.846.210,00	99,73			
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH							**2.176.054.010,00**	**2.133.795.679,00**	**98,06**			
Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	**Capaian Kinerja Program RPJMD**	**Predikat**	**ST**	**ST**	**100,00**	**ST**						
	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Kab/Kota dengan Dokumen Perencanaan Provinsi	**%**	**100**	**100**	**100,00**	**ST**						
	Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah	**%**	**80**	**79,23**	**99,04**	**ST**				Terdapat 2 Indikator yang belum dirilis: 1.Indeks Harmoni; 2.Indeks Modal Manusia		
	Persentase Capaian Target Kinerja Pembangunan Kabupaten/Kota dengan Provinsi pada RKPD	**%**	**71,42**	**95,35**	**133,51**	**ST**						
	Persentase Tingkat Penurunan Nilai Risiko Daerah (Residual risk) melalui Penerapan Manajemen Risiko	**%**	**16,67**	**NA**	**NA**	**NA**				Pada tahun 2025, Penerapan Manajemen Risiko Pemerintah Daerah difokuskan pada penyusunan/ identifikasi risiko, sehingga proses penilaian terhadap manajemen risiko		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
										belum dapat dilakukan		
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan							**1.772.456.950,00**	**1.735.405.725,00**	**97,91**			
21. Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Dokumen)	Dokumen	15	15	100,00	ST	114.172.500,00	112.650.533,00	98,67			
22. Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Dokumen	2	2	100,00	ST	54.793.900,00	53.558.000,00	97,74			
23. Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	100,00	ST	123.712.900,00	122.202.500,00	98,78			
24. Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	Dokumen	2	2	100,00	ST	327.946.000,00	318.802.983,00	97,21			
25. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	4	4	100,00	ST	1.151.831.650,00	1.128.191.709,00	97,95			
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah							**12.500.000,00**	**12.176.325,00**	**97,41**			
26. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dokumen	1	1	100,00	ST	12.500.000,00	12.176.325,00	97,41			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah							**391.097.060,00**	**386.213.629,00**	98,75			
27. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	5	5	100,00	ST	226.767.460,00	223.217.009,00	98,43			
28. Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	Dokumen	21	21	100,00	ST	164.329.600,00	162.996.620,00	99,19			
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							**943.724.521,00**	**918.526.286,00**	**97,33**			
Meningkatnya Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	**Persentase keselarasan Renja PD dengan Renstra PD Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**%**	**100**	**100**	**100,00**	**ST**						
	Persentase Ketersedian Program Daerah Pendukung PN pada Renja Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	**%**	**100**	**100**	**100,00**	**ST**						
	Persentase Keselarasan Program Prioritas RKPD dengan KUA PPAS Perangkat Daerah Mitra Bidang	**%**	**76,19**	**76,19**	**100,00**	**ST**						

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
	Pemerintahan dan Pembangunan Manusia											
	Rata-rata nilai SAKIP Perencanaan dan Pengukuran Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Nilai	47,97	47,97	100,00	ST						
	Persentase Program Perangkat Daerah yang Mendukung PN pada Renja Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	72,29	72,29	100,00	ST						
	Persentase Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Telah Menerapkan Manajemen Risiko	%	22,00	22	100,00	ST						
	Persentase keselarasan Renja PD dengan Renstra PD Mitra Bidang Perekonomian dan SDA	%	100	100	100,00	ST						
	Persentase Ketersedian Program Daerah Pendukung PN pada Renja Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dan SDA	%	100	100	100,00	ST						
	Persentase Keselarasan Program Prioritas RKPD dengan KUA PPAS Perangkat Daerah	%	100	100	100,00	ST						

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
	Mitra Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam											
	Rata-rata nilai SAKIP Perencanaan dan Pengukuran Mitra Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Nilai	48,08	48,08	100,00	ST						
	Persentase Program Perangkat Daerah yang Mendukung PN pada Renja Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	%	18,64	18,64	100,00	ST						
	Persentase Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang Telah Menerapkan Manajemen Risiko	%	20	20	100,00	ST						
	Persentase keselarasan Renja PD dengan Renstra PD Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100	100	100,00	ST						
	Persentase Ketersedian Program Daerah Pendukung PN pada Renja Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100	100	100,00	ST						
	Persentase Keselarasan Program Prioritas RKPD dengan KUA PPAS Perangkat Daerah Mitra Bidang	%	100	100	100,00	ST						

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
	Infrastruktur dan Kewilayahan											
	Rata-rata nilai SAKIP Perencanaan dan Pengukuran Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	**Nilai**	**46,89**	**46,89**	**100,00**	**ST**						
	Persentase Program Perangkat Daerah yang Mendukung PN pada Renja Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	**%**	**52**	**52**	**100,00**	**ST**						
	Persentase Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang Telah Menerapkan Manajemen Risiko	**%**	**86**	**86**	**100,00**	**ST**						
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia							**359.596.731,00**	**339.555.577,00**	**94,43**			
29. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	1	100,00	ST	57.727.400,00	56.607.800,00	98,06			
30. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	1	1	100,00	ST	15.279.400,00	14.018.500,00	91,75			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
31. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	4	4	100,00	ST	286.589.931,00	268.929.277,00	93,84			
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)							**302.781.190,00**	**300.957.484,00**	**99,40**			
32. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	1	100,00	ST	208.564.030,00	208.370.193,00	99,91			
33. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	1	1	100,00	ST	55.937.100,00	55.314.504,00	98,89			
34. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (	Laporan	1	1	100,00	ST	38.280.060,00	37.272.787,00	97,37			
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan							**281.346.600,00**	**278.013.225,00**	**98,82**			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
35. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	1	100,00	ST	80.733.200,00	79.666.550,00	98,68			
36. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	1	1	100,00	ST	41.298.600,00	40.593.150,00	98,29			
37. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	1	1	100,00	ST	51.837.500,00	51.116.250,00	98,61			
38. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	1	1	100,00	ST	107.477.300,00	106.637.275,00	99,22			

3.2.26. Keuangan Daerah

Fungsi penunjang keuangan diselenggarakan secara terkoordinasi melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah bersama Badan Pendapatan Daerah, yang berperan strategis menjaga keberlanjutan pengelolaan keuangan daerah serta optimalisasi pendapatan daerah.

3.2.36 a. Badan Keuangan dan Aset Daerah

Urusan penunjang bidang keuangan Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan salah satunya oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Pelaksanaan urusan tersebut didukung alokasi anggaran sebesar Rp774.045.702.637,04, sementara realisasi anggaran sampai akhir tahun 2025 mencapai Rp754.777.212.470,95 atau setara 97,51 persen, yang mencerminkan tingkat pelaksanaan program dan kegiatan yang sangat optimal. Kinerja program menunjukkan dari sejumlah 9 indikator program telah ditetapkan, seluruhnya sebanyak 9 indikator dalam kategori sangat tinggi.

Berdasarkan dokumen perencanaan dan penganggaran, indikator kegiatan sama dengan indikator sub kegiatan, sehingga dalam dokumen LKPJ ini hanya disajikan indikator sub kegiatan. Terlihat dari sebanyak 91 indikator sub kegiatan, sebanyak 90 indikator telah mencapai target kinerja yang ditetapkan dengan status sangat tinggi, dan sebanyak 1 indikator memiliki kinerja yang rendah yaitu Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan. Secara umum kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam dokumen penganggaran dan perjanjian kinerja tergolong baik.

Uraian lebih rinci mengenai capaian kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan, berikut permasalahan yang dihadapi, upaya penanganan, serta tindak lanjut rekomendasi DPRD pada fungsi penunjang keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.2.36a

Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Fungsi Penunjang Keuangan yang Dilaksanakan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH							**774.045.702.637,04**	**754.777.212.470,95**	**97,51**			
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH							**727.026.712.073,60**	**711.247.379.828,00**	**97,83**			
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	**Persentase penetapan APBD Provinsi Kepulauan Riau tepat waktu**	**%**	**100**	**100**	**100,00**	**ST**						
	Persentase pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah APBD Kab/Kota dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota Tepat Waktu	**%**	**100**	**100**	**100,00**	**ST**						
	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	**%**	**91,68**	**93,89**	**102,41**	**ST**						
	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	**%**	**100**	**100**	**100,00**	**ST**						
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah							**2.516.931.409,00**	**2.319.604.848,00**	**92,16**			
1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	2	2	100,00	ST	171.599.800,00	167.755.421,00	97,76			
2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan	Dokumen	2	2	100,00	ST	116.163.873,00	106.522.697,00	91,70			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
dan Perubahan PPAS	Perubahan PPAS yang Disusun											
3. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	43	43	100,00	ST	77.505.926,00	73.225.108,00	94,48			
4. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	43	43	100,00	ST	81.501.898,00	70.269.978,00	86,22			
5. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	2	2	100,00	ST	302.529.028,00	293.411.061,00	96,99			
6. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	2	2	100,00	ST	276.811.549,00	272.002.919,00	98,26			
7. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	2	2	100,00	ST	285.523.424,00	252.970.246,00	88,60			
8. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Dokumen	4	4	100,00	ST	227.450.670,00	222.216.782,00	97,70			
9. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dokumen	4	4	100,00	ST	708.966.256,00	616.113.251,00	86,90			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
10. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Dokumen	4	4	100,00	ST	97.323.357,00	86.888.398,00	89,28			
11. Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Orang	40	40	100,00	ST	171.555.628,00	158.228.987,00	92,23			
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota							**1.198.649.525,00**	**1.122.966.156,00**	**93,69**			
12. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Laporan	7	7	100,00	ST	171.298.056,00	163.111.684,00	95,22			
13. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Laporan	7	7	100,00	ST	183.597.810,00	175.401.307,00	95,54			
14. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang	Laporan	7	7	100,00	ST	91.885.735,00	84.151.528,00	91,58			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota											
15. Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi	Dokumen	7	7	100,00	ST	165.856.400,00	153.086.490,00	92,30			
16. Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	Laporan	1	1	100,00	ST	263.638.374,00	247.522.172,00	93,89			
17. Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Orang	35	35	100,00	ST	156.630.980,00	146.227.398,00	93,36			
18. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Dokumen	4	4	100,00	ST	165.742.170,00	153.465.577,00	92,59			
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah							**1.383.446.889,00**	**1.234.062.575,00**	**89,20**			
19. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	4	4	100,00	ST	520.372.516,00	487.145.785,00	93,61			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
20. Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Dokumen	2	2	100,00	ST	114.663.472,00	87.259.104,00	76,10			
21. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	2	2	100,00	ST	215.597.628,00	181.023.434,00	83,96			
22. Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen	3	3	100,00	ST	113.382.779,00	107.536.869,00	94,84			
23. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	3	3	100,00	ST	72.111.287,00	65.357.759,00	90,63			
24. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen	1	1	100,00	ST	82.389.729,00	66.802.876,00	81,08			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Pertanggungjawaban Sub Kegiatan												
25. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	120	120	100,00	ST	264.929.478,00	238.936.748,00	90,19			
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah							**1.714.405.489,00**	**1.422.409.505,00**	**82,97**			
26. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan	4	4	100,00	ST	176.944.245,00	136.959.764,00	77,40			
27. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Dokumen	4	4	100,00	ST	159.045.378,00	125.598.429,00	78,97			
28. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO, dan Beban **(UPT DANA BERGULIR)**	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Dokumen	4	4	100,00	ST	14.374.798,00	14.085.250,00	97,99			
29. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	1	1	100,00	ST	475.365.910,00	432.797.169,00	91,05			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
30. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Provinsi Pelaksanaan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Dokumen	2	2	100,00	ST	306.581.982,00	263.020.461,00	85,79			
31. Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	1	1	100,00	ST	54.215.095,00	51.497.665,00	94,99			
32. Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Sistem	1	1	100,00	ST	165.569.673,00	116.897.588,00	70,60	Menindaklanjuti atas Surat Badan keuangan dan Aset Daerah Prov. Kepri Nomor T/900.1/637/BKAD/2025 Tanggal 25 November 2025 terkait pelaksanaan Rekonsiliasi Proyeksi Belanja Akhir Tahun 2025 agar OPD untuk tidak melaksanakan Kegiatan yang	Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan : 1. Sisa Anggaran Belanja Perjalanan Dinas (SPPD) yang tidak digunakan dikembalikan dan disetor ke Kas Daerah	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
										belum berkontrak dengan Pihak Ketiga dikarenakan keterbatasan kondisi kas daerah.		
33. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Orang	95	95	100,00	ST	162.836.854,00	145.688.940,00	89,47			
34. Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina	Unit	21	21	100,00	ST	199.471.554,00	135.864.239,00	68,11	Menindaklanjuti atas Surat Badan keuangan dan Aset Daerah Prov. Kepri Nomor T/900.1/637/BKAD/2025 Tanggal 25 November 2025 terkait pelaksanaan Rekonsiliasi Proyeksi Belanja Akhir Tahun 2025 agar OPD untuk tidak melaksanakan Kegiatan yang belum berkontrak dengan Pihak Ketiga dikarenakan keterbatasan kondisi kas daerah.	Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan : 1. Sisa Anggaran Belanja Perjalanan Dinas (SPPD) yang tidak digunakan dikembalikan dan disetor ke Kas Daerah	
35. Penunjang Urusan Kewenangan							719.465.078.273,60	704.536.068.281,00	97,92			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Pengelolaan Keuangan Daerah												
36. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah **(UPT DANA BERGULIR)**	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Laporan	4	4	100,00	ST	162.296.984,00	150.893.861,00	92,97			
37. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	3	3	100,00	ST	18.315.333.853,00	13.433.222.476,00	73,34	1. Kabupaten Karimun tidak mengajukan berkas usulan permohonan pencairan bantuan keuangan pembebasan lahan bandara kabupaten karimun sebesar Rp4.600.000.000; 2. Terdapat beberapa Posyandu yang nomor registernya belum keluar dari kementerian dalam negeri sehingga belum memenuhi persyaratan untuk penyaluran bantuan keuangan khusus serta terdapat beberapa RT/RW yang mengalami pergantian dan	Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan : 1. Memperkuat Koordinasi dengan Kabupaten/Kota terkait penyaluran Bantuan Keuangan Khusus; 2. melaksanakan Rapat Koordinasi bersama Organisasi Perangkat Daerah terkait yakni Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan guna menggesa kelengkapan Dokumen Administrasi dalam rangka	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
										menolak bantuan yang di berikan.	Percepatan Bantuan Keuangan Pembebasan Lahan Bandara Sei Bati; 3.melakukan koordinasi dengan Dinas PMDDUKCAPIL dan PMD Kabupaten/Kota untuk melakukan pembaharuan data Lembaga Kemasyarakatan baik di Desa maupun di kelurahan), Posyandu, RT/RW, LPM),dst;	
38. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	4	4	100,00	ST	2.281.396.903,60	-	0,00	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak belum ada realisasi dikarenakan di Provinsi Kepulauan Riau di Tahun 2025 tidak ada kejadian luar biasa yang bersifat darurat dan mendesak, yang menjadi syarat mengeluarkan anggaran dengan pembebanan	Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Daerah dapat menganggarkan Belanja Tidak Terduga untuk keperluan penanganan kejadian luar biasa yang bersifat darurat dan mendesak, untuk	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
										langsung dari anggaran BTT.	kedepannya agar BTT tetap dianggarkan sesuai dengan peruntukannya.	
39. Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Laporan	4	4	100,00	ST	698.706.050.533,00	690.951.951.944,00	98,89			
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah							748.200.488,00	612.268.463,00	81,83			
40. Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Dokumen	1	1	100,00	ST	332.051.925,00	307.564.079,00	92,63			
41. Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	Orang	129	129	100,00	ST	416.148.563,00	304.704.384,00	73,22	Menindaklanjuti atas Surat Badan keuangan dan Aset Daerah Prov. Kepri Nomor T/900.1/637/BKAD/2025 Tanggal 25 November 2025 terkait pelaksanaan Rekonsiliasi Proyeksi Belanja Akhir Tahun 2025 agar OPD untuk tidak melaksanakan Kegiatan yang belum berkontrak dengan Pihak Ketiga dikarenakan	Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan : 1. Sisa Anggaran Belanja Perjalanan Dinas (SPPD) yang tidak digunakan dikembalikan dan disetor ke Kas Daerah	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
										keterbatasan kondisi kas daerah.		
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH							**2.767.301.140,00**	**2.420.501.117,00**	**87,47**			
Meningkatnya tata kelola aset daerah	**Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap**	**%**	**3**	**2,78**	**92,67**	**ST**						
Pengelolaan Barang Milik Daerah							**2.767.301.140,00**	**2.420.501.117,00**	**87,47**			
42. Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen	1	1	100,00	ST	497.754.565,00	496.138.355,00	99,68			
43. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	1	1	100,00	ST	90.069.184,00	59.905.332,00	66,51	Menindaklanjuti atas Surat Badan keuangan dan Aset Daerah Prov. Kepri Nomor T/900.1/637/BKAD/2025 Tanggal 25 November 2025 terkait pelaksanaan Rekonsiliasi Proyeksi Belanja Akhir Tahun 2025 agar OPD untuk tidak melaksanakan Kegiatan yang belum berkontrak dengan Pihak Ketiga dikarenakan keterbatasan kondisi kas daerah.	Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan : 1. Sisa Anggaran Belanja yang tidak digunakan dikembalikan dan disetor ke Kas Daerah	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
44. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	1	1	100,00	ST	36.298.458,00	27.860.552,00	76,75			
45. Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	3	3	100,00	ST	194.994.301,00	190.864.211,00	97,88			
46. Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan	1	1	100,00	ST	241.614.344,00	207.083.410,00	85,71			
47. Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	2	2	100,00	ST	847.061.476,00	725.800.237,00	85,68			
48. Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan	1	1	100,00	ST	351.649.803,00	344.621.856,00	98,00			
49. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	1	1	100,00	ST	271.085.336,00	187.653.448,00	69,22	Menindaklanjuti atas Surat Badan keuangan dan Aset Daerah Prov. Kepri Nomor T/900.1/637/BKAD/2025 Tanggal 25 November 2025 terkait pelaksanaan Rekonsiliasi Proyeksi Belanja Akhir Tahun 2025 agar OPD untuk tidak melaksanakan Kegiatan yang belum berkontrak dengan Pihak Ketiga dikarenakan keterbatasan	Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan : 1. Sisa Anggaran Belanja yang tidak digunakan dikembalikan dan disetor ke Kas Daerah	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
										kondisi kas daerah.		
50. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	2	2	100,00	ST	77.419.299,00	49.292.328,00	63,67	Menindaklanjuti atas Surat Badan keuangan dan Aset Daerah Prov. Kepri Nomor T/900.1/637/BKAD/2025 Tanggal 25 November 2025 terkait pelaksanaan Rekonsiliasi Proyeksi Belanja Akhir Tahun 2025 agar OPD untuk tidak melaksanakan Kegiatan yang belum berkontrak dengan Pihak Ketiga dikarenakan keterbatasan kondisi kas daerah.	Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan : 1. Sisa Anggaran Belanja yang tidak digunakan dikembalikan dan disetor ke Kas Daerah	
51. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan	1	1	100,00	ST	159.354.374,00	131.281.388,00	82,38			
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							**44.251.689.423,44**	**41.109.331.525,95**	**92,90**			
Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Keuangan	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)**	**Predikat**	**BB**	**BB**	**100,00**	**ST**						
	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	**Indeks**	**83,11**	**82,1**	**98,78**	**ST**						

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	**Indeks**	**89,05**	**89,05**	**100,00**	**ST**						
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							**480.844.850,00**	**458.841.044,00**	**95,42**			
52. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	100,00	ST	278.489.459,00	269.677.068,00	96,84			
53. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	100,00	ST	79.454.634,00	72.417.036,00	91,14			
54. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	100,00	ST	70.972.064,00	67.095.923,00	94,54			
55. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4	100,00	ST	51.928.693,00	49.651.017,00	95,61			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							**35.777.531.585,94**	**33.356.856.724,00**	**93,23**			
56. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	93	93	100,00	ST	24.890.857.472,94	23.819.298.523,00	95,69			
57. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	4	100,00	ST	10.821.871.500,00	9.481.671.850,00	87,62			
58. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	4	100,00	ST	11.946.814,00	11.714.470,00	98,06			
59. Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	Laporan	4	4	100,00	ST	52.855.799,00	44.171.881,00	83,57			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD											
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							**816.899.810,00**	**639.468.027,00**	**78,28**			
60. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	455	455	100,00	ST	711.327.810,00	580.144.117,00	81,56			
61. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	8	5	62,50	R	105.572.000,00	59.323.910,00	56,19	1. Peserta yang mengusulkan Pendidikan dan Pelatihan tidak lulus dalam seleksi Administrasi yang di adakan oleh Instansi Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan 2. Pembatalan keikutsertaan Peserta Pendidikan dan Pelatihan dikarenakan waktu pelaksanaan yang tidak sesuai	Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan : 1. Optimalisasi jumlah peserta yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam pengembangan kompetensi ASN 2. memprioritaskan peserta yang jadwalnya memungkinkan untuk tetap mengikuti kegiatan, sehingga tidak mengganggu tugas pokok	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Administrasi Umum Perangkat Daerah							**2.497.573.742,00**	**2.196.533.920,00**	**87,95**			
62. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	23.155.155,00	23.115.676,00	99,83			
63. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPT PEMBERDAYAAN DAN PEMANFAATAN ASET)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	36.997.002,00	36.556.890,00	98,81			
64. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	100,00	ST	40.925.134,00	40.482.571,00	98,92			
65. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPT PEMBERDAYAAN DAN PEMANFAATAN ASET)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	100,00	ST	114.300.585,00	112.076.863,00	98,05			
66. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	100,00	ST	129.900.472,00	121.153.713,00	93,27			
67. Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPT PEMBERDAYAAN DAN PEMANFAATAN ASET)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	35.463.062,00	31.578.564,00	89,05			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
68. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	4	100,00	ST	176.448.800,00	170.519.610,00	96,64			
69. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (UPT PEMBERDAYAAN DAN PEMANFAATAN ASET)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	19.055.000,00	18.657.175,00	97,91			
70. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	100,00	ST	92.750.285,00	91.939.474,00	99,13			
71. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	4	100,00	ST	50.880.000,00	42.455.660,00	83,44			
72. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	4	100,00	ST	1.195.401.260,00	962.290.301,00	80,50			
73. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT PEMBERDAYAAN DAN PEMANFAATAN ASET)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	4	100,00	ST	124.292.920,00	116.031.360,00	93,35			
74. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT DANA BERGULIR)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	4	100,00	ST	107.338.931,00	93.768.867,00	87,36			
75. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	4	100,00	ST	350.665.136,00	335.907.196,00	95,79			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							**1.151.204.763,00**	**1.103.704.648,00**	**95,87**			
76. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	2	100,00	ST	99.434.072,00	96.591.900,00	97,14			
77. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	44	44	100,00	ST	909.631.059,00	871.662.490,00	95,83			
78. Pengadaan Aset Tak berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	2	2	100,00	ST	122.513.722,00	118.612.458,00	96,82			
79. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	100,00	ST	19.625.910,00	16.837.800,00	85,79			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**2.266.158.440,00**	**2.183.905.069,00**	**96,37**			
80. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	4	100,00	ST	199.787.615,00	191.020.326,00	95,61			
81. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPT PEMBERDAYAAN DAN PEMANFAATAN ASET)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	4	100,00	ST	397.953.128,00	378.907.580,00	95,21			
82. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	4	100,00	ST	158.465.145,00	158.171.000,00	99,81			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
83. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	4	100,00	ST	1.228.141.378,00	1.177.158.865,00	95,85			
84. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPT PEMBERDAYAAN DAN PEMANFAATAN ASET)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	4	100,00	ST	281.811.174,00	278.647.298,00	98,88			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**1.261.476.232,50**	**1.170.022.093,95**	**92,75**			
85. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	2	2	100,00	ST	82.403.378,00	61.666.456,00	74,83	Menindaklanjuti atas Surat Badan keuangan dan Aset Daerah Prov. Kepri Nomor T/900.1/637/BKAD/2025 Tanggal 25 November 2025 terkait pelaksanaan Rekonsiliasi Proyeksi Belanja Akhir Tahun 2025 agar OPD untuk tidak melaksanakan Kegiatan yang belum berkontrak dengan Pihak Ketiga dikarenakan keterbatasan kondisi kas daerah.	Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan : 1. Sisa Anggaran Belanja yang tidak digunakan dikembalikan dan disetor ke Kas Daerah	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
86. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	36	36	100,00	ST	608.520.145,00	560.654.976,00	92,13			
87. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	75	75	100,00	ST	75.477.833,00	69.574.355,00	92,18			
88. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPT PEMBERDAYAAN DAN PEMANFAATAN ASET)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	62	62	100,00	ST	42.245.000,00	41.970.620,00	99,35			
89. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100,00	ST	196.088.007,50	179.670.859,00	91,63			
90. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (UPT PEMBERDAYAAN DAN PEMANFAATAN ASET)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100,00	ST	176.506.869,00	176.349.827,95	99,91			
91. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (UPT PEMBERDAYAAN DAN	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Unit	1	1	100,00	ST	80.235.000,00	80.135.000,00	99,88			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
PEMANFAATAN ASET)												

3.2.36b. Badan Pendapatan Daerah

Urusan Penunjang Keuangan Tahun Anggaran 2025 salah satunya dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Pelaksanaan urusan tersebut didukung alokasi anggaran sebesar Rp110.833.568.573,00, sementara realisasi anggaran sampai akhir tahun 2025 mencapai Rp 106.733.268.335,75 atau setara 96,30 persen, yang mencerminkan tingkat pelaksanaan program dan kegiatan yang sangat optimal. Kinerja program menunjukkan 9 indikator program telah ditetapkan dan seluruhnya (9 indikator) termasuk dalam kategori sangat tinggi.

Berdasarkan dokumen perencanaan dan penganggaran, indikator kegiatan sama dengan indikator sub kegiatan, sehingga dalam dokumen LKPJ ini hanya disajikan indikator sub kegiatan. Terlihat dari sejumlah 34 indikator sub kegiatan, semuanya sebanyak 34 indikator memiliki status kinerja sangat tinggi. Secara umum kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam dokumen penganggaran dan perjanjian kinerja tergolong baik.

Uraian lebih rinci mengenai capaian kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan, berikut permasalahan yang dihadapi, upaya penanganan, serta tindak lanjut rekomendasi DPRD pada Urusan Penunjang Keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.2.36b.
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Penunjang Bidang Keuangan yang Dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
BADAN PENDAPATAN DAERAH							**110.833.568.573,00**	**106.733.268.335,75**	**96,30**			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							**101.347.595.778,62**	**98.460.809.389,75**	**97,15**			
Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendapatan	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**Predikat**	**BB**	**BB**	**100,00**	**ST**						
	Indeks Kepuasan Masyarakat	**Indeks**	**84**	**91,81**	**109,30**	**ST**						
	Persentase Realisasi PAD selain Pajak Daerah terhadap total PAD	**%**	**9,93**	**17**	**176,03**	**ST**						
	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	**(Indeks)**	**75**	**84,52**	**112,69**	**ST**						
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							**240.861.530,93**	**222.752.980,00**	**92,48**			
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	2	2	100,00	ST	159.867.266,50	150.462.050,00	94,12			
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	1	1	100,00	ST	7.171.500,00	5.219.000,00	72,77			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	1	1	100,00	ST	73.822.764,43	67.071.930,00	90,86			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							**74.824.374.617,51**	**74.030.197.550,00**	**98,94**			
4. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	185	188	101,62	ST	73.211.805.017,51	72.498.143.048,00	99,03			
5. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	1	1	100,00	ST	1.601.088.000,00	1.522.416.000,00	95,09			
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1	1	100,00	ST	11.481.600,00	9.638.502,00	83,95			
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							**94.100.565,49**	**87.727.363,00**	**93,23**			
7. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	1	1	100,00	ST	94.100.565,49	87.727.363,00	93,23			
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah							**326.821.982,88**	**237.503.540,00**	**72,67**			
8. Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	dokumen	1	1	100,00	ST	123.924.582,88	104.094.075,00	84,00			
9. Analisa Dan Pengembangan Retribusi Daerah, Serta Penyusunan	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan	dokumen	1	1	100,00	ST	113.032.600,00	88.567.065,00	78,36			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Kebijakan Retribusi Daerah	Kebijakan Retribusi Daerah											
10. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan kebijakan retribusi daerah	laporan	1	1	100,00	ST	53.157.400,00	15.183.000,00	28,56	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (Belanja Sewa Videotron) - Surat Pemberitahuan Penonaktifan Tayangan Videotron Nomor 370/NOT/WW-ALF/IX/2025 tanggal 9 September 2025	Sudah mendatangi Penyedia Videotron yaitu Alfatron dan Sunli terkait edaran tersebut. Sehubungan dengan implementasi Peraturan Wali Kota (Perwako) Batam No. 38 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame, Tim Penyelenggaraan Reklame (TPR) Kota Batam telah mengeluarkan instruksi agar semua penyelenggara reklame videotron untuk menonaktifkan sementara	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
											tayangan reklame yang sedang berjalan, dan dapat diaktifkan kembali setelah videotron telah memiliki perizinan reklame yang lengkap. Penonaktifan dalam artian bahwa tayangan videotron akan dimatikan/di-off-kan, dan konstruksi videotron tidak dibongkar.	
11. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	laporan	1	1	100,00	ST	36.707.400,00	29.659.400,00	80,80			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							**175.812.440,00**	**167.974.660,00**	**95,54**			
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	**Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan**	**paket**	**3**	**10**	**333,33**	**ST**	**175.812.440,00**	**167.974.660,00**	**95,54**			
12. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	paket	1	1	100,00	ST	97.500.000,00	92.710.000,00	95,09			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Kelengkapannya (Pusat)												
13. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (UPTD PPD Tanjungpinang)	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	paket	1	1	100,00	ST	24.762.440,00	24.681.960,00	99,67			
14. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (UPTD PPD Bintan)	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	paket	1	1	100,00	ST	53.550.000,00	50.582.700,00	94,46			
Administrasi Umum Perangkat Daerah							**9.947.880.918,55**	**8.910.819.666,00**	**89,58**			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	**Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan**	**paket**	**9**	**9**	**100,00**	**ST**	**140.140.343,00**	**123.239.684,00**	**87,94**			
15. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Pusat)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	1	100,00	ST	80.000.000,00	72.186.800,00	90,23			
16. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPTD PPD Batam Centre)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	1	100,00	ST	12.531.400,00	10.053.000,00	80,22			
17. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPTD PPD Tanjungpinang)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	1	100,00	ST	18.038.470,00	14.439.260,00	80,05			
18. Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi	paket	1	1	100,00	ST	8.256.500,00	7.104.000,00	86,04			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPTD PPD Bintan)	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan											
19. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPTD PPD Karimun)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	1	100,00	ST	3.116.748,00	3.014.504,00	96,72			
20. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPTD PPD Lingga)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	1	100,00	ST	1.014.025,00	990.000,00	97,63			
21. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPTD PPD Batu Aji)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	1	100,00	ST	7.781.400,00	7.191.500,00	92,42			
22. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPTD PPD Kijang)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	1	100,00	ST	4.836.800,00	3.791.760,00	78,39			
23. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPTD PPD Tanjung Batu)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	1	100,00	ST	4.565.000,00	4.468.860,00	97,89			
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan**	**paket**	**5**	**5**	**100,00**	**ST**	**757.996.545,00**	**443.249.699,00**	**58,48**			
24. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Pusat)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	1	1	100,00	ST	471.386.200,00	260.047.500,00	55,17	Tunda Bayar	Tunda Bayar	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
25. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD PPD Batam Centre)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	1	1	100,00	ST	194.937.300,00	103.020.000,00	52,85	1. Spesifikasi produk PDN tidak sesuai/ tidak memadai kinerja jangka panjang, sehingga barang rentan rusak; 2. Lambatnya keluar Surat Persetujuan TKDN dari Sekretaris Daerah. Surat tersebut baru keluar tanggal 24 November 2025, sedangkan Nota Dinas Pengajuan ke Badan Pendapatan Daerah Tanggal 29 Oktober 2025	Agar produk PDN memenuhi kualitas dan spesifikasi yang setara atau lebih baik dari produk NON PDN	
26. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD PPD Tanjungpinang)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	1	1	100,00	ST	38.262.116,00	33.737.999,00	88,18			
27. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD PPD Karimun)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	1	1	100,00	ST	25.593.229,00	21.629.200,00	84,51			
28. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	1	1	100,00	ST	27.817.700,00	24.815.000,00	89,21			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Kantor (UPTD PPD Batu Aji)												
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	**Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan**	**paket**	**3**	**3**	**100,00**	**ST**	**470.718.796,00**	**462.589.500,00**	**98,27**			
29. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Pusat)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	1	1	100,00	ST	413.234.896,00	410.463.000,00	99,33			
30. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (UPTD PPD Batam Centre)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	1	1	100,00	ST	34.200.000,00	34.200.000,00	100,00			
31. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (UPTD PPD Kijang)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	1	1	100,00	ST	23.283.900,00	17.926.500,00	76,99			
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	**Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan**	**paket**	**11**	**11**	**100,00**	**ST**	**1.509.249.408,00**	**1.322.653.889,00**	**87,64**			
32. Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Pusat)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	1	1	100,00	ST	602.419.400,00	561.090.500,00	93,14			
33. Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPTD PPD Batam Centre)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	1	1	100,00	ST	243.040.800,00	203.485.500,00	83,72			
34. Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPTD PPD Tanjungpinang)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	1	1	100,00	ST	138.009.711,00	107.851.512,00	78,15			
35. Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPTD PPD Bintan)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	1	1	100,00	ST	75.081.600,00	69.734.807,00	92,88			
36. Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPTD PPD Karimun)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	1	1	100,00	ST	41.573.880,00	30.276.000,00	72,82	Sisa dari pagu anggaran adalah sisa dari hasil negosiasi antara Pejabat Penyedia dengan Penyedia,		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
										namun untuk Realisasi Fisik sudah 100 %		
37. Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPTD PPD Lingga)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	1	1	100,00	ST	25.998.630,00	23.497.900,00	90,38			
38. Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPTD PPD Natuna)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	1	1	100,00	ST	57.120.900,00	34.743.000,00	60,82	Tidak Melakukan Koordinasi Kepada Pihak Pengadaan	Melakukan Koordinasi Kepada Pihak Pengandaan, PPTK melakukan monitoring, Bendahara Pembantu Pengeluaran lebih efektif dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab	
39. Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPTD PPD Anambas)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	1	1	100,00	ST	46.635.587,00	39.555.960,00	84,82			
40. Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPTD PPD Batu Aji)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	1	1	100,00	ST	194.207.200,00	183.066.800,00	94,26			
41. Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPTD PPD Kijang)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	1	1	100,00	ST	59.177.200,00	46.310.310,00	78,26			
42. Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPTD PPD Tanjung Batu)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	1	1	100,00	ST	25.984.500,00	23.041.600,00	88,67			
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	**Jumlah Paket Barang Cetakan dan**	**paket**	**11**	**11**	**100,00**	**ST**	**4.993.262.507,00**	**4.753.954.687,00**	**95,21**			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
	Penggandaan yang Disediakan											
43. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Pusat)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	1	1	100,00	ST	4.228.712.300,00	4.051.428.000,00	95,81			
44. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (UPTD PPD Batam Centre)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	1	1	100,00	ST	405.608.783,00	389.909.000,00	96,13			
45. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (UPTD PPD Tanjungpinang)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	1	1	100,00	ST	60.363.798,00	49.277.430,00	81,63			
46. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (UPTD PPD Bintan)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	1	1	100,00	ST	52.115.800,00	48.882.475,00	93,80			
47. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (UPTD PPD Karimun)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	1	1	100,00	ST	17.190.000,00	17.038.500,00	99,12			
48. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (UPTD PPD Lingga)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	1	1	100,00	ST	7.127.616,00	6.713.280,00	94,19			
49. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (UPTD PPD Natuna)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	1	1	100,00	ST	40.723.000,00	18.673.340,00	45,85	Tidak Tersedianya Pihak Penyedia, Tidak Melakukan Koordinasi Kepada Pihak Pengadaan	Melakukan Koordinasi Kepada Pihak Pengandaan, PPTK melakukan monitoring, Bendahara Pembantu Pengeluaran lebih efektif	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
											dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab	
50. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (UPTD PPD Anambas)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	1	1	100,00	ST	22.190.760,00	21.690.712,00	97,75			
51. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (UPTD PPD Batu Aji)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	1	1	100,00	ST	65.063.600,00	60.349.000,00	92,75			
52. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (UPTD PPD Kijang)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	1	1	100,00	ST	56.438.200,00	53.509.000,00	94,81			
53. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (UPTD PPD Tanjung Batu)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	1	1	100,00	ST	37.728.650,00	36.483.950,00	96,70			
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	**Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan**	**dokumen**	**4**	**4**	**100,00**	**ST**	**64.838.900,00**	**62.081.760,00**	**95,75**			
54. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (Pusat)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	1	1	100,00	ST	49.980.000,00	48.000.000,00	96,04			
55. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (UPTD PPD Tanjungpinang)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	1	1	100,00	ST	5.990.000,00	5.760.000,00	96,16			
56. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	dokumen	1	1	100,00	ST	4.684.500,00	4.678.920,00	99,88			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Perundang-Undangan (UPTD PPD Karimun)	Perundang-Undangan yang Disediakan											
57. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (UPTD PPD Kijang)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	1	1	100,00	ST	4.184.400,00	3.642.840,00	87,06			
Fasilitas Kunjungan Tamu	**Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu**	**laporan**	**4**	**4**	**100,00**	**ST**	**108.257.100,00**	**95.720.220,00**	**88,42**			
58. Fasilitasi Kunjungan Tamu (Pusat)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	1	1	100,00	ST	100.000.000,00	89.407.500,00	89,41			
59. Fasilitasi Kunjungan Tamu (UPTD PPD Tanjungpinang)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	1	1	100,00	ST	3.831.500,00	2.220.000,00	57,94	1. Jumlah Kunjungan Tamu Tidak Sesuai Dengan Proyek Perencanaan awal Sehingga anggaran telah di alokasikan tidak terserap secara optimal. 2. Adanya penyesuaian jadwal dan pembatasan kegiatan kedinasan pada periode tertentu.	1. Melakukan evaluasi dan pemutakhiran perencanaan berdasarkan tren realisasi kunjungan tahun berjalan. 2. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait guna memperoleh estimasi kunjungan yang lebih akurat. 3. Melakukan monitoring dan pengendalian pelaksanaan	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
											kegiatan secara berkala. 4. Mengusulkan penyesuaian (rasionalisasi/ pergeseran) anggaran pada perubahan anggaran apabila diperkirakan tidak terserap optimal.	
60. Fasilitasi Kunjungan Tamu (UPTD PPD Lingga)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	1	1	100,00	ST	1.980.000,00	1.860.000,00	93,94			
61. Fasilitasi Kunjungan Tamu (UPTD PPD Kijang)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	1	1	100,00	ST	2.445.600,00	2.232.720,00	91,30			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**laporan**	**11**	**11**	**100,00**	**ST**	**1.781.451.054,63**	**1.531.029.393,00**	**85,94**			
62. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Pusat)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	1	1	100,00	ST	938.583.088,54	759.783.662,00	80,95			
63. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPTD PPD Batam Centre)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	1	1	100,00	ST	105.079.721,48	101.158.770,00	96,27			
64. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	laporan	1	1	100,00	ST	160.340.840,00	144.962.243,00	90,41			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Konsultasi SKPD (UPTD PPD Tanjungpinang)	Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
65. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPTD PPD Bintan)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	1	1	100,00	ST	59.675.592,35	59.151.323,00	99,12			
66. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPTD PPD Karimun)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	1	1	100,00	ST	158.517.878,03	136.609.729,00	86,18			
67. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPTD PPD Lingga)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	1	1	100,00	ST	66.196.000,00	63.780.600,00	96,35			
68. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPTD PPD Natuna)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	1	1	100,00	ST	153.713.758,25	136.302.521,00	88,67			
69. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPTD PPD Anambas)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	1	1	100,00	ST	61.155.000,00	58.241.000,00	95,24			
70. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPTD PPD Batu Aji)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	1	1	100,00	ST	26.617.175,98	22.550.630,00	84,72			
71. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPTD PPD Kijang)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	1	1	100,00	ST	11.980.000,00	11.697.200,00	97,64			
72. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPTD PPD Tanjung Batu)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	1	1	100,00	ST	39.592.000,00	36.791.715,00	92,93			
73. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen	1	1	100,00	ST	121.966.264,92	116.300.834,00	95,35			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							**2.337.890.050,00**	**2.181.468.916,00**	**93,31**			
74. Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	paket	1	1	100,00	ST	464.860.000,00	355.969.000,00	76,58			
75. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	9	9	100,00	ST	1.873.030.050,00	1.825.499.916,00	97,46			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**5.493.879.159,91**	**5.224.171.784,00**	**95,09**			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**laporan**	**11**	**11**	**100,00**	**ST**	**59.711.100,00**	**56.038.780,00**	**93,85**			
76. Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Pusat)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	1	1	100,00	ST	19.290.000,00	17.279.300,00	89,58			
77. Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPTD PPD Batam Centre)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	1	1	100,00	ST	3.661.400,00	3.653.000,00	99,77			
78. Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPTD PPD Tanjungpinang)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	1	1	100,00	ST	3.892.400,00	3.530.000,00	90,69			
79. Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPTD PPD Bintan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	1	1	100,00	ST	9.500.000,00	9.500.000,00	100,00			
80. Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPTD PPD Karimun)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	1	1	100,00	ST	6.676.100,00	6.302.980,00	94,41			
81. Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPTD PPD Lingga)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	1	1	100,00	ST	2.480.000,00	2.400.000,00	96,77			
82. Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPTD PPD Natuna)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	1	1	100,00	ST	4.500.000,00	4.000.000,00	88,89			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
83. Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPTD PPD Anambas)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	1	1	100,00	ST	2.150.000,00	2.150.000,00	100,00			
84. Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPTD PPD Batu Aji)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	1	1	100,00	ST	2.081.200,00	2.043.500,00	98,19			
85. Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPTD PPD Kijang)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	1	1	100,00	ST	2.480.000,00	2.180.000,00	87,90			
86. Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPTD PPD Tanjung Batu)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	1	1	100,00	ST	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan**	**laporan**	**11**	**11**	**100,00**	**ST**	**3.041.746.448,00**	**2.785.690.561,00**	**91,58**			
87. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Pusat)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	1	1	100,00	ST	1.770.733.478,00	1.703.959.387,00	96,23			
88. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPTD PPD Batam Centre)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	1	1	100,00	ST	133.765.000,00	126.667.292,00	94,69			
89. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPTD PPD Tanjungpinang)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	1	1	100,00	ST	267.199.346,00	244.205.484,00	91,39			
90. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPTD PPD Bintan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	1	1	100,00	ST	124.226.144,00	112.186.640,00	90,31			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
91. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPTD PPD Karimun)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	1	1	100,00	ST	281.453.800,00	188.314.807,00	66,91	Sisa pagu anggaran adalah sisa efisiensi pemakaian rutin (Tagihan Listrik dan Air) dari UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Karimun melalui penghematan atas belanja tersebut		
92. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPTD PPD Lingga)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	1	1	100,00	ST	62.592.000,00	57.251.858,00	91,47			
93. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPTD PPD Natuna)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	1	1	100,00	ST	90.673.600,00	55.617.923,00	61,34	Pemadaman listrik yang berkesinambungan, tidak bisa melakukan pengeseran anggaran	PPTK melakukan monitoring, Bendahara Pembantu Pengeluaran lebih efektif dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab	
94. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPTD PPD Anambas)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	1	1	100,00	ST	57.460.700,00	56.242.689,00	97,88			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
95. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPTD PPD Batu Aji)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	1	1	100,00	ST	117.058.480,00	109.120.894,00	93,22			
96. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPTD PPD Kijang)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	1	1	100,00	ST	87.215.000,00	85.166.111,00	97,65			
97. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPTD PPD Tanjung Batu)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	1	1	100,00	ST	49.368.900,00	46.957.476,00	95,12			
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan**	**laporan**	**5**	**5**	**100,00**	**ST**	**334.607.000,00**	**330.632.000,00**	**98,81**			
98. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Pusat)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	laporan	1	1	100,00	ST	210.000.000,00	209.100.000,00	99,57			
99. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD PPD Batam Centre)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	laporan	1	1	100,00	ST	62.000.000,00	62.000.000,00	100,00			
100. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD PPD Tanjungpinang)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	laporan	1	1	100,00	ST	2.505.000,00	-	-			
101. Penyediaan Jasa Peralatan dan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	laporan	1	1	100,00	ST	48.000.000,00	48.000.000,00	100,00			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Perlengkapan Kantor (UPTD PPD Batu Aji)	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan											
102. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD PPD Kijang)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	laporan	1	1	100,00	ST	12.102.000,00	11.532.000,00	95,29			
103. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	1	1	100,00	ST	2.057.814.611,91	2.051.810.443,00	99,71			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**7.905.974.513,35**	**7.398.192.930,75**	**93,58**			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	**Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya**	**unit**	**85**	**85**	**100,00**	**ST**	**2.639.751.481,00**	**2.459.708.638,75**	**93,18**			
104. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Pusat)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	19	19	100,00	ST	943.575.016,00	807.939.618,00	85,63			
105. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (UPTD PPD Batam Centre)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	12	12	100,00	ST	878.423.965,00	873.266.592,75	99,41			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
106. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (UPTD PPD Tanjungpinang)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	11	11	100,00	ST	205.030.500,00	199.155.750,00	97,13			
107. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (UPTD PPD Bintan)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	8	8	100,00	ST	216.117.000,00	211.125.250,00	97,69			
108. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (UPTD PPD Karimun)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	6	6	100,00	ST	57.165.000,00	57.151.850,00	99,98			
109. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (UPTD PPD Lingga)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	6	6	100,00	ST	51.200.000,00	47.626.000,00	93,02			
110. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	5	5	100,00	ST	77.410.000,00	53.168.878,00	68,68	Kondisi fisik kendaraan bermotor tidak mengalami kerusakan yang sangat	PPTK melakukan monitoring, Bendahara Pembantu Pengeluaran	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Lapangan (UPTD PPD Natuna)										signifikan, tidak bisa melakukan pengeseran anggaran	lebih efektif dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab	
111. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (UPTD PPD Anambas)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	3	3	100,00	ST	10.710.000,00	10.596.000,00	98,94			
112. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (UPTD PPD Batu Aji)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	5	5	100,00	ST	59.800.000,00	59.720.000,00	99,87			
113. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (UPTD PPD Kijang)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	6	6	100,00	ST	96.260.000,00	95.918.700,00	99,65			
114. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (UPTD PPD Tanjung Batu)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	4	4	100,00	ST	44.060.000,00	44.040.000,00	99,95			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	**Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara**	**unit**	**281**	**281**	**100,00**	**ST**	**481.773.338,00**	**446.166.768,00**	**92,61**			
115. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Pusat)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	155	155	100,00	ST	262.698.668,00	236.394.668,00	89,99			
116. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPTD PPD Batam Centre)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	40	40	100,00	ST	60.050.000,00	59.965.000,00	99,86			
117. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPTD PPD Tanjungpinang)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	4	4	100,00	ST	58.540.000,00	56.510.000,00	96,53			
118. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPTD PPD Bintan)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	10	10	100,00	ST	30.050.000,00	29.750.000,00	99,00			
119. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPTD PPD Karimun)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	25	25	100,00	ST	22.600.500,00	21.283.600,00	94,17			
120. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPTD PPD Lingga)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	20	20	100,00	ST	6.344.170,00	5.690.000,00	89,69			
121. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPTD PPD Natuna)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	8	8	100,00	ST	6.100.000,00	6.000.000,00	98,36			
122. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPTD PPD Anambas)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	3	3	100,00	ST	3.330.000,00	3.330.000,00	100,00			
123. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	6	6	100,00	ST	15.460.000,00	11.833.500,00	76,54			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Lainnya (UPTD PPD Batu Aji)												
124. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPTD PPD Kijang)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	5	5	100,00	ST	7.880.000,00	6.775.000,00	85,98			
125. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPTD PPD Tanjung Batu)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	5	5	100,00	ST	8.720.000,00	8.635.000,00	99,03			
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	**Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi**	**unit**	**17**	**17**	**100,00**	**ST**	**4.784.449.694,35**	**4.492.317.524,00**	**93,89**			
126. Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Pusat)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	9	9	100,00	ST	4.252.708.416,70	3.988.758.422,00	93,79			
127. Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (UPTD PPD Tanjungpinang)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	1	100,00	ST	118.387.190,19	98.488.354,00	83,19			
128. Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (UPTD PPD Bintan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	1	100,00	ST	112.590.198,22	110.990.092,00	98,58			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
129. Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (UPTD PPD Karimun)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	1	100,00	ST	62.013.869,92	59.209.533,00	95,48			
130. Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (UPTD PPD Lingga)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	1	100,00	ST	31.853.920,00	31.853.920,00	100,00			
131. Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (UPTD PPD Natuna)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	1	100,00	ST	31.856.607,81	31.855.890,00	100,00			
132. Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (UPTD PPD Batu Aji)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	1	100,00	ST	79.188.128,73	76.337.206,00	96,40			
133. Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (UPTD PPD Kijang)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	1	100,00	ST	32.120.333,65	32.119.097,00	100,00			
134. Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	unit	1	1	100,00	ST	63.731.029,13	62.705.010,00	98,39			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Kantor atau Bangunan Lainnya (UPTD PPD Tanjung Batu)	atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi											
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	**Persentase Realisasi Penerimaan Dana Transfer dibandingkan Target Tahun Berjalan**	**%**	**91**	**98,51**	**108,25**	**ST**	**376.904.800,00**	**332.672.731,00**	**88,26**			
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah							**164.903.000,00**	**155.782.419,00**	**94,47**			
135. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	dokumen	1	1	100,00	ST	164.903.000,00	155.782.419,00	94,47			
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah							**151.798.400,00**	**135.841.312,00**	**89,49**			
136. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	dokumen	1	1	100,00	ST	151.798.400,00	135.841.312,00	89,49			
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah							**60.203.400,00**	**41.049.000,00**	**68,18**			
137. Penyusunan Tanggapan / Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	dokumen	1	1	100,00	ST	60.203.400,00	41.049.000,00	68,18	belanja makan minum rapat yg rencananya diadakan di hotel, tidak dilaksanakan	1. Penyesuaian lokasi kegiatan Rapat tetap	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
										karena efisiensi anggaran, kegiatan tetap dilaksanakan di ruang rapat kantor UPTD PPD Karimun	dilaksanakan sesuai jadwal dengan memanfaatkan fasilitas ruang rapat kantor tanpa mengurangi substansi dan tujuan kegiatan. 2. Penyesuaian perencanaan anggaran Belanja makan dan minum rapat disesuaikan dengan standar biaya yang berlaku untuk kegiatan yang dilaksanakan di kantor, sehingga tetap efisien dan akuntabel. 3. Optimalisasi sarana dan prasarana internal Pemanfaatan sarana	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
											prasarana kantor secara maksimal guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan.	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH							**9.109.067.994,38**	**7.939.786.215,00**	**87,16**			
Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	**Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan**	**%**	**100**	**100**	**100,00**	**ST**						
	Persentase Pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah	**%**	**-8,03**	**-18,59**	**231,51**	**ST**						
	Persentase Penerapan Sistem Pengelolaan Pendapatan Berbasis Digital	**%**	**20**	**25**	**125,00**	**ST**						
	Persentase Piutang Pajak Daerah yang tertagih	**%**	**27**	**28**	**103,70**	**ST**						
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah							**9.109.067.994,38**	**7.939.786.215,00**	**87,16**			
138. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	dokumen	2	2	100,00	ST	258.462.894,00	224.899.618,00	87,01			
139. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah Jumlah Laporan Analisa Pengembangan Pajak dan Kebijakan Pajak Daerah	dokumen	2	2	100,00	ST	244.767.000,00	215.708.468,00	88,13			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
140. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	laporan	1	1	100,00	ST	1.725.768.600,00	1.529.860.500,00	88,65			
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	**Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah**	**unit**	**30**	**30**	**100,00**	**ST**	**1.652.594.608,52**	**1.330.011.156,00**	**80,48**			
141. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Pusat)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	unit	3	3	100,00	ST	908.373.353,89	622.122.730,00	68,49	Tunda Bayar	Tunda Bayar	
142. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (UPTD PPD Batam Centre)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	unit	12	12	100,00	ST	185.880.000,00	185.880.000,00	100,00			
143. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (UPTD PPD Tanjungpinang)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	unit	4	4	100,00	ST	210.657.734,99	198.562.959,00	94,26			
144. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (UPTD PPD Bintan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	unit	2	2	100,00	ST	110.178.169,77	103.135.697,00	93,61			
145. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (UPTD PPD Karimun)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	unit	3	3	100,00	ST	105.503.151,60	97.129.015,00	92,06			
146. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (UPTD PPD Lingga)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	unit	2	2	100,00	ST	49.086.573,27	45.173.688,00	92,03			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
147. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (UPTD PPD Natuna)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	unit	1	1	100,00	ST	25.800.000,00	25.800.000,00	100,00			
148. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (UPTD PPD Kijang)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	unit	2	2	100,00	ST	40.804.625,00	36.018.000,00	88,27			
149. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (UPTD PPD Tanjung Batu)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	unit	1	1	100,00	ST	16.311.000,00	16.189.067,00	99,25			
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	**Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah**	**laporan**	**7**	**7**	**100,00**	**ST**	**259.721.681,18**	**250.065.879,00**	**96,28**			
150. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah (UPTD PPD Batam Centre)	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah	laporan	1	1	100,00	ST	25.563.500,00	25.507.400,00	99,78			
151. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah (UPTD PPD Tanjungpinang)	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah	laporan	1	1	100,00	ST	38.671.000,00	36.093.665,00	93,34			
152. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah (UPTD PPD Bintan)	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek	laporan	1	1	100,00	ST	18.996.000,00	18.340.500,00	96,55			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
	pajak dan wajib pajak daerah											
153. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah (UPTD PPD Karimun)	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah	laporan	1	1	100,00	ST	3.750.000,00	3.661.900,00	97,65			
154. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah (UPTD PPD Lingga)	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah	laporan	1	1	100,00	ST	58.087.426,70	57.535.880,00	99,05			
155. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah (UPTD PPD Batu Aji)	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah	laporan	1	1	100,00	ST	111.875.754,48	106.177.034,00	94,91			
156. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah (UPTD PPD Kijang)	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah	laporan	1	1	100,00	ST	2.778.000,00	2.749.500,00	98,97			
157. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	laporan	1	1	100,00	ST	1.469.527.413,54	1.234.722.832,00	84,02			
158. Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen ketetapan Pajak Daerah	dokumen	1	1	100,00	ST	12.600.000,00	450.000,00	3,57	Kegiatan penetapan Wajib Pajak tahun 2025 difokuskan pada penetapan	output penetapan sebagai Wajib Pajak PBBKB telah dilakukan dengan	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
										Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor selaku Wajib Pungut. Dalam pembahasan mengenai tata cara penetapan Wajib Pajak telah dilaksanakan dalam rapat Koordinasi yang diselaraskan dengan kegiatan lain yang mengundang para wajib pajak selaku Wajib Pungut PBBKB.	melakukan kunjungan ke lokasi usaha Wajib Pajak PBBKB	
159. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan permasalahan yang telah ditindaklanjuti dan belum ditindaklanjuti	laporan	1	1	100,00	ST	95.803.400,00	92.855.645,00	96,92			
160. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	dokumen	1	1	100,00	ST	40.893.000,00	33.029.116,00	80,77			
Penagihan Pajak Daerah	**Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak**	**dokumen**	**11**	**11**	**100,00**	**ST**	**2.011.347.026,20**	**1.879.331.252,00**	**93,44**			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
161. Penagihan Pajak Daerah (Pusat)	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	dokumen	1	1	100,00	ST	284.998.870,54	273.086.552,00	95,82			
162. Penagihan Pajak Daerah (UPTD PPD Batam Centre)	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	dokumen	1	1	100,00	ST	450.293.564,72	379.715.009,00	84,33			
163. Penagihan Pajak Daerah (UPTD PPD Tanjungpinang)	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	dokumen	1	1	100,00	ST	504.370.926,92	484.704.487,00	96,10			
164. Penagihan Pajak Daerah (UPTD PPD Bintan)	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	dokumen	1	1	100,00	ST	47.897.984,89	47.122.447,00	98,38			
165. Penagihan Pajak Daerah (UPTD PPD Karimun)	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	dokumen	1	1	100,00	ST	141.609.386,70	136.189.959,00	96,17			
166. Penagihan Pajak Daerah (UPTD PPD Lingga)	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	dokumen	1	1	100,00	ST	73.222.552,86	70.107.647,00	95,75			
167. Penagihan Pajak Daerah (UPTD PPD Natuna)	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	dokumen	1	1	100,00	ST	96.639.904,97	86.586.487,00	89,60			
168. Penagihan Pajak Daerah (UPTD PPD Anambas)	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	dokumen	1	1	100,00	ST	134.408.477,44	131.532.001,00	97,86			
169. Penagihan Pajak Daerah (UPTD PPD Batu Aji)	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	dokumen	1	1	100,00	ST	141.954.879,90	139.106.595,00	97,99			
170. Penagihan Pajak Daerah (UPTD PPD Kijang)	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	dokumen	1	1	100,00	ST	46.180.302,64	43.366.732,00	93,91			
171. Penagihan Pajak Daerah (UPTD PPD Tanjung Batu)	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	dokumen	1	1	100,00	ST	89.770.174,62	87.813.336,00	97,82			
172. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumn/target Penyelesaian Keberatan Pajak daerah	dokumen	1	1	100,00	ST	116.642.032,15	110.518.180,00	94,75			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	**Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah**	**dokumen**	**9**	**9**	**100,00**	**ST**	**1.075.546.838,79**	**903.903.223,00**	**84,04**			
173. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah (Pusat)	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	dokumen	1	1	100,00	ST	67.550.309,94	53.613.780,00	79,37			
174. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah (UPTD PPD Batam Centre)	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	dokumen	1	1	100,00	ST	437.875.309,07	328.825.352,00	75,10			
175. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah (UPTD PPD Tanjungpinang)	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	dokumen	1	1	100,00	ST	92.737.759,07	89.894.935,00	96,93			
176. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah (UPTD PPD Bintan)	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	dokumen	1	1	100,00	ST	144.512.000,00	113.184.250,00	78,32			
177. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah (UPTD PPD Karimun)	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	dokumen	1	1	100,00	ST	66.390.200,00	62.600.000,00	94,29			
178. Pengendalian, Pemeriksaan dan	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan	dokumen	1	1	100,00	ST	74.554.000,00	73.105.600,00	98,06			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Pengawasan Pajak Daerah (UPTD PPD Lingga)	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah											
179. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah (UPTD PPD Natuna)	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	dokumen	1	1	100,00	ST	49.000.000,00	43.060.000,00	87,88			
180. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah (UPTD PPD Anambas)	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	dokumen	1	1	100,00	ST	77.913.460,71	74.957.006,00	96,21			
181. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah (UPTD PPD Kijang)	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	dokumen	1	1	100,00	ST	65.013.800,00	64.662.300,00	99,46			
182. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	laporan	1	1	100,00	ST	94.704.700,00	89.527.246,00	94,53			
183. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah laporan perkembangan elektronifikasi transaksi tunai menjadi non tunai	laporan	1	1	100,00	ST	50.688.800,00	44.903.100,00	88,59			

3.2.37. Fungsi Penunjang Kepegawaian

Fungsi Penunjang Kepegawaian Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau. Pelaksanaan urusan tersebut didukung alokasi anggaran sebesar Rp19.793.963.183,00 sementara realisasi anggaran sampai akhir tahun 2025 mencapai Rp19.316.741.138,00 atau sebesar 97,59 persen, yang mencerminkan tingkat pelaksanaan program dan kegiatan yang sangat optimal. Kinerja program menunjukkan 11 indikator program telah ditetapkan, semuanya sebanyak 11 indikator termasuk dalam kategori sangat tinggi.

Berdasarkan dokumen perencanaan dan penganggaran, indikator kegiatan sama dengan indikator sub kegiatan, sehingga dalam dokumen LKPJ ini hanya disajikan indikator sub kegiatan. Terlihat dari sejumlah 34 indikator sub kegiatan, semuanya sebanyak 34 indikator memiliki status kinerja sangat tinggi. Secara umum kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam dokumen penganggaran dan perjanjian kinerja tergolong baik.

Uraian lebih rinci mengenai capaian kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan, berikut permasalahan yang dihadapi, upaya penanganan, serta tindak lanjut rekomendasi DPRD pada Fungsi Penunjang Kepegawaian yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.2.37
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Fungsi Penunjang Kepegawaian yang Dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
5.03 - KEPEGAWAIAN							**19.793.963.183,00**	**19.316.741.138,00**	**97,59**			
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							**18.090.194.334,00**	**17.843.327.162,00**	**98,64**			
Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepegawaian	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**Predikat**	**A**	**A**	**100,00**	**ST**						
	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah BKD dan KORPRI	**Indeks**	**79,58**	**87,65**	**110,14**	**ST**						
	Indeks Kepuasan Masyarakat BKD dan KORPRI	**Indeks**	**86,72**	**86,53**	**99,78**	**ST**						
	Indeks Kepuasan Masyarakat UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai	**Indeks**	**81,07**	**84,50**	**104,23**	**ST**						
	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai	**Indeks**	**78,50**	**84,71**	**107,91**	**ST**						
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							**135.824.466,00**	**129.406.369,00**	**95,27**			
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	100,00	ST	78.555.214,00	76.497.509,00	97,38			
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	3	100,00	ST	57.269.252,00	52.908.860,00	92,39			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							**16.900.242.863,00**	**16.686.609.469,00**	**98,74**			
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	83	83	100,00	ST	16.476.042.863,00	16.272.866.469,00	98,77			
4. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	3	3	100,00	ST	424.200.000,00	413.743.000,00	97,53			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							**61.988.000,00**	**61.249.800,00**	**98,81**			
5. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	62	62	100,00	ST	61.988.000,00	61.249.800	98,81			
Administrasi Umum Perangkat Daerah							**336.870.237,00**	**324.209.684,00**	**96,24**			
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3	3	100,00	ST	10.000.000,00	9.694.602,00	96,95			
7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	9	9	100,00	ST	51.522.069,00	48.696.996,00	94,52			
8. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3	3	100,00	ST	7.748.800,00	7.458.771,00	96,26			
9. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	6	100,00	ST	50.000.000,00	43.484.200,00	86,97	Adanya penyesuaian kebijakan efisiensi belanja OPD oleh BKAD dengan mempertimbangkan kondisi ketersediaan kas daerah di Tahun 2025	Pengetatan terhadap negosiasi penyediaan alat tulis kantor melalui e-katalog sehingga ada peningkatan sisa anggaran pada belanja alat tulis kantor, dimana harga riil pengadaan lebih rendah dari SSH yang ditetapkan.	
10. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	3	100,00	ST	10.015.600,00	8.627.678,00	86,14	Adanya penyesuaian kebijakan efisiensi belanja OPD oleh BKAD dengan mempertimbangkan kondisi ketersediaan kas daerah di Tahun 2025	Belanja pada 2 bulan terakhir akan difokuskan pada kegiatan yang bersifat prioritas, oleh karena itu belanja bahan cetak sebesar Rp1.387.922,00 tidak dilaksanakan	
11. Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	Paket	3	3	100,00	ST	34.892.900,00	34.238.900,00	98,13			
12. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	6	6	100,00	ST	15.365.000,00	15.175.000,00	98,76			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
13. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	6	6	100,00	ST	157.325.868,00	156.833.537,00	99,69			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**531.597.768,00**	**525.044.700,00**	**98,77**			
14. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	3	3	100,00	ST	3.000.000,00	2.990.000,00	99,67			
15. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	3	100,00	ST	25.565.000,00	22.266.000,00	87,10	Adanya penyesuaian kebijakan efisiensi belanja OPD oleh BKAD dengan mempertimbangkan kondisi ketersediaan kas daerah di tahun 2025	belanja pada 2 bulan terakhir akan difokuskan pada kegiatan yang bersifat prioritas, oleh karena itu Belanja Bahan Baku Rp. 1.798.000,00 dan Belanja kawat faximile Rp. 1.500.000,00 tidak dapat direalisasikan	
16. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	3	3	100,00	ST	88.000.000,00	87.880.000,00	99,86			
17. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	3	3	100,00	ST	415.032.768,00	411.908.700,00	99,25			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**123.671.000,00**	**116.807.140,00**	**94,45**			
18. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	14	14	100,00	ST	110.000.000,00	103.491.640,00	94,08			
19. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	10	100,00	ST	13.671.000,00	13.315.500,00	97,40			
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH							**1.703.768.849,00**	**1.473.413.976,00**	**86,48**			
Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian	**Nilai Pengadaan dalam Sistem Merit**	**Nilai**	**38,25**	**40**	**104,58**	**ST**						
	Nilai Mutasi dan Rotasi berdasarkan sistem merit	**Nilai**	**22,00**	**40**	**181,82**	**ST**						

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	**%**	**98,58**	**98,8**	**100,22**	**ST**						
	Persentase ASN yang tidak menjalani hukuman disiplin sedang dan berat	**%**	**99,50**	**99,89**	**100,39**	**ST**						
	Persentase ASN yang dibina Karirnya	**%**	**5,15**	**5,23**	**101,55**	**ST**						
	Persentase ASN yang dinilai kompetensi manajerial dan sosial kultural	**%**	**8,31**	**27,44**	**330,20**	**ST**						
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN							**276.448.507,00**	**262.610.687,00**	**94,99**			
20. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	3	3	100,00	ST	188.092.588,00	182.990.811,00	97,29			
21. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	3	3	100,00	ST	7.061.819,00	6.838.700,00	96,84			
22. Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Lembaga	1	1	100,00	ST	54.847.100,00	47.989.893,00	87,50			
23. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	3	3	100,00	ST	26.447.000,00	24.791.283,00	93,74			
Mutasi dan Promosi ASN							**642.825.472,00**	**458.850.211,00**	**71,38**			
24. Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	Dokumen	12	12	100,00	ST	108.546.310,00	97.130.496,00	89,48	Adanya penyesuaian kebijakan efisiensi belanja OPD oleh BKAD dengan mempertimbangkan kondisi ketersediaan kas daerah di tahun 2025	Belanja pada 2 bulan terakhir akan difokuskan pada kegiatan yang bersifat prioritas, oleh karena itu belanja bahan makan minum sebesar Rp3.650.000,00 dan Perjalanan dinas ke Batam sebesar Rp. 2.497.000,00 tidak direalisasikan	
25. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	3	3	100,00	ST	19.432.000,00	18.394.398,00	94,66			
26. Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	12	12	100,00	ST	514.847.162,00	343.325.317,00	66,68	Terdapat Seleksi Inspektur yang tidak	Seleksi JPT Pratama, khusus jabatan Inspektur belum dapat	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
										dilaksanakan sesuai dengan kebijakan pimpinan	dilaksanakan. Menunggu arahan PPK lebih lanjut.	
Pengembangan Kompetensi ASN							**696.994.870,00**	**673.524.622,00**	**96,63**			
27. Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	59	59	100,00	ST	76.500.000,00	71.029.804,00	92,85			
28. Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Dokumen	3	3	100,00	ST	492.593.510,00	476.066.838,00	96,64			
29. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	Dokumen	3	3	100,00	ST	87.181.360,00	86.750.537,00	99,51			
30. Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	Orang	159	159	100,00	ST	40.720.000,00	39.677.443,00	97,44			
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur							**87.500.000,00**	**78.428.456,00**	**89,63**			
31. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	3	3	100,00	ST	25.820.000,00	23.929.500,00	92,68			
32. Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang	250	238	95,20	ST	17.468.340,00	15.101.228,00	86,45	Adanya penyesuaian kebijakan efisiensi belanja OPD oleh BKAD dengan mempertimbangkan kondisi ketersediaan kas daerah di tahun 2025	Belanja pada 2 bulan terakhir akan difokuskan pada kegiatan yang bersifat prioritas, oleh karena itu belanja bahan cetak sebesar Rp1.159.910,00 tidak direalisasikan.	
33. Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	500	500	100,00	ST	39.774.890,00	36.100.128,00	90,76			
34. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	3	3	100,00	ST	4.436.770,00	3.297.600,00	74,32	Adanya penyesuaian kebijakan efisiensi belanja OPD oleh BKAD dengan mempertimbangkan kondisi ketersediaan kas daerah di tahun 2025	Belanja pada 2 bulan terakhir akan difokuskan pada kegiatan yang bersifat prioritas, oleh karena itu belanja bahan cetak sebesar Rp809.052,00 tidak direalisasikan.	

3.2.38. Fungsi Penunjang Pendidikan dan Pelatihan

Fungsi Penunjang Pendidikan dan Pelatihan Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau. Pelaksanaan urusan tersebut didukung alokasi anggaran sebesar Rp16.498.935.759,00, sementara realisasi anggaran sampai akhir tahun 2025 mencapai Rp15.325.213.721,00 atau setara 92,89 persen, yang mencerminkan tingkat pelaksanaan program dan kegiatan yang sangat optimal. Aspek kinerja menunjukkan 7 indikator program telah ditetapkan, seluruhnya (7 indikator) termasuk dalam kategori sangat tinggi.

Berdasarkan dokumen perencanaan dan penganggaran, indikator kegiatan sama dengan indikator sub kegiatan, sehingga dalam dokumen LKPJ ini hanya disajikan indikator sub kegiatan. Terlihat dari sejumlah 27 indikator sub kegiatan, sebanyak 24 indikator telah mencapai target kinerja yang ditetapkan dengan status sangat tinggi, 1 indikator sangat rendah karena efisiensi anggaran dan 2 indikator tidak dilaksanakan karena terkena efisiensi anggaran dan untuk pembayaran tunda bayar tahun sebelumnya. Secara umum kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam dokumen penganggaran dan perjanjian kinerja tergolong baik.

Uraian lebih rinci mengenai capaian kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan, berikut permasalahan yang dihadapi, upaya penanganan, serta tindak lanjut rekomendasi DPRD pada Fungsi Penunjang Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.2.38
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Fungsi Penunjang Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							**16.498.935.759,00**	**15.325.213.721,00**	**92,89**			
5.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							**14.516.667.158,00**	**14.006.332.324,00**	**96,48**			
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan bidang urusan pendidikan dan pelatihan	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**Predikat**	**BB**	**BB**	**100,00**	**ST**						
	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	**Indeks**	**85,18**	**88,33**	**100,00**	**ST**						
	Indeks Kepuasan Masyarakat	**Indeks**	**91,07**	**91,09**	**100,00**	**ST**						
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							**435.876.674,10**	**401.191.532,00**	**92,04**			
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	100,00	ST	308.876.702,10	279.908.993,00	90,62			
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	1	1	100,00	ST	60.448.884,00	55.597.567,00	91,97			
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4	100,00	ST	66.551.088,00	65.684.972,00	98,70			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							475.205.000,00	450.834.957,00	94,87			
4. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	Paket	1	1	100,00	ST	98.475.000,00	95.475.000,00	96,95			
5. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	44	44	100,00	ST	376.730.000,00	355.359.957,00	94,33			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							**10.131.108.008,00**	**9.936.721.828,00**	**98,08**			
6. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	44	44	100,00	ST	9.883.650.008,00	9.692.655.828,00	98,07			
7. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	4	100,00	ST	247.458.000,00	244.066.000,00	98,63			
Administrasi Umum Perangkat Daerah							**564.245.450,00**	**485.993.879,00**	**86,13**			
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	6.736.590,00	4.420.000,00	65,61	Efisiensi anggaran		
9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	5.382.000,00	5.328.000,00	99,00			
10. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	145.731.344,00	108.688.800,00	74,58	Efisiensi anggaran		
11. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	3	100,00	ST	128.727.536,00	96.140.100,00	74,68	Efisiensi anggaran		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
12. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	7.391.400,00	4.299.200,00	58,16			
13. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	0	0	SR	3.000.000,00	0,00	0,00	Efisiensi anggaran		
14. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	4	100,00	ST	267.276.580,00	267.117.779,00	99,94			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							**1.161.996.795,00**	**1.128.377.850,00**	**97,11**			
15. Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	2	2	100,00	ST	881.087.526	852.546.100	96,76			
16. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	5	100,00	ST	280.909.268,90	275.831.750,00	98,19			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**978.674.526,00**	**868.066.667,00**	**88,70**			
17. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	2	50,00	SR	105.044.000,00	31.907.969,00	30,38	Efisiensi anggaran		
18. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	4	100,00	ST	330.480.000,00	306.000.000,00	92,59			
19. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	4	100,00	ST	543.150.526,00	530.158.698,00	97,61			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang							**769.560.705,00**	**735.145.611,00**	**95,53**			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Urusan Pemerintahan Daerah												
20. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	5	5	100,00	ST	183.248.560,00	164.282.601,00	89,65			
21. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	5	100,00	ST	24.488.100,00	20.956.800,00	85,58			
22. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100,00	ST	561.824.045,00	549.906.210,00	97,88			
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							**1.982.268.601,00**	**1.318.881.397,00**	**66,53**			
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	**Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional**	**%**	**12,72**	**27,81**	**100,00**	**ST**						
	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan	**%**	**42,39**	**42,39**	**100,00**	**ST**						
	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	**%**	**11,25**	**22**	**100,00**	**ST**						
	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	**%**	**34,78**	**54,26**	**100,00**	**ST**						
Pengembangan Kompetensi Teknis							**1.209.069.827,00**	**631.155.989,00**	**52,20**			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
23. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang	3845	5999	100,00	ST	815.598.386,00	631.155.989,00	77,39			
24. Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Dokumen	-	-	-	-	393.471.441,00	0,00	0,00	Efisiensi anggaran		
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional							**773.198.774,00**	**687.725.408,00**	**88,95**			
25. Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	Orang	-	-	-	-	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00	Pembayaran tunda bayar		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
26. Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Laporan	2	2	100,00	ST	186.267.641,00	153.203.712,00	82,25			
27. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Orang	3253	7112	100,00	ST	559.931.133,00	507.521.696,00	90,64			

3.2.39. Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan

Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau. Pelaksanaan urusan tersebut didukung alokasi anggaran sebesar Rp140.053.042,07, sementara realisasi anggaran sampai akhir tahun 2025 mencapai Rp129.083.433,00 atau setara 92,17 persen, yang mencerminkan tingkat pelaksanaan program dan kegiatan yang sangat optimal. Kinerja program menunjukkan dari sebanyak 4 indikator program yang telah ditargetkan, seluruhnya (4 indikator) termasuk dalam kategori sangat tinggi.

Berdasarkan dokumen perencanaan dan penganggaran, indikator kegiatan sama dengan indikator sub kegiatan, sehingga dalam dokumen LKPJ ini hanya disajikan indikator sub kegiatan. Terlihat dari sebanyak 4 indikator sub kegiatan, semuanya sebanyak 4 indikator telah mencapai target kinerja yang ditetapkan dengan status sangat tinggi. Secara umum kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam dokumen penganggaran dan perjanjian kinerja tergolong baik.

Uraian lebih rinci mengenai capaian kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan, berikut permasalahan yang dihadapi, upaya penanganan, serta tindak lanjut rekomendasi DPRD pada Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.2.39

Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan yang Dilaksanakan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							**140.053.042,07**	**129.083.433,00**	**92,17**			
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH							**140.053.042,07**	**129.083.433,00**	**92,17**			
Meningkatnya Peran Riset dan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah	**Indeks Inovasi Daerah (IID)**	**Indeks**	**Inovatif**	**Inovatif**	**100**	**ST**						
	Persentase Hasil Riset yang direkomendasikan	**%**	**75**	**75**	**100**	**ST**						
	Persentase Inovasi yang dilaporkan	**%**	**75**	**70**	**93,33**	**ST**						
	Jumlah Diseminasi Hasil Kelitbangan	**Karya**	**20**	**20**	**100**	**ST**						
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan							**79.187.682,07**	**76.407.998,00**	**96,49**			
1. Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Laporan	1	1	100	ST	32.515.230,00	31.433.500,00	96,67			
2. Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan	Laporan	1	1	100	ST	46.672.452,07	44.974.498,00	96,36			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
dan Aset Daerah Reformasi Birokrasi	Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi											
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan							**27.195.730,00**	**20.264.725,00**	**74,51**			
3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Dokumen	1	1	100	ST	27.195.730,00	20.264.725,00	74,51			
Pengembangan Inovasi dan Teknologi							**33.669.630,00**	**32.410.710,00**	**96,26**			
4. Diseminasi Jenis Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan	1	1	100	ST	33.669.630,00	32.410.710,00	96,26			

3.2.40. Fungsi Penunjang Pengelolaan Perbatasan

Fungsi Penunjang Pengelolaan Perbatasan Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi Kepulauan Riau. Pelaksanaan urusan tersebut didukung alokasi anggaran sebesar Rp6.712.957.924,00, dengan realisasi anggaran sampai akhir tahun 2025 mencapai Rp6.129.768.952,00 atau setara 91,31 persen, yang mencerminkan tingkat pelaksanaan program dan kegiatan yang sangat optimal. Aspek kinerja menunjukkan 6 indikator program telah ditetapkan, seluruhnya (6 indikator) tergolong dalam kategori sangat tinggi.

Berdasarkan dokumen perencanaan dan penganggaran, indikator kegiatan sama dengan indikator sub kegiatan, sehingga dalam dokumen LKPJ ini hanya disajikan indikator sub kegiatan. Terlihat dari sebanyak 25 indikator sub kegiatan, sebanyak 24 indikator telah mencapai target kinerja yang ditetapkan, dan sebanyak 1 indikator kategori sangat rendah, yaitu jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan, disebabkan oleh adanya efisiensi anggaran, sehingga output tidak tercapai. Secara umum kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam dokumen penganggaran dan perjanjian kinerja tergolong baik.

Uraian lebih rinci mengenai capaian kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan, berikut permasalahan yang dihadapi, upaya penanganan, serta tindak lanjut rekomendasi DPRD pada Fungsi Penunjang Pengelolaan Perbatasan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.2.40.
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Fungsi Penunjang Pengelolaan Perbatasan yang Dilaksanakan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
1.01 - URUSAN Pengelolaan Perbatasan							**6.712.957.924,00**	**6.129.768.952,00**	**91,31**			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan**						**6.506.598.126,00**	**5.949.291.408,00**	**91,43**			
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan di bidang perbatasan	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**Predikat**	**B**	**BB**	**102,64**	**ST**						
	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	**Indeks**	**82,87**	**83,16**	**100,35**	**ST**						
	Indeks Kepuasan Masyarakat	**Indeks**	**80,00**	**86,91**	**108,64**	**ST**						
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							**147.050.823,00**	**143.350.379,00**	**97,48**			
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	100,00	ST	95.977.355,00	94.837.700,00	98,81			
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	4	100,00	ST	51.073.468,00	48.512.679,00	94,99			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							**5.859.119.021,00**	**5.319.905.973,00**	**90,80**			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	27	27	100,00	ST	5.651.131.020,94	5.139.971.973,00	90,95			
4. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	100,00	ST	207.988.000,06	179.934.000,00	86,51			
Administrasi Umum Perangkat Daerah							**200.508.142,00**	**194.018.991,00**	**96,76**			
5. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6	6	100,00	ST	13.788.309,00	13.233.280,00	95,97			
6. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	3	100,00	ST	28.190.781,00	25.793.736,00	91,50			
7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	100,00	ST	12.014.052,00	10.244.587,00	85,27			
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12	100,00	ST	18.000.000,00	16.500.000,00	91,67			
9. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	100,00	ST	8.515.000,00	8.255.000,00	96,95			
10. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100,00	ST	120.000.000,00	119.992.388,00	99,99			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							**5.221.551,00**	-	-			
11. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	0	SR	5.221.551,00	-	-	Adanya efisiensi anggaran, sehingga output tidak tercapai		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**224.669.935,00**	**223.987.531,00**	**99,70**			
12. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	100,00	ST	2.182.404,00	1.500.000,00	68,73			
13. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100,00	ST	42.000.000,00	42.000.000,00	100,00			
14. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100,00	ST	180.487.531,00	180.487.531,00	100,00			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**70.028.654,00**	**68.028.534,00**	**97,14**			
15. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	100,00	ST	67.148.654,00	66.794.300,00	99,47			
16. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	1	100,00	ST	2.880.000,00	1.234.234,00	42,86			
5.06.02.1. PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN							**206.359.798,00**	**180.477.544,00**	**87,46**			
Meningkatnya pemanfaatan kawasan perbatasan	**Persentase usulan yang menjadi rencana aksi Pembangunan kawasan perbatasan dari Kab/Kota**	**%**	**45,00**	**45,24**	**100,53**	**ST**						
	Persentase kawasan perbatasan yang	**%**	**16,67**	**37,03**	**222,14**	**ST**						

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
	dikembangkan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Pengelolaan Kawasan Perbatasan											
	Persentase rencana aksi Pembangunan kawasan perbatasan yang dimonitoring	**%**	**27,59**	**29,73**	**107,76**	**ST**						
Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama							**50.346.056,00**	**41.110.664,00**	**81,66**			
17. Koordinasi Integrasi dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Dokumen	1	1	100,00	ST	24.623.208,00	23.264.140,00	94,48			
18. Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun	Dokumen	1	1	100,00	ST	25.722.848,00	17.846.524,00	69,38			
Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan							**88.686.559,00**	**79.913.090,00**	**90,11**			
19. Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasaan	Dokumen	1	1	100,00	ST	20.498.752,00	19.477.177,00	95,02			
20. Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Dokumen	1	1	100,00	ST	21.098.257,00	20.496.166,00	97,15			
21. Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	Dokumen	1	1	100,00	ST	23.285.370,00	20.222.861,00	86,85			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
22. Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan	Dokumen	1	1	100,00	ST	23.804.180,00	19.716.886,00	82,83			
Monitoring dan Evaluasi							**67.327.183,00**	**59.453.790,00**	**88,31**			
23. Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Dokumen	1	1	100,00	ST	17.233.465,00	16.299.860,00	94,58			
24. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Laporan	5	5	100,00	ST	16.896.569,00	12.573.350,00	74,41			
25. Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	5	5	100,00	ST	33.197.149,00	30.580.580,00	92,12			

2.3.41. Fungsi Penunjang Pengelolaan Penghubung

Fungsi Penunjang Pengelolaan Penghubung Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Pelaksanaan urusan tersebut didukung alokasi anggaran sebesar Rp13.861.882.473, sementara realisasi anggaran sampai akhir tahun 2025 mencapai Rp13.101.772.294 atau setara 94,52 persen, yang mencerminkan tingkat pelaksanaan program dan kegiatan yang sangat optimal. Kinerja program menunjukkan dari sebanyak 6 indikator program yang telah ditetapkan, semuanya sebanyak 6 indikator termasuk dalam kategori sangat tinggi.

Berdasarkan dokumen perencanaan dan penganggaran, indikator kegiatan sama dengan indikator sub kegiatan, sehingga dalam dokumen LKPJ ini hanya disajikan indikator sub kegiatan. Terlihat dari sebanyak 25 indikator sub kegiatan, semuanya sebanyak 24 indikator telah mencapai target kinerja yang ditetapkan, dan 1 indikator dengan capaian sangat rendah, yaitu Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan. Hal ini disebabkan oleh Anggaran yang tersedia tidak bisa mengakomodir biaya kontribusi penyelenggaraan kegiatan Diklat, Kegiatan Bimtek yang diikuti oleh staf lainnya seperti Bimtek pengelolaan aset dari Kemendagri dan Bimtek dari Kemkomdigi biayanya ditanggung oleh Pemerintah, sehingga anggaran sub kegiatan tidak terserap maksimal. Secara umum kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam dokumen penganggaran dan perjanjian kinerja tergolong baik.

Uraian lebih rinci mengenai capaian kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan, berikut permasalahan yang dihadapi, upaya penanganan, serta tindak lanjut rekomendasi DPRD pada Fungsi Penunjang Pengelolaan Penghubung yang dilaksanakan oleh Badan Penghubung Daerah Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.2.41
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Fungsi Penunjang Pengelolaan Penghubung yang Dilaksanakan Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan					Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
		Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
5.07 - Urusan Pengelolaan Penghubung							**13.861.882.473,00**	**13.101.772.294,00**	**94,52**			
5.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							**10.523.291.664,00**	**10.030.023.780,00**	**95,31**			
Meningkatnya Kualitas Layanan Pemerintahan Bidang Penghubung	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**Predikat**	**B**	**B**	**100,00**	**ST**						
	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	**Indeks**	**62,52**	**87,00**	**139,16**	**ST**						
	Indeks Kepuasan Masyarakat	**Indeks**	**88,01**	**89,03**	**101,16**	**ST**						
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							**229.645.105,00**	**209.024.580,00**	**91,02**			
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	100,00	ST	80.881.925,00	75.705.451,00	93,60			
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	100,00	ST	89.938.130,00	83.151.116,00	92,45			
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	100,00	ST	28.776.960,00	23.572.323,00	81,91			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan					Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
		Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	100,00	ST	30.048.090,00	26.595.690,00	88,51			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							**4.493.191.482,00**	**4.377.644.889,00**	**97,16**			
5. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	43	43	100,00	ST	4.242.117.162,00	4.136.024.023,00	97,50			
6. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1	100,00	ST	208.868.000,00	200.198.000,00	95,85			
7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	100,00	ST	42.206.320,00	41.422.866,00	98,14			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							**51.442.381,00**	**13.643.500,00**	**30,68**			
8. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3	3	100,00	ST	46.962.381,00	12.043.500,00	25,64	Pelaksanaan Penyediaan Paket Pakaian dinas beserta Atribut terdapat (Tunda bayar Sebesar Rp. 33.832.800) dan Silpa Anggaran Sebesar Rp. 1.086.081,-	Penyelesaian Tunda Bayar	
9. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	13	1	7,69	SR	4.480.000,00	1.600.000,00	35,71	Anggaran yang tersedia tidak bisa mengakomodir biaya kontribusi penyelenggaraa		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan					Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
		Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
										n kegiatan diklat, Kegiatan Bimtek yang diikuti oleh staf lainnya seperti Bimtek pengelolaan aset dr Kemendagri dan Bimtek dr Kemkomdigi biayanya ditanggung oleh Pemerintah, sehingga anggaran sub kegiatan tidak terserap maksimal.		
Administrasi Umum Perangkat Daerah							**422.724.117,35**	**410.451.648,00**	**98,42**			
10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	27.101.400,00	26.144.940,00	96,47			
11. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	31.616.600,00	31.598.000,00	99,94			
12. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	54.744.500,00	54.744.500,00	100,00			
13. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	100,00	ST	45.589.000,00	45.585.000,00	99,99			
14. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100,00	ST	263.672.617,35	252.379.208,00	95,72			
Pengadaan Barang Milik Daerah							**458.092.900,65**	**457.000.000,00**	**99,76**			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan					Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
		Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												
15. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	1	100,00	ST	458.092.900,65	457.000.000,00	99,76			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**2.681.886.673,00**	**2.588.544.068,00**	**92,53**			
16. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100,00	ST	754.324.664,00	689.910.089,00	91,46	Terdapat Tunda Bayar 2025: Belanja Kawat/Faksimili /Internet/TV Berlangganan sebesar Rp.25.000.000,-	Penyelesaian Tunda Bayar	
17. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100,00	ST	150.000.000,00	129.941.090,00	86,63	Terdapat Tunda Bayar 2025: Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Sebesar Rp. 20.000.000,-	Penyelesaian Tunda Bayar	
18. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100,00	ST	1.777.562.009,00	1.768.692.889,00	99,50			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**2.186.309.005,00**	**1.973.715.095,00**	**84,31**			
19. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	32	32	100,00	ST	1.573.935.649,00	1.491.128.486,00	94,74	Terdapat Tunda Bayar 2025: sebesar Rp. 82.416.390 dengan uraian 1. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan, 2.	Penyelesaian Tunda Bayar	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan					Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
		Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
										Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang		
20. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	50	50	100,00	ST	315.749.900,00	219.938.728,00	69,66	Terdapat Tunda Bayar 2025: sebesar Rp.55.888.500,- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Penyelesaian Tunda Bayar	
21. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	2	2	100,00	ST	296.623.456,00	262.647.881,00	88,55	Terdapat Tunda Bayar 2025: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebesar Rp. 32.743.050,-	Penyelesaian Tunda Bayar	
5.07.02 - PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG							**3.338.590.809,00**	**3.071.748.514,00**	**92,01**			
Meningkatnya Kualitas Layanan Penghubung	**Persentase Hasil Masyarakat Kepri yang di layani**	**Persentase**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**ST**						
	Persentase Hasil Promosi Produk Unggulan Provinsi Kepulauan Riau	**Persentase**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**ST**						

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan					Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
		Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
	Persentase Hasil Koordinasi Pusat Daerah	**Persentase**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**ST**						
Pelaksanaan Pelayanan Penghubung							**3.338.590.809,00**	**3.071.748.514,00**	**92,01**			
22. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	Laporan	12	12	100,00	ST	2.075.373.812,00	1.872.038.252,00	90,20	Terdapat Tunda Bayar 2025: Total sebesar Rp. 201.260.927,- yang terdiri dari 1. Belanja Natura dan Pakan-Natura, 2. Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga, 3. Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu, 4. Belanja Natura dan Pakan-Natura, 5. Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Penyelesaian Tunda Bayar	
23. Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Laporan	12	12	100,00	ST	315.682.000,00	313.851.936,00	99,42			
24. Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan	Laporan	12	12	100,00	ST	289.464.598,00	270.770.493,00	93,54	Terdapat Tunda Bayar 2025:Sebesar Rp.	Penyelesaian Tunda Bayar	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan					Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
		Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
dan Pelestarian Seni Budaya	Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan									15.356.850,- dengan uraian Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan (Tari Melayu untuk Acara Soul Of Youth TMII		
25. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Laporan	12	12	100,00	ST	=658.070.399,00	615.087.833,00	93,47	Terdapat Tunda Bayar 2025: Total sebesar Rp. 41.400.000,- dengan uraian Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Penyelesaian Tunda Bayar	

3.2.42. Fungsi Penunjang Pengawasan

Fungsi Penunjang Pengawasan Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau. Pelaksanaan urusan tersebut didukung alokasi anggaran sebesar Rp51.206.443.087,00, sementara realisasi anggaran sampai akhir tahun 2025 mencapai Rp49.818.552.697,00 atau setara 97,29 persen, yang mencerminkan tingkat pelaksanaan program dan kegiatan yang sangat optimal. Aspek kinerja menunjukkan 11 indikator program telah ditetapkan, seluruhnya (11 indikator) termasuk dalam kategori sangat tinggi.

Berdasarkan dokumen perencanaan dan penganggaran, indikator kegiatan sama dengan indikator sub kegiatan, sehingga dalam dokumen LKPJ ini hanya disajikan indikator sub kegiatan. Terlihat dari sebanyak 44 indikator sub kegiatan, semuanya sebanyak 44 indikator telah mencapai target kinerja yang ditetapkan dengan status sangat tinggi. Secara umum kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam dokumen penganggaran dan perjanjian kinerja tergolong baik.

Uraian lebih rinci mengenai capaian kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan, berikut permasalahan yang dihadapi, upaya penanganan, serta tindak lanjut rekomendasi DPRD pada Fungsi Penunjang Pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.2.42

Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Fungsi Penunjang Pengawasan yang Dilaksanakan Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH							**51.206.443.087,00**	**49.818.552.697,00**	**97,29**			
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							**42.487.351.009,00**	**41.276.970.657,00**	**97,15**			
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Pengawasan	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**Predikat**	**A**	**A**	**100,00**	**ST**						
	Indeks Kepuasan Masyarakat	**Indeks**	**88,09**	**88,09**	**100,00**	**ST**						
	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	**Indeks**	**85,65**	**85,65**	**100,00**	**ST**						
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							**341.457.700,00**	**337.722.970,00**	**98,91**			
1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	13	13	100,00	ST	309.745.000,00	307.347.320,00	99,23			
2. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	5	5	100,00	ST	31.712.700,00	30.375.650,00	95,78			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							**32.806.226.673,00**	**32.056.883.393,00**	**97,72**			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang /Bulan	86	86	100,00	ST	32.154.062.673,00	31.443.209.193,00	97,79			
4. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1	100,00	ST	529.686.000,00	492.560.000,00	92,99			
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	2	100,00	ST	122.478.000,00	121.114.200,00	98,89			
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							**90.680.100,00**	**88.290.815,00**	**97,37**			
6. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	4	100,00	ST	53.102.200,00	51.507.200,00	97,00			
7. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	4	100,00	ST	37.577.900,00	36.783.615,00	97,89			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							**2.482.802.790,00**	**2.441.859.779,00**	**98,35**			
8. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	2	100,00	ST	193.400.500,00	189.457.000,00	97,96			
9. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan	Dokumen	5	5	100,00	ST	125.785.300,00	116.177.200,00	92,36			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
	Administrasi Kepegawaian											
10. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	130	130	100,00	ST	2.072.246.190,00	2.062.423.650,00	99,53			
11. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	100	100	100,00	ST	91.370.800,00	73.801.929,00	80,77			
Administrasi Umum Perangkat Daerah							**4.452.914.225,00**	**4.098.287.890,00**	**92,04**			
12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	99.977.000,00	99.669.120,00	99,69			
13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	100,00	ST	802.086.600,00	710.650.555,00	88,60			
14. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3	3	100,00	ST	50.000.000,00	46.963.545,00	93,93			
15. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	8	8	100,00	ST	638.279.300,00	631.648.615,00	98,96			
16. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	3	100,00	ST	360.362.625,00	354.497.565,00	98,37			
17. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	15	15	100,00	ST	28.975.800,00	26.497.980,00	91,45			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
18. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	26	26	100,00	ST	2.359.437.000,00	2.160.323.830,00	91,56			
19. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2	2	100,00	ST	39.038.000,00	38.236.680,00	97,95			
20. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	1	100,00	ST	74.757.900,00	29.800.000,00	39,86	Terjadi perubahan kebutuhan terhadap aplikasi Pengawasan.	Berkoordinasi terkait kebutuhan pengadaan Aplikasi pengadaan di tahun berikutnya	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							**101.875.400,00**	**99.562.502,00**	**97,73**			
21. Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	4	4	100,00	ST	101.775.400,00	99.562.502,00	97,83			
22. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	100,00	ST	100.000,00	-	-	Adanya Efisiensi anggaran		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**875.781.981,00**	**826.747.397,00**	**94,40**			
23. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	100,00	ST	12.000.000,00	8.347.300,00	69,56	Pengeluaran sesuai dengan kebutuhan riil.		
24. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	110.022.000,00	73.075.000,00	66,42	Pengeluaran sesuai dengan tagihan		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
25. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100,00	ST	753.759.981,00	745.325.097,00	98,88			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**1.335.612.140,00**	**1.327.615.911,00**	**99,40**			
26. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	5	5	100,00	ST	275.175.000,00	274.334.448,00	99,69			
27. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	21	21	100,00	ST	519.890.000,00	514.343.326,00	98,93			
28. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	30	30	100,00	ST	98.040.000,00	96.975.000,00	98,91			
29. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100,00	ST	442.507.140,00	441.963.137,00	99,88			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN							**6.001.100.780,00**	**5.875.047.790,00**	**97,90**			
Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	**Persentase Perangkat Daerah yang mendapat Nilai Sakip BB ke Atas**	**%**	**85,29**	**85,29**	**100,00**	**ST**						
	Persentase Program Strategis Daerah yang di lakukan pengawasan	**%**	**100**	**100**	**100,00**	**ST**						
	Persentase Pengawasan Akuntabilitas Pengelolaan Perencanaan dan Keuangan Daerah	**%**	**100**	**100**	**100,00**	**ST**						
	Persentase Pengawasan dan Pembinaan yang dilakukan terhadap Kabupaten/Kota	**%**	**42,86**	**42,86**	**100,00**	**ST**						
Kegiatan Penyelenggaraan pengawasan internal.							**4.727.361.680,00**	**4.641.262.530,00**	**98,18**			
30. Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	90	90	100,00	ST	859.689.000,00	791.951.636,00	92,12			
31. Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	150	150	100,00	ST	1.475.689.000,00	1.474.324.774,00	99,91			
32. Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	1	1	100,00	ST	14.547.580,00	7.200.000,00	49,49	Terjadi perubahan jadwal	Akan melakukan penyusunan	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
										evaluasi Kinerja sehingga jadwal penugasan beririsan dengan penugasan yang lain.	Tim lebih efektif	
33. Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	1	1	100,00	ST	145.694.000,00	145.349.200,00	99,76			
34. Sub Kegiatan Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Laporan	3	3	100,00	ST	603.121.600,00	603.109.402,00	100,00			
35. Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (kesepakatan)	Kesepakatan	1	1	100,00	ST	1.087.300.000,00	1.084.827.934,00	99,77			
36. Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	10	10	100,00	ST	541.320.500,00	534.499.584,00	98,74			
Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu							**1.273.739.100,00**	**1.233.785.260,00**	**96,86**			
37. Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	4	4	100,00	ST	152.379.900,00	118.406.200,00	77,70			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Kerugian Negara/Daerah												
38. Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan	45	45	100,00	ST	1.121.359.200,00	1.115.379.060,00	99,47			
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI							**2.717.991.298,00**	**2.666.534.250,00**	**98,11**			
Meningkatnya Kualitas pendampingan dan asistensi	**Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Predikat WBK/WBBM menuju ZI**	**Perangkat Daerah**	**1**	**1**	**100,00**	**ST**						
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Pengawasan yang dihasilkan	**Rekomendasi**	**3**	**3**	**100,00**	**ST**						
	perangkat daerah yang dilakukan Monitoring dan Evaluasi Capaian MCP KPK	**Perangkat Daerah**	**12**	**12**	**100,00**	**ST**						
	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi SPIP	**Perangkat Daerah**	**34**	**34**	**100,00**	**ST**						
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan							**648.001.362,00**	**645.440.000,00**	**99,60**			
39. Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	4	4	100,00	ST	332.178.000,00	331.578.000,00	99,82			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
di Bidang Pengawasan												
40. Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	2	2	100,00	ST	315.823.362,00	313.862.000,00	99,38			
Kegiatan Pendampingan dan Asistensi							**2.069.989.936,00**	**2.021.094.250,00**	**97,64**			
41. Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	34	34	100,00	ST	802.436.880,00	801.906.240,00	99,93			
42. Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokras	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	34	34	100,00	ST	130.794.100,00	124.023.560,00	94,82			
43. Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Perangkat Daerah	2	2	100,00	ST	785.910.856,00	750.731.230,00	95,52			
44. Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah	34	34	100,00	ST	350.848.100,00	344.433.220,00	98,17			

3.2.43. Urusan Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik

Urusan Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kepulauan Riau. Pelaksanaan urusan tersebut didukung alokasi anggaran sebesar Rp44.877.969.777,00, sementara realisasi anggaran sampai akhir tahun 2025 mencapai Rp41.636.034.038,00 atau setara 92,78 persen, yang mencerminkan tingkat pelaksanaan program dan kegiatan yang sangat optimal. Aspek kinerja menunjukkan 9 indikator program telah ditetapkan, seluruhnya (9 indikator) tergolong dalam kategori sangat tinggi.

Berdasarkan dokumen perencanaan dan penganggaran, indikator kegiatan sama dengan indikator sub kegiatan, sehingga dalam dokumen LKPJ ini hanya disajikan indikator sub kegiatan. Terlihat dari sebanyak 37 indikator sub kegiatan, semuanya sebanyak 37 indikator telah mencapai target kinerja yang ditetapkan dengan status sangat tinggi. Secara umum kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam dokumen penganggaran dan perjanjian kinerja tergolong baik.

Uraian lebih rinci mengenai capaian kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan, berikut permasalahan yang dihadapi, upaya penanganan, serta tindak lanjut rekomendasi DPRD pada Urusan Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa Dan Politik yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.2.43

Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik yang Dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							**44.877.969.777,00**	**41.636.034.038,00**	**92,78**			
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							**22.454.254.766,00**	**19.622.752.271,00**	**87,39**			
Meningkatnya Kualitas Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**Predikat**	**BB**	**BB**	**100,00**	**ST**						
	Indeks Kepuasan Masyarakat	**Indeks**	**88,55**	**88,63**	**100,09**	**ST**						
	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	**Indeks**	**83,97**	**86,47**	**102,98**	**ST**						
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							**335.631.221,80**	**329.850.084,00**	**98,28**			
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	22	22	100,00	ST	268.525.509,82	264.545.065,00	98,52			
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	7	7	100,00	ST	67.105.711,98	65.305.019,00	97,32			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							**8.994.932.376,20**	**8.690.420.766,00**	**96,61**			
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	61	61	100,00	ST	8.426.861.288,20	8.174.112.006,00	97,00			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
4. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1	100,00	ST	543.902.000,00	493.948.500,00	90,82			
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	100,00	ST	24.169.088,00	22.360.260,00	92,52			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							**171.611.500,00**	**161.599.000,00**	**94,17**			
6. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	61	61	100,00	ST	123.224.000,00	123.224.000,00	100,00			
7. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	1	1	100,00	ST	48.387.500,00	38.375.000,00	79,31			
Administrasi Umum Perangkat Daerah							**1.523.099.569,00**	**1.436.575.149,00**	**94,32**			
8. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	64.217.452,00	63.629.860,00	99,08			
9. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	87.247.800,00	85.550.986,00	98,06			
10. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	100,00	ST	170.355.000,00	144.985.000,00	85,11			
11. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	100,00	ST	1.062.134.621,00	1.006.134.201,00	94,73			
12. Penatausahaan Arsip Dinamis	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	100,00	ST	22.610.427,00	21.430.107,00	94,78			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
pada SKPD												
13. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	1	100,00	ST	116.534.269,00	114.844.995,00	98,55			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							**8.962.668.698,00**	**6.898.686.175,00**	**76,97**			
14. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	15	15	100,00	ST	8.962.668.698,00	6.898.686.175,00	76,97			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**2.149.120.006,00**	**1.796.399.962,00**	**83,59**			
15. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	1.460.956.502,00	1.108.532.739,00	75,88			
16. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	95.002.000,00	94.771.720,00	99,76			
17. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	593.161.504,00	593.095.503,00	99,99			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**317.191.395,00**	**309.221.135,00**	**97,49**			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
18. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	9	9	100,00	ST	296.903.395,00	289.482.935,00	97,50			
19. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	5	100,00	ST	20.288.000,00	19.738.200,00	97,29			
8.01.02. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN							**1.959.964.051,00**	**1.850.151.111,00**	**94,40**			
Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dalam Mewujudkan Kerukunan Bangsa	**Presentase Potensi Konflik Antar Suku dan Etnis di Provinsi Kepulauan Riau yang Tertangani**	**%**	**100**	**100**	**100,00**	**ST**						
	Persentase Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara	**%**	**0,002**	**0,004**	**200,00**	**ST**						
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan							**1.959.964.051,00**	**1.850.151.111,00**	**94,40**			
20. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter	Orang	42	42	100,00	ST	46.828.310,00	9.195.630,00	19,64	efisiensi anggaran karena rencana semula kegiatan		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan									dilaksanakan secara luring/langsung tatap muka. Pada realisasinya dilaksanakan secara daring/online. Sehingga terjadi penghematan anggaran		
21. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	125	125	100,00	ST	281.575.392,00	267.548.184,00	95,02			
22. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Laporan	1	1	100,00	ST	50.609.662,00	42.042.853,00	83,07			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
23. Pelaksanaan tugas purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	1	1	100,00	ST	169.836.439,00	154.090.034,00	90,73			
24. Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	Orang	270	270	100,00	ST	1.411.114.248,00	1.377.274.410,00	97,60			
8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK							**5.273.723.200,00**	**5.270.644.854,00**	**99,94**			
Meningkatnya Etika dan Budaya Politik Melalui Pendidikan Politik	**Persentase Partai Politik yang melakukan Pendidikan Politik Masyarakat**	**%**	**33,33**	**33,33**	**100,00**	**ST**						
Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik							**5.273.723.200,00**	**5.270.644.854,00**	**99,94**			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
25. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	200	200	100,00	ST	56.061.200,00	54.048.659,00	96,41			
26. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	200	200	100,00	ST	5.171.643.200,00	5.170.723.582,00	99,98			
27. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,	Laporan	1	1	100,00	ST	46.018.800,00	45.872.613,00	99,68			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah											
8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN							**2.079.165.000,00**	**1.825.239.562,00**	**87,79**			
Meningkatnya ketertiban Organisasi Kemasyarakatan	**Presentase Ormas/LSM yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan**	**%**	**85**	**99,55**	**117,12**	**ST**						
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan							**2.079.165.000,00**	**1.825.239.562,00**	**87,79**			
28. Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,	Orang	150	150	100,00	ST	177.500.000,00	158.332.182,00	89,20			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah											
29. Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	100	100	100,00	ST	1.855.015.000,00	1.620.932.380,00	87,38			
30. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan	1	1	100,00	ST	46.650.000,00	45.975.000,00	98,55			
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA							**1.120.329.600,00**	**1.112.879.482,00**	**99,34**			
Meningkatnya ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat	**Presentase Potensi Konflik Ekonomi, Budaya, dan Agama di Provinsi Kepulauan Riau yang Tertangani**	**%**	**100**	**100**	**100,00**	**ST**						
Perumusan Kebijakan Teknis dan							**1.120.329.600,00**	**1.112.879.482,00**	**99,34**			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya												
31. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	150	150	100,00	ST	73.290.500,00	66.711.500,00	91,02			
32. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	100	100	100,00	ST	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00			
33. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi	Laporan	1	1	100,00	ST	47.039.100,00	46.167.982,00	98,15			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah											
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL							**11.990.533.160,00**	**11.954.366.758,00**	**99,70**			
Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Konflik Sosial	**Presentase Potensi Konflik Sosial di Daerah yang Tertangani**	**%**	**100**	**100**	**100,00**	**ST**						
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial							**11.990.533.160,00**	**11.954.366.758,00**	**99,70**			
34. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi		120	120	100,00	ST	147.934.500,00	137.988.300,00	93,28			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah											
35. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	150	150	100,00	ST	4.524.922.180,00	4.510.842.238,00	99,69			
36. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Dokumen	1	1	100,00	ST	54.781.900,00	54.364.000,00	99,24			

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025			
Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah												
37. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Dokumen	4	4	100,00	ST	7.262.894.580,00	7.251.172.220,00	99,84			

3.3. Capaian Pelaksanaan Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

Tahun Anggaran 2025 menetapkan sejumlah proyek strategis Provinsi Kepulauan Riau sebagai bagian integral pelaksanaan kebijakan strategis dan prioritas pembangunan daerah. Penetapan proyek strategis tersebut diarahkan untuk memastikan ketercapaian sasaran pembangunan daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Capaian kinerja pelaksanaan masing-masing proyek strategis daerah disajikan secara rinci pada tabel berikut.

Tabel 3.3.1
Realisasi Pelaksanaan Kebijakan/Proyek Strategis Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

No	Perangkat Daerah	No	Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan Tahun 2025										Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
			Kebijakan Strategis	Lokasi	Satuan	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	% Realisasi Kinerja	Pagu Anggaran Tahun 2025	Realisasi Anggaran Tahun 2025	% Realisasi Anggaran Tahun 2025	Keterangan		
1	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAÑ PROVINSI REPULAUAN RIAU		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM										Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 925 Tahun 2025 Tanggal 20 Agustus 2025	
			KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) LINTAS KABUPATEN /KOTA											
			SUB KEGIATAN PENINGKATAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) LINTAS KABUPATEN /KOTA											
		1	Pengembangan Jaringan Peipaan di Kawasan LANUDAL Tanjungpinang	Tanjungpinang	Liter/detik	1	1	100	1.357.500.000,00	403.254.553,20	29,71	Penyerapan Anggaran yang tidak maksimal		

No	Perangkat Daerah	No	Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan Tahun 2025										Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
			Kebijakan Strategis	Lokasi	Satuan	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	% Realisasi Kinerja	Pagu Anggaran Tahun 2025	Realisasi Anggaran Tahun 2025	% Realisasi Anggaran Tahun 2025	Keterangan		
												dikarenakan defisit anggaran (Tunda Bayar)		
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG											
			KEGIATAN PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI											
			SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN, PEMANFAATAN, PELESTARIAN DAN PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI											
		2	Pembangunan Rumah Sakit Angkatan Darat Desa Bengkong Kota Batam (Lanjutan)	Batam	Gedung	1	1	100	2.250.314.200,00	669.188.520,00	29,74	Penyerapan Anggaran yang tidak maksimal dikarenakan defisit anggaran (Tunda Bayar)		
		3	Pembangunan Gedung Dirkrimsus Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, Kota Batam (Lanjutan)	Batam	Gedung	1	1	100	3.253.584.635,00	2.768.211.802,67	85,08	Penyerapan Anggaran yang tidak maksimal dikarenakan defisit anggaran (Tunda Bayar)		
		4	Pembangunan Gedung Persatuan Istri Tentara (Persit) di KOREM 033 WIRA PRATAMA, Tanjungpinang	Tanjungpinang	Gedung	1	1	100	1.461.702.300,00	427.021.380,00	29,21	Penyerapan Anggaran yang tidak maksimal dikarenakan defisit anggaran (Tunda Bayar)		

No	Perangkat Daerah	No	Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan Tahun 2025										Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
			Kebijakan Strategis	Lokasi	Satuan	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	% Realisasi Kinerja	Pagu Anggaran Tahun 2025	Realisasi Anggaran Tahun 2025	% Realisasi Anggaran Tahun 2025	Keterangan		
			SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN, PERAWATAN, DAN PEMERIKSAAN BERKALA BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI											
		5	Rehabilitasi Kantor BLK Km. 8, Kota Tanjungpinang	Tanjungpinang	Gedung	1	1	100	1.472.828.282,50	1.445.656.565,00	98,16			
		6	Pemeliharaan/Renovasi Gedung Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau di Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang	Tanjungpinang	Gedung	1	1	100	3.500.000.000,00	987.627.873,99	28,22	Penyerapan Anggaran yang tidak maksimal dikarenakan defisit anggaran (Tunda Bayar)		
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA											
			KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA											
			SUB KEGIATAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN CAGAR BUDAYA, KAWASAN PARIWISATA, KAWASAN SISTEM PERKOTAAN NASIONAL DAN KAWASAN STRATEGIS LAINNYA											

No	Perangkat Daerah	No	Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan Tahun 2025										Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
			Kebijakan Strategis	Lokasi	Satuan	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	% Realisasi Kinerja	Pagu Anggaran Tahun 2025	Realisasi Anggaran Tahun 2025	% Realisasi Anggaran Tahun 2025	Keterangan		
		7	Penataan Kawasan Taman Gurindam 12 (Lanjutan)	Tanjungpinang	Kawasan	1	1	100	4.432.856.341,00	2.964.199.980,00	66,87	Penyerapan Anggaran yang tidak maksimal dikarenakan defisit anggaran (Tunda Bayar)		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN											
			KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI											
			SUB KEGIATAN REHABILITASI JEMBATAN											
		8	Rehabilitasi Jembatan 2 Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang	Tanjungpinang	Jembatan	1	1	100	3.407.879.740,00	3.406.934.600,00	99,97			
			SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN BERKALA JALAN											
		9	Pemeliharaan Berkala Jalan Simpang Batu 14 - Pelabuhan Tanjung Berlian Kabupaten Karimun (DBH Sawit Provinsi Kepulauan Riau Lanjutan	Karimun	Km	0,265	0,265	100	1.041.000.000,00	1.020.216.400,00	98,00			
			SUB KEGIATAN REKONSTRUKSI JALAN											
		10	Peningkatan Jalan Coastal Area, Kabupaten Karimun	Karimun	Km	0,345	0,345	100	1.414.000.000,00	1.413.080.700,00	99,93			
		11	Rekonstruksi Jl. Pelantar II, Kota Tanjungpinang	Tanjungpinang	Km	24,2	24,2	100	4.450.000.000,00	2.905.510.370,00	65,29	Penyerapan Anggaran yang tidak maksimal dikarenakan defisit anggaran (Tunda Bayar)		

No	Perangkat Daerah	No	Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan Tahun 2025										Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
			Kebijakan Strategis	Lokasi	Satuan	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	% Realisasi Kinerja	Pagu Anggaran Tahun 2025	Realisasi Anggaran Tahun 2025	% Realisasi Anggaran Tahun 2025	Keterangan		
			SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN JEMBATAN											
		12	Pembangunan Jembatan Semala, Kabupaten Natuna	Natuna	Jembatan	1	1	100	12.054.000.000,00	8.825.036.243,69	73,21	Penyerapan Anggaran yang tidak maksimal dikarenakan defisit anggaran (Tunda Bayar)		
			SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN											
		13	Pembangunan Jalan Akses Menuju Makogabwilhan Pulau Dompak (Lanjutan)	Tanjungpinang	Km	0,1862	0,1862	100	1.156.975.300,00	1.149.411.874,00	99,35			
2	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU								**9.905.000.000,00**	**8.478.514.076,00**	**85,60%**		Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1132 Tahun 2025 Tanggal 21 Oktober 2025	Realisasi Anggaran Kecil karena ada Tunda Bayar di Tahun 2025
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN						**660.000.000,00**	**658.373.300,00**	**99,75%**			
			KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITAS RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PROVINSI						660.000.000,00	658.373.300,00	99,75%			
			SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN RUMAH KHUSUS BESERTA PSI_J BAGI KORBAN BENCANA PROVINSI						660.000.000,00	658.373.300,00	99,75%			

No	Perangkat Daerah	No	Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan Tahun 2025										Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
			Kebijakan Strategis	Lokasi	Satuan	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	% Realisasi Kinerja	Pagu Anggaran Tahun 2025	Realisasi Anggaran Tahun 2025	% Realisasi Anggaran Tahun 2025	Keterangan		
		1	Pembangunan Rumah Khusus Bagi Korban Bencana di Kecamatan Serasan	Desa Pangkalan, Kec. Serasan Kab. Natuna	Unit Rumah	2	2	100%	660.000.000,00	658.373.300,00	99,75%	Korban Bencana Tahun 2023		SPM - Urusan Perumahan Rakyat
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN						**5.640.000.000,00**	**5.625.489.400,00**	99,74%			
			KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS 10 (SEPULUH) Ha SAMPAI DENGAN Dl BAWAH 15 (LIMA BELAS) Ha						5.640.000.000,00	5.625.489.400,00	99,74%			
			SUB KEGIATAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DALAM KAWASAN PERMUKIMAN DENGAN LUAS 10 (SEPULUH) Ha SAMPAI DENGAN Dl BAWAH 15 (LIMA BELAS) Ha						4.900.000.000,00	4.889.878.400,00	99,79%			
		2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Temoyong, Kecamatan Bulang, Kota Batam	Batam	Unit Rumah	9	9	100%	400.000.000,00	399.000.000,00	99,75%			Mendukung Program Nasional 3 Juta Rumah, Serta Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem
		3	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kawasan Kumuh Kabupaten Bintan	Bintan	Unit Rumah	40	40	100%	2.000.000.000,00	1.997.239.500,00	99,86%			
		4	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kawasan Kumuh Kabupaten Karimun	Karimun	Unit Rumah	5	5	100%	250.000.000,00	249.811.000,00	99,92%			
		5	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kawasan	Tanjungpinang	Unit Rumah	10	10	100%	500.000.000,00	497.342.200,00	99,47%			

No	Perangkat Daerah	No	Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan Tahun 2025										Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
			Kebijakan Strategis	Lokasi	Satuan	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	% Realisasi Kinerja	Pagu Anggaran Tahun 2025	Realisasi Anggaran Tahun 2025	% Realisasi Anggaran Tahun 2025	Keterangan		
			Kumuh Kota Tanjungpinang											
		6	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kawasan Kumuh Kabupaten Lingga	Lingga	Unit Rumah	35	35	100%	1.750.000.000,00	1.746.485.700,00	99,80%			
			SUB KEGIATAN PELAKSANAAN PEMUGARAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN WAS 10 (SEPULUH) Hn SAMPAI DENGAN DI BAWAH 15 (LIMA BELAS) Ha						740.000.000,00	735.611.000,00	99,41%			
		7	Pembangunan Jalan Lingkungan di Kelurahan Ternoyong, Batam	Batam	Paket	1	1	100%	400.000.000,00	399.161.000,00	99,79%			
		8	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Skala Individual di Pemping	Batam	Paket	1	1	100%	340.000.000,00	336.450.000,00	98,96%			
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)						**3.605.000.000,00**	**2.194.651.376,00**	60,88%			Realisasi Anggaran Kecil karena ada Tunda Bayar di Tahun 2025
			KEGIATAN URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERMUKIMAN						3.605.000.000,00	2.194.651.376,00	60,88%			
			SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERMUKIMAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI PERMUKIMAN						3.605.000.000,00	2.194.651.376,00	60,88%			

No	Perangkat Daerah	No	Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan Tahun 2025										Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
			Kebijakan Strategis	Lokasi	Satuan	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	% Realisasi Kinerja	Pagu Anggaran Tahun 2025	Realisasi Anggaran Tahun 2025	% Realisasi Anggaran Tahun 2025	Keterangan		
		9	Semenisasi Jalan Masuk menuju SMKN 9 Batam	Batam	Paket	1	1	100%	780.000.000,00	689.293.688,00	88,37%			
		10	Pembangunan TPQ Yayasan Al-Hidayah Perumahan PGRI Kelurahan Sungai Binti, Kecamatan Sagulung, Kota Batam	Batam	Paket	1	1	100%	500.000.000,00	439.274.277,00	87,85%			
		11	Penataan PSU Fasilitas Umum Kapling Tiban Madani, Tiban 1 RW 04 Kelurahan Patam Lestari, Sekupang	Batam	Paket	1	1	100%	635.000.000,00	0	0,00%			Tunda Bayar di Tahun 2025
		12	Penataan PSU Fasilitas Umum Perumahan Tiban Palem RW 08 Kelurahan Tiban Baru, Sekupang	Batam	Paket	1	1	100%	840.000.000,00	220.126.773,00	26,21%			30% Sudah di bayar, Sisa Tunda Bayar di Tahun 2025
		13	Semenisasi Jalan di Pulau Kasu, Batam	Batam	Paket	1	1	100%	850.000.000,00	845.956.638,00	99,52%			
3	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU													
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN											
			KEGIATAN PENGELOLAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS											
			SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU											
		1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA di Rempang Galang	Batam	Unit	1	1	100	3.000.000.000,00	2.539.003.554,00	84,63			Peningkatan akses pendidikan dan rasio

No	Perangkat Daerah	No	Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan Tahun 2025										Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
			Kebijakan Strategis	Lokasi	Satuan	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	% Realisasi Kinerja	Pagu Anggaran Tahun 2025	Realisasi Anggaran Tahun 2025	% Realisasi Anggaran Tahun 2025	Keterangan		
														siswa perkelas
			SUB KEGIATAN PENGADAAN PERLENGKAPAN PESERTA DIDIK											
		2	Seragam Siswa SMA	Provinsi Kepulauan Riau	Paket	1	1	100	5.935.494.986,20	5.021.283.883,00	84,60			Peningkatan akses dan pengurangan biaya pendidikan masyarakat
			SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU											
		3	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMAN 25 Batam	Batam	Ruang	6	6	100	2.100.000.000,00	1.703.407.550,00	100			Peningkatan akses pendidikan dan rasio siswa perkelas
		4	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMAN 26 Batam	Batam	Ruang	6	6	100	3.300.000.000,00	2.749.493.949,00	83,32			Peningkatan akses pendidikan dan rasio siswa perkelas
		5	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMAN 29 Batam	Batam	Ruang	4	4	100	1.900.000.000,00	1.531.878.228,00	80,63			Peningkatan akses pendidikan dan rasio siswa perkelas
			KEGIATAN PENGELOLAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN											
			SUB KEGIATAN PENGADAAN											

No	Perangkat Daerah	No	Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan Tahun 2025										Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
			Kebijakan Strategis	Lokasi	Satuan	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	% Realisasi Kinerja	Pagu Anggaran Tahun 2025	Realisasi Anggaran Tahun 2025	% Realisasi Anggaran Tahun 2025	Keterangan		
			PERLENGKAPAN PESERTA DIDIK											
		6	Seragam Siswa SMK	Provinsi Kepulauan Riau	Paket	1	1	100	4.915.787.000,00	4.601.402.659,00	93,60			Peningkatan akses dan pengurangan biaya pendidikan masyarakat
			SUB KEGIATAN PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA PESERTA DIDIK											
		7	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Provinsi Kepulauan Riau	Paket	12	12	100	12.303.466.000,00	10.779.788.286,00	87,62			
			SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU											Peningkatan akses dan kualitas pendidikan
		8	Pembangunan Ruang Kelas Baru di SMKN IO BATAM	Batam	Ruang	4	6	150	2.021.634.750,00	1.690.532.675,00	83,62			Peningkatan akses pendidikan dan rasio siswa perkelas
		9	Pembangunan Ruang Kelas Baru di SMKN 11 BATAM	Batam	Ruang	4	4	100	2.781.558.000,00	2.770.790.008,00	99,61			Peningkatan akses pendidikan dan rasio siswa perkelas
			KEGIATAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS											
			SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU											

No	Perangkat Daerah	No	Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan Tahun 2025										Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
			Kebijakan Strategis	Lokasi	Satuan	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	% Realisasi Kinerja	Pagu Anggaran Tahun 2025	Realisasi Anggaran Tahun 2025	% Realisasi Anggaran Tahun 2025	Keterangan		
		10	Lanjutan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SLBN 2 Batam	Batam	Unit	1	1	100	1.400.000.000,00	1.193.765.493,00	85,27			Peningkatan akses pendidikan dan rasio siswa perkelas
4	DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU													
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT											
			KEGIATAN PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI											
			SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA											
		1	Pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) Tier III Tingkat Provinsi Kepulauan Riau	Tanjungpinang	Unit	1	1	100	18.025.309.400	17.658.576.240	97,97			
			SUB KEGIATAN PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK											

No	Perangkat Daerah	No	Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan Tahun 2025										Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
			Kebijakan Strategis	Lokasi	Satuan	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	% Realisasi Kinerja	Pagu Anggaran Tahun 2025	Realisasi Anggaran Tahun 2025	% Realisasi Anggaran Tahun 2025	Keterangan		
			FASILITAS LAYANAN KESEHATAN											
5	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU													
			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN											
			KEGIATAN PENGELOLAAN ANEKA ENERGI BARU TERBARUKAN BERUPA SINAR MATAHARI, ANGIN, ALIRAN DAN TERJUNAN AIR, GERAKAN DAN PERBEDAAN SUHU LAPISAN LAUT DALAM WILAYAH PROVINSI											
			SUB KEGIATAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMANFAATAN ANEKA EBT											
		1	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Tenaga Surya	Batam, Karimun, Tanjungpinang	Unit	712	723	101,5	19.628.010.400	19.537.660.200	99,5			Memperluas akses penerangan jalan di Lingkungan Masyarakat dan wilayah yang belum terjangkau jaringan listrik,serta

No	Perangkat Daerah	No	Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan Tahun 2025										Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
			Kebijakan Strategis	Lokasi	Satuan	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	% Realisasi Kinerja	Pagu Anggaran Tahun 2025	Realisasi Anggaran Tahun 2025	% Realisasi Anggaran Tahun 2025	Keterangan		
														Mengurangi konsumsi energi listrik berbasis fosil dan biaya operasional penerangan jalan melalui pemanfaatan energi surya.
			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN											
			KEGIATAN PENGANGGARAN UNTUK KELOMPOK MASYARAKAT TIDAK MAMPU, PEMBANGUNAN SARANA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK BELUM BERKEMBANG, DAERAH TERPENCIL DAN PERDESAAN											
			SUB KEGIATAN PENETAPAN PENERIMA MANFAAT DARI KELOMPOK MASYARAKAT TIDAK MAMPU											
		2	Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL)	Batam	Unit	73	73	100	211.374.420	201.621.500	95,4			Membantu Rumah Masyarakat tidak mampu yang belum berlistrik
6	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI													

No	Perangkat Daerah	No	Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan Tahun 2025										Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
			Kebijakan Strategis	Lokasi	Satuan	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	% Realisasi Kinerja	Pagu Anggaran Tahun 2025	Realisasi Anggaran Tahun 2025	% Realisasi Anggaran Tahun 2025	Keterangan		
	KEPULAUAN RIAU													
			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN											
			KEGIATAN PEMBANGUNAN, PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL											
			SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL											
		1	Pengadaan dan Pemasangan Dermaga Apung HDPE Pelabuhan Jagoh	Lingga	Unit	1	1	100%	2.895.421.128,00	933.140.932,30	32	Realisasi Anggaran tidak 100% karena terjadi tunda bayar		
		2	Pembangunan Pelabuhan Tanjung Permai Kampung Beko Pulau Kasu	Batam	Unit	1	1	100%	1.359.838.000,00	609.718.400,76	45	Realisasi Anggaran tidak 100% karena terjadi tunda bayar		
7	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU													
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP						**13.496.177.809,12**	**12.957.686.423,12**	**96,01**			
			KEGIATAN PENGELOLAAN RUANG						**12.814.608.014,12**	**12.302.209.912,00**	**96,00**			

No	Perangkat Daerah	No	Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan Tahun 2025									Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
			Kebijakan Strategis	Lokasi	Satuan	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	% Realisasi Kinerja	Pagu Anggaran Tahun 2025	Realisasi Anggaran Tahun 2025	% Realisasi Anggaran Tahun 2025	Keterangan		
			LAUT SAMPAI DENGAN 12 MIL DI WAR MINYAK DAN GAS BUMI											
			SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PRASARANA USAHA PERIKANAN TANGKAP						6.768.192.500,00	6.558.772.384,00	96,91			
		1	Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Nelayan Kecil	Provinsi Kepulauan Riau	Orang	31.304	31.304	100%	6.310.886.400,00	6.300.487.200,00	99,84			
			SUB KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA USAHA PERIKANAN TANGKAP			5310	5310	100%	6.046.415.514,12	5.733.038.328,00	94,82			
		2	Penyediaan Bantuan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap kepada Nelayan Kecil	Provinsi Kepulauan Riau	Unit	5310	5310	100%	5.551.873.620,00	5.263.035.880,00	94,80			
			KEGIATAN PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN SERTA PENGELOLAAN PELAB PERIKANAN PROVINSI						648.218.995,00	622.765.951,12	96,07			
			SUB KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PELABUHAN PERIKANAN		Unit	1	1	100%	546.524.595,00	541.593.951,12	99,10			
		3	Pembangunan Tambatan Perahu untuk nelayan di Kabupaten Karimun	Karimun	Unit	1	1	100%	472.890.315,00	472.054.632,12	99,82	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi dan Belanja di serahkan kepada masyarakat (Pembangunan)		
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA						**2.887.067.836,00**	**2.746.081.044,80**	**95,12**			

No	Perangkat Daerah	No	Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan Tahun 2025										Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
			Kebijakan Strategis	Lokasi	Satuan	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	% Realisasi Kinerja	Pagu Anggaran Tahun 2025	Realisasi Anggaran Tahun 2025	% Realisasi Anggaran Tahun 2025	Keterangan		
			KEGIATAN PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN DI LAUT						**2.853.672.103,00**	**2.712.685.311,80**	**95,06**			
			SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PRASARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN DI LAUT		Unit	7	7	100%	157.567.182,00	132.123.751,00	83,85			
		4	Bantuan Jaring Keramba untuk Pembudidayaan Ikan di Laut	Bintan	Unit	7	7	100%	30.821.259,00	20.923.500,00	67,89	Hanya belanja jaring keramba		
			SUB KEGIATAN PENJAMINAN KETERSEDIAAN SARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN DI LAUT		Unit	8	8	100%	1.111.987.230,00	1.062.046.100,00	95,51	Terdapat tunda bayar T.A 2024 sebesar 109.900.000,00		
		5	Bantuan Bibit Ikan dan Pakan Ikan untuk Pembudidayaan Ikan di Laut	Provinsi Kepulauan Riau	Ekor	3022	3022	100%	999.940.000,00	959.771.000,00	95,98			
8	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KEPULAUAN RIAU													

No	Perangkat Daerah	No	Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan Tahun 2025										Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
			Kebijakan Strategis	Lokasi	Satuan	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	% Realisasi Kinerja	Pagu Anggaran Tahun 2025	Realisasi Anggaran Tahun 2025	% Realisasi Anggaran Tahun 2025	Keterangan		
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN											
			KEGIATAN PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN /KOTA											
			SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN KEWENANGAN PROVINSI											
		1	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Pekerjaan Renovasi Rumah Perlindungan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak)	Tanjungpinang	Paket	1	1	100	2.548.857.363,00	2.235.511.300,00	87,71	DAK Fisik PPA	Peraturan Presiden (Peres) Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 dan Surat Kementerian	Peningkatan Pelayanan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi Melalui Renovasi Rumah Perlindungan UPTD dan Penyediaan Peralatannya

No	Perangkat Daerah	No	Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan Tahun 2025										Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
			Kebijakan Strategis	Lokasi	Satuan	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	% Realisasi Kinerja	Pagu Anggaran Tahun 2025	Realisasi Anggaran Tahun 2025	% Realisasi Anggaran Tahun 2025	Keterangan		
													PPA RI Nomor: B-241/Setmen.Birorenkeu/PR.02/11/2024	
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK											
			KEGIATAN PENYEDIAAN LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH PROVINSI											
			SUB KEGIATAN KOORDINASI PELAKSANAAN LAYANAN AMPK KEWENANGAN PROVINSI											
		2	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Pekerjaan Renovasi Gedung Kantor UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak)	Tanjungpinang	Paket	1	1	100	1.766.185.375,00	1.492.190.890,00	84,49	DAK Fisik PPA	Peraturan Presiden (Peres) Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 dan Surat Kementerian PPA RI Nomor: B-	Peningkatan Pelayanan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi Melalui Renovasi Gedung Kantor UPTD PPA dan Penyediaan Peralatannya

No	Perangkat Daerah	No	Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan Tahun 2025										Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
			Kebijakan Strategis	Lokasi	Satuan	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	% Realisasi Kinerja	Pagu Anggaran Tahun 2025	Realisasi Anggaran Tahun 2025	% Realisasi Anggaran Tahun 2025	Keterangan		
													241/Setmen.Birorenkeu/PR.02/11/2024	
9	RSUD RAJA AHMAD TABIB PROVINSI KEPULAUAN RIAU													
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT											
			KEGIATAN PENYEDIAAN FASILITAS, SAMNA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM dan UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI											
			SUB KEGIATAN PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS LAYANAN KESEHATAN											
		1	Bronchoscopy	Tanjungpinang	1	1	1	100%	2.500.000.000,00	2.408.000.000,00	96	Memenuhi Alat kesehatan di Ruangan Operasi	Peraturan gubernur Nomor 1132 Tahun 2025	melengkapi alat kesehatan diruangan sehingga dapat lebih optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

No	Perangkat Daerah	No	Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan Tahun 2025										Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
			Kebijakan Strategis	Lokasi	Satuan	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	% Realisasi Kinerja	Pagu Anggaran Tahun 2025	Realisasi Anggaran Tahun 2025	% Realisasi Anggaran Tahun 2025	Keterangan		
		2	Treadmill	Tanjungpinang	1	1	1	100%	500.000.000,00	459.000.000,00	92	Memenuhi Alat kesehatan di Poliklinik	Peraturan gubernur Nomor 1132 Tahun 2025	melengkapi alat kesehatan diruangan sehingga dapat lebih optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
10	RSJKO ENGKU HAJI DAUD PROVINSI KEPULAUAN RIAU													
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT											
			KEGIATAN PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SAMNA, PRASARANA DAN ALAT											
			SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	tanjung uban	Unit	75	75	100	35.495.700.000	33.911.619.272	95,54			

3.4. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD

Perangkat daerah telah melaksanakan berbagai langkah tindak lanjut atas rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun Anggaran sebelumnya. Tindak lanjut tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan program, serta akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun Anggaran 2024 oleh masing-masing perangkat daerah disajikan secara sistematis pada tabel berikut.

Tabel 3.3.1
Tindak lanjut terhadap rekomendasi DPRD atas LKPJ Tahun Anggaran Sebelumnya (2024)

Perangkat Daerah	No	Rekomendasi DPRD LKPJ Tahun Sebelumnya	Tindak lanjut (Program/Kegiatan/Regulasi/ Kebijakan/Anggaran) di Tahun 2025/2026	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
Dinas Pendidikan	1	Prioritaskan Belanja Modal untuk Sarana Pendidikan Dorong peningkatan belanja pembangunan ruang kelas baru, laboratorium, dan perpustakaan yang berdampak jangka panjang terhadap mutu pendidikan.	Dinas Pendidikan di Tahun 2025 telah Melaksanakan Belanja Pembangunan seperti : 1. Pembangunan Unit sekolah baru SMA 2. Pembangunan Ruang Kelas Baru Untuk jenjang SMA sebanyak 20 Ruang kelas, SMK sebanyak 10 Ruang. 3. dan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah, Meningkatkan kualitas pendidikan, pemerataan akses dan kualitas pendidikan dan rasio siswa perkelas
	2	Tertibkan Administrasi Pembayaran untuk Cegah Tunda Bayar Pastikan proses administrasi keuangan lebih tertib dan terencana, agar tidak terjadi pengajuan TU/SP2D yang terlambat pada akhir tahun anggaran.	Dinas Pendidikan di Tahun 2025 telah Melaksanakan kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD secara tertib, namun karena kebijakan efisiensi anggaran tunda bayar tidak dapat dihindarkan.	Tertib administrasi tata kelola keuangan
	3	Evaluasi Program Seragam dan SPP Gratis Review efektivitas dan distribusi program bantuan seragam dan SPP gratis, serta pastikan penerima tepat sasaran berdasarkan data keluarga tidak mampu (DTKS).	Pelaksanaan Pemberian Seragam Gratis dan SPP gratis adalah dalam rangka mengurangi biaya pendidikan bagi orang tua. Pemberian seragam diberikan kepada semua peserta didik baru, sedangkan SPP Gratis diberikan kepada semua peserta didik.	Meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Putus Sekolah dan mengurangi pengeluaran pendidikan
	4	Segera Bayarkan Kegiatan Strategis yang Tertunda Kegiatan seperti pembangunan RKB, pelatihan guru, dan pengadaan sarana peserta didik harus menjadi prioritas utama pembayaran pada tahun berjalan.	Tunda Bayar Tahun 2024 telah di anggarkan di Tahun 2025 dan sudah terealisasi.	Penyelesaian kewajiban Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

Perangkat Daerah	No	Rekomendasi DPRD LKPJ Tahun Sebelumnya	Tindak lanjut (Program/Kegiatan/Regulasi/ Kebijakan/Anggaran) di Tahun 2025/2026	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	5	Tingkatkan Kualitas Pelaporan Output Kegiatan Laporan capaian kinerja kegiatan tidak hanya secara fisik dan keuangan, tetapi juga hasil/impact kepada peserta didik dan sekolah.	Dinas Pendidikan di tahun 2025 telah melaksanakan kegiatan secara optimal yang mengarah pada peningkatan kualitas peserta didik dan sekolah.	
	6	Pastikan Program Link & Match SMK Berdampak Nyata Program pemagangan, penyelarasan kurikulum, dan kerja sama industri perlu ditindaklanjuti dengan data konkret penyerapan lulusan SMK.	Program *Link & Match* SMK melalui pemagangan, tracer study, perlibatan DUDI secara aktif, penyelarasan kurikulum,kebutuhan pasar kerja dan kerja sama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dilaksanakan dan ditindaklanjuti secara terukur dan berkelanjutan agar memberikan dampak nyata. Implementasi program dibuktikan dengan meningkatnya **penyerapan lulusan SMK pada DUDI**	Meningkatnya kualitas dan penyerapan peserta di pada DUDI pada DUDI
	7	Alokasikan Anggaran Ekstrakurikuler secara Merata Dinas perlu menjamin setiap sekolah mendapat akses anggaran untuk pengembangan karakter, seni, olahraga, dan kegiatan siswa non akademik.	Alokasi anggaran telah disediakan secara proporsional untuk kegiatan ekstrakurikuler dalam rangka penjaringan bakat dan minat siswa	Mengembangkan karakter dan potensi peserta didik dengan mempertimbangkan minat dan bakat
	8	Perkuat Sistem Informasi Pendidikan Bangun dashboard data terintegrasi untuk memantau jumlah siswa, kebutuhan ruang kelas, guru, dan bantuan pendidikan secara real time.	Dashboard Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau telah ditayangkan dalam website disdik yang berisi berbagai informasi untuk berbagai kebutuhan masyarakat, guru dan ASN. Di berbagai satuan pendidikan dikembangkan berbagai aplikasi dalam rangka penyelenggaraan administrasi pendidikan	Kemudahan informasi, transparansi dan kemudahan pelayanan administrasi pendidikan untuk guru, masyarakat dan peserta didik
	9	Maksimalkan Fungsi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Monev harus dilakukan rutin dan mendalam untuk setiap kegiatan/sub kegiatan, terutama yang berulang setiap tahun.	Tindak lanjut Monev yang dilakukan menetapkan jadwal dan berkelanjutan, menyusun instrumen yang berstandar, memperkuat analisis sebagai rekomendasi dan tindak lanjut monev yang berkelanjutan demi perbaikan.	Peningkatan kualitas dan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, transparansi dan penguatan basis data sebagai sumber perencanaan
	10	Libatkan Komite Sekolah dalam Penyusunan Program Partisipasi masyarakat melalui komite sekolah penting dalam merancang program yang relevan dan menjawab kebutuhan nyata di lapangan.	Langkah strategis dalam penyusunan dan merancang kegiatan strategis serta relevan, satuan pendidikan selalu melibatkan komite sekolah secara aktif yang bertindak sebagai mitra satuan pendidikan sehingga mampu	Memperkuat sinergi, transparansi, akuntabilitas dan dukungan masyarakat dalam pengelolaan program dan

Perangkat Daerah	No	Rekomendasi DPRD LKPJ Tahun Sebelumnya	Tindak lanjut (Program/Kegiatan/Regulasi/ Kebijakan/Anggaran) di Tahun 2025/2026	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
			menjembatani antara tujuan sekolah dengan kepentingan peserta didik dan kebutuhan masyarakat	peningkatan kualitas pendidikan
	11	Rehabilitasi dan Perawatan Sekolah Harus Terjadwal Pastikan kegiatan rehabilitasi ringan, sedang, dan berat gedung sekolah dilakukan berdasarkan audit teknis dan skala prioritas.	Pengawasan kegiatan rehabilitas sekolah dilakukan secara ketat dan terjadwal, pengawasan bahkan dimulai sebelum kontrak hingga penyerahan aset dan masa pemeliharaan	Pekerjaan tepat waktu, berkwalitas dan fungsional
	12	Cegah Ketimpangan Fasilitas Antar Sekolah Distribusi bantuan sarana-prasarana dan tenaga pendidik perlu mempertimbangkan disparitas geografis antar wilayah dan antar sekolah negeri.	Distribusi penyediaan sarana dan prasarana diarahkan untuk memperkuat akses dan kualitas di daerah 3T termasuk distribusi guru yang berimbang	Angka Partisipasi sekolah dan peningkatan kualitas pendidikan antar wilayah
	13	Wujudkan Kepastian Status Tanah Sekolah Percepat penyelesaian legalitas aset lahan sekolah, terutama untuk sekolah yang akan dibangun atau direnovasi menggunakan DAK.	Pembangunan USB mengutamakan status lahan dari sisi regulasi dan percepatan administrasi penyelesaian aset	Kepastian hukum aset pendidikan
	14	Revisi Kegiatan yang Tidak Mendukung Indikator RPJMD Hentikan kegiatan administratif yang tidak memiliki kontribusi langsung terhadap pencapaian indikator RPJMD dan kinerja pendidikan.	Pelaksanan Kegiatan Dinas Pendidikan di Tahun 2025 telah mengacu kepada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisien Belanja APBD Tahun 2025 dan dalam rangka mendukung pencapaian RPJMD Dinas Pendidikan telah melaksanakan Program ASTACITA	Efisiensi dan kegiatan mendukung Indikator OPD dan RPJMD
	15	Susun Proyeksi Kebutuhan RKB (Ruang Kelas Baru) dan GTK (Guru dan Tenaga Kependidikan) Lima Tahun ke Depan Dinas perlu membuat proyeksi berbasis data demografis dan zonasi agar pembangunan ruang kelas dan penempatan guru lebih akurat dan terencana.	Sedang dilakukan pendalaman data, peta kebutuhan berbasis zonasi, analisis kebutuhan dan anggaran, analisis permasalahan secara komprehensif di antar wilayah, sinkronisasi lintas sektor dan mengsinkronisasikan dengan RPJMD dan kemampuan keuangan	Rencana Terukur, terarah, penempatan guru proporsional, efisiensi anggaran, mengurangi risiko kelas berlebih pada suatu wilayah dan memperkuat perencanaan lintas sektor
Dinas Kesehatan	1	Lakukan audit kepegawaian internal untuk mengklarifikasi status 35 ASN tersebut.		
	2	Sinkronisasi sistem informasi kepegawaian (BKD) dengan sistem keuangan dan perencanaan anggaran.	Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau telah menggunakan Sistem SILAT BKD dalam pengelolaan data kepegawaian, dengan jumlah pegawai sebanyak 96 orang PNS dan 79 orang PPPK. Dalam perencanaan dan penganggaran gaji pegawai, telah dilakukan pemetaan data SILAT dengan sistem keuangan provinsi untuk menghitung kebutuhan anggaran.	

Perangkat Daerah	No	Rekomendasi DPRD LKPJ Tahun Sebelumnya	Tindak lanjut (Program/Kegiatan/Regulasi/ Kebijakan/Anggaran) di Tahun 2025/2026	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
			Dengan demikian, pembayaran gaji telah sesuai dengan jumlah pegawai yang ada.	
	3	Evaluasi beban kerja aktual dibandingkan jumlah ASN riil yang dibayar.	Analisis beban kerja dan kebutuhan pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1395 Tahun 2024, kebutuhan ASN ditetapkan sebanyak 406 orang, sementara ASN yang tersedia berdasarkan peta jabatan sebanyak 185 orang, sehingga masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 221 orang. Namun demikian, pembayaran gaji dan tunjangan telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan karena hanya dibayarkan kepada ASN yang berstatus sah dan aktif melaksanakan tugas	
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR)	1	Audit kebutuhan jembatan provinsi berdasarkan peta jaringan jalan 600 km dan overlay dengan peta geografi/hidrologi.	sudah dilaksanakan pembangunan jembatan semala pada ruas jalan batubi-klarik, Kab. Natuna dengan panjang 30 meter. Untuk kebutuhan pembangunan jembatan yang belum ditangani yaitu: 1. Jembatan pada ruas jalan batubi-klarik dengan panjang 15 meter. 2. Jembatan pada ruas jalan setajam serteh Kab. Lingga dengan panjang 30 meter. 3. Jembatan pulau parit-pulau lumut Kab.Karimun. 4. Jembatan pulau parit-pulau papan Kab. Karimun. Untuk jembatan dengan kondisi rusak yang membutuhkan rekonstruksi antara lain: 1. Jembatan letung - kuala maras 01, 2. ·jembatan letung - kuala maras 02, 3. ·jembatan letung - kuala maras 03, 4. ·jembatan letung - bandara 01, 5. ·jembatan letung - bandara 02	sebagai konektivitas antar daerah
	2	Susun Rencana Induk Jembatan Provinsi sebagai turunan dari Rencana Jaringan Jalan Daerah (RJJD) 2021–2041.	Pada tahun 2025 sudah dilakukan pengajuan penganggaran, namun belum dapat diakomodir karena belum adanya ketersediaan anggaran tersebut.	akan diusulkan kembali pada tahun anggaran berikutnya
	3	Masukkan pembangunan jembatan sebagai prioritas utama dalam RKPD dan KUA-PPAS 2026–2027.	Pembangunan jembatan sudah dimasukkan dalam dokumen RKPD 2026 dan menjadi salah satu prioritas dalam komponen penyusun indeks infrastruktur RPJMD tahun 2025 - 2029	Pembangunan jembatan prioritas dalam RKPD dan KUA - PPAS 2026 - 2027

Perangkat Daerah	No	Rekomendasi DPRD LKPJ Tahun Sebelumnya	Tindak lanjut (Program/Kegiatan/Regulasi/ Kebijakan/Anggaran) di Tahun 2025/2026	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	4	Optimalisasi tugas pembantuan dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat untuk pembangunan jembatan di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).	Syarat yang harus dipenuhi dalam menentukan pembangunan jembatan pada tugas pembantuan dan DAK yaitu: 1. Termasuk ke dalam ruas jalan provinsi. 2. Menjadi akses utama dalam daerah. 3. Ketersediaan Dokumen Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL). 4. DED meliputi gambar dan Owner Estimate (OE)	mengoptimalkan dana dari pusat terkait pembangunan jembatan di daerah 3T
	5	Lakukan sinkronisasi program jembatan dengan kabupaten/kota, terutama jembatan strategis lintas batas administratif.	Sudah dilakukan koordinasi antara kab. Bintan dan kota tanjungpinang terkait jembatan yang menghubungkan kedua daerah tersebut, namun secara geografis kedua daerah tersebut tidak memerlukan jembatan dan hanya berupa jalan. Koordinasi tersebut akan terus dilakukan setiap tahunnya.	Sudah dilakukan sinkronisasi
	6	Reformulasi struktur belanja penataan ruang, alokasikan minimal 1 2% dari total belanja Dinas PUPR untuk penataan ruang.	1. Pada tahun 2025 anggaran penataan ruang sebesar Rp 920,672,103 (0,67%) dari total pagu anggaran Rp 138,175,806,364 2. Pada tahun 2026 Rp 970,949,301 (0.36%) dari total pagu anggaran OPD 269.708.139.204, berdasarkan progres dokumen RTRW tahun 2026 hampir selesai.	meningkatkan capaian kinerja dalam penetapan dokumen penataan ruang
	7	Integrasikan rencana tata ruang dalam pembangunan jalan, jembatan, dan irigasi, agar pembangunan infrastruktur sejalan dengan kebijakan ruang.	dalam penyusunan rtrw sudah memuat rencana sektor-sektor terkait termasuk pembangunan jalan, irigasi, sda, pelabuhan dll.	integrasi rencana tata ruang dalam pembangunan jalan, jembatan, dan irigasi
	8	Prioritaskan penyusunan dan pemutakhiran RTRW dan RDTR kawasan strategis (perbatasan, kawasan pertumbuhan ekonomi, pesisir).	Dokumen RTRW provinsi sudah disusun namun masih dalam proses penetapan Perda Dokumen RDTR menjadi kewenangan kabupaten/kota	Penyusunan Dokumen RTRW menjadi dasar dalam implementasi Penataan Ruang di Kepulauan Riau
	9	Perkuat koordinasi lintas OPD, terutama dengan Dinas Lingkungan Hidup, Perhubungan, Kelautan, dan Bappeda.Evaluasi ulang skema belanja pada urusan wajib, terutama belanja modal, agar tidak terkena tunda bayar.	dalam proses perencanaan pembangunan pada setiap tahun anggaran, berdasarkan permendagri nomor 86 tahun 2017 meliputi persiapan penyusunan awal, penyusunan rancangan musrembang, penyusunan rancangan akhir KUA-PPAS, sampai kepada nota keuangan setiap proses diatas selalu	penguatan koordinasi lintas opd dan evaluasi skema belanja dan pengendalian kas daerah

Perangkat Daerah	No	Rekomendasi DPRD LKPJ Tahun Sebelumnya	Tindak lanjut (Program/Kegiatan/Regulasi/ Kebijakan/Anggaran) di Tahun 2025/2026	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	10	Perkuat fungsi cash flow forecasting dan pengendalian kas daerah, agar belanja wajib memiliki jaminan pembayaran.	melibatkan stakeholder terkait seperti bappeda, bpkad, biro pembangunan dengan mempertimbangkan skema belanja pada urusan wajib dan pelayanan dasar sesuai dengan tupoksi masing-masing OPD.	
	11	Susun prioritas pembayaran dan proyek berdasarkan urgensi pelayanan dasar, bukan hanya nilai anggaran.	Dinas PUPP pada tahun 2025 sudah mengikuti rekomendasi terkait penyusunan prioritas pembayaran, pembayaran kegiatan fisik/nonfisik dilakukan setelah selesai pekerjaan dan pengajuan seluruh SPM sesuai dengan batas waktu penginputan tanpa mengecualikan berdasarkan nilai anggaran	prioritas pembayaran proyek pelayanan dasar
	12	Pastikan tidak ada lagi tunda bayar pada urusan wajib pelayanan dasar, sesuai prinsip money follows program.	Dinas PUPP sudah menerapkan sesuai dengan prinsip money follows program, namun tunda bayar terjadi dikarenakan kurangnya kemampuan anggaran dan menjadi kewenangan BKAD selaku pengelola keuangan daerah.	sudah menerapkan prinsip money follows program
	13	Tingkatkan disiplin dan integrasi perencanaan-rencana kas pelaksanaan agar urusan wajib tidak terkompromikan akibat defisit.	Dinas pupp sudah melaksanakan sesuai rekomendasi yang diberikan sehingga urusan wajib tidak terkompromi akibat defisit. Perlu pemahaman yang komprehensif bahwa pagu anggaran yang direncanakan di dokumen perencanaan sampai kepada penyusunan KUA-PPAS masih bersifat indikatif, sedangkan proses nota keuangan sampai menjadi dokumen DPA itu adalah pagu yang sudah final, namun begitu tidak menutup kemungkinan adanya kebijakan anggaran baik dari pusat maupun daerah yang mempengaruhi proses pelaksanaan pembangunan yang berdampak kepada kebijakan defisit anggaran	peningkatan disiplin dan integritas Perencanaan - Rencana kas urusan wajib agar tidak terkompromi akibat defisit
	14	Revisi pendekatan perencanaan berbasis lahan dan kesiapan teknis untuk memastikan program tidak mandek karena aspek non anggaran.	pada umumnya dalam proses pembangunan infrastruktur khususnya, salah satu readiness criteria yang harus disiapkan adalah kesiapan lahan namun begitu beberapa hal yang menjadi kendala adalah 1. proses pengadaan/pembebasan lahan yang membutuhkan waktu cukup lama. 2. kesiapan anggaran untuk pembebasan lahan juga sangat	kesiapan teknis dalam menjalankan program agar tidak berhenti.

Perangkat Daerah	No	Rekomendasi DPRD LKPJ Tahun Sebelumnya	Tindak lanjut (Program/Kegiatan/Regulasi/ Kebijakan/Anggaran) di Tahun 2025/2026	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
			minim dan bahkan melibatkan stakeholder atau pemerintah daerah lainnya yang menjadi sharing cost sering tidak terpenuhi.	
	15	Tingkatkan efisiensi penganggaran dengan penguatan budget tagging pada indikator RPJMD.	pagu anggaran yang ditetapkan pada RPJMD tahun 2025 - 2029 telah melalui proses penyesuaian proyeksi pendapatan daerah yang bersumber dari badan pendapatan daerah melalui koordinasi bappeda, adapun pagu setiap indikator RPJMD telah disesuaikan dengan target yang direncanakan.	penguatan budget tagging pada indikator RPJMD
	16	Evaluasi struktural jumlah Non-ASN dan tetapkan strategi penguatan kelembagaan melalui peningkatan kompetensi ASN teknis.	tahun 2025 DPUPP tidak ada lagi Non-ASN karena pada bulan november semua tenaga Non-ASN sudah diangkat PPPK peningkatan kompetensi ASN teknis sudah dilakukan dengan cara menganggarkan pelatihan setiap tahunnya	evaluasi struktural jumlah non-ASN dan penguatan kelembagaan melalui peningkatan kompetensi ASN
	17	Penguatan sistem manajemen kas dan belanja multiyears agar tunda bayar tidak berulang.	penguatan sistem manajemen kas dilaksanakan melalui sistem SIPD dengan berkoordinasi kepada BKAD dan untuk belanja multiyears adalah salah satu kebijakan anggaran yang salah satu fungsinya agar menghindari adanya tunda bayar, dimana dengan sistem multiyears beban anggaran dibagi dalam beberapa tahun sehingga ruang fiskal lebih terjaga.	penguatan sistem manajemen kas dan belanja multiyears
DPUPR (PERTANAHAN)	1	Kembangkan indikator kinerja yang bersifat outcome-based (berbasis hasil), bukan hanya output administratif.		
	2	Perluasan cakupan kegiatan yang mendukung penguatan akses lahan bagi masyarakat, pengendalian pemanfaatan ruang, serta sinergi lintas sektor (seperti Dinas Perumahan, LH, dan Perikanan).		
	3	Lakukan review dan pembaruan Renstra Sub Urusan Pertanahan untuk lebih selaras dengan visi RPJMD 2021–2026 yang menitikberatkan pembangunan berkelanjutan dan keadilan akses ruang.		

Perangkat Daerah	No	Rekomendasi DPRD LKPJ Tahun Sebelumnya	Tindak lanjut (Program/Kegiatan/Regulasi/ Kebijakan/Anggaran) di Tahun 2025/2026	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Sub Kegiatan tersebut dimunculkan kembali pada Tahun 2025, untuk Pembayaran Honorarium Tenaga Ahli yang belum dibayar pada Tahun 2024	Tunda Bayar Tahun 2024 sudah terpenuhi
	2	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Tidak terdapat Sub Kegiatan dimaksud pada Tahun Anggaran 2024	
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA URUSAN KETENTRAMAN KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1	Peningkatan Alokasi Anggaran Direkomendasikan untuk mengkaji ulang rasionalisasi anggaran agar tidak menghambat pelaksanaan kegiatan penting seperti pelatihan aparatur dan penegakan Perda. Anggaran yang cukup untuk kegiatan strategis harus diutamakan untuk memastikan keberlanjutan program.		
	2	Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi SDM Peningkatan pelatihan bagi aparatur Satpol PP perlu dilakukan secara konsisten. Fokuskan pada pengembangan kompetensi yang relevan dengan tugas dan fungsi mereka dalam menjaga ketertiban dan penegakan hukum.	Pada tahun 2025 telah dilaksanakan peningkatan kompetensi SDM melalui pelaksanaan program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum, pada kegiatan Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	Menjamin peningkatan SDM Aparatur Satpol PP
			Program Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	
			Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	
			Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	
	3	Optimalisasi Koordinasi dengan OPD Meningkatkan koordinasi antara Satuan Polisi Pamong Praja dan OPD terkait untuk memaksimalkan penerapan perda/perkada. Sosialisasi yang lebih intensif perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya aturan yang ada.	Pada tahun 2025 telah dilakukan pelaksanaan penegakan perda/perkada melalui pelaksanaan program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum, pada kegiatan penegakan peraturan daerah provinsi dan peraturan gubernur	Menjamin pelaksanaan Penegakan perda/perkada

Perangkat Daerah	No	Rekomendasi DPRD LKPJ Tahun Sebelumnya	Tindak lanjut (Program/Kegiatan/Regulasi/ Kebijakan/Anggaran) di Tahun 2025/2026	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
			Program Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	
			Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	
			Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	
			Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan gubernur	
	4	Peningkatan Penyusunan Peta Rawan Kebakaran Penting untuk memastikan bahwa peta rawan kebakaran di seluruh wilayah, termasuk di Kabupaten Kepulauan Anambas, segera disusun dan disosialisasikan untuk mempermudah tindakan pencegahan dan penanganan kebakaran	Pada tahun 2025 tidak ada anggaran untuk penyusunan kajian potensi rawan kebakaran di provinsi kepulauan Riau, namun untuk pembinaan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan provinsi dan kabupaten/kota ada dianggarkan	Penyusunan perencanaan penanggulangan wilayah yang memiliki potensi kebakaran
			Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	
			Penyelenggaraan pemetaan rawan bencana kebakaran	
			Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	
DINAS SOSIAL URUSAN SOSIAL	1	Peningkatan Koordinasi dan Pengelolaan Anggaran Dinas Sosial perlu meningkatkan koordinasi antara OPD terkait dan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memastikan program program berjalan sesuai rencana dan tidak terhambat oleh kendala anggaran.	Koordinasi antara OPD dan pemerintah kab/kota untuk memastikan program berjalan sudah dilaksanakan ditahun 2025, dan akan ditindaklanjuti kembali pada pelaksanaan DPA 2026.	Meningkatkan kualitas pelaksanaan program dan penyediaan data antara Dinas Sosial dengan perangkat daerah terkait dan kab/kota.
	2	Optimalisasi Penggunaan Anggaran Direkomendasikan untuk melakukan evaluasi lebih lanjut mengenai penggunaan anggaran, terutama pada program yang memiliki penyerapan anggaran tinggi namun tidak sebanding dengan hasil kinerja yang dicapai.	Dilakukan evaluasi lebih lanjut terhadap subkegiatan-subkegiatan yang penyerapan anggarannya tinggi tetapi tidak sebanding dengan kinerja yang dicapai. Hal ini akan dilakukan melalui rapat-rapat evaluasi internal pada setiap triwulan.	Meningkatkan keselarasan antara realisasi kinerja dan anggaran ditahun 2025

Perangkat Daerah	No	Rekomendasi DPRD LKPJ Tahun Sebelumnya	Tindak lanjut (Program/Kegiatan/Regulasi/ Kebijakan/Anggaran) di Tahun 2025/2026	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	3	Penyelesaian Tunda Bayar Perlu dilakukan upaya lebih serius dalam mengatasi masalah tunda bayar, terutama terkait pengeluaran untuk bantuan sosial dan rehabilitasi. Koordinasi yang lebih baik dengan BKAD dan pihak terkait harus diprioritaskan.	Tunda bayar APBD 2024 sudah dibayarkan pada APBD 2025. Ke depannya, akan diupayakan koordinasi yang lebih baik dengan BKAD dan pihak terkait.	Kewajiban tunda bayar tahun 2024 sudah terpenuhi
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI URUSAN TENAGA KERJA	1	Peningkatan Koordinasi dengan Perusahaan Dinas Tenaga Kerja perlu meningkatkan kerja sama dengan industri dan dunia usaha (DUDI) agar pelatihan yang diberikan lebih relevan dengan kebutuhan pasar. Melakukan pelatihan berbasis kompetensi yang lebih sinkron dengan perkembangan industri.	Sebagai upaya konkret dalam menjawab tantangan relevansi kompetensi tenaga kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau telah menempuh langkah progresif melalui Penguatan ekosistem kolaborasi Triple Helix yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, dan pelaku industri. Langkah strategis ini diwujudkan melalui aksi nyata yang menjadi landasan kuat bagi pelaksanaan program di tahun mendatang, antara lain: 1. Menjalin Perjanjian Kerja Sama dengan Politeknik Negeri Batam dalam pemanfaatan hasil riset berbasis Sistem Cerdas (Artificial Intelligence) untuk memetakan dan menentukan kebutuhan tenaga kerja secara presisi dan berbasis data. 2. Melaksanakan Penandatanganan Komitmen Dukungan Program Pelatihan Vokasi bersama 25 Perusahaan/HRD di kawasan Bintan Inti Industrial Estate, yang meliputi perusahaan strategis seperti PT. Esco Bintan Indonesia, PT. Singatac Bintan, PT. Bintan Resort Cakrawala, Natra Bintan, Holiday Inn Resort Bintan, dan PT. Bintan Alumina Indonesia.	Implementasi dari kerja sama strategis dengan Politeknik Negeri Batam dan komitmen 25 perusahaan di kawasan Bintan ini menjadi kunci utama dalam upaya percepatan terselesainya tantangan fundamental pembangunan sumber daya manusia di Kepulauan Riau. Upaya konkret ini secara langsung menyasar pada: • Terselesainya masalah ketidakakuratan perencanaan pelatihan, di mana penentuan kejuruan dan materi pelatihan kini tidak lagi berbasis asumsi manual, melainkan berbasis data presisi melalui pemanfaatan riset sistem cerdas. • Terselesainya kesenjangan (gap) kompetensi lulusan, sehingga materi pelatihan menjadi sinkron dengan standar industri modern dan menghilangkan isu lulusan yang dianggap "kurang siap pakai"

Perangkat Daerah	No	Rekomendasi DPRD LKPJ Tahun Sebelumnya	Tindak lanjut (Program/Kegiatan/Regulasi/ Kebijakan/Anggaran) di Tahun 2025/2026	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
				oleh perusahaan. • Terselesainya hambatan akses penempatan kerja, melalui adanya jaminan komitmen dari pihak industri (seperti di kawasan Bintan) untuk membuka ruang magang dan memberikan prioritas rekrutmen bagi tenaga kerja lokal.
	2	Optimalisasi Pelatihan dan Pemagangan Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan serta memperkuat program pemagangan di perusahaan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan meningkatkan daya saing di pasar kerja.	Dalam rangka meningkatkan kompetensi tenaga kerja yang adaptif terhadap kebutuhan pasar serta memperkuat daya saing daerah, langkah-langkah konkret yang dilaksanakan adalah sebagai berikut: 1. Akselerasi Program Pemagangan Berbasis Kualifikasi Pendidikan Melaksanakan program pemagangan terstruktur yang disesuaikan dengan jenjang pendidikan peserta untuk memastikan penempatan yang tepat sasaran (right placement): • Pemagangan Jenjang Sarjana (S1): Menjalin sinergi dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker) untuk memfasilitasi lulusan perguruan tinggi masuk ke pasar kerja profesional melalui program pemagangan nasional. 1. Penguatan Program Pelatihan melalui aktivitas Pemagangan Jenjang Menengah (SMA/SMK): Fokus pada sektor pariwisata dan ritel untuk menyerap lulusan sekolah vokasi. Pelaksanaan pemagangan ini bekerja sama dengan mitra strategis, antara lain: a. Hotel Santika b. PT. Bintan Resort Cakrawala (BRC) c. Department Store Ramayana	Tercapainya ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif di mana kurikulum pendidikan vokasi (Politeknik/SMK) selaras dengan standar kompetensi di perusahaan besar (seperti Infineon, McDermott, dan Schneider), serta percepatan penyerapan tenaga kerja melalui jalur pemagangan yang diakui industri.

Perangkat Daerah	No	Rekomendasi DPRD LKPJ Tahun Sebelumnya	Tindak lanjut (Program/Kegiatan/Regulasi/ Kebijakan/Anggaran) di Tahun 2025/2026	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
			2. Formalisasi Komitmen "Link and Match" Lintas Sektor Melakukan pengikatan kerja sama melalui Penandatanganan Komitmen Dukungan Program Pelatihan Vokasi dan Pemagangan di Provinsi Kepulauan Riau. • Skala Kegiatan: Kegiatan ini melibatkan 84 pemangku kepentingan (stakeholders) yang terdiri dari perwakilan sektor industri, pendidikan vokasi (SMK & Politeknik), instansi pemerintah, dan asosiasi perhotelan yang tersebar di Batam dan Provinsi Kepulauan Riau. • Mitra Industri Strategis: Komitmen ini didukung oleh perusahaan-perusahaan multinasional (MNC) dan industri besar, di antaranya: a. Sektor Manufaktur, Elektronik & Migas: PT. Citra Tubindo Tbk, b. PT. Sumitomo Wiring Systems Batam, PT. McDermott c. Indonesia, PT. Infineon Technologies Batam, PT. Schneider d. Electric, dan PT. BSSTEC. e. Sektor Pendidikan: Politeknik Negeri Batam (Polibatam) yang melibatkan unsur pengajar, laboran, dan mahasiswa. f. Sektor Perhotelan & Pariwisata: Aston Inn Gideon Batam, Aston Batam Hotel & Residence, Grand Mercure, PT. Hotel Ozon (Artotel Group), dan Harper Premier Nagoya.	
	3	Meningkatkan Pengelolaan Anggaran Menyusun rencana anggaran yang lebih proporsional sesuai dengan kegiatan yang mendesak dan relevansi program. Fokuskan anggaran pada program pelatihan yang mampu meningkatkan produktivitas dan keterampilan tenaga kerja secara langsung.	Pengelolaan Anggaran pada pada tahun 2025 telah disusun sesuai dengan prioritas dan porsi anggaran yang tersedia Rp. 37.958.769.556. fokus kegiatan Tahun 2025 telah diarahkan untuk meningkatkan Produktivitas dan Keterampilan tenaga kerja; Tahun 2025 total anggaran untuk Program Pelatihan dan Produktivitas sebesar Rp. 7.386.480.453 atau sebesar 19,46% dari total pagu 2025 (37.958.769.556) Atau sebesar 63,09% dari total belanja pembangunan (Rp. 11.706.949.214)	Dari Anggaran yang tersedia pada Program Pelatihan terdapat beberapa aktivitas yang dilaksanakan yang mampu meningkatkan Produktivitas Tenaga kerja/angkatan kerja seperti : 1. Terdapat beberapa paket Pelatihan kerja yang dilaksanakan di BLK dan LPK dengan total yang dilatih sebanyak 362 orang

Perangkat Daerah	No	Rekomendasi DPRD LKPJ Tahun Sebelumnya	Tindak lanjut (Program/Kegiatan/Regulasi/ Kebijakan/Anggaran) di Tahun 2025/2026	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
				2. Kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas 3. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja di Balai Latihan Kerja
	4	Penyelesaian Tunda Bayar: Perlu segera menuntaskan masalah tunda bayar pada beberapa kegiatan, seperti pelatihan yang sudah dilaksanakan, agar program dapat berjalan sesuai jadwal.	Proses Tunda Bayar sudah dilakukan review dari inspektorat Daerah dan Berdasarkan hasil review tersebut sudah dianggarkan tahun 2025 dan telah dilakukan Pelunasan Pembayarannya pada tahun 2025	Hasil Review Telah dilakukan pembayaran Tunda Bayar Terhadap sub kegiatan berikut: 1. Sub kegiatan Proses Pelatihan Berbasis kompetensi yaitu pada Pelatihan Menjahit dan Otomasi yang telah dilaksanakan 2. Pengadaan Mebel 3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1	Peningkatan Koordinasi dan Sinergitas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana perlu memperkuat koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait untuk memperlancar penyediaan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak.		

Perangkat Daerah	No	Rekomendasi DPRD LKPJ Tahun Sebelumnya	Tindak lanjut (Program/Kegiatan/Regulasi/ Kebijakan/Anggaran) di Tahun 2025/2026	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	2	Optimalisasi Penggunaan Anggaran Alokasi anggaran untuk program pengendalian penduduk dan perlindungan perempuan harus disesuaikan dengan prioritas dan kebutuhan yang lebih mendalam, mengingat adanya beberapa kegiatan yang tidak mendapatkan anggaran yang proporsional.		
	3	Peningkatan Pelatihan dan Penguatan SDM Mengoptimalkan pelatihan dan penguatan kapasitas perempuan dalam berbagai bidang keterampilan yang relevan, serta memberikan dukungan berkelanjutan untuk pemenuhan hak anak.		
	4	Penyelesaian Masalah Tunda Bayar Mengatasi masalah tunda bayar pada beberapa program, serta meningkatkan pengelolaan administrasi dan pencairan dana agar program dapat terlaksana tepat waktu.		
DINAS KETAHANAN PANGAN URUSAN PANGAN	1	Optimalisasi Serapan Anggaran Strategis Tingkatkan realisasi anggaran pada kegiatan substansial, bukan hanya capaian output administratif.	Telah dilakukan evaluasi secara bertahap dari persiapan hingga pelaksanaan kegiatan, dengan memperhatikan substansial kegiatan yang berdampak langsung	Peningkatan kinerja serapan anggaran
	2	Fokus pada Intervensi Nyata Realisasikan program-program yang berdampak langsung ke masyarakat seperti bantuan distribusi pangan dan penguatan cadangan pangan daerah.	Tahun 2025 telah dianggarkan dalam hal penguatan cadangan . Berkenaan dengan itu telah disusun regulasi Rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan. Dokumen yang sudah dilaksanakan dalam bentuk Naskah Akademik dan Ranperda yang sudah harmonisasi dengan kementerian Hukum RI. Padaa saat ini rancangan regulasi dimaksud menunggu pengesahan dari DPRD Provinsi Kepulauan Riau.Pada tahun Anggaran 2026 telah dialokasikan di anggaran pengadaan dan penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah sejumlah Rp 600.000.000	Dukungan penanganan kerawanan pangan daerah, dukungan ketersediaan pasokan pangan dan optimalisasi pemanfaatan cadangan pangan, dan penyusunan regulasi penyelenggaraan cadangan pangan
				Saat ini Ranperda Penyelenggaraan cadangan

Perangkat Daerah	No	Rekomendasi DPRD LKPJ Tahun Sebelumnya	Tindak lanjut (Program/Kegiatan/Regulasi/ Kebijakan/Anggaran) di Tahun 2025/2026	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
				pangan belum di Sahkan oleh DPRD Provinsi Kepri dan akan dianggarkan pada Tahun 2026
	3	Penguatan Sinkronisasi Vertikal Perkuat koordinasi provinsi dan kabupaten/kota terkait pemetaan kerawanan dan pelaksanaan program berbasis data FSVA (Food Security and Vulnerability Atlas).	Telah dialokasikan anggaran dalam rangka penyusunan FSVA Provinsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp 17.312. 665. Anggaran tersebut diperuntukkan sebagai anggaran pendampingan penyusunan dokumen FSVA. Untuk tahun 2026 telah dialokasikan anggaran sebanyak Rp. 28.699.187,50 .	Untuk pemetaan situasi kerentanan dan kerawanan pangan ditingkat provinsi dan kabupaten/kota
	4	Reformulasi Indikator Kinerja Gunakan indikator yang mengukur outcome dan dampak nyata pada ketahanan pangan masyarakat, bukan sekadar pelaporan kegiatan.	DKP2KH dalam penentuan indikator berdasarkan dokumen perencanaan yang terdapat pada RPJMD dan Renstra, dengan fokus : Peningkatan kesejahteraan petani, Penurunan ketergantungan pasokan pangan dari luar Kepri dengan peningkatan produksi, Optimalisasi lahan terbatas melalui pertanian adaptif kepulauan	Meningkatkan produksi pertanian, sehingga dapat menurunkan ketergantungan dari luar dan meningkatkan kesejahteraan petani
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN URUSAN LINGKUNGAN HIDUP	1	Rasionalisasi dan Fokus Anggaran Lakukan pengurangan dan penyederhanaan subkegiatan yang tidak berdampak langsung pada target RPJMD. Fokuskan pada kegiatan prioritas yang mendukung pengelolaan lingkungan, seperti penanganan sampah, pengawasan limbah B3, dan perlindungan kawasan hutan.	Pada Tahun 2025 anggaran pengelolaan sampah sebesar Rp. 1.197.821.048,-, Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan anggaran Rp 72.117.000,- sedangkan untuk perlindungan kawasan hutan dengan anggaran sebesar Rp.1.128.825.560,-.	Pengelolaan sampah di tingkat kelompok masyarakat yaitu Kelompok Bank Sampah, pengelolaan limbah B3 yang taat aturan, pengawasan terhadap unit usaha yang mempunyai izin lebih patuh, terkendalinya kawasan hutan terhadap kerusakan hutan.
			Pada Tahun 2026 anggaran pengelolaan sampah sebesar Rp.100.000.000-, Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan anggaran Rp 40.000.000,-, Pengawasan perizinan berusaha terhadap izin usaha pengelolaan lingkungan hidup dengan anggaran sebesar Rp.50.817.000,- sedangkan untuk perlindungan kawasan hutan dengan anggaran sebesar Rp.1.204.622.101,-	
	2	Tingkatkan Koordinasi Lintas Sektor Tingkatkan sinergi dengan OPD dan pemerintah kabupaten/kota dalam mengelola isu-isu	Pada Tahun 2025 anggaran pengelolaan sampah sebesar Rp. 1.197.821.048,-, Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan anggaran Rp 72.117.000,- sedangkan	Penanganan dan pengelolaan persampahan, pengendalian pencemaran lingkungan hidup

Perangkat Daerah	No	Rekomendasi DPRD LKPJ Tahun Sebelumnya	Tindak lanjut (Program/Kegiatan/Regulasi/ Kebijakan/Anggaran) di Tahun 2025/2026	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		strategis lingkungan seperti persampahan, pencemaran, dan ilegal logging.	untuk perlindungan kawasan hutan dengan anggaran sebesar Rp.1.128.825.560,-.serta pagu anggaran penghijauan dan rehabilitasi mangrove sebesar Rp.838.258.300,-	dengan instansi terkait sesuai kewenangannya serta berkurangnya kerusakan hutan dengan patroli oleh polisi kehutanan dan pertemuan, sosialisasi dengan stake holder dan masyarakat .
			Pada Tahun 2026 anggaran pengelolaan sampah sebesar Rp.100.000.000-, Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan anggaran Rp 40.000.000,-, Pengawasan perizinan berusaha terhadap izin usaha pengelolaan lingkungan hidup dengan anggaran sebesar Rp.50.817.000,- sedangkan untuk perlindungan kawasan hutan dengan anggaran sebesar Rp.1.204.622.101,- serta pagu anggaran penghijauan dan rehabilitasi mangrove sebesar Rp.1.286.664.000,-	
	3	Perbaiki Perencanaan dan Monitoring Perencanaan program perlu berbasis pada kebutuhan riil dan kemampuan fiskal. Monitoring harus diperkuat agar capaian tidak hanya administratif, tetapi juga substansial terhadap visi RPJMD.	Pada Tahun 2026 anggaran untuk monitoring, pemantauan dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup sebesar RP.219.000.000,- sedangkan untuk perlindungan kawasan hutan berupa patroli dan sosialisasi kepada masyarakat dan stake holder dengan anggaran sebesar Rp.1.204.622.101,-	Terkendalinya kerusakan lingkungan hidup
	4	Penganggaran Kembali untuk Proyek Penting Alokasikan kembali dana untuk proyek fisik seperti normalisasi sungai dan bangunan pengaman pantai yang tertunda agar target strategis lingkungan hidup dapat tercapai.	Pada Tahun 2026 anggaran pengadaan kendaraan roda tiga untuk pengangkutan sampah sebesar Rp.81.780.637-, pagu anggaran penghijauan dan rehabilitasi mangrove sebesar Rp.1.286.664.000,- serta Peningkatan Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) pagu anggaran sebesar Rp.98.345.000,-,	Optimalisasi daya dukung dan daya tampung Daerah Aliran Sungai (DAS)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1	Perlu penajaman indikator berbasis outcome, seperti tingkat kepemilikan dokumen kependudukan di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).	Penyempurnaan indikator kinerja program administrasi kependudukan yang berorientasi pada hasil (outcome), khususnya indikator kepemilikan dokumen kependudukan di wilayah 3T, sesuai kewenangan Provinsi Kepulauan Riau, yang diintegrasikan dalam dokumen perencanaan daerah.	Tersedianya indikator kinerja yang lebih terukur guna mendorong pemerataan kepemilikan dokumen kependudukan di wilayah 3T Provinsi Kepulauan Riau.

Perangkat Daerah	No	Rekomendasi DPRD LKPJ Tahun Sebelumnya	Tindak lanjut (Program/Kegiatan/Regulasi/ Kebijakan/Anggaran) di Tahun 2025/2026	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
DAN PENCATATAN SIPIL				
	2	Usulkan secara khusus anggaran prioritas untuk penyediaan alat perekam dan cetak KTP-el secara bertahap, minimal melalui skema bantuan provinsi atau dukungan dana pusat.	Fasilitasi dan penganggaran prioritas secara bertahap pengadaan sarana perekaman dan pencetakan KTP-el melalui bantuan keuangan provinsi serta koordinasi dukungan anggaran pemerintah pusat, sesuai kewenangan Provinsi Kepulauan Riau.	Mendukung pemenuhan sarana prasarana pelayanan KTP-el kabupaten/kota guna peningkatan cakupan perekaman dan pencetakan KTP-el.
	3	Tingkatkan inovasi pelayanan digital dan mobile service (pelayanan keliling) untuk menjangkau wilayah kepulauan.	Penguatan inovasi pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital dan pelayanan keliling (mobile service) untuk menjangkau wilayah kepulauan, sesuai kewenangan Provinsi Kepulauan Riau.	Meningkatkan keterjangkauan dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat di wilayah kepulauan.
	4	Perkuat mekanisme koordinasi, supervisi, dan monitoring dengan kabupaten/kota secara sistematis dan terstandar.	Penguatan koordinasi, pembinaan, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan administrasi kependudukan kabupaten/kota secara sistematis dan terstandar, sesuai kewenangan Provinsi Kepulauan Riau.	Meningkatkan keselarasan pelaksanaan kebijakan serta akuntabilitas penyelenggaraan administrasi kependudukan di Provinsi Kepulauan Riau.
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1	Lakukan peninjauan terhadap indikator kinerja yang sangat rendah dan evaluasi efektivitas sub kegiatan terkait.	Evaluasi dilakukan melalui penyusunan Rencana Strategis (Renstra) OPD Tahun 2025-2029	Penyusunan anggaran berbasis kinerja
	2	Perkuat sinergi dan komunikasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk menyelaraskan program dengan karakteristik dan kebutuhan lokal masing-masing desa.	Sinergi dan komunikasi dengan pemerintah kabupaten melalui rapat koordinasi dengan Dinas PMD dan Desa	Menyelaraskan Program dan Sub Kegiatan yang ada di setiap Kabupaten

Perangkat Daerah	No	Rekomendasi DPRD LKPJ Tahun Sebelumnya	Tindak lanjut (Program/Kegiatan/Regulasi/ Kebijakan/Anggaran) di Tahun 2025/2026	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	3	Tingkatkan efektivitas fasilitasi dan pembinaan kepada desa, serta dorong inovasi berbasis potensi lokal melalui dukungan teknis dan keuangan yang lebih tepat sasaran.	Fasilitasi dan pembinaan kepada desa telah dilaksanakan diantaranya melalui kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan kegiatan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Mendorong kemandirian Desa melalui Inovasi desa sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki setiap Desa .
	4	Lakukan refocusing anggaran untuk mendukung kegiatan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kapasitas ekonomi dan sosial desa.	Tahun 2025 dilakukan efisiensi anggaran namun dalam rangka untuk memenuhi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan Instruksi Gubernur Nomor 1 Tahun Nomor : B/900.1.2/112.2/BKAD-SET/2025	Efektifitas anggaran untuk mendukung program prioritas nasional
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK & KELUARGA BERENCANA URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1	Lakukan perbaikan tata kelola anggaran, termasuk percepatan proses pencairan dan penyusunan anggaran yang proporsional dengan kebutuhan lapangan.		
	2	Kembangkan indikator berbasis hasil, misalnya penurunan tingkat unmet need dan peningkatan akses KB di daerah kepulauan.		
	3	Perkuat kemitraan dengan organisasi masyarakat dan lintas sektor dalam program Bangga Kencana untuk memperluas jangkauan dan efektivitas program.		
	4	Lakukan audit dan review berkala atas hambatan administrasi, serta libatkan inspektorat dan BKAD		

Perangkat Daerah	No	Rekomendasi DPRD LKPJ Tahun Sebelumnya	Tindak lanjut (Program/Kegiatan/Regulasi/ Kebijakan/Anggaran) di Tahun 2025/2026	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		dalam penyusunan rencana anggaran tahun berikutnya agar lebih tepat sasaran.		
DINAS PERHUBUNGAN URUSAN PERHUBUNGAN	1	Perluasan program pembangunan pelabuhan di tahun-tahun sisa RPJMD.	Melaksanakan kegiatan pembangunan pelabuhan pengumpan regional dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, yaitu Pengadaan dan Pemasangan Dermaga Apung HDPE Pelabuhan Jagoh, dan Pembangunan Pelabuhan Tanjung Permai Kampung Beko Pulau Kasu pada tahun 2025, kemudian untuk tahun 2026 yaitu Pengadaan dan Pemasangan Dermaga Apung HDPE Pelabuhan Matak Anambas, dan Pemasangan Dermaga Apung HDPE Pelabuhan Selat Lampa Natuna.	Peningkatan kapasitas/ketersediaan pelabuhan
	2	Evaluasi realisasi fisik dan keuangan terhadap program strategis konektivitas.	Dishub telah melaksanakan evaluasi kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan sebagai bagian dari program strategis Gubernur untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik dan mencapai output yang telah ditetapkan.	Peningkatan kualitas pelabuhan dan kualitas pelayanan jasa kepelabuhanan
	3	Skema multiyears dan kemitraan untuk percepatan infrastruktur pelabuhan di pulau-pulau prioritas.	Pelaksanaan kegiatan pembangunan pelabuhan pengumpan regional dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah setiap tahunnya, tidak menggunakan skema multiyears. Rencana kemitraan dengan pihak swasta berupa pembangunan pelabuhan Bengkong Sadai Kota Batam.	Peningkatan kapasitas/ketersediaan pelabuhan
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1	Lakukan evaluasi menyeluruh terhadap kegiatan/subkegiatan yang indikatornya rendah atau tidak relevan dengan RPJMD.	telah melakukan evaluasi kinerja pertriwulan bersama Bappeda terkait program kegiatan dan sub kegiatan	dengan adanya evaluasi kinerja maka potensi masalah sudah bisa di prediksi dari awal
	2	Tingkatkan akurasi perencanaan anggaran dengan memperketat standar kinerja dan justifikasi capaian.	akurasi perencanaan penganggaran sudah sesuai dengan indikator yang ada di RPJMD dan Renstra	tercapaian akurasi perencanaan penganggaran yang di dukung dengan standar kerja dalam mencapai target indikator yang ada di RPJMD dan renstra

Perangkat Daerah	No	Rekomendasi DPRD LKPJ Tahun Sebelumnya	Tindak lanjut (Program/Kegiatan/Regulasi/ Kebijakan/Anggaran) di Tahun 2025/2026	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	3	Prioritaskan kegiatan berdampak tinggi terhadap misi "Pemerintahan yang Terbuka dan Terintegrasi Berbasis Teknologi Informasi" dengan penguatan indeks SPBE dan keterbukaan informasi publik.	fokus kegiatan telah dllakukan, kegiatan berdampak pada misi telah dilakukan antara lain untuk penguatan SPBE yang dilakukan melalui audit aplikasi, penganggaran firewall sebagai cyber security.	mendukung pada pencapaian peningkatan Keterbukaan informasi publik tahun 2025 sebesar 97,25 melebihi target yang di tetapkan
	4	Segera realisasikan kegiatan yang tertunda (seperti audit ITSA) agar tidak kembali menjadi indikator nol pada tahun berikutnya.	BSSN dan Pemprov Kepri Untuk tahun 2025 telah dilakukan audit Information Technology Security Assessment terhadap 2 website yaitu JDIH biro Hukum dan Terhadap website kepriprov, dan Pemprov Kepri sudah mengikuti semua rekomendasi dari BSSN	kegiatan ITSA yang sempat tertunda sudah di penuhi di tahun 2025 sehingga indikator nya berkinerja
	5	Optimalkan peran pengawasan internal untuk menghindari mismatch antara output program dan realisasi belanja.	telah dilakukan rapat berkala tiap bulan dalam rangka evaluasi realisasi program kegiatan	capaian kinerja output maupun outcome dan realisasi belanja menjadi selaras berdasarkan hasil ,monev triwulan
URUSAN PERSANDIAN	1	Melakukan review menyeluruh terhadap program dan kegiatan persandian agar selaras dengan indikator sasaran RPJMD dan kebutuhan keamanan informasi era digital.	telah dilakukan rapat berkala tiap bulan dalam rangka evaluasi realisasi program kegiatan	capaian kinerja output maupun outcome dan realisasi belanja menjadi selaras berdasarkan hasil monev triwulan
	2	Meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan dan sertifikasi teknis di bidang persandian dan keamanan siber.	Telah dilakukan Pelatihan Comcheck pelaksanaan Csirt Pelatihan Indeks KAMI versi 5.0 Pelatihan PDP perlindungan data pribadi yang diikuti oleh staf bidang persandian	meningkatnya pemerataan kapasitas SDM persandian
	3	Mengembangkan sistem pengamanan informasi berbasis teknologi terbaru yang terintegrasi dengan sistem pemerintahan elektronik (e-government).	Untuk pengamanan informasi berbasis teknologi telah di anggarkan antivirus Imunify 360 untuk sistem pengamanan dan belanja Firewall NGFW pencegahan serangan siber	menurunnya serangan siber terhadap keamanan informasi daerah
	4	Meningkatkan koordinasi lintas perangkat daerah untuk integrasi sistem pengamanan data dan informasi.	Melaksanakan rakor urusan persandian Kab/Kota se Provinsi Kepulauan Riau	meningkatkan kapasitas koordinasi antar OPD dan antar kab/kota dalam mendukung keamanan data dan informasi
	5	Mengalokasikan anggaran secara lebih proporsional dan berbasis kinerja nyata terhadap program penguatan persandian.	Telah dilakukan penyesuaian anggaran secara proporsional sesuai dengan kebutuhan terhadap program penguatan persandian	meningkatkan kinerja pencapaian indikator persandian di tahun 2025

Perangkat Daerah	No	Rekomendasi DPRD LKPJ Tahun Sebelumnya	Tindak lanjut (Program/Kegiatan/Regulasi/ Kebijakan/Anggaran) di Tahun 2025/2026	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	6	Mendorong kegiatan berbasis inovasi dan kolaborasi dengan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) dalam membangun sistem pertahanan informasi daerah.	Telah dilakukan Perjanjian Kerjasama dengan BSSN tentang untuk pengamanan informasi daerah salah satu penggunaan TTE, Kerjasama dengan tim penanggulangan insiden Siber Pelaksanaan ITSA web dan aplikasi Pemprov Kepri	meningkatkan sistem pengamanan informasi melalui dukungan BSSN
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	1	Fokus pada penguatan dampak jangka panjang dengan mengubah pendekatan program menjadi berbasis hasil (outcome).	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah telah menjalankan Program sebagaimana mandatori urusan koperasi dan UMKM, dalam pelaksanaan program telah disesuaikan dengan RPJMD dan Renstra, dengan besarnya data koperasi dan UMKM yang diberikan pembinaan dan anggaran yang terbatas tidak begitu terlihat dampaknya	Akan mengoptimalkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/ kota atau dinas terkait dalam koordinasi kebijakan pengembangan usaha koperasi dan UMKM
	2	Tingkatkan koordinasi dengan kabupaten/kota dalam menjangkau koperasi dan UMKM di daerah terpencil atau kepulauan.	Dengan keterbatasan anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah akan mengoptimalkan jangkauan ke Kabupaten/ Kota bahkan di daerah terpencil dan kepulauan	Akan mengoptimalkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/ kota atau dinas terkait dalam koordinasi kebijakan pengembangan usaha koperasi dan UMKM
	3	Tambahkan indikator kualitas kelembagaan koperasi dan keberlanjutan usaha UMKM, bukan hanya kuantitas pelatihan.	Penyesuaian indikator sasaran strategis dan target pada Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025-2029 yang mengukur kualitas kelembagaan Koperasi dan keberlanjutan Usaha UMKM yaitu Persentase Koperasi yang berkualitas, Jumlah Produk tersertifikasi halal dan Persentase UMKM yang naik kelas dan penambahan indikator pada aspek daya saing daerah yaitu Rasio Kewirausahaan Daerah dan Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Non Pertanian	Akan meningkatkan pengawasan, pendampingan dan pembinaan terhadap Koperasi dan UMKM dalam pengembangan usaha
	4	Optimalkan pemanfaatan DAK nonfisik PK2UMK dan susun skema pendampingan tematik berbasis rantai pasok sektor unggulan.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melalui alokasi DAK nonfisik PK2UMK memiliki 4 menu yaitu Pelatihan, Pendataan, pendampingan dan Inkubasi yang dilaksanakan sejalan dengan tematik rantai pasok industri dengan pelaksanaan business matching	Akan terus melanjutkan pelaksanaan Inkubasi Bisnis dengan pendampingan intensif dalam pengembangan usaha hingga mendapatkan market tertentu

Perangkat Daerah	No	Rekomendasi DPRD LKPJ Tahun Sebelumnya	Tindak lanjut (Program/Kegiatan/Regulasi/ Kebijakan/Anggaran) di Tahun 2025/2026	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU URUSAN PENANAMAN MODAL	1	Segera selesaikan proses legislasi Rancangan Perda Insentif dan Kemudahan Berusaha, termasuk regulasi turunannya agar dapat mendorong realisasi target RPJMD investasi.	sebagai tindak lanjut atas rekomendasi pertama, DPMPTSP telah menyelesaikan penyusunan naskah akademis perda pemberian insentif dan kemudahan berusaha. Naskah akademis sudah dilanjutkan dengan pengajuan ke DPRD Provinsi Kepri berupa ranperda. Pada tahun 2025 lalu Perda Pemberian insentif dan kemudahan berusaha telah disahkan menjadi perda.	PP no 24 Tahun 2019 tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi di daerah yang mengamanatkan pemerintah daerah untuk menyusun perda pemberian insentif dan kemudahan berusaha. Perda ini bertujuan untuk mengoptimalkan realisasi investasi di daerah
	2	Tingkatkan efektivitas kegiatan pengawasan dan penyelesaian masalah investasi melalui pendekatan hybrid (daring dan luring) serta koordinasi yang kuat dengan kementerian teknis.	Sebagai tindak lanjut rekomendasi peningkatan efektivitas pengawasan dan penyelesaian permasalahan investasi, DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau mengembangkan inovasi Si-IPIN (Sistem Informasi Pembinaan Investasi) sebagai sarana pembinaan dan pengawasan investasi berbasis pendekatan hybrid. Inovasi ini bertujuan menyediakan ruang pembinaan yang lebih ramah dan mudah diakses bagi pelaku usaha dan investor secara daring, khususnya dalam menghadapi kendala investasi serta pemenuhan kewajiban pelaporan LKPM. Melalui Si-IPIN, proses pengawasan tidak hanya mengandalkan mekanisme pengaduan, tetapi juga dilengkapi dengan layanan klinik investasi yang dapat dilaksanakan secara daring maupun luring, sehingga memungkinkan penyelesaian permasalahan investasi secara lebih cepat, terkoordinasi, dan efektif dengan melibatkan perangkat daerah terkait serta kementerian teknis sesuai kewenangannya.	efektivitas kegiatan pengawasan dan penyelesaian masalah investasi, serta tindaklanjut atas rekomendasi DPRD Provinsi
	3	Optimalkan kegiatan promosi penanaman modal dengan memperluas jaringan investor dan alokasi anggaran yang proporsional.	Sebagai tindak lanjut rekomendasi optimalisasi kegiatan promosi penanaman modal, DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025–2026 telah memperkuat strategi promosi yang terarah melalui perluasan jejaring investor dan penguatan alokasi anggaran secara proporsional, khususnya dengan memanfaatkan forum internasional strategis seperti	mengoptimalkan kegiatan promosi penanaman modal dan tindaklanjut atas rekomendasi DPRD Provinsi Kepri

Perangkat Daerah	No	Rekomendasi DPRD LKPJ Tahun Sebelumnya	Tindak lanjut (Program/Kegiatan/Regulasi/ Kebijakan/Anggaran) di Tahun 2025/2026	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
			World Expo 2025 Osaka, Jepang. Melalui partisipasi aktif dalam business forum, rolling exhibition, dan one-on-one meeting, Kepulauan Riau tidak hanya mempromosikan potensi investasi dan IPRO unggulan, tetapi juga berhasil mendorong komitmen konkret investor asing yang ditandai dengan penandatanganan Joint Venture Agreement antara Kawasan Industri Wiraraja (PT Galang Bumi Industri) dengan Green Bank & Co. Ltd dan C-Energy di sektor energi baru terbarukan dengan nilai penjajakan investasi awal sebesar 1 juta USD. Selain itu, DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau juga memperkuat sinergi promosi investasi melalui kerja sama antardaerah dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, baik dalam pertukaran data peluang investasi, kolaborasi promosi lintas wilayah, maupun penguatan jejaring pelaku usaha untuk mendukung rantai pasok industri. Tindak lanjut konkret dari promosi di Osaka juga diwujudkan melalui kunjungan calon investor asal Jepang ke Kabupaten Bintan dalam rangka penjajakan investasi dan pendalaman kesiapan proyek, sebagai upaya mengonversi minat awal menjadi rencana investasi yang lebih matang. Capaian ini menunjukkan bahwa pendekatan promosi berbasis targeted promotion, kemitraan dengan pengelola kawasan industri, kolaborasi antardaerah, serta penguatan fasilitasi pasca-promosi (aftercare) mampu meningkatkan efektivitas promosi investasi dan mendukung transformasi ekonomi hijau di Provinsi Kepulauan Riau.	
	4	Pastikan bahwa setiap kegiatan dengan anggaran besar memiliki outcome yang konkret terhadap pencapaian sasaran investasi daerah.	dalam penyusunan kegiatan di DPMPTSP sudah melalui perencanaan dengan membuat dokumen Kerangka Acuan Kegiatan (KAK). Terdapat 2 kegiatan pembangunan di DPMPTSP dengan anggaran besar yaitu Penyusunan perda pemberian insentif dan kemudahan berusaha, dan kegiatan promosi investasi. kedua kegiatan tersebut memiliki outcome yang jelas yaitu peningkatan investasi daerah.	tindaklanjut atas rekomendasi DPRD Provinsi Kepri Tahun 2024

Perangkat Daerah	No	Rekomendasi DPRD LKPJ Tahun Sebelumnya	Tindak lanjut (Program/Kegiatan/Regulasi/ Kebijakan/Anggaran) di Tahun 2025/2026	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1	Mempercepat pembentukan Perda Keolahragaan sebagai dasar hukum untuk pembinaan, penganggaran, dan pembangunan olahraga daerah.	Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Perda Keolahragaan belum dapat dianggarkan pada tahun 2026, akan diusulkan pada Tahun 2027	Penyediaan Naskah Akademik Rancangan Perda Keolahragaan
	2	Menyusun Rencana Induk Keolahragaan Daerah (RIORDA) sebagai lampiran dari perda.	Rencana Induk Keolahragaan Daerah (RIORDA) belum dapat dianggarkan pada tahun 2026, akan diusulkan pada Tahun 2027	Penyediaan kebijakan di bidang keolahragaan.
	3	Melibatkan stakeholder olahraga (KONI, akademisi, pelatih, atlet, media, swasta) dalam penyusunan naskah akademik Perda.	Penyusunan Naskah akademis Perda Keolahragaan belum dapat dianggarkan pada tahun 2026, akan diusulkan pada Tahun 2027. Jika sudah dianggarkan tentu akan melibatkan stakeholder olahraga.	Penyediaan Naskah Akademik Rancangan Perda Keolahragaan
	4	Menjadikan Perda Olahraga sebagai indikator kinerja DISPORA tahun 2025, untuk memastikan percepatan pembentukannya.	Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Perda Keolahragaan belum dapat dianggarkan pada tahun 2026, akan diusulkan pada Tahun 2027. Untuk indikator menggunakan indikator sub kegiatan yang diatur oleh Kementerian Dalam Negeri.	Penyediaan Naskah Akademik Rancangan Perda Keolahragaan
	5	DPRD merekomendasikan agar Dinas lebih mensinergikan kegiatan/sub kegiatan dengan OPD terkait dan Pemkab/Pemkot untuk meningkatkan kualitas SDM kepemudaan.	Melalui Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan/Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi, Dispora telah melakukan berkoordinasi dengan Dispora 7 Kab/Kota terkait kegiatan di Bidang kepemudaan pada tahun 2025 dan akan dilanjutkan pada tahun berikutnya.	Koordinasi dengan Dispora 7 Kab/Kota terkait kegiatan di Bidang kepemudaan.
	6	Perhatian terhadap pengembangan olahraga masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal kesejahteraan atlet berprestasi.	Melalui Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan/Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional, sudah diberikan penghargaan pada atlet berprestasi	Pembinaan terhadap atlet yang berprestasi baik dari dukungan pemerintah maupun pihak lain.
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA URUSAN STATISTIK	1	Perlu transformasi dari pemenuhan administratif ke arah penguatan kualitas dan pemanfaatan statistik sektoral berbasis teknologi.	Portal SATU DATA Provinsi Kepri Pengumpulan data dalam E Walidata SIPD	Meningkatkan akses data statistik sektoral baik antar perangkat daerah pemerintah maupun masyarakat

Perangkat Daerah	No	Rekomendasi DPRD LKPJ Tahun Sebelumnya	Tindak lanjut (Program/Kegiatan/Regulasi/ Kebijakan/Anggaran) di Tahun 2025/2026	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	2	Dorong pengembangan Sistem Informasi Statistik Daerah (SISDA) yang terintegrasi dan dapat diakses lintas sektor.	Portal SATU DATA Provinsi Kepri	Meningkatkan akses data statistik sektoral baik antar perangkat daerah pemerintah maupun masyarakat
	3	Tingkatkan koordinasi dengan BPS dalam hal rekomendasi kompilasi statistik dan pelatihan teknis bagi SDM statistik di OPD.	Adanya pemanfaatan aplikasi romantik BPS untuk penerbitan rekomendasi kegiatan statistik Pelatihan teknis yang telah dilaksanakan 1. Pelatihan statistik sektoral 2. Program magang melur berseri adan 6 OPD yang magang di BPS	meningkatnya penyelenggaran statistik daerah dalam rangka mendukung capaian EPSS
	4	Tambahkan indikator outcome seperti tingkat integrasi data lintas perangkat daerah dan efektivitas pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan.	Indikator telah disesuaikan dengan indikator hasil rekomendasi dari BPS dan juga berdasarkan Instruksi Menteri No 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029	Pemenuhan kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN) yang menjadi bagian IPS yang sudah tertuang menjadi indikator renstra 2025 - 2029
DINAS KEBUDAYAAN URUSAN KEBUDAYAAN	1	Tingkatkan Efisiensi dan Evaluasi Triwulan Lakukan evaluasi capaian kinerja dan realisasi keuangan setiap triwulan agar serapan anggaran lebih proporsional dan akuntabel.	pada tahun 2026 dinas kebudayaan akan lebih mengoptimalkan Melaksanakan evaluasi capaian kinerja dan realisasi keuangan secara triwulanan terhadap seluruh program dan kegiatan kebudayaan.	Mengatasi ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi pelaksanaan program kebudayaan serta meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.
	2	Fokus pada Peningkatan Capaian Subkegiatan Cagar Budaya Alokasikan ulang dan tingkatkan perhatian pada program perlindungan dan pengelolaan cagar budaya yang belum mencapai target. Kegiatan ini penting karena berkontribusi langsung pada Indeks Pembangunan Kebudayaan.	Tahun 2026 dilaksanakan penguatan **Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya** melalui peningkatan kualitas perlindungan, pengelolaan, dan penetapan cagar budaya tetapi jika dilihat dari pagu yang sudah di alokasi kan untuk cagar budaya masih jauh untuk dapat mencapai target yang ditentukan	DI APBD Perubahan tahun 2026 dinas kebudayaan akan mengusulkan kembali program kegiatan yang berkaitan dengan cagar budaya sehingga apa yang menjadi target baik itu daerah maupun nasional dapat tercapai sehingga dapat

Perangkat Daerah	No	Rekomendasi DPRD LKPJ Tahun Sebelumnya	Tindak lanjut (Program/Kegiatan/Regulasi/ Kebijakan/Anggaran) di Tahun 2025/2026	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
				memberikan kontribusi atas capaian IPK prov kepri
	3	Percepat Implementasi Regulasi Strategis Dorong percepatan implementasi Perda Pemajuan Kebudayaan dan Perda Bangunan Berciri Khas Melayu sebagai instrumen kebijakan yang relevan dengan visi RPJMD untuk memajukan identitas budaya lokal.	perencanaan di tahun 2026 dilakukan penguatan implementasi **Perda Pemajuan Kebudayaan** dan **Perda Bangunan Berciri Khas Melayu** melalui program pemajuan kebudayaan, sosialisasi regulasi, dan koordinasi lintas perangkat daerah tetapi ini belum bisa di lakukan dikarenakan keterbatasan anggaran APBD Dinas kebudayaan tidak mengakomodir kegiatan tersebut	Meningkatkan efektivitas penerapan regulasi kebudayaan serta memperkuat identitas budaya lokal sesuai visi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau jika program kegiatan yang sudah direncanakan dapat berjalan
	4	Sinkronisasi Perencanaan Program dengan RPJMD: Pastikan setiap subkegiatan mengacu pada sasaran dan indikator RPJMD agar konsistensi dan kesinambungan pembangunan kebudayaan dapat terjaga.	Tahun 2026 setiap sub kegiatan kebudayaan disusun dan diinput dalam SIPD mengacu pada sasaran dan indikator RPJMD serta Renstra tetapi tidak maksimal dikarenakan keterbatasan anggaran APBD Dinas kebudayaan sehingga apa yang menjadi target renstra di tahun 2026 tidak bisa tercapai	Dinas kebudayaan sudah berusaha Menjaga konsistensi perencanaan dan kesinambungan pembangunan kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau tetapi dikarenakan anggaran untuk pemajuan kebudayaan sangat lah minim sehingga dinas kebudayaan tidak bisa optimal dalam pelestarian kebudayaan di provinsi kepulauan riau
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN URUSAN PERPUSTAKAAN	1	Memperkuat infrastruktur digital dan jaringan internet untuk mendukung layanan perpustakaan digital di seluruh wilayah, termasuk kepulauan.	Program: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pengunjung / Pemustaka Mendapatkan Layanan Internet Yang Maksimal
	2	Menyusun strategi pelayanan keliling dan berbasis komunitas untuk menjangkau wilayah terpencil dan minim akses.	Program: Program Pembinaan Perpustakaan Kegiatan: Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	1. Rendahnya akses terhadap bahan bacaan yang bermutu. 2. Rendahnya minat baca dan

Perangkat Daerah	No	Rekomendasi DPRD LKPJ Tahun Sebelumnya	Tindak lanjut (Program/Kegiatan/Regulasi/ Kebijakan/Anggaran) di Tahun 2025/2026	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
			Sub Kegiatan: Pengembangan Layanan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	literasi. 3. Adanya kesenjangan kualitas pendidikan antara wilayah kota dan daerah terpencil. 4. Adanya keterbatasan sarana dan fasilitas perpustakaan permanen. 5. Kurangnya kegiatan edukasi, edukatif dan sosial berbasis literasi pendidikan.
	3	Menambah koleksi buku digital dan memperkuat sistem otomasi manajemen perpustakaan.	Program: Program Pembinaan Perpustakaan Kegiatan: Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi Sub Kegiatan: Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik Program: Program Pembinaan Perpustakaan Kegiatan: Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi Sub Kegiatan: Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Semakin bertambahnya koleksi di Layanan Perpustakaan Digital E-Kepri Untuk Memudahkan Pemustaka dan dapat dilihat dari statistik pengunjung yang meningkat dari tahun sebelumnya
	4	Meningkatkan kolaborasi dengan sektor pendidikan, organisasi masyarakat, dan komunitas literasi dalam mendorong budaya baca.	.Pada sektor pendidikan dilaksanakan pembinaan diperpustakaan sekolah untuk akreditasi perpustakaan Pada tahun 2025 Untuk tingkat SMA. Pada organisasi Masyarakat dilaksanakan Pembinaan perpustakaan pada tingkat kelurahan dan desa se-kepri	-Yang sudah terakreditasi tingkat Sekolah 1. SMAN.1 Tanjungpinang 2. SMAN.2 Tanjungpinang 3. SMAN 4 Tanjungpinang 4. SMAN 6 Tanjungpinang 5. MAN Tanjungpinang

Perangkat Daerah	No	Rekomendasi DPRD LKPJ Tahun Sebelumnya	Tindak lanjut (Program/Kegiatan/Regulasi/ Kebijakan/Anggaran) di Tahun 2025/2026	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
				6. SMKN 4 Tanjungpinang - Pemenang Lomba Perpustakaan Kelurahan Tingkat Nasional: Juara 1: Kelurahan Bukit Cermin Kota Tanjungpinang - Pemenang Apresiasi perpustakaan dan personal terbaik program Transformasi Perpustakaan Berbasis Ingklusi Sosial (TPBIS) dalam kegiatan pertemuan pembelajaran sebaya tingkat provinsi tahun 2025
	5	Meningkatkan alokasi anggaran untuk kegiatan literasi yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas SDM.	Pembinaan kepada pengelola perpustakaan Sekolah/ perpustakaan kelurahan dan perpustakaan desa	Untuk mengelola perpustakaannya
	6	Melakukan monitoring berkala terhadap efektivitas program dan kegiatan perpustakaan berdasarkan indikator RPJMD.	melaksanakan monitoring perpustakaan sesuai rekomendasi tahun sebelumnya	pelaksanaan monitoring terlaksana
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN URUSAN KEARSIPAN	1	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM melalui pelatihan arsiparis dan sertifikasi kompetensi.	Melakukan Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Kearsipan	Meningkatkan Pengelolaan Arsip di OPD
	2	Menyusun peta jalan transformasi digital arsip daerah yang selaras dengan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	Penyusunan Dokumen Strategis tahunan dan Peraturan Gubernur Nomor 14 tahun 2023 tentang Pedoman Penerapan SRIKANDI di lingkungan Pemerintah Daerah Kepulauan Riau	Pelaksanaan SRIKANDI sudah Dilakukan Oleh 34 OPD
	3	Mengintegrasikan sistem kearsipan dengan perangkat daerah dan mengembangkan pusat arsip digital provinsi.	Implementasi menyeluruh aplikasi SRIKANDI di seluruh OPD	Mempermudah temu balik arsip antar instansi dan

Perangkat Daerah	No	Rekomendasi DPRD LKPJ Tahun Sebelumnya	Tindak lanjut (Program/Kegiatan/Regulasi/ Kebijakan/Anggaran) di Tahun 2025/2026	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
				menjamin keamanan data arsip elektronik
	4	Meningkatkan pengawasan dan kepatuhan terhadap pengelolaan arsip sesuai peraturan perundang-undangan.	Melaksanakan Pengawasan Kearsipan Baik tingkat Kabupaten Kota maupun OPD yang ada di Lingkungan Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau Mendapatkan Nilai BB dari Arsip Nasional Republik Indonesia
	5	Mengalokasikan anggaran secara proporsional untuk kegiatan digitalisasi, pengamanan, dan penyelamatan arsip statis yang bernilai sejarah.	Penganggaran belum dilakukan secara maksimal pada Kegiatan digitalisasi, pengamanan, dan penyelamatan arsip statis yang bernilai sejarah. Kegiatan SIKN dan JIKN	Digitalisasi Arsip Statis yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau
	6	Melakukan evaluasi rutin atas efektivitas kebijakan dan sistem kearsipan guna mendukung akuntabilitas pemerintahan daerah.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SRIKANDI	Pelaksanaan SRIKANDI sudah Dilakukan Oleh 34 OPD
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	1	Lakukan evaluasi mendalam terhadap program/kegiatan yang memiliki serapan anggaran tinggi tetapi output/substansi rendah untuk direstrukturisasi atau diganti.	Menerapkan penganggaran berbasis kinerja dalam penyusunan Renstra 2025-2029, RKPD 2026 dan APBD 2026 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, dengan fokus anggaran pada program prioritas serta pengendalian kegiatan agar belanja daerah lebih efisien, tepat sasaran, dan berdampak langsung bagi masyarakat pesisir dan nelayan	Meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas belanja daerah dengan memastikan program dan kegiatan yang didanai memberikan output dan outcome yang nyata serta berdampak langsung bagi masyarakat.
	2	Tingkatkan pemetaan dan pemanfaatan potensi laut Kepri secara strategis. Fokuskan program pada: o Pengembangan kawasan konservasi dan zona tangkap berkelanjutan. o Inovasi budidaya laut terpadu o Peningkatan daya saing produk olahan kelautan	o Telah ditetapkan kawasan konservasi perairan di Provinsi Kepulauan Riau, juga telah dibentuk UPTD Pengelola Kawasan Konservasi berdasarkan Pergub 16 Tahun 2024. kemudian untuk zona perikanan tangkap juga telah ditetapkan dalam dokumen RZWP3K yang saat ini sedang dalam proses integrasi dengan dokumen RTRW Provinsi Kepulauan RIau. o Inovasi budidaya laut terpadu telah dilakukan dengan pembentukan/penetapan kampung perikanan budidaya di beberapa lokasi, salah satunya Kampung Keter Tembeling, Kab. Bintan. selain itu juga Provinsi Kepri yaitu Kota Batam ditetapkan menjadi kawasan percontohan budidaya Lobster,	o penetapan alokasi ruang untuk menyelesaikan permasalahan tumpang tindih kepentingan serta pengaturan pemanfaatan wilayah. o Peningkatan produksi perikanan budidaya di Provinsi Kepulauan Riau o Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan dan Peningkatan Nilai Ekspor Hasil

Perangkat Daerah	No	Rekomendasi DPRD LKPJ Tahun Sebelumnya	Tindak lanjut (Program/Kegiatan/Regulasi/ Kebijakan/Anggaran) di Tahun 2025/2026	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
			Peningkatan daya saing juga telah dilakukan inisiasi ekspor Produk Perikanan ke Berbagai Negara	Kelautan dan Perikanan dari Provinsi Kepulauan RIau
	3	Integrasikan indikator keberhasilan program dengan indikator sasaran RPJMD secara lebih langsung, terutama dalam hal kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB (yang sudah meningkat tajam di 2024 hingga 182,7%).	Menetapkan indikator sasaran dan indikator program sektor perikanan yang secara langsung mengukur kontribusi terhadap PDRB, antara lain total produksi perikanan, nilai tukar nelayan dan pembudidaya ikan, nilai ekspor perikanan, serta jumlah dan nilai produk olahan perikanan, dan mencantumkannya secara eksplisit dalam Renja OPD, RKPD, dan APBD Tahun 2026	Memastikan kinerja program sektor perikanan terukur dan selaras dengan sasaran RPJMD, sehingga penganggaran dan program berdampak nyata terhadap peningkatan PDRB sub sektor perikanan.
	4	Pastikan validitas dan kebermanfaatan data/informasi sebagai dasar perencanaan. Penyediaan dokumen tanpa akurasi dan kualitas data yang baik hanya menjadi formalitas dan tidak efektif.	Validasi telah dilakukan bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Badan Pusat Statistik Kepulauan Riau	memberikan kepastian validitas data dan informasi
DINAS PARIWISATA URUSAN PARIWISATA	1	Menyusun strategi promosi digital terintegrasi yang menjangkau pasar domestik dan internasional secara lebih luas.	Pada tahun 2025, Dinas Pariwisata mengaktifkan kembali pengelolaan website pariwisata dan promosi melalui media sosial, selain itu pada tahun 2026 Dinas Pariwisata melakukan inovasi dengan pengembangan promosi pariwisata dalam 5 bahasa (Bahasa Indonesia, Inggris, Mandarin, Jepang, dan Korea) untuk menjangkau lebih luas pasar wisatawan domestik dan internasional	Untuk meningkatkan citra destinasi pariwisata Kepri, dan memperluas jangkauan promosi wisatawan serta meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri
	2	Mengembangkan destinasi berbasis potensi lokal seperti wisata bahari, budaya Melayu, dan ekowisata secara berkelanjutan.	Pada tahun anggaran 2026, Dinas Pariwisata telah menganggarkan Kegiatan Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang fokus kegiatannya pada Gerakan Wisata Bersih dan penyerahan peralatan kebersihan di beberapa kawasan pariwisata yang sejalan dengan program Kementerian Pariwisata Republik Indonesia serta pengembangan destinasi berbasis minat khusus yang melibatkan BPBD dan SAR di setiap lokasi wisata.	Sebagai upaya dalam pelaksanaan pariwisata regeneratif di Kepulauan Riau, dimana Provinsi Kepulauan Riau telah dipilih oleh Kemenpar RI sebagai pilot project pariwisata regeneratif nasional bersama Provinsi Bali dan Jakarta
	3	Meningkatkan kemitraan dengan sektor swasta dan komunitas pariwisata untuk mendukung inovasi layanan dan paket wisata.	Dinas Pariwisata telah melakukan kolaborasi dengan stakeholder pariwisata dalam pelaksanaan kegiatan/event kepariwisataan serta peningkatan kapasitas sumberdaya	Untuk Peningkatan kualitas dan daya saing destinasi wisata, memperluas jangkauan

Perangkat Daerah	No	Rekomendasi DPRD LKPJ Tahun Sebelumnya	Tindak lanjut (Program/Kegiatan/Regulasi/ Kebijakan/Anggaran) di Tahun 2025/2026	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
			manusia pariwisata juga dengan melaksanakan kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	promosi dan memperkuat partisipasi masyarakat dan stakeholder pariwisata dalam rangka meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah
	4	Meningkatkan alokasi anggaran untuk pengembangan infrastruktur dasar penunjang pariwisata.	Pemeliharaan jalan, pelabuhan, fasilitas kesehatan dll oleh instansi terkait sebagai penunjang kepariwisataan yang merupakan bentuk kerjasama lintas OPD dalam pengembangan kepariwisataan, serta kemudahan perizinan usaha pariwisata seperti akomodasi, restoran dll sebagai usaha mendorong percepatan pengembangan pariwisata dari pihak swasta.	Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar penunjang pariwisata bertujuan untuk meningkatkan kualitas kunjungan wisatawan di daerah wisata, sehingga angka lama kunjungan wisatawan akan meningkat
	5	Menyusun peta jalan pengembangan pariwisata yang terintegrasi dengan program ekonomi kreatif dan pelatihan SDM lokal.	Pada tahun 2025, Dinas Pariwisata melalui Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif melaksanakan Penyusunan Draft Peta Jalan (Road Map) Pengembangan Ekonomi Kreatif Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027 - 2031 yang terintegrasi dengan pengembangan pariwisata di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Pada tahun 2025 Dinas Pariwisata juga telah melaksanakan program pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif dengan kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang terdiri dari sertifikasi bagi tour guide, dan pelatihan bagi Pelaku Ekraf (Barista, Kuliner dan Kriya) dan pengelola Homestay/Pondok Wisata	Terwujudnya pengembangan pariwisata yang terpadu dan berkelanjutan serta meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah
	6	Melakukan evaluasi berkala terhadap program dan kegiatan pariwisata guna memastikan keterkaitan langsung dengan target RPJMD dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.	Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan tindak lanjut evaluasi berkala program dan kegiatan pariwisata melalui penyelarasan dokumen perencanaan dan pelaksanaan program agar selaras dengan target RPJMD, penajaman indikator kinerja dan telah dituangkan dokumen	Selarasnya program dan kegiatan perangkat daerah dengan dokumen RPJMD dalam upaya mendukung pencapaian target pembangunan daerah

Perangkat Daerah	No	Rekomendasi DPRD LKPJ Tahun Sebelumnya	Tindak lanjut (Program/Kegiatan/Regulasi/ Kebijakan/Anggaran) di Tahun 2025/2026	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
			Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 yang telah disusun pada tahun 2025	dan nasional di sektor pariwisata
DINAS KETAHANAN PANGAN URUSAN PERTANIAN	1	Reformulasi perencanaan program dan kegiatan pertanian berbasis wilayah dan potensi lokal, termasuk penerapan teknologi pertanian adaptif seperti hidroponik dan aquaponik.	Perencanaan pertanian diarahkan dari pendekatan seragam berbasis kegiatan menjadi spesifik wilayah berbasis potensi lokal dan teknologi adaptif. DKP2KH telah pada Tahun 2025 dan 2026 telah menganggarkan kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang di dalamnya untuk pengembangan Hidroponik dan Tanaman Pekarangan. Serta Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Meningkatkan produksi pertanian, sehingga dapat menurunkan ketergantungan dari luar dan meningkatkan kesejahteraan petani
	2	Membangun sistem data petani dan lahan pertanian secara digital untuk mendukung akurasi intervensi program.	Aplikasi database petani Nasional SIMLUHTAN (Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian) berbasis GIS yang terintegrasi dengan Pusat	Data akurat untuk penyaluran bantuan Pupuk Bersubsidi dan perencanaan program Bantuan Lainnya
	3	Meningkatkan kapasitas SDM petani melalui pelatihan dan pendidikan vokasi berbasis teknologi tepat guna.	Pelatihan Teknologi Tepat Guna, yang di lakukan : 1. sekolah lapang pertanian, dan 2. Pelatihan Biosaka	Petani lebih produktif dengan 1. Memahami budidaya cabai sistem PROLIGA dan 2. bisa menghemat pupuk dengan membuat BIOSAKA Petani mampu mengadopsi teknologi baru.
	4	Mendorong kemitraan strategis dengan swasta, perguruan tinggi, dan BUMDes untuk penguatan rantai pasok dan hilirisasi hasil pertanian.	Sudah dilaksanakan/dirintis kerjasama antardaerah dengan beberapa daerah surplus	Penguatan rantai pasok dengan adanya kerjasama dengan daerah surplus
	5	Fokus pada pemberdayaan petani muda dan regenerasi petani melalui program insentif dan fasilitasi usaha tani.	Program insentif usaha tani (subsidi modal, akses Kredit Usaha rakyat KUR),	Mengatasi Permasalahan Permodalan Petani yang mau mengembangkan Usaha Tani
	6	Mengalokasikan anggaran yang proporsional dan berbasis pada kinerja nyata dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan daerah.	DKP2KH telah mengalokasikan anggaran pertanian dan pangan berdasarkan dokumen perencanaan yang terdapat pada RPJMD dan Renstra, dengan fokus : Peningkatan pendapatan petani, Penurunan ketergantungan pasokan pangan dari luar Kepri, Optimalisasi lahan terbatas melalui pertanian adaptif kepulauan	Menurunkan ketergantungan dari luar dan meningkatkan pendapatan petani

Perangkat Daerah	No	Rekomendasi DPRD LKPJ Tahun Sebelumnya	Tindak lanjut (Program/Kegiatan/Regulasi/ Kebijakan/Anggaran) di Tahun 2025/2026	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN URUSAN KEHUTANAN	1	Rasionalisasi Subkegiatan Non-Teknis Hapus atau alihkan anggaran dari kegiatan seperti penggandaan dokumen, kunjungan tamu, dan rapat umum ke subkegiatan teknis berbasis hasil.	Pada Tahun 2025 Perlindungan kawasan hutan dengan anggaran sebesar Rp.1.128.825.560,-, Rehabilitasi di luar kawasan hutan anggaran sebesar Rp. 838.258.300,-, Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan anggaran sebesar Rp.303.755.350,-	tercapainya kegiatan fisik dalam rangka pengendalian kerusakan hutan
			Pada Tahun 2026 anggaran pengadaan kendaraan roda tiga untuk pengangkutan sampah sebesar Rp.81.780.637-, pagu anggaran penghijauan dan rehabilitasi mangrove sebesar Rp.1.286.664.000,- serta Peningkatan Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) pagu anggaran sebesar Rp.98.345.000,- serta perlindungan kawasan hutan dengan anggaran sebesar Rp.1.204.622.101	
	2	Dorong Program Perhutanan Sosial dan Rehabilitasi Fokus ke kegiatan yang menunjang sasaran lingkungan lestari, ekonomi hijau, dan pemberdayaan masyarakat hutan, sesuai RPJMD.	Pada Tahun 2025 Perlindungan kawasan hutan dengan anggaran sebesar Rp.1.128.825.560,-, Rehabilitasi di luar kawasan hutan anggaran sebesar Rp. 838.258.300,-, Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan anggaran sebesar Rp.303.755.350,-	Penguatan pada kelompok perhutanan sosial (KTH), pelaksanaan penghijauan dan rehabilitasi mangrove serta perlindungan dan pengendalian kerusakan hutan
			Pada Tahun 2026 pagu anggaran penghijauan dan rehabilitasi mangrove sebesar Rp.1.286.664.000,-, Peningkatan Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) pagu anggaran sebesar Rp.98.345.000,-, perlindungan kawasan hutan dengan anggaran sebesar Rp.1.204.622.101,- dan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan anggaran sebesar Rp. 196.565.300,-	
	3	Advokasi dan Inovasi Kebijakan Segera bentuk tim kerja untuk menyusun usulan kepada pemerintah pusat terkait peninjauan PNBP kayu bakau dan eksplorasi alternatif pemanfaatan hutan.	SK Pembekuan izin sudah dicabut oleh Kementerian Kehutanan, saat ini koperasi Wahana Jaya karimun sudah menyusun RKUPS (Rencana Kerja Usaha Perhutanan Sosial) dan RKT (Rencana Kerja tahunan) dan saat ini sudah pengajuan pengaktifan SIPUHH sedangan Koperasi mangrove Lestari Lingga saat ini sedang proses penyusunan RKUPS dan RKT.	Izin usaha sudah dibuka lagi oleh Kementerian Kehutanan

Perangkat Daerah	No	Rekomendasi DPRD LKPJ Tahun Sebelumnya	Tindak lanjut (Program/Kegiatan/Regulasi/ Kebijakan/Anggaran) di Tahun 2025/2026	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	4	Peningkatan Efektivitas ASN Fungsional Distribusi beban kerja ASN perlu diarahkan lebih besar ke kegiatan teknis dan pengawasan kehutanan, bukan hanya administrasi.	Penambahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) jabata fungsional sebanyak 6 pegawai meliputi 4 Peagwai dengan jabatan Pengendali Ekosistem Hutan dan 2 Pagawai dengan jabatan Penyuluh Lingkungan Hidup	Sebaran 6 PNS meliputi 1 PNS di Bidang Konservasi, Pemberdayaan Masyarakat dan Gakkum Lingkungan Hidup, 2 PNS di bidang Tata kelola Hutan dan Pemanfaatan Hasil Hutan, 1 PNS di KPHP Unit III Lingga dan 2 PNS di Bidang Pengelolaan Sampah. Limbah B3 dan Kajian Dampak Lingkungan
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	1	Melakukan pemetaan potensi energi terbarukan secara komprehensif dan memperbaharui data secara berkala sebagai dasar perencanaan program.	Melaksanakan pemutakhiran data secara berkala untuk menyesuaikan perkembangan teknologi, kondisi wilayah, dan kebutuhan energi daerah	Menyediakan data potensi energi terbarukan yang akurat, mutakhir, dan berbasis wilayah sebagai dasar penetapan prioritas program dan kegiatan.
	2	Meningkatkan sosialisasi dan edukasi masyarakat mengenai manfaat dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan.	Penyusunan Anggaran pada Tahun 2026 telah disusun dengan melakukan penyesuaian dan kebutuhan anggaran berdasarkan pertimbangan pelaksanaan di tahun 2025, dengan memperhatikan kebutuhan dan urgensi pelaksanaan Sub Kegiatan	Meningkatkan literasi dan pengetahuan masyarakat tentang konsep, teknologi, dan potensi EBT serta Meluruskan persepsi keliru terkait biaya, keandalan, dan pemanfaatan EBT.
	3	Mengembangkan proyek percontohan (pilot project) energi bersih di pulau-pulau kecil dengan melibatkan masyarakat dan LSM lokal.	Akan diusulkan pada rencana kerja di tahun 2027 dengan memperhatikan kemampuan anggaran daerah	Meningkatkan peran masyarakat dalam penggunaan energi bersih dalam kehidupan sehari-hari
	4	Meningkatkan alokasi anggaran dan mendorong investasi swasta dalam sektor energi, khususnya energi terbarukan.	Pada tahun 2026 akan dilakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat untuk pemanfaatan energi baru terbarukan	Meningkatkan porsi bauran EBT dalam pemanfaatan energi
	5	Menyusun kebijakan insentif daerah untuk percepatan pengembangan energi alternatif	Akan diusulkan pada rencana kerja di tahun 2027 dengan memperhatikan kemampuan anggaran daerah	Meningkatkan peran masyarakat dalam penggunaan

Perangkat Daerah	No	Rekomendasi DPRD LKPJ Tahun Sebelumnya	Tindak lanjut (Program/Kegiatan/Regulasi/ Kebijakan/Anggaran) di Tahun 2025/2026	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		melalui kerjasama dengan lembaga donor dan sektor privat.		energi bersih dalam kehidupan sehari-hari
	6	Memperkuat koordinasi lintas sektor dan lintas pemerintahan untuk integrasi program energi dan infrastruktur dasar.	koordinasi lintas sektor dan lintas pemerintahan untuk integrasi program energi dan infrastruktur dasar, terus dilaksanakan secara berkelanjutan agar operasional, terukur, dan relevan untuk dokumen perencanaan dan pengendalian kinerja	Pelaksanaan koordinasi lintas sektor dan lintas pemerintahan untuk integrasi program energi dan infrastruktur dasar bertujuan untuk menyelesaikan berbagai masalah struktural, tata kelola, dan efektivitas pembangunan
	7	Mengarahkan program ESDM agar berkontribusi nyata dalam menurunkan biaya energi, meningkatkan akses listrik, dan mendorong pembangunan ekonomi lokal di wilayah kepulauan.	Pada tahun 2026, Dinas ESDM telah menganggarkan pelaksanaan kegiatan konservasi energi dan pengadaan barang melalui pemanfaatan energi baru terbarukan sebagai sumber energi lokal	Meningkatkan efisiensi pemanfaatan energi serta meningkatkan porsi bauran EBT dalam pemanfaatan energi
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN URUSAN PERDAGANGAN	1	Menyusun dan mengimplementasikan sistem informasi perdagangan daerah yang memuat data harga, stok, dan distribusi barang secara real-time.	Melalui Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting khususnya pada sub kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan pemantauan secara berkala melalui sistem informasi barang kebutuhan pokok (INBOK) yang memuat data real time harga dan ketersediaan pasokan dari masing - masing kabupaten kota.	Teridentifikasinya harga dan stok barang kebutuhan pokok di 7 kabupaten kota secara real time perhari.
	2	Mengembangkan jaringan distribusi berbasis wilayah maritim dengan pendekatan klaster pulau dan dukungan logistik digital.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau secara berkala berkoordinasi dengan beberapa instansi terkait seperti Pelindo, KSOP, Karantina, Bea Cukai dan OPD Teknis terkait dalam membahas isu isu strategis dan permasalahan terkait pendistribusian barang kebutuhan pokok di wilayah Provinsi Kepulauan Riau	Mengidentifikasi persoalan terhambatnya pendistribusian logistik barang kebutuhan pokok di wilayah Provinsi Kepulauan Riau serta mencari alternatif solusi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Perangkat Daerah	No	Rekomendasi DPRD LKPJ Tahun Sebelumnya	Tindak lanjut (Program/Kegiatan/Regulasi/ Kebijakan/Anggaran) di Tahun 2025/2026	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	3	Mempercepat revitalisasi pasar rakyat dan pembangunan sarana perdagangan di lokasi strategis termasuk daerah 3T.	Dalam rangka mengakselerasi pembangunan sarana perdagangan dan revitalisasi pasar rakyat pada 7 kabupaten/kota di wilayah provinsi kepulauan riau, dinas perindustrian dan perdagangan provinsi kepulauan riau berkoordinasi secara berkala bersama dinas yang membidangi urusan perdagangan di kabupaten kota. Pada tahun 2025 Gubernur Kepri beberapa kali melakukan pertemuan bersama Menteri Perdagangan RI untuk membahas percepatan pembangunan dimaksud	Sudah mulai berjalannya pembangunan revitalisasi pasar rakyat di Kabupaten Kepulauan Anambas
	4	Mendorong integrasi program perdagangan dengan sektor pertanian, perikanan, dan UMKM untuk memperluas rantai nilai lokal.	Dalam rangka memperluas komoditas unggulan lokal dan potensi sektor perdagangan, perindustrian, pertanian, perikanan dan UMKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau berkolaborasi dengan OPD teknis terkait dalam menyusun perjanjian kerjasama antar provinsi, tepatnya pada tahun 2025 telah dilaksanakan penandatanganan kerjasama antara Gubernur Kepulauan Riau dengan Gubernur Jawa Timur. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau berperan dalam menghubungkan akses pasar, produksi, pengolahan komoditas prioritas perdagangan dengan berbagai lembaga terkait.	1. untuk pengintegrasian logistik perdagangan, mengendalikan ketersediaan harga dan stok dan untuk mempromosikan produk unggulan Provinsi Kepulauan Riau
	5	Menyusun roadmap perdagangan berbasis komoditas unggulan daerah untuk peningkatan ekspor domestik dan internasional.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau berkolaborasi bersama Direktorat Jenderal Pengembangan Export Nasional Kementerian Perdagangan RI dalam pembentukan export center Batam sebagai pilot project export center di wilayah Sumatera. Lembaga tersebut merupakan wadah bagi para pelaku usaha lokal untuk berkonsultasi terkait mekanisme ekspor, mendapatkan akses informasi pasar, fasilitas temu buyer dan mempromosikan produk unggulan daerah. kedepan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau akan berkolaborasi dengan Kementerian Perdagangan RI dalam menyusun roadmap perdagangan wilayah Provinsi Kepulauan Riau	untuk memetakan persoalan-persoalan kendala teknis dilapangan terkait mekanisme ekspor produk, mempromosikan produk unggulan provinsi kepulauan riau di pasar global dan mendapatkan informasi akses pasar.

Perangkat Daerah	No	Rekomendasi DPRD LKPJ Tahun Sebelumnya	Tindak lanjut (Program/Kegiatan/Regulasi/ Kebijakan/Anggaran) di Tahun 2025/2026	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	6	Melakukan pelatihan dan pendampingan bagi pelaku usaha kecil agar dapat bersaing di pasar digital dan modern.	melalui beberapa program terkait pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau seperti Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri dan Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau melakukan pelatihan dan pendampingan bagi pelaku usaha sektor industri dan perdagangan diwilayah Provinsi Kepulauan Riau. substansi pelatihan tersebut mencakup sosialisasi regulasi dan tata cara promosi produk secara digital agar dapat bersaing dipasar global	meningkatkan pemahaman terkait regulasi bagi para pelaku usaha, mempromosikan produk-produk unggulan di provinsi kepulauan riau, dan membangun kemitraan antara industri kecil dan industri besar
	7	Meningkatkan koordinasi lintas perangkat daerah dan pemerintah pusat dalam pengendalian harga dan distribusi kebutuhan pokok, khususnya menjelang hari besar keagamaan dan bencana.	dalam upaya meningkatkan koordinasi lintas sektoral Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau secara aktif mengikuti rapat pengendalian inflasi tingkat nasional pada setiap hari senin yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Pangan Nasional dan Kementerian Lembaga terkait lainnya dalam memonitor angka inflasi dari masing - masing komoditas. di skala regional Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau menjadi salah satu anggota pada tim pengendalian inflasi daerah bersama Bank Indonesia dalam menjalankan rencana aksi pengendalian inflasi daerah (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, komunikasi efektif). selain itu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau bersama dengan Polda Kepri melaksanakan rapat secara berkala dalam memetakan persoalan kelancaran pendistribusian dan harga komoditas.	untuk melaksanakan pemantauan harga lintas sektoral pada 7 kabupaten kota, sebagai penguatan kapasitas SDM pada sektor perdagangan, dan sebagai sarana digitalisasi pasar
	8	Meningkatkan anggaran berbasis hasil dan kinerja nyata untuk mendukung transformasi perdagangan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.	Tindak lanjut rekomendasi ini dilaksanakan dengan mengarahkan alokasi belanja daerah pada program transformasi perdagangan yang berdampak langsung, seperti penguatan konektivitas perdagangan antarpulau, digitalisasi UMKM dan pasar rakyat, serta peningkatan kapasitas pelaku	Tujuan dari peningkatan anggaran berbasis hasil dan kinerja nyata di Provinsi Kepulauan Riau menjadi solusi untuk mengatasi rendahnya

Perangkat Daerah	No	Rekomendasi DPRD LKPJ Tahun Sebelumnya	Tindak lanjut (Program/Kegiatan/Regulasi/ Kebijakan/Anggaran) di Tahun 2025/2026	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
			usaha lokal. Penganggaran dilakukan berbasis indikator kinerja yang terukur, termasuk penurunan disparitas harga antarwilayah, peningkatan volume perdagangan antarpulau, dan perluasan akses pasar bagi UMKM, guna mendorong perdagangan daerah yang inklusif dan berkelanjutan	efektivitas belanja perdagangan daerah dengan memastikan alokasi anggaran benar-benar berdampak pada peningkatan konektivitas antarpulau, penguatan UMKM, dan pemerataan akses pasar. Pendekatan ini diarahkan untuk mengurangi ketimpangan perdagangan, meningkatkan daya saing pelaku usaha lokal, serta mendorong transformasi perdagangan yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah kepulauan.
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN URUSAN PERINDUSTRIAN	1	Audit Anggaran terhadap Sub Kegiatan Serapan Rendah ● Lakukan evaluasi mendalam terhadap sub kegiatan dengan serapan anggaran di bawah 85%, terutama yang bernilai besar namun hanya menghasilkan output formal tidak menunjukkan ukuran hasil.		
	2	Tingkatkan Transparansi Catatan “Tunda Bayar” ● Diperlukan format pelaporan yang eksplisit mencatat apakah suatu realisasi rendah disebabkan oleh efisiensi, gagal lelang, atau tunda bayar. Ini penting untuk perencanaan anggaran tahun berikutnya.		
	3	Review Pola Indikator Output ● Hindari pola pengukuran kinerja berdasarkan jumlah “1 dokumen = 100% capaian”. Indikator harus berbasis dampak atau outcome nyata di sektor industri.		

Perangkat Daerah	No	Rekomendasi DPRD LKPJ Tahun Sebelumnya	Tindak lanjut (Program/Kegiatan/Regulasi/ Kebijakan/Anggaran) di Tahun 2025/2026	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	4	Penjadwalan Realistis dan Sinkronisasi dengan BAKD ● Pastikan kegiatan yang menyedot anggaran besar direncanakan di semester awal, agar jika terjadi kendala bisa ditindaklanjuti tepat waktu dan tidak menumpuk di akhir tahun, menghindari risiko tunda bayar.		
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI URUSAN TRANSMIGRASI	1	Pemetaan dan Verifikasi Lahan Transmigrasi Diperlukan percepatan proses legalitas dan verifikasi kawasan yang layak untuk transmigrasi, terutama di Pulau Sebangka dan Kabupaten Anambas.	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi Tahun 2025 diprioritaskan untuk mendukung kebijakan kementerian di kawasan kawasan Transmigrasi Barelang Batam.	Sesuai Prioritas Kementrans kawasan Transmigrasi di Kepulauan Anambas Tahun 2025 belum ada dukungan anggaran dalam rangka pemetaan dan verifikasi lahan transmigrasi dari Pemerintah Provinsi (Mengingat pengelolaan ex lahan transmigrasi sesuai ketentuan juga merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Anambas)
	2	Sinergi dengan Kementerian/Lembaga Perlu upaya advokasi lebih aktif untuk memasukkan Kepulauan Riau dalam daftar kawasan prioritas nasional revitalisasi transmigrasi.	Berdasarkan Renstra Kementerian Transmigrasi Tahun 2025 sd Tahun 2029 Kepulauan Riau Masuk kedalam 111 Kawasan Prioritas Kementrans. Adapun kawasan tersebut yaitu Batam (Barelang), Kabupaten Natuna (Bunguran) dan Kepulauan Anambas	Proses sinergi sampai saat berjalan dengan kementerian Transmigrasi, BP Batam dan Pemko Batam dalam Pengembangan kawasan transmigrasi di Barelang. (saat ini ada 227 KK yang telah ditetapkan sebagai Transmigrasi Lokal)
	3	Optimalisasi Indikator Program Lakukan review indikator kinerja agar lebih realistis dan sesuai dengan kemampuan serta potensi daerah, disertai strategi pencapaian yang terukur.	Indikator Program Kawasan Transmigrasi kedepannya (Tahun 2026 -2029) telah disusun dengan program : 1. Program Perencanaan Kawasan transmigrasi yang dengan indikator Persentase rencana teknis kawasan transmigrasi	Pencapaian indikator kinerja telah disesuaikan dengan target dan capaian program transmigrasi yang dilaksanakan

Perangkat Daerah	No	Rekomendasi DPRD LKPJ Tahun Sebelumnya	Tindak lanjut (Program/Kegiatan/Regulasi/ Kebijakan/Anggaran) di Tahun 2025/2026	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
			yang clear and clean yang diusulkan untuk program transmigrasi baru Satuan Pemukiman Baru, Satuan Pemukiman Pugar, dan Satuan Pemukiman Tempatan (%) dengan target 5 Tahunan sebanyak 3 Satuan Kawasan Transmigrasi yang masuk dalam 111 Prioritas Kementerian Transmigrasi yaitu Batam, Natuna dan Anambas 2. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi dengan Indikator Persentase bidang Lahan/KK yang tertata di lokasi kawasan transmigrasi (%) dengan Target 5 Tahunan sebesar 45,9 persen dengan perbandingan Jumlah KK yang telah menempati Permukiman Transmigrasi (telah memenuhi syarat sesuai ketentuan) dibagi dengan jumlah KK yang ditargetkan untuk menempati Kawasan Pemukiman Transmigrasi. 3. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi dengan Indikator Persentase satuan kawasan permukiman transmigrasi yg mendapatkan pengembangan usaha ekonomi kawasan (%) dengan target 5 Tahunan sebanyak 6 satuan Pemukiman (SP) Transmigrasi (yaitu 2 SP di Batam, 3 SP di Natuna dan 1 SP di Anambas) dari total 16 SP yang ada di Kepulauan Riau (kawasan ini dalam proses pembahasan Kawasan Transmigrasi dan memiliki HPL Transmigrasi)	oleh kementerian. Sehingga indikator yang ada diarahkan untuk memberikan dukungan baik koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk pencapaian target kinerja yang ditetapkan.
	4	Penguatan Anggaran Operasional Alokasikan anggaran yang lebih memadai untuk kegiatan operasional di lapangan, termasuk koordinasi, pemetaan, dan penyusunan dokumen perencanaan.	Penguatan anggaran telah dilakukan dengan Usulan anggaran yang telah ditetapkan dalam rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2025 - 2029 dalam rangka dukungan Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang ada Di Provinsi Kepulauan Riau. Mengingat sesuai dengan Ketentuan bahwa pengelolaan kawasan transmigrasi Tidak lepas dari Kewenangan Kementerian dan Kabupaten/Kota dimana Kawasan transmigrasi itu berada. Dalam Renstra Total Anggaran yang direncanakan sampai tahun 2026 untuk urusan Transmigrasi sebanyak 200 juta. Namun dalam perkembangannya	Pada Tahun 2026 anggaran dialokasikan pada Program Pembangunan Kawasan transmigrasi dengan sub kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi yang rencananya dalam mendukung proses koordinasi, evaluasi program transmigrasi yang berjalan. Pelaksanaan Sub kegiatan dilaksanakan dengan

Perangkat Daerah	No	Rekomendasi DPRD LKPJ Tahun Sebelumnya	Tindak lanjut (Program/Kegiatan/Regulasi/ Kebijakan/Anggaran) di Tahun 2025/2026	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
			mengingat keterbatasan anggaran Bidang Transmigrasi menjalankan tugas dan fungsinya dengan mengoptimalkan anggaran yang tersedia.	mengoptimalkan anggaran yang tersedia pada tahun 2026.
	5	Integrasi Perencanaan dengan RPJMD Selaraskan program transmigrasi dengan sasaran RPJMD 2021–2026, khususnya untuk mendorong pertumbuhan wilayah terpencil dan kawasan perbatasan.	Program Transmigrasi dalam Renstra telah diselaraskan dengan RPJMD dimana Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi diarahkan untuk mengemban Misi "Untuk Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Maritim dan Keunggulan wilayah. Dan Khusus untuk urusan transmigrasi sasaran dari Dinas tenaga kerja dan transmigrasi adalah Meningkatkan pelayanan ketransmigrasian di kawasan transmigrasi, dengan indikator kinerja sasaran (ultimate outcome), yaitu: Persentase Satuan Permukiman Transmigrasi yang memenuhi standard.	Rencana Pencapaian Target kinerja dalam renstra dan RPJMD saat ini telah selaras dengan kebijakan Kementerian Transmigrasi dengan masuknya 3 Kawasan Transmigrasi di Kepri kedalam 111 Kawasan Prioritas Kementerian. Kedepan Memerlukan dukungan anggaran yang memadai untuk mendukung Program Kementerian dalam pengembangan 3 kawasan transmigrasi yaitu Batam, Natuna dan Anambas. Dalam mendorong pertumbuhan wilayah terpencil dan kawasan perbatasan.
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH URUSAN SEKRETARIAT DAERAH	1	Penguatan Standar Laporan dan Format Kinerja - Biro Pemerintahan perlu menetapkan standar baku format pelaporan LKPJ oleh seluruh OPD dengan menyertakan isu strategis dan evaluasi substansi kinerja.	Biro pemerintahan sudah menyusun format standar baku pelaporan LKPJ untuk seluruh OPD, sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2024.	Penerapan standar baku dalam penyusunan LKPJ seluruh perangkat daerah
	2	Konsolidasi dan Revisi Dokumen Perencanaan - Lakukan sinkronisasi menyeluruh terhadap RKPD, RKA, Renja OPD agar sejalan dengan RPJMD dan tidak terjadi perbedaan data antar dokumen.	Sinkronisasi antara dokumen perencanaan dan penganggaran antara RKPD, RKA dan Renja OPD sudah dilakukan oleh Barenlitbang dan BKAD.	Sinkronisasi dokumen perencanaan dan penganggaran antara RKPD, RKA dan Renja OPD

Perangkat Daerah	No	Rekomendasi DPRD LKPJ Tahun Sebelumnya	Tindak lanjut (Program/Kegiatan/Regulasi/ Kebijakan/Anggaran) di Tahun 2025/2026	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	3	Optimalisasi Perencanaan dan Evaluasi Triwulanan - Evaluasi kinerja secara berkala perlu dioptimalkan untuk memastikan sub kegiatan yang kurang berhasil bisa diperbaiki sebelum akhir tahun anggaran.	Evaluasi kinerja secara berkala sudah dilakukan oleh Barenlibang	Evaluasi kinerja secara berkala dalam memastikan pencapaian kinerja perangkat daerah
	4	Perkuat Peran Inspektorat dalam Tahap Perencanaan - Inspektorat tidak hanya berperan di tahap pemeriksaan pasca pelaksanaan, tapi juga saat perencanaan dan penganggaran untuk mencegah deviasi sejak dini.	Inspektorat telah berperan dalam pengawasan perencanaan dan penganggaran melalui Reviu atas Dokumen RPJMD, Renstra, RKPD, KUA PPAS, RENJA dan RKA beserta perubahannya	Peningkatan pengawasan dalam perencanaan penganggaran
	5	Penyesuaian Alokasi Anggaran - Alokasi anggaran perlu disusun berdasarkan urgensi, isu strategis dan evaluasi kinerja sebelumnya, bukan sekadar pola historis atau serapan tahun lalu.	Pengalokasian anggaran telah disusun sesuai dengan isu strategis dan prioritas pembangunan daerah oleh Barenlitbang dan BKAD.	Pengalokasian anggaran telah disusun sesuai dengan isu strategis dan prioritas pembangunan daerah
SEKRETARIAT DPRD URUSAN SEKRETARIAT DPRD	1	Tata Kelola dan Perencanaan ● Segera perbaiki korelasi antara RKA dan output subkegiatan agar sesuai dengan fungsi DPRD. ● Tingkatkan validasi awal terhadap penginputan target subkegiatan dan capaian dalam SIPD-RI. ● Pastikan seluruh perencanaan belanja pokok lebih dominan dari belanja penunjang, seperti yang disarankan APIP.		
	2	Pembayaran dan Administrasi ● Percepat proses klaim dan pencairan perjalanan dinas DPRD, dengan menyederhanakan SOP dan sistem digitalisasi. ● Selesaikan tunda bayar terutama pada tenaga pendukung (kebersihan, keamanan, sopir), agar tidak mengganggu operasional.		

Perangkat Daerah	No	Rekomendasi DPRD LKPJ Tahun Sebelumnya	Tindak lanjut (Program/Kegiatan/Regulasi/ Kebijakan/Anggaran) di Tahun 2025/2026	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	3	Sarana dan Pemerataan Pelayanan ● Perluasan dan penataan ulang ruang kerja DPRD untuk memastikan seluruh anggota terlayani secara adil dan optimal. ● Penambahan utilitas dan infrastruktur kerja berbasis IT untuk mendukung kerja legislatif modern dan transparan.		
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN URUSAN PERENCANAAN	1	Penyusunan Perencanaan yang Lebih Terpadu dan Konsisten: Dinas Perencanaan perlu menyusun dan memastikan konsistensi antara RPJMD, Renstra, dan RKPD. Penyesuaian yang lebih fleksibel terhadap anggaran dan perencanaan harus dilakukan berdasarkan kondisi yang ada.	Bappeda Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen penuh dalam menyusun dokumen perencanaan yang akuntabel dan selaras dengan regulasi yang berlaku. Dalam periode 2025-2029, RPJMD Provinsi Kepulauan Riau hadir dengan pendekatan yang lebih adaptif dan fleksibel guna merespons dinamika pembangunan secara lebih efektif dibandingkan periode sebelumnya. Seluruh tahapan perencanaan telah dilaksanakan secara konsisten dan sistematis, merujuk pada tata cara yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Dokumen RPJMD ini merupakan instrumen krusial yang berfungsi sebagai pedoman strategis bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) maupun dokumen perencanaan tahunan, guna menjamin terciptanya sinkronisasi pembangunan yang berkelanjutan.	Keselarasan antar Dokumen Perencanaan dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah
	2	Optimalisasi Koordinasi Antar OPD: Koordinasi antar OPD perlu diperkuat, terutama dalam hal penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja. Peran Bappeda sebagai pengarah perlu diperjelas dan dijadikan lebih efektif.	Bappeda Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen untuk senantiasa berperan aktif dalam koordinasi, mengasistensi dan supervisi mitra perangkat daerah dalam menyusun dokumen perencanaan serta evaluasi dokumen perencanaan perangkat daerah. Pada Tahun 2025 dan Tahun 2026, Koordinasi, asistensi dan monitoring evaluasi dilaksanakan melalui sub kegiatan: 1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD	Penguatan peran bappeda dalam penyusunan dokumen perencanaan

Perangkat Daerah	No	Rekomendasi DPRD LKPJ Tahun Sebelumnya	Tindak lanjut (Program/Kegiatan/Regulasi/ Kebijakan/Anggaran) di Tahun 2025/2026	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
			dan RKPD) 2. Pelaksanaan monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 3. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 4. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 5. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 6. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian 7. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA 8. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 9. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur 10. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 11. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	
	3	Reviu RPJMD dan Penyesuaian Anggaran: Perlu dilakukan reviu terhadap RPJMD untuk menyesuaikan dengan kondisi nyata serta penyesuaian anggaran yang lebih tepat agar tidak ada kegiatan yang terhambat oleh kekurangan dana.	Dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 telah melalui serangkaian tahapan penyempurnaan, mulai dari pembahasan intensif bersama Pansus DPRD hingga proses reviu oleh aparat pengawas internal. Hal ini dibuktikan dengan terbitnya Laporan Hasil Reviu (LHR) Nomor LHR.01/REVIU-RPJMD/ITPROV.3/2025 pada 4 Juli	sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah, memastikan dokumen rencana pembangunan memiliki landasan hukum yang kuat, serta menjamin bahwa target-

Perangkat Daerah	No	Rekomendasi DPRD LKPJ Tahun Sebelumnya	Tindak lanjut (Program/Kegiatan/Regulasi/ Kebijakan/Anggaran) di Tahun 2025/2026	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
			2025. Selanjutnya, dokumen tersebut telah dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri guna memastikan keselarasan dan sinkronisasi antara kebijakan pusat dengan dinamika kondisi terkini di daerah	target yang ditetapkan tetap relevan dan selaras dengan dinamika kondisi terkini
	4	Evaluasi dan Pemantauan Program yang Lebih Intensif: Meningkatkan evaluasi dan pemantauan program yang dilaksanakan untuk memastikan tidak ada ketidaksesuaian dalam pelaksanaan, serta untuk memperbaiki pengelolaan anggaran.	Penyusunan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 telah melalui proses evaluasi oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 600.5-3435 Tahun 2025. Seluruh target pembangunan telah dievaluasi secara makro, penetapan alokasi anggarannya tetap dilakukan secara cermat dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian serta menyesuaikan pada kemampuan keuangan daerah. Begitu pula dalam pelaksanaannya, pengendalian dan evaluasi atas rencana kerja perangkat daerah rutin dilaksanakan melalui sub kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi, secara berkala setiap triwulan.	Keselarasan serta efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BKAD) URUSAN KEUANGAN	1	Terapkan early warning system dalam sistem keuangan daerah untuk mendeteksi potensi defisit kas.	Dalam rangka menerapkan *early warning system* pada sistem keuangan daerah untuk mendeteksi potensi defisit Kas Daerah, BKAD telah melaksanakan upaya-upaya sebagai berikut: 1. Menerbitkan Surat Badan keuangan dan Aset Daerah Prov. Kepri Nomor T/900.1/558/BKAD/2025 Tanggal 21 Oktober 2025 terkait Pemberitahuan Pengajuan SPM Akhir Tahun 2025; 2. Menerbitkan Surat Badan keuangan dan Aset Daerah Prov. Kepri Nomor B/900.1/616/BKAD/2025 Tanggal 14 November 2025 terkait tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah Akhir Tahun 2025 3. Menerbitkan Surat Badan keuangan dan Aset Daerah Prov. Kepri Nomor T/900.1/637/BKAD/2025 Tanggal 25 November 2025 terkait pelaksanaan Rekonsiliasi Proyeksi Belanja Akhir Tahun 2025 agar OPD untuk tidak melaksanakan Kegiatan	Besaran potensi tunda bayar dapat ditekan dan keberlanjutan pelaksanaan APBD tetap terjaga.

Perangkat Daerah	No	Rekomendasi DPRD LKPJ Tahun Sebelumnya	Tindak lanjut (Program/Kegiatan/Regulasi/ Kebijakan/Anggaran) di Tahun 2025/2026	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
			yang belum berkontrak dengan Pihak Ketiga dikarenakan keterbatasan kondisi kas daerah 4. Menerbitkan Surat Badan keuangan dan Aset Daerah Prov. Kepri Nomor B/900.1/713/BKAD/2025 Tanggal 24 Desember 2025 terkait surat kedua tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah akhir tahun 2025 Upaya tersebut di atas dilaksanakan melalui Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah;	
	2	Revisi jadwal belanja dan kegiatan SKPD berdasarkan ketersediaan kas riil, bukan hanya pagu.	Upaya yang telah dilakukan BKAD dalam mengatur jadwal kegiatan OPD yang disesuaikan dengan ketersediaan Kas riil antara lain: 1. OPD Mengajukan Rencana Penarikan Dana Bulanan (RPD) sesuai dengan pelaksanaan dengan kebutuhan satu bulan yang disesuaikan dengan kondisi Kas Daerah sesuai dengan SOP. 2.Melakukan rekonsiliasi atau desk antara BKAD Bidang perbendaharaan bersama OPD untuk menyesuaikan belanja OPD dengan ketersediaan kas daerah dan penyerapan/realisasi belanja masing-masing OPD per triwulan Upaya yang dilakukan di atas dilaksanakan melalui Subkegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah;	Penyesuaian kebutuhan belanja OPD dengan ketersediaan pada Kas Daerah
	3	Tingkatkan akurasi proyeksi arus kas dengan tools berbasis data historis dan prediktif.	Dalam rangka meningkatkan akurasi proyeksi arus Kas, BKAD telah melakukan langkah-langkah antara lain : 1.Melakukan penguatan koordinasi secara berkala bersama OPD Penghasil untuk memperoleh estimasi pendapatan setiap bulannya, 2. Melakukan penguatan koordinasi dengan kementerian keuangan terkait dana transfer pusat; Upaya yang dilakukan di atas dilaksanakan melalui Sub	Tersedianya informasi terkait Proyeksi pendapatan baik PAD maupun dana transfer Pusat untuk disesuaikan dengan estimasi belanja.

Perangkat Daerah	No	Rekomendasi DPRD LKPJ Tahun Sebelumnya	Tindak lanjut (Program/Kegiatan/Regulasi/ Kebijakan/Anggaran) di Tahun 2025/2026	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
			kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	
	4	Dorong diversifikasi PAD dan percepat penagihan piutang.	Dalam rangka mendorong diversifikasi PAD dan percepatan penagihan piutang,BKAD pada tahun 2025 telah melakukan upaya-upaya antara lain : 1. Monitoring aktif dan rutin melaksanakan pembinaan terhadap debitur serta memberikan surat tagihan untuk menginformasikan mengenai hutang yang belum terbayarkan melalui Subkegiatan Analisis perencanaan dan pelaksanaan penerimaan kembali pinjaman daerah 2. BKAD secara berkala telah melaksanakan rekonsiliasi Bank atas rekening dana bergulir untuk mengetahui peningkatan penerimaan dari debitur melalui pelaksanaan : a. Subkegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran kas Serta Pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait. b. Subkegiatan Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban,ekuitas, pendapatan,belanja , pembiayaan, pendapatan-LO dan beban	1. Peningkatan jumlah debitur yang termonitoring sehingga dapat meningkatkan potensi pengembalian dana bergulir 2. Optimalisasi pemantauan penerimaan kembali pinjaman setiap debitur penerima pinjaman daerah
			3. Dalam rangka mendorong diversifikasi Pendapatan Asli Daerah, UPTD Pemberdayaan dan Pemanfaatan Aset (Asrama Haji) BKAD Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan upaya perbaikan dan peningkatan prasarana Asrama Haji melalui pelaksanaan : a.Sub kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya. b. Sub kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Optimalisasi pelayanan dalam rangka mendorong diversifikasi Pendapatan Asli Daerah melalui Retribusi Daerah.
	5	Perketat evaluasi triwulanan dan integrasikan dengan realisasi kas secara langsung.	Dalam rangka memperketat evaluasi triwulanan dan integrasi dengan realisasi Kas secara langsung, BKAD telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut :	Sinkronisasi data KAS Daerah, KAS OPD dan data yang ada pada Bank RKUD

Perangkat Daerah	No	Rekomendasi DPRD LKPJ Tahun Sebelumnya	Tindak lanjut (Program/Kegiatan/Regulasi/ Kebijakan/Anggaran) di Tahun 2025/2026	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
			1. Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran KAS Daerah bersama Bank RKUD secara berkala atau triwulan melalui Subkegiatan Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran KAS serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait 2. Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran KAS daerah dengan KAS bendahara OPD secara berkala atau triwulan melalui subkegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN KORPRI URUSAN KEPEGAWAIAN	1	Tingkatkan alokasi anggaran pada program pengembangan kompetensi ASN berbasis analisis kebutuhan jabatan dan kompetensi, bukan hanya administrasi kepegawaian.	- Program pengembangan aparatur yang ada di BKD dan KORPRI di tahun 2025 sudah melakukan melalui kegiatan pengembangan karir dalam bentuk rekomendasi usulan uji kompetensi, perpindahan jabatan ke jabatan lain, kenaikan dan jenjang jabatan bagi Pejabat Fungsional, sesuai analisis kebutuhan; - Telah dilaksanakan Ujian dinas sebanyak 59 orang melalui Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN, tugas belajar sebanyak 1 orang dan pembinaan jabatan fungsional sebanyak 159 orang. - Peningkatan anggaran akan dilakukan pada tahun 2026 dengan adanya dukungan program strategis Gubernur yaitu Pemberian Pendidikan Lanjutan bagi Tenaga Kesehatan pada RS RAT dan RSJKO. Program kegiatan pengembangan karir tetap dilakukan di tahun 2026; - Program pengembangan kompetensi ASN pada Sub Kegiatan Pengelolaan Asesmen Center tidak hanya melaksanakan administrasi kepegawaian saja namun juga melaksanakan penilaian kompetensi pegawai yang salah satu outputnya adalah saran pengembangan kompetensi pegawai sebagai dasar BPSDM menyusun Analisa Kebutuhan Pengembangan Kompetensi (AKPK) Pegawai;	Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN berbasis analisis kebutuhan jabatan dan kompetensi

Perangkat Daerah	No	Rekomendasi DPRD LKPJ Tahun Sebelumnya	Tindak lanjut (Program/Kegiatan/Regulasi/ Kebijakan/Anggaran) di Tahun 2025/2026	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	2	Kaji ulang proporsi anggaran untuk program pelaporan dan fasilitasi internal yang terlalu dominan dibanding kegiatan strategis SDM.	Sudah dilakukan kaji ulang terhadap proporsi anggaran di tahun 2025 yaitu program pelaporan dan fasilitasi internal yang pagu anggarannya tidak lebih besar dari pada pagu anggaran kegiatan strategis SDM di 15 Sub Kegiatan. Di tahun 2026 proporsi anggaran kegiatan strategis SDM masih lebih dominan dari pada program pelaporan dan fasilitasi internal.	Meningkatnya proporsi anggaran untuk program kegiatan strategis SDM.
	3	Percepat implementasi sistem manajemen talenta dengan rotasi, mutasi, dan promosi berbasis kinerja nyata.	- Di tahun 2025 telah dilakukan percepatan implementasi sistem manajemen talenta berdasarkan rekomendasi dari KASN dan BKN RI, untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi melalui Talent Pool, rotasi dan mutasi; - Pengisian Jabatan Fungsional baik dari perpindahan Jabatan maupun Kenaikan Jabatan dan Pengangkatan Kembali telah dilaksanakan melalui Manajemen Talenta dengan memperhatikan Surat Edaran Gubernur Kepulauan Riau Nomor B/800/59/BKDKORPRI-SET/2025 tentang Penerapan Manajemen Talenta Dalam Proses Perpindahan Dari Jabatan Pelaksana ke Dalam Jabatan Fungsional, Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional, Penyesuaian Dalam Jabatan Fungsional Dan Pengangkatan Kembali Ke Dalam Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau; - Seleksi pindah masuk ke Provinsi Kepulauan Riau telah dilaksanakan melalui Tahapan Akuisisi Talenta Eksternal yang merupakan bagian dari penyelenggaraan Manajemen Talenta; - Telah dilaksanakan penilaian kompetensi ASN sebagai pemenuhan indikator di dalam Manajemen Talenta; - Implementasi Manajemen Talenta di atas telah memperhatikan capaian kinerja di atas ekspektasi dan telah berkinerja nyata yang dituangkan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);	Meningkatnya upaya penerapan sistem merit

Perangkat Daerah	No	Rekomendasi DPRD LKPJ Tahun Sebelumnya	Tindak lanjut (Program/Kegiatan/Regulasi/ Kebijakan/Anggaran) di Tahun 2025/2026	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	4	Perkuat peran BKD dalam membina jabatan fungsional melalui kemitraan dengan instansi pembina profesi (BKN, LAN, KemenPAN RB).	- Di tahun 2025 BKD dan KORPRI telah melakukan pembinaan Pejabat Fungsional jenjang Keahlian Madya melalui kemitraan dengan BKN dan KemenPAN RB, dalam bentuk sharing session; - Tahun 2026 akan dilaksanakan supervisi pada asosiasi profesi Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau; - Tahun 2026 akan dilaksanakan pembinaan bagi Pejabat Fungsional Guru melalui kemitraan dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI dan BKN dalam bentuk sharing session secara hybrid.	Memberikan jaminan pengembangan pola karir ASN sesuai dengan ketentuan
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1	Rasionalisasi Subkegiatan Non-Strategis Hapus atau tangguhkan subkegiatan yang tidak berdampak langsung terhadap penguatan SDM ASN, seperti pengadaan alat kantor dan kegiatan administratif lainnya.	Sudah dilakukan rasionalisasi dan penangguhan pada sub kegiatan non strategis	Anggaran diprioritaskan untuk sub kegiatan yang berdampak langsung dengan pengembangan kompetensi ASN
	2	Prioritaskan Kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi Fokuskan anggaran pelatihan pada kebutuhan jabatan, seperti diklat teknis, manajerial, dan digitalisasi ASN.	Pengembangan kompetensi telah berbasis kebutuhan seperti pelatihan PKA,PKP, Orientasi PPPK dan Pelatihan Teknis	Meningkatkan kompetensi ASN
	3	Percepat Penyerapan dengan Sistem Pengelolaan TU yang Tertib Awali kegiatan pelatihan sejak Triwulan I untuk menghindari penumpukan kegiatan akhir tahun dan risiko tunda bayar.	Anggaran per TW telah diserap dengan baik dan tidak terdapat tunda bayar	Menempatkan Penyerapan Anggaran per TW
	4	Integrasikan Kegiatan dengan Sistem Merit ASN Pelatihan ASN harus dikaitkan langsung dengan rencana karier, promosi, dan penilaian kinerja.	Pengembangan Kompetensi telah terintegrasi dengan sistem merit melalui pelatihan Manajerial dan Teknis	Pengembangan Kompetensi sudah terintegrasi dengan rencana karir, promosi dan penilaian kinerja
	5	Perkuat Koordinasi antara BPSDM dan OPD Agar perencanaan pelatihan sinkron dengan	Pengembangan kompetensi sudah berdasarkan AKPK dengan mengintegrasikan Sistem Pembelajaran Ligat Kepri	Meningkatkan kerjasama dalam penyelenggaraan pelatihan

Perangkat Daerah	No	Rekomendasi DPRD LKPJ Tahun Sebelumnya	Tindak lanjut (Program/Kegiatan/Regulasi/ Kebijakan/Anggaran) di Tahun 2025/2026	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		kebutuhan lapangan dan tidak hanya berbasis ketersediaan anggaran.		
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		A. Strategis		
	1	Reorientasi fokus kegiatan Litbang agar mendukung misi RPJMD: - Pertumbuhan ekonomi maritim dan pariwisata, - Reformasi birokrasi berbasis data, - Inovasi sosial dan pelayanan publik.	a) Pada Tahun 2026 melalui Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial dan Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Berbasis hasil riset, fokus pada pelaksanaan riset pada bidang ekonomi maritim dan pariwisata unggulan daerah, termasuk penyusunan rekomendasi kebijakan dan policy brief. b) Tahun 2025 - 2029 melalui sub kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi, fokus pada Pelaksanaan kajian kebijakan berbasis data (evidence-based policy) dan dukungan Riset terhadap implementasi Satu Data Daerah; c) Pada Tahun 2025 melalui sub kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Bersifat Inovatif telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2025 tentang Inovasi Daerah yang mendorong partisipasi aktif seluruh OPD dalam menciptakan Inovasi.	a) Mengatasi belum terarahnya kegiatan Litbang pada sektor prioritas RPJMD serta memperkuat pemanfaatan hasil riset sebagai dasar perumusan kebijakan pengembangan ekonomi maritim dan pariwisata daerah; b) Menjawab masih terbatasnya pengambilan kebijakan berbasis data terintegrasi serta memperkuat dukungan Litbang terhadap penerapan Satu Data Daerah dalam reformasi birokrasi; c) Mengatasi belum optimalnya kerangka regulasi dan partisipasi OPD dalam pengembangan inovasi daerah serta mendorong inovasi sosial dan pelayanan publik yang lebih terarah dan berkelanjutan

Perangkat Daerah	No	Rekomendasi DPRD LKPJ Tahun Sebelumnya	Tindak lanjut (Program/Kegiatan/Regulasi/ Kebijakan/Anggaran) di Tahun 2025/2026	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	2	Tetapkan indikator keberhasilan kegiatan Litbang tidak hanya dari output laporan, tetapi dari adopsi kebijakan hasil riset.	Dalam Dokumen Rencana Strategis Bappeda Tahun 2025 - 2029, pada program Penelitian dan Pengembangan Daerah salah satu indikator adalah Persentase hasil riset yang direkomendasikan. Pada Program riset dan inovasi daerah (Sub kegiatan Penyusunan Kebijakan Berbasis Hasil Riset), indikator outcome adalah jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset.	Mengatasi kelemahan pengukuran kinerja Litbang yang sebelumnya berfokus pada output laporan, dengan mengarahkan indikator kinerja pada pemanfaatan dan adopsi hasil riset dalam bentuk rekomendasi dan naskah kebijakan sebagai dasar perumusan kebijakan daerah
		B. Teknis		
	1	Bangun kemitraan aktif dengan perguruan tinggi, LSM, dan sektor swasta dalam pelaksanaan Litbang.	Pada Tahun 2025, Bappeda (Bidang Riset dan Inovasi Daerah) melakukan kolaborasi penelitian dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional melalui sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial. Penelitian yang dilakukan berjudul Transformasi Digital Dalam Penyelenggaraan dan Pengembangan Kawasan Desa.	Secara umum kolaborasi riset dengan lembaga riset yang lain untuk mengatasi keterbatasan pelaksanaan Litbang yang sebelumnya didominasi oleh internal Perangkat Daerah, serta memperkuat kualitas dan relevansi riset melalui kemitraan strategis dengan lembaga riset nasional guna mendukung perumusan kebijakan pembangunan desa berbasis transformasi digital.
	2	Integrasikan hasil kajian ke dalam proses penyusunan RKPD dan Renja OPD	Pada Tahun 2026 Bappeda akan melakukan penyusunan Rencana Induk Peta Jalan dan Pemajuan Iptek Daerah (RIPJPID) sesuai yang diamanatkan dalam PERPRES Nomor 78 Tahun 2021 tengan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dokumen ini akan disusun melalui Sub kegiatan Penyusunan Kebijakan Berbasis Hasil Riset. Dokumen ini menjadi pedoman strategis untuk mengarahkan riset dan inovasi agar selaras dengan prioritas pembangunan daerah, menciptakan ekosistem riset dan inovasi yang kuat, meningkatkan daya	Mengatasi belum terintegrasinya hasil kajian dan riset secara sistematis ke dalam dokumen RKPD dan Renja OPD, dengan menyediakan pedoman strategis yang menjembatani hasil riset, agenda inovasi, dan prioritas pembangunan daerah

Perangkat Daerah	No	Rekomendasi DPRD LKPJ Tahun Sebelumnya	Tindak lanjut (Program/Kegiatan/Regulasi/ Kebijakan/Anggaran) di Tahun 2025/2026	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
			saing, memecahkan masalah lokal, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dengan melibatkan kolaborasi multipihak untuk memastikan relevansi dan keberhasilan implementasinya.	agar perencanaan lebih berbasis bukti dan berdampak
	3	Terapkan mekanisme monitoring pasca-kegiatan untuk menilai implementasi dan manfaat hasil Litbang	Pada Tahun 2026, Bappeda melalui Program Riset dan Inovasi Daerah akan mengintegrasikan mekanisme monitoring dan evaluasi pasca-kegiatan Litbang (Riset) yang sudah dilakukan selama ini oleh Pemerintah Daerah (OPD lain) dan Bappeda akan melakukan guidance/pendampingan sebagai pengayaan dalam pelaksanaan pelaporan inovasi melalui Sub Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.	Mengatasi belum terintegrasinya mekanisme monitoring dan evaluasi pasca-kegiatan Litbang antar OPD serta belum seragamnya kualitas pelaporan inovasi, sehingga implementasi dan manfaat hasil riset dan inovasi daerah dapat dipantau secara konsisten dan ditingkatkan melalui pendampingan yang terarah
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH URUSAN PENGELOLAAN PERBATASAN	1	Penguatan Basis Data dan Evaluasi Kinerja - Segera menyusun dan mengintegrasikan data spasial dan sosial ekonomi perbatasan, termasuk potensi SDA dan kebutuhan infrastruktur dasar. - Menyediakan sistem monitoring dan evaluasi berbasis teknologi digital yang dapat diakses lintas OPD.	Telah disusunnya data spasial dan sosial ekonomi perbatasan, termasuk potensi SDA dan kebutuhan infrastruktur dasar namun belum optimal	Memudahkan dalam penyusunan kebutuhan perencanaan penganggaran di bidang perbatasan, dan memberikan informasi yang terverifikasi terhadap kondisi sosial
			Telah dibuat aplikasi sistem monitoring dan evaluasi dengan nama border information system (Boris)	Memudahkan pelaksanaan Monev pembangunan di kawasan perbatasan
	2	Peningkatan Kualitas Program dan Output Nyata - Fokus pada pembangunan layanan dasar dan infrastruktur prioritas di wilayah LOKPRI, dengan pelibatan masyarakat perbatasan dalam perencanaan dan pelaksanaan. - Meninjau ulang kegiatan yang bersifat	Telah dilakukan koordinasi dalam proses perencanaan program kegiatan pembangunan layanan dasar dan infrastruktur di Kecamatan Perbatasan Prioritas dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional, dengan melibatkan masyarakat langsung di kawasan Perbatasan	Meningkatkan akses layanan dasar bagi masyarakat di kawasan perbatasan, terutama pada layanan pendidikan tahun 2025

Perangkat Daerah	No	Rekomendasi DPRD LKPJ Tahun Sebelumnya	Tindak lanjut (Program/Kegiatan/Regulasi/ Kebijakan/Anggaran) di Tahun 2025/2026	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		seremonial atau administratif dan mengalihkannya ke program dengan dampak langsung terhadap masyarakat perbatasan.		
			Telah dilakukan peninjauan ulang pada kegiatan yang bersifat seremonial atau administratif, dimana pada kegiatan tersebut dialihkan dengan menggunakan metode video conference antara lain Sosialisasi Potensi Sektor Kelautan, Koordinasi Sinkronisasi dan Integrasi Pembangunan Kawasan Perbatasan .	Meningkatnya informasi kepada masyarakat di kawasan perbatasan yang lebih efektif dan efisien
	3	Optimalisasi Koordinasi Lintas Sektor dan Lintas Level - Memperkuat forum koordinasi perbatasan dengan melibatkan K/L, provinsi tetangga, dan pemerintah kabupaten/kota secara aktif. - Membentuk unit khusus lintas sektoral untuk sinkronisasi program RPJMN–RPJMD di kawasan perbatasan.	Telah dilakukan koordinasi dengan instansi terkait baik Kementerian Lembaga, Provinsi Tetangga, dan Kabupaten/Kota, Seperti melalui kerjasama Sosekmalindo dan Rapat Koordinasi Lintas Sektoral	Terealisasi Kerjasama pembangunan Sosial Ekonomi Malindo dan Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian BWN-KP
			Telah dibentuk unit khusus lintas sektoral terkait dengan: Tim Fasilitasi Pemulangan Jenazah Warga Negara Indonesia/Pekerja Migran Indonesia dari Melaka/Johor Malaysia Ke Provinsi Kepulauan Riau dan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Kepulauan Riau	Terfasilitasi kemudahan pemulangan jenazah Warga negara Indonesia dari Malaysia ke Indonesia terkhusus warga Kepri dan terfasilitasinya penanganan Warga Negara Indonesia menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.
	4	Penyelarasan Renstra Perbatasan dengan RPJMD 2021–2026 (Perda No. 2/2024) - Setiap sub kegiatan harus ditinjau ulang untuk disejajarkan dengan sasaran strategis perubahan RPJMD agar tidak terjadi program yang tidak relevan.	Telah dilakukan penyelarasan sub kegiatan pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah yang mendukung sasaran strategis perubahan RPJMD 2021–2026	Atas hasil penyelarasan telah mampu berkontribusi terhadap nilai SAKIP OPD

Perangkat Daerah	No	Rekomendasi DPRD LKPJ Tahun Sebelumnya	Tindak lanjut (Program/Kegiatan/Regulasi/ Kebijakan/Anggaran) di Tahun 2025/2026	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
BADAN PENGHUBUNG DAERAH URUSAN PENGELOLAAN PENGHUBUNG	1	Penyelesaian Tunda Bayar dan Pengadaan Peralatan Dinas Penghubung perlu segera menyelesaikan masalah tunda bayar dan mencari solusi untuk pengadaan peralatan yang terhambat. Misalnya, dalam kasus pengadaan AC, perlu mempertimbangkan opsi pengadaan set lengkap jika bagian terpisah tidak tersedia .	Sudah di lakukan rekonsiliasi penyelesaian Tunda Bayar bersama OPD Terkait	Menyesuaikan dengan mekanisme penyelesaian Tunda Bayar Tahun 2025
	2	Optimalkan Pelaksanaan Program yang Relevan dengan Isu Strategis Program yang berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat, seperti pelayanan Rumah Singgah dan fasilitasi keprotokolan, harus lebih dimaksimalkan agar mencerminkan kualitas pelayanan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di luar daerah. Dinas Penghubung harus lebih berfokus pada isu-isu strategis yang dapat memberikan dampak langsung pada masyarakat .	Peningkatan Kualitas pelayanan terus di tingkatkan dengan inovasi dan pelayanan optimal	Menyediakan pelayanan berbasis digital terkait pelayanan Rumah Singgah dan Kelembagaan
	3	Peningkatan Koordinasi Antar OPD Dinas Penghubung harus meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait dalam pelaksanaan program, untuk memastikan bahwa setiap kegiatan/sub kegiatan yang dilakukan benar-benar relevan dan dapat mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Sinergitas antar OPD ini sangat penting untuk mempercepat pencapaian visi dan misi RPJMD	Melakukan koordinasi intern lintas OPD terkait pelayanan Badan Penghubung Daerah terhadap indikator yang akan dicapai dalam RPJMD	Melakukan Koordinasi Lintas OPD terkait Pelayanan Rumah Singgah dan Pengelolaan Anjungan Kepulauan Riau TMII
	4	Evaluasi dan Monitoring Kinerja Secara Berkala Lakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap kinerja kegiatan dan penyerapan anggaran, serta pastikan bahwa laporan kegiatan dan pencapaian indikator selalu tersedia untuk analisis lebih lanjut. Hal ini akan membantu	Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara periodik terhadap keberlangsungan Program dan Kegiatan di Badan Penghubung Daerah	Monitoring dan Evaluasi Lintas Bidang Secara periodik setiap bulannya

Perangkat Daerah	No	Rekomendasi DPRD LKPJ Tahun Sebelumnya	Tindak lanjut (Program/Kegiatan/Regulasi/ Kebijakan/Anggaran) di Tahun 2025/2026	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		dalam perbaikan perencanaan anggaran di masa mendatang .		
INPEKTORAT URUSAN PENGAWASAN	1	Optimalkan Pengawasan Keuangan dan Kinerja Dinas Pengawasan harus memperkuat kapasitas pengawasan dengan memanfaatkan teknologi dan metodologi terbaru, termasuk dalam hal sistem pelaporan dan analisis kinerja. Meningkatkan pengawasan tidak hanya pada pelaksanaan, tetapi juga pada perencanaan dan penganggaran untuk memastikan keselarasan.	Dalam hal pengawasan atas keuangan dan kinerja, pada tahun 2025, Inspektorat Daerah telah melaksanakan kegiatan pengawasan berupa : 1. Audit Kinerja pada Dinas Kesehatan, PTSP dan DKP 2. Audit Ketaatan pada Disperindag, Dinas Koperasi dan UKM dan Dinas Kominfo dengan ruang lingkup pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan 3. pengawasan atas perencanaan dan penganggaran dilaksanakan melalui Reviu atas Dokumen RPJMD, Renstra, RKPD, KUA PPAS, RENJA dan RKA beserta perubahannya	Berdasarkan hasil pengawasan tersebut terdapat beberapa permasalahan yang dapat diselesaikan antara lain : 1. Perbaikan atas indikator kinerja yang tidak selaras antara Renstra dan RPJMD 2. Perbaikan atas kesalahan penganggaran belanja modal yang masih dianggarkan pada belanja barang dan jasa 3. Perbaikan atas adanya pengadaan belanja modal yang tidak terdapat dalam RKBMD 4. Perbaikan atas adanya anggaran pemeliharaan yang tidak sesuai atau tidak di dukung dengan RKPBMD 5. Memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan sudah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya dalam pertanggungjawaban belanja 6. Memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan sudah memenuhi kriteria 3E (Efektif, Efisien dan Ekonomis)
	2	Peningkatan Koordinasi Lintas OPD Koordinasi antar OPD harus ditingkatkan dengan lebih seringnya pertemuan lintas sektoral dan	Pada tahun 2025, Inspektorat bersama dengan TIM SAKIP Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menginisiasi hadirnya aplikasi pengawasan kinerja (SAKIP) yang	Permasalahan yang diselesaikan : 1. memudahkan pemantauan

Perangkat Daerah	No	Rekomendasi DPRD LKPJ Tahun Sebelumnya	Tindak lanjut (Program/Kegiatan/Regulasi/ Kebijakan/Anggaran) di Tahun 2025/2026	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		penggunaan platform berbasis digital untuk memantau dan mengawal implementasi kebijakan yang lebih efisien. Dinas Pengawasan perlu menjadi fasilitator dalam hal ini, dengan fokus pada penyusunan dan evaluasi bersama.	dikoordinatori oleh BARENLITBANG. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan koordinasi lintas sektoral terutama untuk memastikan indikator cross cutting (lintas sektoral) dapat dieksekusi sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah	kinerja indikator cross cutting, 2. kegiatan pengendalian akan dapat lebih terarah dalam rangka pencapaian visi misi daerah
	3	Tindak Lanjut Penundaan Pengadaan Pengadaan barang dan jasa yang tertunda harus segera diselesaikan dengan menggandeng pihak penyedia yang lebih fleksibel dan siap dengan barang yang dibutuhkan. Pengadaan harus disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan agar tidak menghambat pelaksanaan program.	Dalam hal pengadaan barang dan jasa, Inspektorat telah melaksanakan kegiatan pengawasan berupa Probity Audit dimulai dari tahapan reviu atas HPS sampai dengan tahap persiapan dan FHO. Hal ini untuk memastikan kegiatan pengadaan barang dan jasa berjalan secara efektif dan efisien serta sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah yang dapat bermanfaat pada kualitas pelayanan publik. Kegiatan probity audit dilakukan terhadap paket-paket strategis pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Berdasarkan hasil pengawasan diketahui terdapat beberapa permasalahan yang diselesaikan antara lain: 1. potensi ketidaksesuaian spesifikasi antara kontrak dan kondisi di lapangan 2. potensi kelebihan pembayaran 3. memastikan pengadaan barang dan jasa dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1	Reformulasi indikator kinerja: Fokus pada kualitas partisipasi politik, misalnya peningkatan kesadaran kritis pemilih, partisipasi perempuan/milenial dalam politik, atau peningkatan indeks toleransi dan kerukunan berbasis survei independen.	Indikator Kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan turunan dari indikator kinerja sasaran pada dokumen RPJMD yaitu : 1. Indek Demokrasi Indonesia aspek Kapasitas lembaga Demokrasi dan Indeks Kerukunan Umat Beragama	peningkatan partisipasi politik masyarakat dan menjaga kerukunan umat beragama
	2	Optimalisasi program berbasis kebutuhan lokal: Kegiatan seperti pendidikan politik dan penanggulangan konflik sosial harus didesain dengan pendekatan partisipatif, bukan sekadar penyuluhan top-down.	Penyusunan Program dan kegiatan pada badan kesatuan bangsa dan politik sudah disusun berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan, berbasis partisipatif yang dilaksanakan melalui musrenbang untuk menampung usulan dari masyarakat dan forum OPD yg melibatkan bakesbangpol kabupaten dan kota untuk mensinkronkan usulan dari kabupaten dan kota.	aspirasi masyarakat terkait program, kegiatan, sub kegiatan terakomodir dengan baik
	3	Evaluasi efektivitas anggaran: Meski realisasi anggaran tinggi (di atas 97%), perlu ditinjau	Anggaran pada badan kesatuan bangsa dan politik selain untuk membiayai program dan kegiatan sesuai tupoksi juga	efisiensi dan efektivitas anggaran

Perangkat Daerah	No	Rekomendasi DPRD LKPJ Tahun Sebelumnya	Tindak lanjut (Program/Kegiatan/Regulasi/ Kebijakan/Anggaran) di Tahun 2025/2026	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		kembali proporsi anggaran terhadap output berdampak langsung terhadap sasaran RPJMD.	untuk menganggarkan Hibah kepada instansi vertikal dan organisasi kemasyarakatan sesuai dengan Peraturan yang berlaku (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Tahun Anggaran 2025)	
	4	Integrasi program lintas sektor: Kolaborasi dengan Dinas Pendidikan, Kominfo, dan LSM untuk memperkuat literasi politik dan nilai-nilai kebangsaan sejak usia dini dan di ruang digital.	Pada tahun 2025 badan kesatuan bangsa dan politik berkolaborasi dengan beberapa dinas dan instansi terkait lainya diantaranya (dinas pendidikan, dinas kominfo, kpu, bawaslu, bnn, korem, FKDM,FKPT, FPK, PKK, dll)dalam meningkatkan Pendidikan politik bagi masyarakat, pendidikan ideologi pancasila, serta pencegahan peredaran gelap narkotika, pendidikan karakter bangsa dan wawasan kebangsaan	peningkatan partisipasi kelompok masyarakat dan OPD lain dalam penguatan literasi politik dan penguatan nilai-nilai kebangsaan
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI	1	Review target sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dan evaluasi kinerja entitas pengelolanya.		
	2	Tingkatkan inovasi dan digitalisasi pelayanan pajak daerah untuk mempertahankan tren positif.		
	3	Pembayaran pajak kendaraan berbasis online, sehingga WP tidak perlu datang ke kantor UPTD.		
	4	Optimalkan potensi pendapatan lain-lain PAD melalui intensifikasi pemungutan dan pengawasan.		
	5	Membangun Dashboard Transparansi Pendapatan Daerah Real-Time		
RSUD RAJA AHMAD TABIB	1	Implementasi Sertifikasi ISO 9001 Langkah: Mengimplementasikan sistem manajemen mutu berdasarkan standar ISO 9001, melakukan audit internal secara berkala, dan melakukan perbaikan berkelanjutan.	Telah dilaksanakan audit internal dan audit maternal–perinatal secara berkala sebagai bagian dari penerapan sistem manajemen mutu.	Menurunkan dan mencegah angka kematian ibu dan bayi melalui peningkatan mutu pelayanan.
	2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Medis ● Langkah: Menyelenggarakan pelatihan dan	- Telah dilaksanakan pelatihan dan case report bagi tenaga medis melalui kegiatan internal rumah sakit (in-house	- Meningkatkan kualitas dan pengetahuan sumber daya

Perangkat Daerah	No	Rekomendasi DPRD LKPJ Tahun Sebelumnya	Tindak lanjut (Program/Kegiatan/Regulasi/ Kebijakan/Anggaran) di Tahun 2025/2026	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		sertifikasi bagi dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya secara rutin. Melakukan pengujian kompetensi melalui simulasi atau ujian sertifikasi.	training) serta pelatihan eksternal seperti pelatihan dan bimbingan teknis. '-Telah dilaksanakan proses kredensial dan re-kredensial tenaga medis oleh masing-masing komite sesuai ketentuan.	manusia pelayanan medis. '- Memantau dan memastikan kompetensi tenaga medis sesuai standar pelayanan.
	3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Non-Medis ● Langkah: Memberikan pelatihan soft skills kepada petugas administrasi dan staf rumah sakit tentang layanan pelanggan yang ramah dan profesional.	Kegiatan Pelatihan Komunikasi Efektif (Kecerdasan Emosional, Manajemen Stres dan Cara berkomunikasi) telah dilaksanakan pada tahun 2025 dan akan dilaksanakan pada tahun 2026 sesuai ketersediaan anggaran.	Staf mampu membangun komunikasi interpersonal yang efektif dan profesional, sehingga tercipta hubungan yang harmonis serta kepercayaan yang tinggi dari setiap pelanggan
	4	Penerapan Teknologi Informasi dalam Sistem Layanan ● Langkah: Menerapkan sistem eHealth untuk rekam medis elektronik (EMR), sistem antrian otomatis, dan aplikasi mobile untuk memudahkan pasien dalam mengakses informasi dan membuat janji temu.	Anggaran Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan APBD 2025 : Rp 233,958,876 Anggaran Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan BLUD 2025 : RP 515.000.000 Anggaran Diklat SIMRS : Rp 39,871,500 Anggaran Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan APBD 2026 : Rp 101,065,500 Anggaran Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan BLUD 2026 : Rp 415.000.000	RSUD Raja Ahmad Tabib pada tanggal 28 Juni 2024 telah melakukan Joint development dengan RSUP Sardjito Yogyakarta terkait Implementasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Terintegrasi (SIMETRIS), dimana salah satu sistem yang dikembangkan adalah penerapan aplikasi Rekam Medis Elektronik (E-MR) sebagai bagian dari transformasi digital layanan kesehatan dan penguatan sistem e-Health. Penerapan E-MR bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan, efisiensi operasional, serta kesinambungan data klinis pasien.

Perangkat Daerah	No	Rekomendasi DPRD LKPJ Tahun Sebelumnya	Tindak lanjut (Program/Kegiatan/Regulasi/ Kebijakan/Anggaran) di Tahun 2025/2026	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
				E-MR di RSUD Raja Ahmad Tabib saat ini telah digunakan pada unit pelayanan, khususnya pada proses pendaftaran pasien melalui Aplikasi 24 Krat Aja serta check-in mandiri melalui mesin anjungan mandiri (APM) yg telah tersedia di lobby rs, pencatatan identitas pasien, pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap dan pelayanan penunjang, dokumentasi terlampir.
	5	Peningkatan Sistem Keamanan dan Kesehatan Rumah Sakit ● Langkah: Meningkatkan pelatihan keselamatan kerja, memberikan edukasi kepada staf mengenai prosedur keselamatan pasien, dan memeriksa peralatan rumah sakit secara berkala.	• Telah dilakukan Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Rumah Sakit pada tahun 2025. • Telah dilakukan Webinar Kebijakan K3RS dan Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Manajemen Fasilitas Dan Keselamatan (MFK) untuk Tim Unit K3 RS pada tahun 2025 • Kegiatan Pelatihan K3 RS untuk semua Pegawai dan tenaga outsourcing Rumah Sakit telah dilaksanakan pada tahun 2025 dan 2026 akan dilakukan secara berkala. • Melaksanakan kegiatan sosialisasi Pasien Safety untuk semua pegawai pada tahun 2026.	Seluruh staf memiliki kompetensi mendalam mengenai Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) serta dedikasi terhadap Prosedur Keselamatan Pasien
	6	Peningkatan Layanan Pasca-Rawat Inap ● Langkah: Menyediakan layanan follow-up melalui telemedicine atau kunjungan rumah untuk pasien rawat inap, serta memastikan pasien memahami instruksi pasca-pengobatan.	- Telah dilaksanakan program pelayanan telemedicine untuk keluhan dan konsultasi pasien, termasuk pemeriksaan penunjang seperti EKG dan USG. '- Telah dilaksanakan program pelayanan paliatif bagi pasien yang membutuhkan perawatan berkelanjutan.	Memfasilitasi konsultasi dan tindak lanjut pelayanan dokter/tenaga medis bagi pasien yang memiliki keterbatasan akses ke rumah sakit.
	7	Fokus pada Peningkatan Infrastruktur dan Fasilitas ● Langkah: Meningkatkan kualitas dan memperbarui fasilitas rumah sakit seperti ruang	Melaksanakan peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit melalui rehabilitasi fasilitas umum, penataan ruang pelayanan, serta penguatan sistem kebersihan, keamanan, dan keselamatan lingkungan rumah	- Mengatasi keterbatasan dan penurunan kualitas infrastruktur (pengecheckan oleh unit terkait)

Perangkat Daerah	No	Rekomendasi DPRD LKPJ Tahun Sebelumnya	Tindak lanjut (Program/Kegiatan/Regulasi/ Kebijakan/Anggaran) di Tahun 2025/2026	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		perawatan, ruang ICU, ruang gawat darurat, serta area umum untuk memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pasien.	sakit. Pelaksanaan kegiatan dilakukan berdasarkan prioritas kebutuhan dan kemampuan keuangan.	- Meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pasien, pengunjung serta pegawai - Mendukung kelancaran operasional pelayanan medis dan non-medis berupa penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur dan fasilitas - Meningkatkan citra dan kualitas layanan RSUD Raja Ahmad Tabib
	8	Meningkatkan Partisipasi Pasien dalam Penilaian Layanan ● Langkah: Menyediakan sistem survei kepuasan pasien baik secara online maupun offline untuk mengetahui kekurangan layanan dan area yang perlu diperbaiki.	• Survei Kepuasan Pasien sudah dilaksanakan secara online melalui penyediaan fitur Aplikasi 24 KRAT Survei Kepuasan Pasien sudah dilaksanakan secara offline yaitu melalui Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Raja Ali Haji Tanjungpinang (STISIPOL). Waktu pelaksanaan kegiatan tersebut adalah Semester 1 pada bulan Juni s.d Juli 2025 dan Semester 2 pada November s.d Desember 2025.	Tercapaian partisipasi masyarakat dalam perbaikan dan peningkatan pelayanan di rumah sakit
	9	Meningkatkan Komunikasi Antar Staf ● Langkah: Menyelenggarakan rapat koordinasi rutin, pelatihan komunikasi efektif, serta menyediakan sistem informasi rumah sakit yang memungkinkan semua pihak berkomunikasi secara efektif.	• Rapat koordinasi antara bagian/bidang secara rutin pada tahun 2025 dan 2026. • Kegiatan Pelatihan Komunikasi Efektif (Kecerdasan Emosional, Manajemen Stres dan Cara berkomunikasi) kepada seluruh Pegawai dan Tenaga outsourcing telah dilaksanakan tahun 2025 dan akan dilaksanakan secara bertahap pada 2026.	Membangun sinergi dan koordinasi interprofesional yang solid antar-pegawai
	10	Peningkatan Kebijakan dan Prosedur Operasional Standar (SOP) Pasien BPJS ● Langkah: Menyusun dan memperbarui SOP secara berkala untuk semua departemen, serta melibatkan semua pihak dalam perencanaan dan evaluasi prosedur rumah sakit.	Telah dilakukan revisi dan penambahan Standar Prosedur Operasional (SPO) pelayanan medis sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan pelayanan.	Menstandarisasi alur pelayanan bagi seluruh lini pelayanan pasien BPJS

Perangkat Daerah	No	Rekomendasi DPRD LKPJ Tahun Sebelumnya	Tindak lanjut (Program/Kegiatan/Regulasi/ Kebijakan/Anggaran) di Tahun 2025/2026	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
RSJKO EHD	1	Pengadaan dan Modernisasi Sarana & Alat Kesehatan Jiwa • Rekomendasi: Segera ajukan pengadaan alat-alat tersebut melalui DAK atau APBD karena berperan penting dalam diagnosis dan terapi pasien gangguan jiwa.		
	2	Pembangunan Infrastruktur Penunjang Jiwa • Rekomendasi: Bangun gedung penunjang jiwa secara bertahap sesuai perencanaan DAK 2025-2026, termasuk area terapi okupasi dan ruang isolasi.		
	3	Pemenuhan SDM Kejiwaan • Rekomendasi: Tambahkan formasi khusus untuk dokter spesialis jiwa dan lakukan pelatihan rutin (minimal >20 jam/tahun) bagi perawat di bidang kejiwaan.		
	4	Peningkatan Jangkauan Layanan Kejiwaan Daerah • Rekomendasi: Perluas jangkauan layanan TEJO (Telemedicine Jiwa Online) dan kerja sama rujukan terpadu dengan Dinas Kesehatan kabupaten/kota.		
	5	Digitalisasi dan Integrasi SIM-RS • Rekomendasi: Kembangkan dan integrasikan SIM-RS untuk efisiensi pelayanan, pencatatan medis, serta pelaporan akreditasi dan indikator mutu.		
BIRO KESRA	1	Peninjauan kembali alokasi hibah ke kab/kota, khususnya jika melebihi 30–40% dari total belanja biro.	Pelaksanaan review tahunan alokasi hibah oleh Tim Anggaran dan Biro Kesejahteraan Rakyat.	Meningkatkan akuntabilitas dan kepatuhan terhadap prinsip pengelolaan keuangan daerah.

Perangkat Daerah	No	Rekomendasi DPRD LKPJ Tahun Sebelumnya	Tindak lanjut (Program/Kegiatan/Regulasi/ Kebijakan/Anggaran) di Tahun 2025/2026	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	2	Penguatan analisis kebutuhan dan urgensi setiap usulan hibah, dengan memperhatikan kemampuan fiskal riil daerah.	Peningkatan kapasitas SDM melalui bimtek/pendampingan teknis analisis kelayakan hibah Tahun 2025–2026.	Menjamin hibah diberikan secara selektif, objektif, dan berbasis kebutuhan nyata. Meningkatkan efektivitas dan tepat sasaran belanja hibah.
	3	Memastikan alokasi untuk urusan wajib pelayanan dasar (kode 1) dibayar penuh terlebih dahulu sebelum hibah.	Monitoring dan pengendalian realisasi anggaran secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap skala prioritas.	Meningkatkan kualitas perencanaan dan disiplin anggaran daerah.
	4	Menetapkan batasan maksimal proporsi belanja hibah dalam Renja dan RKA SKPD.	Integrasi ketentuan batasan proporsi hibah ke dalam pedoman penyusunan Renja dan RKA SKPD Tahun 2025 dan 2026. Pelaksanaan review dan pengendalian anggaran pada tahap perencanaan dan pembahasan anggaran untuk memastikan kepatuhan terhadap batasan yang ditetapkan.	Pelaksanaan review dan pengendalian anggaran pada tahap perencanaan dan pembahasan anggaran untuk memastikan kepatuhan terhadap batasan yang ditetapkan.
BIRO UMUM	1	Optimalisasi Tata Kelola Arsip Dinamis SKPD o Lakukan pelatihan dan pendampingan teknis untuk penanggung jawab arsip pada masing-masing SKPD. o Gunakan sistem digitalisasi arsip berbasis cloud untuk mengurangi ketergantungan terhadap penyimpanan fisik dan mempercepat pencarian arsip.	Pelaksanaan program peningkatan kapasitas pengelolaan arsip melalui pelatihan dan pendampingan teknis pengelola arsip SKPD, serta pengembangan dan pemanfaatan sistem digitalisasi arsip berbasis aplikasi untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis secara terintegrasi.	Meningkatkan tertib administrasi dan kualitas pengelolaan arsip SKPD, mengurangi ketergantungan pada arsip fisik, mempercepat proses pencarian arsip, serta mendukung efisiensi kerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
	2	Evaluasi dan Penyusunan Ulang Program Pengadaan Kendaraan: Revisi perencanaan pengadaan berdasarkan kebutuhan riil dan kemampuan keuangan daerah.	Melakukan evaluasi kebutuhan kendaraan dinas berdasarkan kondisi eksisting dan urgensi operasional, serta penyesuaian perencanaan pengadaan kendaraan dinas dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan prioritas program kerja perangkat daerah	Mewujudkan pengadaan kendaraan dinas yang tepat guna dan tepat sasaran, mengoptimalkan pemanfaatan kendaraan yang ada, serta menjaga efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah

Perangkat Daerah	No	Rekomendasi DPRD LKPJ Tahun Sebelumnya	Tindak lanjut (Program/Kegiatan/Regulasi/ Kebijakan/Anggaran) di Tahun 2025/2026	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
BIRO HUKUM	1	Penyelesaian Peraturan Daerah yang Belum Rampung Pemerintah Daerah melalui Biro Hukum diharapkan dapat mempercepat proses penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang belum selesai, terutama yang telah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun berjalan. Langkah percepatan dapat dilakukan melalui: • Penguatan koordinasi lintas perangkat daerah pengusul, • Percepatan harmonisasi dan legal drafting, serta • Pengaturan ulang tahapan pembahasan bersama DPRD sesuai skala prioritas	Draf Ranperda yang belum disampaikan oleh PD teknis terkait sehingga tidak dapat ditindaklanjuti oleh Biro Hukum	Ranperda yang disampaikan PD belum disertai dengan Naskah Akademik dan Ranperda
	2	Pemrosesan Awal Terhadap Perda Prioritas yang Belum Diawali Perlu adanya inisiatif segera dari perangkat daerah pengusul untuk memulai proses perumusan awal terhadap Ranperda yang belum diproses, meskipun telah ditetapkan dalam Propemperda. Biro Hukum dapat mengambil peran aktif dengan: • Melakukan asistensi terhadap penyusunan naskah akademik, • Menyusun jadwal teknis pembahasan internal, • Memberikan penguatan kepada OPD terkait pentingnya ketepatan waktu pengajuan draft.	1. Biro Hukum tidak memiliki anggaran penyusunan naskah akademik dan Ranperda sehingga asistensi terhadap Naskah Akademik dan Ranperda tidak dapat dilaksanakan secara maksimal 2. dalam pemprosesan awal Ranperda Biro Hukum telah menyampaikan kepada PD Teknis terkait yang menyampaikan Ranperda pada Propemperda tahun berjalan untuk menyampaikan Naskah Akademi dan Ranperda pada kesempatan pertama hal ini sering kali tidak ditindaklanjuti oleh PD Teknis terkait.	Dalam rangka Propemperda tahun berjalan maka diharapkan kepada PD teknis terkait untuk dapat menyampaikan Naskah Akademik dan Ranperda yang diusulkan sehingga Biro Hukum dapat melakukan Harmonisasi bersama Kementerian Hukum pada kesempatan pertama
BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1	Menyusun Rencana Induk Pembinaan BUMD Membuat dokumen perencanaan jangka menengah dan panjang terkait penguatan BUMD sebagai sumber PAD. Harus sinergis dengan RPJMD, Renstra OPD, dan RKPD.	Rencana Induk Pembinaan BUMD, baik jangka menengah dan panjang yang ditujukan agar adanya penguatan BUMD sebagai salah satu sumber PAD belum dapat disusun karena keterbatasan anggaran, akan diusulkan pada penganggaran tahun 2027, dan mohon dukungan dari DPRD.	Perbaikan dan sinergitas perencanaan BUMD

Perangkat Daerah	No	Rekomendasi DPRD LKPJ Tahun Sebelumnya	Tindak lanjut (Program/Kegiatan/Regulasi/ Kebijakan/Anggaran) di Tahun 2025/2026	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	2	Membangun Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja BUMD Menerapkan dashboard digital yang memuat indikator keuangan dan operasional tiap BUMD. Menyusun KPI (Key Performance Indicator) yang baku untuk semua BUMD.	Sudah menyusun program dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah, yang dimulai dari dokumen Renstra OPD dan akan diturunkan dalam program tahunan (Renja), serta melakukan evaluasi kinerja setiap tahun sebagai bagian pembinaan dan pengawasan BUMD	Peningkatan monitoring dan evaluasi kinerja BUMD
	3	Melakukan Evaluasi Tahunan terhadap Direksi dan Dewas BUMD Melibatkan auditor independen atau akuntan publik. Digunakan sebagai dasar pengangkatan, pemberhentian, atau insentif.	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas para Direksi dan Dewan Pengawas untuk memastikan berjalannya fungsi manajemen sudah dilakukan setiap tahun.	Evaluasi tahunan berbasis kinerja dan keterlibatan auditor independen sebagai dasar pengangkatan, pemberhentian, dan pemberian insentif
	4	Mendorong Penyusunan Business Plan dan RKA BUMD yang Realistis Biro mendampingi penyusunan bisnis plan berbasis potensi lokal dan tren sektor. Disinkronkan dengan prioritas pembangunan daerah.	Biro Perekonomian dan pembangunan mengingatkan manajemen, agar BUMD menyusun Business Plan dan RKA BUMD yang Realistis dan dapat dilaksanakan, dan agar pelaksanaan tugas senantiasa berpedoman pada rencana yang sudah disusun.	Pendampingan penyusunan Business Plan dan RKA BUMD yang berbasis potensi lokal, tren sektor, dan sinkron dengan prioritas pembangunan daerah
	5	Menata Kembali Penyertaan Modal Daerah Evaluasi efektivitas penyertaan modal lama. Usulan baru wajib berbasis kajian kelayakan usaha dan potensi ROI (Return on Investment) ke PAD.	Penyertaan modal pemerintah daerah dilakukan dengan mempertimbangan kinerja BUMD, sehingga penyertaan modal belum dapat dilaksanakan sesuai dengan Perda. Biro Perekonomian dan pembangunan terus mengingatkan manajemen BUMD, agar kinerja BUMD semakin membaik dan memberikan deviden bagi Pemerintah Provinsi Kepri, sehingga penyaluran penyertaan modal dapat dilaksanakan sesuai Perda.	Penataan penyertaan modal daerah yang mengarah pada kinerja BUMD
	6	Menyusun Regulasi Teknis Pembinaan BUMD Contoh: Pergub tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Penilaian Kinerja BUMD. Menetapkan mekanisme reward–punishment berdasarkan kontribusi ke PAD.	Regulasi Teknis Pembinaan BUMD belum tersusun karena keterbatasan anggaran. Pembinaan yang sudah dijalankan dilakukan melalui RUPS oleh KPM yaitu Gubernur. Kedepan akan diusulkan penyusunan regulasi teknis Pembinaan, Pengawasan, dan Penilaian Kinerja BUMD.	Penataan regulasi teknis pembinaan BUMD untuk mendorong peningkatan kinerja BUMD
	7	Mendorong Diversifikasi Usaha BUMD Mendorong BUMD untuk masuk ke sektor potensial: energi terbarukan, air minum, logistik,	Dalam rangka diversifikasi usaha, telah terbentuk BUMD PT. Energi Kepri (Perseroda). Untuk Perumda Air Minum Tirta Kepri dan PT Pelabuhan Kepri (Perseroda), PT Pembangunan Kepri sudah berupaya melakukan perbaikan layanan kepada	Pengembangan usaha dan peningkatan layanan BUMD agar mampu mendorong peningkatan kinerja BUMD

Perangkat Daerah	No	Rekomendasi DPRD LKPJ Tahun Sebelumnya	Tindak lanjut (Program/Kegiatan/Regulasi/ Kebijakan/Anggaran) di Tahun 2025/2026	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		digital ekonomi. Hindari ketergantungan hanya pada sektor tradisional seperti SPBU atau pasar.	pengguna layanan, sehingga lebih meningkatkan pendapatan.	
	8	Membangun Kemitraan Strategis (Public Private Partnership) Fasilitasi BUMD bermitra dengan swasta melalui pola KPBU atau join venture. Fokus pada investasi yang berdampak langsung ke PAD dan pelayanan publik.	Guna meningkatkan daya saing BUMD, Biro Perekonomian dan Pembangunan akan mendorong upaya membangun Kemitraan Strategis *(Public Private Partnership)* dan memfasilitasi BUMD agar mampu bermitra dengan swasta melalui pola KPBU atau joint venture	Pembangunan kemitraan strategis (Public Private Partnership/KPBU dan joint venture) guna menarik investasi swasta yang berdampak langsung pada peningkatan kinerja BUMD.
	9	Mendorong Akselerasi Transformasi Digital BUMD BUMD diarahkan menggunakan sistem keuangan dan operasional digital. Efisiensi operasional akan berdampak pada peningkatan margin usaha.	Biro Perekonomian dan Pembangunan akan mendorong BUMD untuk mengakselerasi Transformasi Digital dalam manajemen BUMD, diharapkan BUMD menggunakan sistem keuangan dan operasional berbasis digital.	Akselerasi transformasi digital BUMD, khususnya pada sistem keuangan dan operasional, untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan margin usaha.
	10	Menyelenggarakan Capacity Building Rutin untuk SDM BUMD Pelatihan kepemimpinan, manajemen keuangan, hukum perusahaan, dan GCG. Dapat difasilitasi bekerja sama dengan BPKP, LKPP, perguruan tinggi, atau KADIN.	Guna meningkatkan daya saing BUMD, Biro Perekonomian dan Pembangunan akan mendorong BUMD untuk menyelenggarakan Capacity Building Rutin untuk SDM BUMD, dan Pelatihan kepemimpinan, manajemen keuangan, hukum perusahaan, dan GCG, bekerjasama dengan BPKP.	Meningkatkan kualitas SDM BUMD melalui program capacity building rutin di bidang kepemimpinan, manajemen keuangan, hukum perusahaan, dan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) bekerja sama dengan lembaga kompeten.
	11	Membentuk Forum Koordinasi Pembinaan BUMD Wadah antar Biro Perekonomian, Inspektorat, BPKAD, dan DPRD untuk mengawal kinerja dan sinergi kebijakan terhadap BUMD. Dapat pula menggandeng akademisi dan pelaku usaha.	Dimasa datang akan bekerjasama dengan beberapa instansi terkait BPKP, LKPP, perguruan tinggi, atau KADIN, serta akan membentuk Forum Koordinasi Pembinaan BUMD sebagai wadah yang terdiri dari Biro Perekonomian, Inspektorat, BPKAD, dan DPRD untuk mengawal kinerja dan sinergi kebijakan terhadap BUMD dan menggandeng akademisi dan pelaku usaha	Penguatan kolaborasi perangkat daerah dan pemangku kepentingan melalui Forum Koordinasi Pembinaan BUMD sebagai wadah untuk mengawal kinerja dan sinergi kebijakan terhadap BUMD
	12	Menyusun Roadmap Peningkatan PAD Berbasis Kinerja BUMD Menetapkan target tahunan kontribusi PAD dari masing-masing BUMD.	Dimasa datang akan mendorong BUMD agar menyusun Roadmap Peningkatan PAD Berbasis Kinerja BUMD. Target proyeksi pendapatan deviden atas penyertaan modal pada	Penyediaan Roadmap Peningkatan PAD berbasis kinerja BUMD, penetapan target kontribusi PAD tahunan,

Perangkat Daerah	No	Rekomendasi DPRD LKPJ Tahun Sebelumnya	Tindak lanjut (Program/Kegiatan/Regulasi/ Kebijakan/Anggaran) di Tahun 2025/2026	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		Dihubungkan dengan kontrak kinerja direksi dan kebijakan insentif fiskal.	BUMD dari masing-masing BUMD sudah disusun oleh Biro Perekonomian dan Pembangunan.	serta mengkaitkan dengan kontrak kinerja direksi dan kebijakan insentif fiskal.
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	1	Optimalisasi tugas ASN di Biro Pengadaan Barang dan Jasa harus meliputi: • Melaksanakan tugas fungsional pengadaan secara profesional dan akuntabel. • Menjamin integritas proses pengadaan sesuai prinsip efisien, terbuka, bersaing, dan akuntabel. • Mengembangkan dan memelihara sistem informasi pengadaan sebagai bagian dari e-government. • Melakukan pendampingan aktif dan pembinaan ke OPD. Rekomendasi Operasional untuk ASN: • Pelatihan teknis berkala terkait strategi pengadaan dan digitalisasi proses. • Audit internal dan eksternal rutin atas kegiatan yang tidak menghasilkan output. • Integrasi e-procurement dengan sistem penganggaran dan perencanaan Bappeda.	Pelaksanaan pelatihan teknis dan bimbingan teknis secara berkala terkait regulasi pengadaan barang/jasa, strategi pengadaan, serta pemanfaatan sistem pengadaan berbasis digital, antara lain: ► Peningkatan profesionalisme dan akuntabilitas ASN pengadaan melalui pelaksanaan pelatihan teknis dan bimbingan teknis secara berkala terkait regulasi pengadaan barang/jasa, strategi pengadaan, serta pemanfaatan sistem pengadaan berbasis digital, termasuk e-Purchasing dan e-Katalog versi terbaru. ► Penguatan integritas dan tata kelola pengadaan dengan memastikan seluruh proses pengadaan dilaksanakan sesuai prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel melalui penerapan standar operasional prosedur (SOP) serta pengendalian internal yang konsisten. ► Pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi pengadaan sebagai bagian dari implementasi e-government, termasuk optimalisasi penggunaan SPSE, e-Katalog, serta penguatan integrasi data pengadaan dengan sistem perencanaan dan penganggaran daerah. ► Pelaksanaan pendampingan dan pembinaan aktif kepada OPD, khususnya kepada PPK dan Pejabat Pengadaan, dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, serta pengendalian pelaksanaan kontrak. ► Pelaksanaan pelatihan teknis dan bimbingan teknis secara berkala terkait regulasi pengadaan barang/jasa, strategi pengadaan, serta pemanfaatan sistem pengadaan berbasis digital. ► Pelaksanaan audit internal dan evaluasi eksternal	► Meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan akuntabilitas ASN di lingkungan Biro Pengadaan Barang dan Jasa. ►Mewujudkan proses pengadaan barang/jasa yang transparan, efisien, dan bebas dari penyimpangan. ► Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pengadaan sehingga menghasilkan output dan outcome yang optimal. ► Memperkuat integrasi sistem pengadaan dengan sistem perencanaan dan penganggaran daerah. ► Meningkatkan kualitas pelayanan pengadaan barang/jasa kepada seluruh OPD secara berkelanjutan. ► Mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan Pemerintah Daerah. ► Integrasi sistem mendorong OPD menyusun RUP dan paket pengadaan berbasis dokumen

Perangkat Daerah	No	Rekomendasi DPRD LKPJ Tahun Sebelumnya	Tindak lanjut (Program/Kegiatan/Regulasi/ Kebijakan/Anggaran) di Tahun 2025/2026	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
			terhadap kegiatan pengadaan barang/jasa untuk memastikan efektivitas output dan outcome kegiatan, serta sebagai dasar perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pengadaan. ► Koordinasi dan integrasi sistem e-procurement dengan sistem perencanaan dan penganggaran yang dikelola oleh Bappeda dan perangkat daerah terkait guna menjamin keselarasan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pengadaan.	perencanaan dan penganggaran yang valid.
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	1	Tugas Pokok Biro Administrasi Pimpinan: Agar meningkatkan kinerja dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi, dokumentasi, serta dukungan teknis dan operasional terhadap tugas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Sekretariat Daerah."	Biro Administrasi Pimpinan telah meningkatkan pelayanan administrasi, dokumentasi, serta dukungan teknis dan operasional terhadap tugas Kepala Daerah, Wakil Kepala daerah dan Sekretariat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya	Pelayanan Administrasi Pimpinan dapat diselenggarakan dengan baik sesuai ketentuan hingga akhir tahun anggaran
BIRO ORGANISASI	1	Biro Organisasi perlu melakukan evaluasi terhadap sejumlah Kegiatan maupun Sub Kegiatan yang kinerja serapan anggarannya belum optimal, sehingga penentuan alokasi anggaran harus benar-benar proporsional dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan dalam pengelolaan anggaran.	Biro Organisasi telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan dan serapan anggaran secara berkala (bulanan/triwulan/semester) melalui rapat-rapat internal. Pada Tahun 2025, Alokasi Anggaran Biro Organisasi adalah sebesar Rp. 927.894.796 dengan Realisasi Fisik 100%, dan capaian Realisasi Keuangan sebesar Rp. 881.263.370 (94,97%).	Target Kinerja yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan serta target serapan anggaran tercapai sesuai yang telah direncanakan, selain itu, tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi bisa terlaksana sesuai ketentuan dan indikator kinerja program utama Biro Organisasi tercapai sesuai target yang direncanakan
	2	Implementasi Sistem Monitoring Kinerja Berbasis Digital di Seluruh Perangkat Daerah Uraian: Langkah Strategis: 1. Menyusun peta kebutuhan informasi kinerja perangkat daerah.	Pada tahun 2026 Biro Organisasi akan mengaktifkan kembali sistem monitoring berbasis digital yaitu aplikasi SIJABAT, Pada Tahun 2025 Implementasi Sistem Monitoring Kinerja Berbasis Digital belum dapat dilaksanakan karena belum tersusunnya peta kebutuhan informasi kinerja perangkat daerah dan belum terpenuhinya kesiapan teknis pendukung,	Biro Organisasi akan melanjutkan/mengaktifkan kembali Aplikasi SIJABAT yang berbasis WEB untuk meningkatkan transparansi dan akurasi pelaporan data di

Perangkat Daerah	No	Rekomendasi DPRD LKPJ Tahun Sebelumnya	Tindak lanjut (Program/Kegiatan/Regulasi/ Kebijakan/Anggaran) di Tahun 2025/2026	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		2. Mengembangkan aplikasi internal sederhana berbasis web untuk input dan visualisasi capaian kinerja. 3. Melakukan pelatihan kepada unit kerja terkait dan menyiapkan SOP pemantauan rutin.	namun demikian tetap akan melakukan tindak lanjut penyiapan pemetaan kebutuhan data kinerja secara bertahap serta mengkoordinasikan dengan perangkat daerah dan unit pengelola membangun sistem berbasis web, dan Pelatihan kepada unit kerja terkait penyiapan SOP Pemantauan rutin	lingkungan pemerintah daerah dengan menyiapkan dasar pengembangan sistem monitoring kinerja perangkat daerah berbasis digital melalui penyelarasan kebutuhan informasi kinerja, sebagai langkah awal menuju tersedianya sistem pemantauan kinerja yang terintegrasi dan berkelanjutan guna mendukung penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

BAB IV
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

4.1. Urusan Pemerintahan yang Diberikan Tugas Pembantuan

Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 melaksanakan penugasan pemerintahan melalui mekanisme tugas pembantuan yang bersumber dari pemerintah pusat. Pelaksanaan tugas pembantuan tersebut mencakup tiga urusan pemerintahan, meliputi Urusan Pertanian, Urusan Kepemudaan dan Olahraga, dan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Ketiga urusan tersebut menjadi fokus pelaksanaan kewenangan penugasan pusat yang dijalankan pemerintah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Urusan Pertanian

Tugas pembantuan urusan pertanian Tahun 2025 bersumber dari Kementerian Pertanian serta dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, serta Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau. Penugasan berasal dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, serta Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Seluruh kegiatan mencapai target kinerja output sebesar 100 persen, meliputi layanan BMN sebanyak 1 layanan, layanan data dan informasi 1 layanan, layanan pemantauan dan evaluasi 1 layanan, layanan manajemen keuangan 1 layanan, pengelolaan alat dan mesin pertanian subsektor tanaman pangan 1 kegiatan, serta validasi dan verifikasi penerima pupuk subsidi sebanyak 1.260 orang. Kegiatan koordinasi, bimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi produksi tanaman serealia juga terealisasi penuh sesuai target 1 kegiatan.

Alokasi anggaran tugas pembantuan urusan pertanian Tahun 2025 mencapai Rp1.689.036.000,00, terealisasi sebesar Rp803.969.064,00. Rincian realisasi meliputi tugas pembantuan dari Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp71.274.580,00, tugas pembantuan dari Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian

sebesar Rp605.551.835,00, serta tugas pembantuan dari Ditjen Tanaman Pangan sebesar Rp127.142.649,00. Tingkat serapan anggaran bervariasi antara 9,39 persen hingga 98,50 persen, sementara capaian kinerja output seluruh kegiatan mencapai 100 persen.

2. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Tugas pembantuan urusan kepemudaan dan olahraga Tahun 2025 bersumber Kementerian Pemuda dan Olahraga yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau melalui Program Keolahragaan. Kegiatan pengelolaan Sentra Pembinaan Olahragawan Muda merealisasikan fasilitasi serta pembinaan atlet sebanyak 8 atlet sesuai target 2025 atau sebesar 100 persen. Pagu anggaran kegiatan sebesar Rp918.043.000,00 terealisasi sebesar Rp916.427.787,00 atau sebesar 99,82 persen, mencerminkan tingkat serapan anggaran sangat optimal serta pelaksanaan kegiatan berjalan efektif tanpa kendala yang mempengaruhi pencapaian target kinerja.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tugas pembantuan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang Tahun 2025 bersumber dari Kementerian Pekerjaan Umum yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Riau melalui Program Infrastruktur Konektivitas. Kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana konektivitas darat mencakup pemeliharaan rutin jalan sepanjang 12,160 km, pemeliharaan rutin kondisi jalan sepanjang 36,82 km, penunjangan jalan sepanjang 1,20 km, pemeliharaan rutin jembatan sepanjang 389,70 meter, serta pemeliharaan berkala jembatan sepanjang 339,80 meter. Seluruh indikator output kegiatan terealisasi sesuai target atau sebesar 100 persen. Pagu anggaran keseluruhan sebesar Rp7.641.436.000,00 terealisasi secara keseluruhan sebesar Rp7.641.436.000,00 atau 100 persen. Hal ini menunjukkan tingkat serapan anggaran optimal serta pelaksanaan tugas pembantuan berjalan efektif tanpa kendala yang mempengaruhi capaian kinerja.

4. Urusan Transmigrasi

Tugas pembantuan urusan transmigrasi bersumber dari Kementerian Transmigrasi yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui Program Transmigrasi dan Program Dukungan Manajemen. Kegiatan Perencanaan dan Penyiapan Kawasan Transmigrasi mencakup Fasilitasi dan Pembinaan Pengurusan sertifikat hak milik atas tanah sebanyak 653 orang. Kegiatan Pembangunan Kawasan Transmigrasi mencakup Koordinasi Bidang Pembangunan dan Pengembangan Kawasan sebanyak 1 kegiatan, Bantuan Sarana Produksi Pertanian yang dikembangkan di kawasan transmigrasi sebanyak 504 unit, Fasilitasi dan Pembinaan Perpindahan dan Penempatan Provinsi Tujuan sebanyak 504 keluarga, Bantuan Catu Pangan di Provinsi sebanyak 504 keluarga. Kegiatan Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Layanan Dukungan Manajemen Internal sebanyak 2 layanan, laporan, dokumen, rekomendasi, unit. Pagu anggaran keseluruhan sebesar Rp28.645.260.000,00 terealisasi secara keseluruhan sebesar Rp26.598.947.776,00 atau 92,86 persen. Hal ini menunjukkan tingkat serapan anggaran optimal serta pelaksanaan tugas pembantuan berjalan efektif tanpa kendala yang mempengaruhi capaian kinerja.

Rincian capaian kinerja tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ditampilkan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1.

Program, Anggaran dan Realisasinya Serta Capaian Realisasi Fisik Dana Tugas Pembantuan yang Diterima Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

No	Kementerian	Perangkat Daerah Pelaksana	Program	Kegiatan	Indikator Output	Satuan	Realisasi Kinerja 2025			Realisasi Anggaran 2025			Penyebab Ketidaktercapaian Target Kinerja
							Target 2025	Realisasi 2025	% Realisasi Kinerja	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran	
A	**URUSAN PERTANIAN**												
1	KEMENTERIAN PERTANIAN - DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	Layanan BMN	Layanan	1	1	100,00	9.222.000,00	866.000,00	9,39	
					Layanan Data dan Informasi	Layanan	1	1	100,00	25.060.000,00	7.088.000,00	28,28	
					Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Layanan	1	1	100,00	90.857.000,00	11.786.000,00	12,97	
					Layanan Manajemen Keuangan	Layanan	1	1	100,00	90.857.000,00	51.534.580,00	56,72	
2	KEMENTERIAN PERTANIAN - DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	Alat dan Mesin Pertanian sub sektor Tanaman Pangan	Kegiatan	1	1	100,00	105.000.000,00	60.023.700,00	57,17	
				Fasilitas Pupuk dan Pestisida	Penerima Pupuk Subsidi yang divalidasi dan diverifikasi	Orang	1260	1260	100,00	586.060.000,00	284.837.885,00	48,60	
			Dukungan dan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Dukungan Lainnya Ditjen Sarana dan Prasarana Pertanian	Layanan Manajemen Keuangan	Dokumen	1	1	100,00	593.600.000,00	260.690.250,00	43,92	

No	Kementerian	Perangkat Daerah Pelaksana	Program	Kegiatan	Indikator Output	Satuan	Realisasi Kinerja 2025			Realisasi Anggaran 2025			Penyebab Ketidaktercapaian Target Kinerja
							Target 2025	Realisasi 2025	% Realisasi Kinerja	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran	
3	KEMENTERIAN PERTANIAN - DITJEN TANAMAN PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Tanaman Pangan	Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Produksi Tanaman Serealia Tanaman Pangan	Kegiatan	1	1	100,00	5.000.000,00	4.925.000,00	98,50	
			Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Ditjen Tanaman Pangan	Layanan Data dan Informasi	Layanan	1	1	100,00	132.390.000,00	78.147.500,00	59,03	
					Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	1	1	100,00	4.950.000,00	4.065.000,00	82,12	
					Layanan Manajemen Keuangan	Dokumen	1	1	100,00	46.040.000,00	40.005.149,00	86,89	
					Total				100,00	**1.689.036.000,00**	**803.969.064,00**	**47,60**	
B	**URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**												
1	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Keolahragaan	Pengelolaan Sentra Pembinaan Olahragawan Muda	Fasilitasi dan Pembinaan Atlet	Atlet	8	8	100,00	918.043.000,00	916.427.787,00	99,82	
					Total				**100,00**	**918.043.000,00**	**916.427.787,00**	**99,82**	
C	**URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**												
5	Kementerian Pekerjaan Umum	SKPD-TP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau	Program Infrastruktur Konektivitas	OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)	Pemeliharaan Rutin	Km	12,160	12,160	100,00	432.265.000,00	432.265.000,00	100,00	

No	Kementerian	Perangkat Daerah Pelaksana	Program	Kegiatan	Indikator Output	Satuan	Realisasi Kinerja 2025			Realisasi Anggaran 2025			Penyebab Ketidaktercapaian Target Kinerja
							Target 2025	Realisasi 2025	% Realisasi Kinerja	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran	
		SKPD-TP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau	Program Infrastruktur Konektivitas	OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)	Pemeliharaan Rutin Kondisi	Km	36,82	36,82	100,00	2.882.503.000	2.882.503.000	100,00	
		SKPD-TP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau	Program Infrastruktur Konektivitas	OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)	Penunjangan/holding	Km	1,20	1,20	100,00	261.758.000	261.758.000	100,00	
		SKPD-TP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau	Program Infrastruktur Konektivitas	OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan)	Pemeliharaan Rutin Jembatan	M	389,70	389,70	100,00	381.726.000,00	381.726.000,00	100,00	
		SKPD-TP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau	Program Infrastruktur Konektivitas	OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan)	Pemeliharaan Berkala Jembatan	M	339,80	339,80	100,00	3.683.184.000,00	3.683.184.000,00	100,00	
					Total				**100,00**	**7.641.436.000,00**	**7.641.436.000,00**	100,00	
D	**URUSAN TRANSMIGRASI**												
1	Kementerian Transmigrasi	Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi	Program Transmigrasi	Perencanaan dan Penyiapan Kawasan Transmigrasi	Fasilitasi dan Pembinaan Pengurusan sertifikat hak milik atas tanah	orang	653	653	100,00	435.600.000,00	0	0	
				Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Koordinasi Bidang Pembangunan dan Pengembangan Kawasan	kegiatan	1	1	100,00	4.500.000,00	2.181.696,00	48,48	efisiensi anggaran
					Bantuan Sarana Produksi Pertanian yang dikembangkan di	unit	504	504	100,00	700.000.000,00	699.300.000,00	99,90	
					Fasilitasi dan Pembinaan Perpindahan dan Penempatan	keluarga	504	504	100,00	22.548.636.000,00	20.987.667.895,00	93,08	

No	Kementerian	Perangkat Daerah Pelaksana	Program	Kegiatan	Indikator Output	Satuan	Realisasi Kinerja 2025			Realisasi Anggaran 2025			Penyebab Ketidaktercapaian Target Kinerja
							Target 2025	Realisasi 2025	% Realisasi Kinerja	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran	
					Provinsi Tujuan								
					Bantuan Catu Pangan di Provinsi	keluarga	504	504	100,00	4.842.420.000,00	4.818.013.302,00	99,50	
			Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal	layanan, laporan, dokumen, rekomendasi, unit	2	2	100,00	114.104.000,00	91.784.883,00	80,44	efisiensi anggaran
										28.645.260.000,00	**26.598.947.776,00**	**92,86**	

4.2. Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

Pelaksanaan tugas pembantuan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, serta SKPD Tugas Pembantuan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan kinerja yang berlangsung tertib, terencana, serta terkoordinasi antarunit pelaksana. Seluruh rangkaian kegiatan terlaksana sesuai rencana kerja, didukung kesiapan perangkat daerah serta dukungan teknis yang memadai. Tidak ditemukan hambatan substantif selama tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan kegiatan. Kondisi tersebut mendorong tercapainya seluruh target kinerja output yang telah ditetapkan, sekaligus mencerminkan efektivitas pelaksanaan tugas pembantuan serta kesesuaian antara perencanaan program, penganggaran, dan realisasi kegiatan.

BAB V
PENUTUP

Prinsip akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah menuntut penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penyusunan LKPJ Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 merefleksikan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 terkait Laporan serta Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dokumen tersebut menghadirkan gambaran menyeluruh atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang Tahun Anggaran 2025. Substansi LKPJ memuat hasil pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kepulauan Riau, mencakup urusan wajib maupun urusan pilihan, termasuk pula hasil pelaksanaan tugas pembantuan serta penugasan sepanjang tahun anggaran. Penyajian kinerja tersusun sistematis guna memberikan potret objektif terkait efektivitas kebijakan, program, serta kegiatan pembangunan daerah.

Realisasi Anggaran Pendapatan serta Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 menunjukkan pengelolaan fiskal yang relatif optimal. Pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp3.729.977.626.911,96 atau 95,39 persen dibandingkan target pendapatan APBD Perubahan sebesar Rp3.910.214.946.462,43. Belanja daerah mencapai Rp3.733.650.403.940,54 atau setara 94,94 persen dari pagu belanja APBD Perubahan sebesar Rp3.932.501.110.900,44. Pembiayaan daerah memperlihatkan kinerja sangat baik tercermin atas realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp27.291.476.128,01 atau 100,01 persen dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp27.286.164.438,01, serta realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp5.000.000.000,00 atau 100 persen dari rencana pengeluaran pembiayaan sebesar Rp5.000.000.000,00

Capaian pembangunan daerah tercermin atas hasil pengukuran indikator tujuan, sasaran, dan program RPJMD Tahun 2025 yang berjumlah 458 indikator. Mayoritas indikator berada kategori sangat tinggi sebanyak 436 indikator atau 95,20 persen, selanjutnya kategori tinggi sebanyak 14 indikator atau 3,06 persen, kemudian kinerja sedang sebanyak 4 indikator atau 0,87 persen, sebanyak 3 indikator atau 0,66 persen memiliki kinerja rendah, dan 3

indikator atau 0,22 persen data tidak tersedia *(not available).* Selengkapnya rekapitulasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1
Rekapitulasi Capaian Kinerja indikator Tujuan dan Sasaran, dan Indikator Program
Tahun 2025

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Jumlah Indikator	Jumlah Indikator Status Sangat Tinggi	Jumlah Indikator Status Tinggi	Jumlah Indikator Status Sedang	Jumlah Indikator Status Rendah	Jumlah Indikator Status Sangat Rendah	Jumlah Indikator NA (data tidak tersedia)
A	**Indikator Tujuan dan Sasaran**		42	38	4				
B	**Indikator Program**								
1	Pendidikan	Dinas Pendidikan	14	11	2	1			
2	Kesehatan	Dinas Kesehatan	22	19	2		1		
		RSUD RAT	4	4					
		RSKJK EHD	5	5					
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPUPR	13	11	1	1			
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Disperkim	8	8					
5	Trantibum Linmas	Satpol PP Gulkar	9	9					
		BPBD	6	5	1				
6	Sosial	Dinsos	15	15					
7	Tenaga Kerja	Disnakertrans	9	8	1				
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DP3AP2KB	12	11	1				
9	Pangan	DKP2KH	6	6					
10	Pertanahan	DPUPR	1	1					
11	Lingkungan Hidup	DLHK	11	10		1			
12	Admindukcapil	DPMD Dukcapil	8	8					

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Jumlah Indikator	Jumlah Indikator Status Sangat Tinggi	Jumlah Indikator Status Tinggi	Jumlah Indikator Status Sedang	Jumlah Indikator Status Rendah	Jumlah Indikator Status Sangat Rendah	Jumlah Indikator NA (data tidak tersedia)
13`	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	DPMD Dukcapil	4	4					
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DP3AP2KB	7	6			1		
15	Perhubungan	Dishub	7	7					
16	Komunikasi dan Informatika	Diskominfo	6	6					
17	Koperasi dan UKM	Dinkop UKM	11	10	1				
18	Penanaman Modal	DPMPTSP	8	8					
19	Kepemudaan dan Olahraga	Dispora	8	8					
20	Statistik	Diskominfo	1	1					
21	Persandian	Diskominfo	1	1					
22	Kebudayaan	Disbud	11	11					
23	Perpustakaan	Disperpusip	8	7		1			
24	Kearsipan	Disperpusip	1	1					
25	Kelautan dan Perikanan	DKP	9	8			1		
26	Pariwisata	Dispar	9	8	1				
27	Pertanian	DKP2KH	9	9					
28	Kehutanan	DLHK	14	14					
29	ESDM	Dinas ESDM	8	8					
30	Perdagangan	Disperindag	8	8					
31	Perindustrian	Disperindag	4	4					
32	Transmigrasi	Disnakertrans	1	1					
33	Sekretariat Daerah	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	5	5					
		Biro Kesejahteraan Rakyat	4	4					
		Biro Pengadaan Barang dan Jasa	4	4					

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Jumlah Indikator	Jumlah Indikator Status Sangat Tinggi	Jumlah Indikator Status Tinggi	Jumlah Indikator Status Sedang	Jumlah Indikator Status Rendah	Jumlah Indikator Status Sangat Rendah	Jumlah Indikator NA (data tidak tersedia)
		Biro Perekonomian dan Pembangunan	5	5					
		Biro Organisasi	7	7					
		Biro Administrasi Pimpinan	3	3					
		Biro Hukum	4	4					
		Biro Umum	3	3					
34	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD	6	6					
35	Perencanan	Bappeda	26	25					1
36	Keuangan	BKAD	8	8					
		Bapenda	9	9					
37	Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Korpri	11	11					
38	Pendidikan dan Pelatihan	BPSDM	7	7					
39	Penelitian dan Pengembangan	Bappeda	4	4					
40	Pengelolaan Perbatasan	BPPD	6	6					
41	Pengelolaan Penghubung	Badan Penghubung	6	6					
42	Pengawasan	Inspektorat	11	11					
43	Kesatuan Bangsa dan Politik	Bakesbangpol	9	9					
	Jumlah Indikator Tujuan, Sasaran, Program		**458**	**436**	**14**	**4**	**3**	**0**	**1**
	PERSENTASE		**100**	**95,20**	**3,06**	**0,87**	**0,66**	**-**	**0,22**
	PERSENTASE			**Akumulasi ST dan T=**		**Akumulasi S, R, SR =**			
				98,25		**1,53**			**0,22**

Selain capaian kinerja Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan kinerja yang baik, sepanjang Tahun 2025 yang tercermin atas perolehan sejumlah penghargaan tingkat regional maupun nasional. Ragam penghargaan tersebut merepresentasikan pengakuan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik, serta efektivitas pelaksanaan program pembangunan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Peringkat Ketiga Peraih Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) *Monitoring Center for Prevention* (MCP) kategori Pemerintah Provinsi Tahun 2024 dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
2. Penghargaan Top Pembina BUMD Tahun 2025 kategori Kepala Daerah dari Majalah Top Business.
3. Penghargaan atas pengelolaan anggaran Tahun 2023 beropini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sekaligus penerimaan Opini WTP untuk ke-15 kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
4. Penghargaan Baznas Awards Tahun 2025 kepada Wakil Gubernur Kepulauan Riau atas peran aktif mendukung pergerakan zakat daerah dari Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia.
5. Penghargaan *Innovation Public Official Leader* sebagai Inovator Ekonomi Inklusif Daerah dari TV One.
6. Penghargaan terbaik pertama kategori Pemerintah Daerah atas capaian peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) tertinggi tingkat nasional Tahun 2024 dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia.
7. Penghargaan terbaik keempat kategori Pemerintah Daerah atas capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) tingkat nasional Tahun 2024 dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia.
8. Penghargaan peringkat ketiga destinasi ramah Muslim tingkat nasional Tahun 2025 dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.
9. Penghargaan Provinsi terbaik kedua inovasi pengelolaan kepegawaian tingkat nasional Tahun 2025 pada ajang BKN Awards dari Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia.
10. Penetapan karya-karya Raja Ali Haji sebagai Warisan Ingatan Kolektif Nasional (IKON) dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 ini untuk dibahas DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Harapan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tertuju atas diperolehnya rekomendasi DPRD yang konstruktif guna penyempurnaan kebijakan, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau pada tahun mendatang.